

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bagian ini membahas secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, yaitu pos pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih serta merinci pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional sedangkan pos aset, kewajiban dan ekuitas dana ada dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu terdapat penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Arus Kas.

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. PENDAPATAN

Pendapatan merupakan semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode anggaran tahun 2021 yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Lampung dan tidak perlu dibayar kembali. Pemerintah Provinsi Lampung menganggarkan pendapatan Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp7.538.150.772.809,50 dan direalisasikan sebesar Rp7.469.469.346.029,05 atau sebesar 99.09 %.

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Pendapatan Asli Daerah	3,336,257,494,574.50	3,249,669,847,265.05	97.40%	2,842,286,479,070.36
Pendapatan Transfer	4,153,418,184,000.00	4,209,156,682,009.00	101.34%	2,508,320,307,957.00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	48,475,094,235.00	10,642,816,755.00	21.96%	1,668,712,684,856.00
Total	7,538,150,772,809.50	7,469,469,346,029.05	99.09%	7,019,319,471,883.36

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut PAD dimaksudkan agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri.

PAD Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2021 terdiri atas pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pajak Daerah	2,653,659,165,839.00	2,721,138,045,704.00	102.54	2,386,345,268,304.00
Retribusi Daerah	13,597,476,628.00	14,664,095,996.00	107.84	17,080,208,104.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	225,327,175,290.14	33,335,927,752.08	14.79	29,873,630,623.14
Lain - lain PAD yang Sah	443,673,676,817.36	480,531,777,812.97	108.31	408,987,372,039.22
Jumlah	3,336,257,494,574.50	3,249,669,847,265.05	97.40	2,842,286,479,070.36

1) Pendapatan Pajak Daerah

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah yang dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2021 terdiri atas:

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor	890,000,000,000.00	880,359,093,903.00	98.92	786,228,389,430.00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	624,000,000,000.00	613,520,230,500.00	98.32	440,909,561,650.00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	560,000,000,000.00	626,925,543,622.00	111.95	536,625,926,088.00
Pajak Air Permukaan	5,000,000,000.00	5,554,293,075.00	111.09	5,091,629,070.00
Pajak Rokok	574,659,165,839.00	594,778,884,604.00	103.50	617,489,762,066.00
Jumlah	2,653,659,165,839.00	2,721,138,045,704.00	102.54	2,386,345,268,304.00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2021 mencapai 102.54% dari anggaran yang ditargetkan, namun bila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp334.792.777.400,00 atau 14.03%, kenaikan tersebut berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan.

Pada TA 2021 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok terealisasi melebihi target yaitu masing-masing sebesar 111.95%, 111.09% dan 103.50% sedangkan untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hanya mencapai realisasi sebesar 98.92% dan 98.32% dari target yang telah ditetapkan.

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2021 sebesar 98,92% dari target. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp94.130.704.473,00 atau 11.97%. Dari dua belas jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), terdapat empat jenis pajak yang melebihi targetnya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor-Mobil Penumpang-Jeep, Pajak Kendaraan Bermotor-Mobil Penumpang-Minibus, Pajak Kendaraan Bermotor-Mobil Bus-Microbus dan PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van masing-masing sebesar 102.89%, 101.23%, 101,57% dan 118,68%. Kemudian Pada jenis PKB-Mobil Penumpang-Sedan, PKB-Mobil Bus-Bus, PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up, PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck, PKB-Mobil Barang/Beban-Truck, PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua, PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga dan PKB-Mobil Roda Tiga hanya terealisasi masing-masing sebesar 78.60%, 80.68%, 96.02%, 98.70%, 94.075%, 76.11% dan 27.43%.

Tabel 5.4 Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
A-1 Sedan Jeep, Station Wagon (Pribadi)	-	-	-	409,406,212,297.00
A-2 Sedan Jeep, Station Wagon (Umum)	-	-	-	271,951,620.00
B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	-	-	-	1,602,289,506.00
B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	-	-	-	800,678,450.00
C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	-	-	-	142,797,298,776.00
C-2 Truck, Pick Up (Umum)	-	-	-	59,194,079,725.00
D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	-	-	-	42,343,200.00
D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	-	-	-	16,501,000.00
E Sepeda Motor, Scooter	-	-	-	172,097,034,856.00
Jumlah	-	-	-	786,228,389,430.00

Tabel 5.5 Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
PKB-Mobil Penumpang-Sedan	18.619.501.000,00	14.634.304.484,00	78,60	-
PKB-Mobil Penumpang-Jeep	67.489.957.000,00	69.443.558.187,00	102,89	-
PKB-Mobil Penumpang-Minibus	378.112.369.000,00	382.772.220.665,00	101,23	-
PKB-Mobil Bus-Microbus	1.869.000.000,00	1.898.411.144,00	101,57	-
PKB-Mobil Bus-Bus	809.900.000,00	653.428.675,00	80,68	-
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	73.540.699.000,00	70.610.381.560,00	96,02	-
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	93.249.899.000,00	95.888.693.810,00	102,83	-
PKB-Mobil Barang/Beban- Truck	65.014.476.000,00	64.166.332.867,00	98,70	-
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	1.495.200.000,00	1.774.547.269,00	118,68	-
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	189.651.600.000,00	178.407.416.082,00	94,07	-
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	142.399.000,00	108.427.660,00	76,14	-
PKB-Mobil Roda Tiga	5.000.000,00	1.371.500,00	27,43	-
Jumlah	890.000.000.000,00	880.359.093.903,00	98,92	-

1) Penumpang-Sedan

Pendapatan PKB-Mobil Penumpang-Sedan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.6 Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-Mobil Penumpang-Sedan per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	17.027.832.000,00	14.585.305.641,00	85,66	-
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	275.822.000,00	12.899.625,00	4,68	-
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	532.285.000,00	-	-	-
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	783.562.000,00	36.099.218,00	4,61	-
Jumlah	18.619.501.000,00	14.634.304.484,00	78,60	-

Realisasi PKB mobil penumpang sedan tahun 2021 sebesar Rp14.634.304.484,00 dengan persentase sebesar 78,60%.

2) PKB-Mobil Penumpang-Jeep

Pendapatan PKB-Mobil Penumpang-Jeep tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.7 Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-Mobil Penumpang-Jeep per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	66.368.410.000,00	68.940.056.023,00	103,87	-
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat	338.243.000,00	-	-	-
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	783.304.000,00	503.502.164,00	64,28	-
Jumlah	67.489.957.000,00	69.443.558.187,00	102,89	-

Realisasi PKB-Mobil Penumpang-Jeep tahun 2021 sebesar Rp69.443.558.187,00 dengan persentase sebesar 102,89%.

3) PKB-Mobil Penumpang-Minibus

Pendapatan PKB-Mobil Penumpang-Minibus tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.8 Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-Mobil Penumpang-Minibus per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	374,486,886,000.00	380,290,308,715.00	101.55	-
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	526,546,000.00	220,873,138.00	41.95	-
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	590,584,000.00	-	-	-
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	2,508,353,000.00	2,261,038,812.00	90.14	-
Jumlah	378,112,369,000.00	382,772,220,665.00	101.23	-

Realisasi PKB-Mobil Penumpang-Minibus tahun 2021 sebesar Rp382.772.220.665,00 dengan persentase sebesar 101,23%.

4) PKB-Mobil Bus-Microbus

Pendapatan PKB-Mobil Bus-Microbus tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.9 Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-Mobil Bus-Microbus per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	1.057.884.000,00	1.381.966.964,00	130,64	-
PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	606.641.000,00	330.431.891,00	54,47	-
PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat	74.613.000,00	-	-	-
PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	129.862.000,00	186.012.289,00	143,24	-
Jumlah	1.869.000.000,00	1.898.411.144,00	101,57	-

Realisasi PKB-Mobil Bus-Microbus tahun 2021 sebesar Rp1.898.411.144,00 dengan persentase sebesar 101,57%.

5) PKB-Mobil Bus-Bus

Pendapatan PKB-Mobil Bus-Bus tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.10 Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-Mobil Bus-Bus per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	240.501.000,00	231.528.000,00	96,27	-
PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	554.941.000,00	404.911.175,00	72,96	-
PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	11.322.000,00	-	-	-
PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	3.136.000,00	16.989.500,00	541,76	-
Jumlah	809.900.000,00	653.428.675,00	80,68	-

Realisasi PKB-Mobil Bus-Bus tahun 2021 sebesar Rp653.428.675,00 dengan persentase sebesar 80,68%.

6) PKB-Mobil Barang/Beban-Pick UP

Pendapatan PKB - Mobil Barang/Beban-Pick Up tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5.11 Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-
Mobil Barang/Beban-Pick Up per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	72.626.020.000,00	69.827.605.335,00	96,15	-
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	109.523.000,00	146.522.849,00	133,78	-
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat	122.464.000,00	-	-	-
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	682.692.000,00	636.253.376,00	93,20	-
Jumlah	73.540.699.000,00	70.610.381.560,00	96,02	-

Realisasi PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up tahun 2021 sebesar Rp70.610.381.560,00 dengan persentase sebesar 96,02%.

7) PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck

Pendapatan PKB- Mobil Barang/Beban-Light Truck tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.12 Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-Mobil Barang/Beban-Light Truck per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	60.586.179.000,00	76.878.856.277,00	126,89	-
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	32.333.623.000,00	18.773.340.720,00	58,06	-
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat	25.021.000,00	-	-	-
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	305.076.000,00	236.496.813,00	77,52	-
Jumlah	93.249.899.000,00	95.888.693.810,00	102,83	-

Realisasi PKB- Mobil Barang/Beban-Light Truck tahun 2021 sebesar Rp95.888.693.810,00 dengan persentase sebesar 102,83%.

8) PKB- Mobil Barang/Beban-Truck

Pendapatan PKB- Mobil Barang/Beban-Truck tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.13 Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-Mobil Barang/Beban-Truck per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	21.965.229.000,00	23.543.233.601,00	107,18	-
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	43.040.597.000,00	40.490.297.766,00	94,07	-
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat	5.046.000,00	-	-	-
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	3.604.000,00	132.801.500,00	3.684,84	-
Jumlah	65.014.476.000,00	64.166.332.867,00	98,70	-

Realisasi PKB- Mobil Barang/Beban –Truck tahun 2021 sebesar Rp64.166.332.867,00 dengan persentase sebesar 98,70%.

9) PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van

Pendapatan PKB- Mobil Barang/Beban-Blind Van tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.14 Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-Mobil Barang/Beban-Blind Van per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	1.466.385.000,00	1.750.506.380,00	119,38	-
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	296.000,00	618.450,00	208,94	-
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat	1.309.000,00	-	-	-
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	27.210.000,00	23.422.439,00	86,08	-
Jumlah	1.495.200.000,00	1.774.547.269,00	118,68	-

Realisasi PKB- Mobil Barang/Beban-Blind Van tahun 2021 sebesar Rp1.774.547.269,00 dengan persentase sebesar 118,68%.

10) PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua

Pendapatan PKB- Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.15 Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	188,970,219,000.00	177,884,390,267.00	94.13	-
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	90,692,000.00	-	-	-
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	590,689,000.00	523,025,815.00	88.55	-
Jumlah	189,651,600,000.00	178,407,416,082.00	94.07	-

Realisasi PKB- Mobil Barang/Beban-Blind Van tahun 2021 sebesar Rp178.407.416.082,00 dengan persentase sebesar 94,07%.

11) PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga

Pendapatan PKB- Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.16 Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	123,676,000.00	97,274,660.00	78.65	-
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat	1,460,000.00	-	-	-
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	17,263,000.00	11,153,000.00	64.61	-
Jumlah	142,399,000.00	108,427,660.00	76.14	-

Realisasi PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga tahun 2021 sebesar Rp108.427.660,00 dengan persentase sebesar 76,14%.

12) PKB-Mobil Roda Tiga

Pendapatan PKB-Mobil Roda Tiga tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.17 Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-Mobil Roda Tiga per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi	3.000.000,00	937.500,00	31,25	-
PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat	2.000.000,00	-	-	-
PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah	-	434.000,00	-	-
Jumlah	5.000.000,00	1.371.500,00	27,43	-

Realisasi PKB-Mobil Roda Tiga tahun 2021 sebesar Rp1.371.500,00 dengan persentase sebesar 27,43%.

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Realisasi Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) TA 2021 adalah sebesar 98,32 %. Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp172.610.668.850,00 atau 39,15 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2020.

Tabel 5.18 Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) TA 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
A-1 Sedan Jeep, Station Wagon (Pribadi)	-	-	-	205.681.881.000,00
A-2 Sedan Jeep, Station Wagon (Umum)	-	-	-	24.623.500,00
B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	-	-	-	2.125.865.000,00
B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	-	-	-	157.889.500,00
C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	-	-	-	67.984.813.275,00
C-2 Truck, Pick Up (Umum)	-	-	-	12.400.193.750,00
D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	-	-	-	104.085.375,00
D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	-	-	-	7.989.500,00
E Sepeda Motor	-	-	-	152.422.220.750,00
Jumlah	-	-	-	440.909.561.650,00

Tabel 5.19 Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	2.154.000.000,00	1.789.887.500,00	83,10	-
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	42.097.000.000,00	56.948.775.000,00	135,28	-
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	202.741.000.000,00	229.275.219.500,00	113,09	-
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	1.358.000.000,00	1.102.247.000,00	81,17	-
BBNKB-Mobil Bus-Bus	300.000.000,00	229.591.500,00	76,53	-
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	78.874.000.000,00	60.228.765.000,00	76,36	-
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	23.859.000.000,00	24.375.009.500,00	102,16	-
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	24.023.000.000,00	14.133.435.500,00	58,83	-
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	2.988.000.000,00	2.034.945.000,00	68,10	-
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	243.091.000.000,00	222.760.108.000,00	91,64	-
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	2.465.000.000,00	642.247.000,00	26,05	-
BBNKB-Mobil Roda Tiga	50.000.000,00	-	-	-
Jumlah	624.000.000.000,00	613.520.230.500,00	98,32	-

1) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-Mobil Penumpang-Sedan

Pendapatan BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.20 Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-Mobil Penumpang-Sedan per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	2.154.000.000,00	1.789.887.500,00	83,10	-
Jumlah	2.154.000.000,00	1.789.887.500,00	83,10	-

Realisasi BBNKB-mobil penumpang-sedan tahun 2021 sebesar Rp1.789.887.500,00 dengan persentase sebesar 83,10%.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-Mobil Penumpang-Jeep

Pendapatan BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.21 Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-Mobil Penumpang-Jeep per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	42.097.000.000,00	56.948.775.000,00	135,28	-
Jumlah	42.097.000.000,00	56.948.775.000,00	135,28	-

Realisasi BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep tahun 2021 sebesar Rp56.948.775.000,00 dengan persentase sebesar 135,28%.

3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-Mobil Penumpang-Minibus

Pendapatan BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.22 Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-Mobil Penumpang-Minibus per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	202.741.000.000,00	229.275.219.500,00	113,09	-
Jumlah	202.741.000.000,00	229.275.219.500,00	113,09	-

Realisasi BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus tahun 2021 sebesar Rp229.275.219.500,00 dengan persentase sebesar 113,09%.

4) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-Mobil Bus-Microbus

Pendapatan BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.23 Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-Mobil Bus Microbus per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	1.358.000.000,00	1.102.247.000,00	81,17	-
Jumlah	1.358.000.000,00	1.102.247.000,00	81,17	-

Realisasi BBNKB-Mobil Bus-Microbus tahun 2021 sebesar Rp1.102.247.000,00 dengan persentase sebesar 81,17%.

5) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-Mobil Bus-Bus

Pendapatan BBNKB-Mobil Bus-Bus tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.24 Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-Mobil Bus-Bus per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
BBNKB-Mobil Bus-Bus	300.000.000,00	229.591.500,00	76,53	-
Jumlah	300.000.000,00	229.591.500,00	76,53	-

Realisasi BBNKB-Mobil Bus-Bus tahun 2021 sebesar Rp229.591.500,00 dengan persentase sebesar 76,53%.

6) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-Mobil Barang/Beban-Pick Up

Pendapatan BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.25 Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-Mobil Barang/Beban-Pick Up per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	78.874.000.000,00	60.228.765.000,00	76,36	-
Jumlah	78.874.000.000,00	60.228.765.000,00	76,36	-

Realisasi BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up tahun 2021 sebesar Rp60.228.765.000,00 dengan persentase sebesar 76,36%.

7) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)- Mobil Barang/Beban-Light Truck

Pendapatan BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.26 Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-Mobil Barang/Beban-Light Truck per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	23.859.000.000,00	24.375.009.500,00	102,16	-
Jumlah	23.859.000.000,00	24.375.009.500,00	102,16	-

Realisasi BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck tahun 2021 sebesar Rp24.375.009.500,00 dengan persentase sebesar 102,16%.

8) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-Mobil Barang/Beban-Truck

Pendapatan BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.27 Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-Mobil Barang/Beban- Truck per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	24.023.000.000,00	14.133.435.500,00	58,83	-
Jumlah	24.023.000.000,00	14.133.435.500,00	58,83	-

Realisasi BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck tahun 2021 sebesar Rp14.133.435.500,00 dengan persentase sebesar 58,83%.

9) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-Mobil Barang/Beban-Blind Van

Pendapatan BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.28 Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-Mobil Barang/Beban- Blind Van per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	2.988.000.000,00	2.034.945.000,00	68,10	-
Jumlah	2.988.000.000,00	2.034.945.000,00	68,10	-

Realisasi BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van tahun 2021 sebesar Rp2.034.945.000,00 dengan persentase sebesar 68,10%.

10) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua

Pendapatan BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.29 Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	243.091.000.000,00	222.760.108.000,00	91,64	-
Jumlah	243.091.000.000,00	222.760.108.000,00	91,64	-

Realisasi BBNKB- Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua tahun 2021 sebesar Rp222.760.108.000,00 dengan persentase sebesar 91,64%.

11) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga

Pendapatan BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.30 Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	2.465.000.000,00	642.247.000,00	26,05	-
Jumlah	2.465.000.000,00	642.247.000,00	26,05	-

Realisasi BBNKB- Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga tahun 2021 sebesar Rp642.247.000,00 dengan persentase sebesar 26,05%.

12) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-Mobil Roda Tiga

Pendapatan BBNKB-Mobil Roda Tiga tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.31 Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-Mobil Roda Tiga per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
BBNKB-Mobil Roda Tiga	50.000.000,00	-	-	-
Jumlah	50.000.000,00	-	-	-

Realisasi BBNKB-Mobil Roda Tiga tahun 2021 tidak ada.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Realisasi Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) TA 2021 sebesar 111,95 %.

Tabel 5.32 Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021(Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Bensin/Premium	355.144.977.660,00	385.665.823.206,65	108,59	257.989.783.829,00
Pertamax	-	-	-	71.661.238.857,80
Pertamax Plus	-	-	-	1.900.958.727,00
Solar	204.855.022.340,00	241.259.720.415,35	117,77	205.073.944.674,20
Jumlah	560.000.000.000,00	626.925.543.622,00	111,95	536.625.926.088,00

1) Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Bensin

Pendapatan PBB-KB Bensin tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.33 Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Bensin/Premium per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021(Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Bensin/Premium	355.144.977.660,00	385.665.823.206,65	108,59	257.989.783.829,00
Jumlah	355.144.977.660,00	385.665.823.206,65	108,59	257.989.783.829,00

Realisasi PBB-KB Bensin tahun 2021 sebesar Rp385.665.823.206,65,00 dengan persentase sebesar 108,59%.

2) Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Pertamina

Pendapatan PBB-KB Pertamina tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.34 Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)-Pertamax per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021(Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pertamax	-	-	-	71.661.238.857,80
Jumlah	-	-	0,00	71.661.238.857,80

Realisasi PBB-KB Pertamina tahun 2021 tidak ada.

3) Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Pertamina Plus

Pendapatan PBB-KB Pertamina Plus tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.35 Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)-Pertamax Plus per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021(Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pertamax plus	-	-	-	1.900.958.727,00
Jumlah	-	-	0,00	1.900.958.727,00

Realisasi PBB-KB Pertamina Plus tahun 2021 tidak ada.

4) Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Solar

Pendapatan PBB-KB Solar tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.36 Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)- Solar per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021(Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Solar	204.855.022.340,00	241.259.720.415,35	117,77	205.073.944.674,20
Jumlah	204.855.022.340,00	241.259.720.415,35	117,77	205.073.944.674,20

Realisasi PBB-KB Solar tahun 2021 sebesar Rp241.259.720.415,35 dengan persentase sebesar 117,77%.

d) Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Pajak Air Permukaan semula bernama Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah; dimana

Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai pajak provinsi sedangkan Pajak Air Bawah Tanah menjadi pajak kabupaten/kota. Pada TA 2021 realisasi Pajak Air Permukaan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 111,09% dan bila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 462.664.005,00 atau 9,09%.

Tabel 5.37 Pendapatan Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020(Rp)
Pajak Air Permukaan	5.000.000.000,00	5.554.293.075,00	111,09	5.091.629.070,00
Jumlah	5.000.000.000,00	5.554.293.075,00	111,09	5.091.629.070,00

1) Pendapatan Pajak Air Permukaan

Pendapatan Pajak Air Permukaan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.38 Pendapatan Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020(Rp)
Pajak Air Permukaan	5.000.000.000,00	5.554.293.075,00	111,09	5.091.629.070,00
Jumlah	5.000.000.000,00	5.554.293.075,00	111,09	5.091.629.070,00

Realisasi Pajak Air Permukaan tahun 2021 sebesar Rp5.554.293.075,00 dengan persentase sebesar 111,09%.

e) Pajak Rokok

Realisasi pajak rokok tahun 2021 sebesar Rp594.778.884.604,00 atau sebesar 103,50% dari anggaran sebesar Rp574.659.165.839,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp22.710.877.462.00 atau sebesar 3,68%.

Tabel 5.39 Pendapatan Pajak Rokok per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pajak Rokok	574.659.165.839,00	594.778.884.604,00	103,50	617.489.762.066,00
Jumlah	574.659.165.839,00	594.778.884.604,00	103,50	617.489.762.066,00

1) Pendapatan Pajak Rokok

Pendapatan Pajak Rokok tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.40 Pendapatan Pajak Rokok per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pajak Rokok	574.659.165.839,00	594.778.884.604,00	103,50	617.489.762.066,00
Jumlah	574.659.165.839,00	594.778.884.604,00	103,50	617.489.762.066,00

Realisasi Pajak Air Rokok tahun 2021 sebesar Rp594.778.884.604,00 dengan persentase sebesar 103,50%.

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaan bersifat ekonomis, ada imbalan langsung

walaupun harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil (tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar), dan merupakan pungutan yang sifatnya *budgetair* tidak menonjol. Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

Jumlah Retribusi Daerah yang dapat dipungut dan telah disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2021 sebesar Rp14.664.095.996,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.41 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	492,493,580.00	9,191,718,601.00	1,866.36	6,170,230,166.00
Retribusi Jasa Usaha	12,771,428,348.00	5,060,077,895.00	39.62	10,246,922,538.00
Retribusi Perizinan Tertentu	333,554,700.00	412,299,500.00	123.61	663,055,400.00
Jumlah	13,597,476,628.00	14,664,095,996.00	107.84	17,080,208,104.00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2021 sebesar 107,84% dari target dan bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp2.416.112.108,00 atau 14,15%.

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Umum menampung pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan Retribusi Terminal.

Tabel 5.42 Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum Per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	342,493,580.00	8,966,908,601.00	2,618.12	6,114,309,666.00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	150,000,000.00	224,810,000.00	149.87	-
Retribusi Terminal	-	-	-	55,920,500.00
Jumlah	492,493,580.00	9,191,718,601.00	1,866.36	6,170,230,166.00

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2021 sebesar Rp8.966.908.601,00 atau 2.618,12% sebagai berikut:

Tabel 5.43 Realisasi Rincian Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenisnya	342.493.580,00	8.966.908.601,00	2.618,12	6.114.309.666,00
Jumlah	342.493.580,00	8.966.908.601,00	2.618,12	6.114.309.666,00

(2) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Realisasi retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran tahun 2021 sebesar Rp224.810.000,00 atau sebesar 149,87% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00.

Tabel 5.44 Realisasi Rincian Pendapatan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa	150.000.000,00	224.810.000,00	149,87	-
Jumlah	150.000.000,00	224.810.000,00	149,87	-

(3) Retribusi Terminal

Retribusi terminal tahun 2020 terealisasi sebesar Rp.55.920.500,00 dan tahun 2021 reklas ke Jasa Usaha.

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta. Pada TA 2021 Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp5.060.077.895,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.45 Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10,697,293,548.00	3,266,304,221.00	30.53	6,940,304,443.00
Retribusi Tempat Pelelangan	580,343,400.00	406,802,820.00	70.10	491,711,900.00
Retribusi Terminal	40,000,000.00	124,608,000.00	311.52	-
Retribusi Tempat Khusus Parkir	284,288,000.00	215,347,000.00	75.75	-
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	55,532,500.00	67,557,000.00	121.65	55,478,000.00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	213,073,500.00	149,998,300.00	70.40	-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	900,897,400.00	829,460,554.00	92.07	981,147,295.00
Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	-	-	-	1,778,280,900.00
Jumlah	12,771,428,348.00	5,060,077,895.00	39.62	10,246,922,538.00

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha tahun 2021 sebesar 39.62% dari target yang bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp5.186.844.643,00 atau 50,62%.

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan pemakaian tanah dan bangunan, ruangan untuk pesta, dan kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Pada TA 2021 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp3.266.304.221,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.46 Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Per 31 Desember 2021

	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20,685,000.00	7,150,000.00	34.57%	13,896,000.00
UPTD Museum Negeri Rua Jurai	12,435,000.00	6,150,000.00	49.46%	7,435,000.00
UPTD Museum Ketransmigrasian	1,250,000.00	-	0.00%	2,711,000.00
UPTD Taman Budaya	7,000,000.00	1,000,000.00	14.29%	3,750,000.00
		-		
Dinas Kesehatan	8,437,889,000.00	892,248,000.00	10.57%	4,482,392,715.00
UPTD Laboratorium Kesehatan	7,837,889,000.00	-	0.00%	4,153,444,715.00
UPTD Bapelkes	600,000,000.00	892,248,000.00	148.71%	328,948,000.00
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	806,321,168.00	476,529,240.00	59.10%	519,673,600.00
Sewa Alat Berat	443,275,568.00	358,886,740.00	80.96%	329,475,600.00
Sewa Laboratorium	363,045,600.00	117,642,500.00	32.40%	190,198,000.00
Dinas Tenaga Kerja	22,098,000.00	42,848,600.00	193.90%	193,870,000.00
UPTD BLK Bandar Lampung	10,296,000.00	11,202,600.00	108.81%	16,925,000.00
UPTD BLK Way Abung	1,890,000.00	788,000.00	41.69%	2,119,000.00
UPTD BLK Kalianda	5,628,000.00	5,628,000.00	100.00%	6,216,000.00
UPTD BLK Metro	3,564,000.00	3,564,000.00	100.00%	3,551,000.00
UPTD Hiperkes (Balai K3)	0.00	-	0	143,985,000.00
Sewa Rumah Dinas	720,000.00	21,666,000.00	3009.17%	21,074,000.00
UPTD Musium Ketransmigrasian	0.00	-	0.00%	-
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi	19,354,000.00	-	0.00%	-
Dinas Pemuda dan Olahraga	0.00	-	0.00%	54,222,000.00
Dinas Perhubungan	21,280,000.00	21,280,000.00	100.00%	-
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah,	50,000,000.00	72,545,000.00	145.09%	60,705,000.00
UPTD Bandiklat & UKM (Koperasi)	50,000,000.00	72,545,000.00	145.09%	60,705,000.00
Dinas Kelautan dan Perikanan	317,982,500.00	436,347,700.00	137.22%	356,602,250.00
UPTD Pelabuhan Perikanan	195,979,000.00	304,777,700.00	155.52%	241,202,250.00
UPTD LPPMHP	122,003,500.00	131,570,000.00	107.84%	115,400,000.00
Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan dan Holistikultura	128,186,580.00	133,532,250.00	104.17%	133,997,230.00
Sewa Rumah Dinas	10,734,300.00	15,920,000.00	148.31%	16,447,500.00
UPTD Balai Pengawasan & Sertifikasi Benih (BPSB)	108,452,280.00	108,612,250.00	100.15%	108,549,730.00
Sewa Lahan	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%	9,000,000.00
Dinas Perkebunan	107,833,440.00	129,950,050.00	120.51%	-
UPTD BP2MB	107,833,440.00	129,950,050.00	120.51%	-
Dinas Kehutanan	66,339,360.00	68,222,000.00	102.84%	100,669,000.00
Ret. Karcis Masuk TAHURA WAR (UPTD Tahura)	-	-	0.00%	37,781,000.00
Sewa Rumah Dinas	66,339,360.00	68,222,000.00	102.84%	62,888,000.00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	248,175,500.00	140,698,896.00	56.69%	181,213,046.00
Sewa Rumah Dinas	10,080,000.00	10,080,000.00	100.00%	1,448,400.00
UPTD Balai Industri Pangan Olahan dan Kemasan	10,351,500.00	10,351,500.00	100.00%	6,215,000.00
UPTD BPSMB	227,744,000.00	120,267,396.00	52.81%	173,549,646.00
Badan Pendapatan	50,494,000.00	87,500,200.00	173.29%	283,615,900.00
Retribusi Pelayanan Tempat Parkir	-	-	0.00%	233,121,500.00
Sewa Lahan dan Bangunan	50,494,000.00	87,500,200.00	173.29%	50,494,400.00
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	100,000,000.00	66,171,000.00	66.17%	3,930,000.00
Sewa Tanah dan Bangunan	100,000,000.00	58,971,000.00	58.97%	-
Sewa Rumah Dinas	-	7,200,000.00	0.00%	3,930,000.00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	82,655,000.00	139,509,000.00	168.78%	-
Sewa Pemakaian Ruangan	54,750,000.00	120,000,000.00	219.18%	-
Sewa Pemakaian Alat	27,905,000.00	19,509,000.00	69.91%	-
Badan Penghubung	218,000,000.00	146,541,284.00	67.22%	442,564,702.00
UPTD Anjungan Lampung TMII	45,000,000.00	27,350,000.00	60.78%	32,800,000.00
Sewa Kamar Wisma Bandar Lampung	173,000,000.00	119,191,284.00	68.90%	409,764,702.00
Sekretariat Daerah	-	405,231,001.00	108.84%	112,955,000.00
Penyewaan Tanah dan Bangunan	-	405,231,001.00	108.84%	112,955,000
Jumlah	10,697,293,548.00	3,266,304,221.00	30.53%	6,940,306,443.00

- a. Dinas Pendidikan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 34,57% hal ini disebabkan pada gedung Museum Ruwa Jurai sedang dalam renovasi kemudian tidak adanya kegiatan pada Museum Transmigrasi dan Taman Budaya sehingga kedua tempat tersebut ditutup.

- b. Dinas Kesehatan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Tahun 2021 tidak tercapai hal ini dikarenakan UPTD Laboratorium Kesehatan yang sudah menjadi BLUD.
- c. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 59,10%.
- d. Dinas Tenaga Kerja Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 193.90%.
- e. Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah masing-masing sebesar 100%, 145,09%, 137,22%, 104,17%, 120,51% dan 102,84%
- f. Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan realisasi sebesar 56,69%
- g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2021 target pendapatan tidak tercapai hal ini dikarenakan sewa gedung/rumah dilakukan pada tahun 2019 dalam jangka waktu 5 tahun, terhitung 2019 sampai dengan 2024 sehingga target awal tidak mungkin terpenuhi selain itu dikarenakan adanya pengalihan status pengguna barang kepada perangkat daerah sebagai pengguna barang.
- h. Badan Pendapatan, Badan Pengembangan SDM, Badan Penghubung dan Sekretariat Daerah realisasi retribusi sebesar 173,29%, 168,78%, 67,22% dan 108,84%.

2) Retribusi Tempat Pelelangan

Retribusi Tempat Pelelangan, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan tempat pelelangan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pada TA 2021 realisasi Retribusi Tempat Pelelangan sebesar Rp406.802.820,00 atau 70,10% dari target

**Tabel 5.47 Realisasi Rincian Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan
Per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	580.343.400,00	406.802.820,00	70,10%	491.711.900,00
JUMLAH	580.343.400,00	406.802.820,00	70,10	491.711.900,00

3) Retribusi Terminal

Retribusi Terminal, adalah pendapatan berasal pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang pada Tahun 2021 realisasi sebesar 124.608.000,00 atau dengan persentase 311,52% dari target. Hal ini disebabkan sebagai berikut :

Tabel 5.48 Realisasi Rincian Pendapatan Retribusi Terminal
Per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	40.000.000,00	124.608.000,00	311,52%	-
JUMLAH	40.000.000,00	124.608.000,00	311,52	-

4) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Khusus Parkir, adalah pelayanan tempat khusus parkir. Pada TA 2021 realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp215.347.000,00 atau 75,75% dari target

Tabel 5.49 Realisasi Rincian Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir
Per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	284.288.000,00	215.347.000,00	75,75%	-
JUMLAH	284.288.000,00	215.347.000,00	75,75	-

5) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, adalah Pelayanan Kepelabuhan. Pada TA 2021 realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Daerah sebesar Rp67.557.000,00 atau 121,65% dari target

Tabel 5.50 Realisasi Rincian Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
Per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	55.532.500,00	67.557.000,00	121,65%	-
JUMLAH	55.532.500,00	67.557.000,00	121,65	-

6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga. Pada TA 2021 realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp149.998.300,00 atau 70,40% dari target

Tabel 5.51 Realisasi Rincian Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	213.073.500,00	149.998.300,00	70,40%	-
JUMLAH	213.073.500,00	149.998.300,00	70,40	-

7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah. Pada TA 2021 realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp829.460.554,00 atau 92.07% dari target.

Tabel 5.52 Realisasi Rincian Pendapatan Retribusi Produksi Usaha Daerah
Per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	-	0.00%	359,748,700.00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	-	-	0.00%	494,446,595.00
Dinas Perikanan dan Kelautan (UPTD BBDI)	-	-	0.00%	126,952,000.00
JUMLAH	-	-	-	981,147,295.00

Tabel 5.53 Realisasi Rincian Pendapatan Retribusi Produksi Usaha Daerah
Per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	348,899,200.00	349,817,500.00	100.26%	-
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	285,594,000.00	256,564,000.00	89.84%	-
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	146,404,200.00	103,000,000.00	70.35%	-
Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman , Ternak, dan Ikan	120,000,000.00	120,079,054.00	100.07%	-
JUMLAH	900,897,400.00	829,460,554.00	92.07	-

8) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair

Realisasi retribusi pengolahan limbah cair tahun 2021 tidak ada dan tidak dianggarkan .

Tabel 5.54 Realisasi Rincian Pendapatan Retribusi Pengolahan Limbah Cair
Per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Retribusi Pengolahan Limbah Cair	-	-	-	1.778.280.900,00
Jumlah	-	-	-	1.778.280.900,00

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Daerah Provinsi Lampung TA 2021 terdiri dari:

Tabel 5.55 Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu
Per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	110,000,000.00	69,058,500.00	62.78	125,359,000.00
Retribusi Perizinan usaha Perikanan	93,554,700.00	161,095,000.00	172.19	-
Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing/IMTA	130,000,000.00	182,146,000.00	140.11	424,091,400.00
Retribusi Perizinan Kapal Perikanan	-	-	-	84,255,000.00
Retribusi Pengujian Kapal Perikanan	-	-	-	29,350,000.00
Jumlah	333,554,700.00	412,299,500.00	123.61	663,055,400.00

Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2021 sebesar 123,61% dari target dan bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp250.755.900,00 atau 37,82%.

1) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.56 Realisasi Rincian Pendapatan Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Umum	110.000.000,00	69.058.500,00	62,78	125.359.000,00
Jumlah	110.000.000,00	69.058.500,00	62,78	125.359.000,00

Realisasi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum tahun 2021 sebesar Rp69.058.500,00 dengan persentase sebesar 62,78%.

2) Retribusi Perizinan usaha Perikanan

Retribusi Perizinan usaha Perikanan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.57 Realisasi Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan usaha Perikanan per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	93.554.700,00	161.095.000,00	172,19	-
Jumlah	93.554.700,00	161.095.000,00	172,19	-

Realisasi Retribusi Perizinan usaha Perikanan tahun 2021 sebesar Rp161.095.000,00 dengan persentase sebesar 172,19%.

3) Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing/IMTA

Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing/IMTA tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.58 Realisasi Rincian Pendapatan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing/IMTA Per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Retribusi Pemberian Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	130.000.000,00	182.146.000,00	140,11	424.091.400,00
Jumlah	130.000.000,00	182.146.000,00	140,11	424.091.400,00

Realisasi Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing/IMTA tahun 2021 sebesar Rp182.146.000,00 dengan persentase sebesar 140,11%.

4) Retribusi Perizinan Kapal Perikanan

Retribusi Perizinan Kapal Perikanan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.59 Realisasi Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Kapal Perikanan Per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Retribusi Perizinan Kapal Perikanan	-	-	-	84.255.000,00
Jumlah	-	-	-	84.255.000,00

Realisasi Perizinan Kapal Perikanan tahun 2021 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi.

5) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

Retribusi Pengujian Kapal Perikanan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.60 Realisasi Rincian Pendapatan Retribusi Pengujian Kapal Perikanan Per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Retribusi Pengujian Kapal Perikanan	-	-	-	29.350.000,00
Jumlah	-	-	-	29.350.000,00

Realisasi Pengujian Kapal Perikanan tahun 2021 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari dividen/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga. Hasil perusahaan milik daerah berupa pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke Kas Daerah. Sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah.

Pada TA 2021 penerimaan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp33.335.927.752,08 atau sebesar 14,79%, bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp3.462.297.128,94 atau 11,59%.

Tabel 5.61 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	-	-	-	29.732.704.705,14
Bank Lampung	-	-	-	29.729.274.051,14
PT. Lampung Jasa Utama	-	-	-	3.430.654,00
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	-	-	-	140.925.918,00
Perusahaan PT. Sarana Lampung Ventura	-	-	-	65.685.000,00
Dividen Asuransi Bangun Askrida	-	-	-	75.240.918,00
Jumlah	-	-	-	29.873.630.623,14

Tabel 5.62 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	225.327.175.290,14	33.335.927.752,08	14,79	-
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	29.999.999.999,14	33.261.046.724,08	110,87	-
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	195.327.175.291,00	74.881.028,00	0,04	-
Jumlah	225.327.175.290,14	33.335.927.752,08	14,79	-

1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.63 Realisasi Rincian Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	29.999.999.999,14	33.261.046.724,08	110,87	-
Jumlah	29.999.999.999,14	33.261.046.724,08	110,87	-

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) tahun 2021 sebesar Rp33.261.046.724,08 dengan persentase sebesar 110,87%.

2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.64 Realisasi Rincian Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	195.327.175.291,00	74.881.028,00	0,04	-
Jumlah	195.327.175.291,00	74.881.028,00	0,04	-

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) tahun 2021 sebesar Rp74.881.028,00 dengan persentase sebesar 0.04%.

4) Lain-lain PAD yang Sah

Pos Lain-lain PAD yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pos ini mempunyai sifat pembuka bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan, yang bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang tertentu. Pos Lain-lain PAD yang Sah terdiri atas:

Tabel 5.65 Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	108.973.139.053,36	4.940.760.877,00	4,53	9.707.141.998,00
Penerimaan Jasa Giro	28.910.401.324,00	17.570.837.925,40	60,78	25.060.186.941,36
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TPTGR)	900.000.000,00	20.115.125,00	2,24	23.500.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	49.202.288,00	59.861.406,00	121,66	262.435.767,00
Pendapatan Denda Pajak	8.047.707.294,00	7.976.746.533,00	99,12	18.258.922.697,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah (Keterlambatan Pengembalian Buku)	6.000.000,00	4.587.075,00	76,45	-
Pendapatan dari Pengembalian	14.773.285.058,00	7.343.531.081,00	49,71	10.376.786.228,00
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	282.013.941.800,00	442.442.374.535,42	156,89	339.281.603.795,47
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	172.963.255,15	-	-
Penerimaan Lain-lain	-	-	-	6.016.794.612,39
Jumlah	443.673.676.817,36	480.531.777.812,97	108,31	408.987.372.039,22

Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2021 sebesar Rp480.531.777.812,97 atau 108,31% dari target dan bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp71.544.405.773,75 atau 17,49%.

1. Terdapat temuan kekurangan penerimaan sebesar Rp 19.405.000 dari rekening BLUD Labling tidak dapat ditelusuri penggunaannya dan telah di tindaklanjuti dengan menyetorkan ke Kas daerah.
2. Terdapat temuan selisih penerimaan antara tanda bukti pembayaran dengan rekapan penerimaan sebesar Rp31.065.000,00 pada BLUD Labkesda dan telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke rekening BLUD Labkesda.

a) Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan terdiri atas:

Tabel 5.66 Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Hasil Penjualan Tanah	108.858.139.053,36	4.751.542.987,00	4,36	9.606.778.417,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	53.020.000,00	353,47	54.287.333,00
Penjualan Gedung dan Bangunan (Rumah Jabatan/Rumah Dinas)	100.000.000,00	136.197.890,00	136,20	46.076.248,00
Jumlah	108.973.139.053,36	4.940.760.877,00	4,53	9.707.141.998,00

1) Hasil Penjualan Tanah

Retribusi hasil penjualan tanah tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.67 Realisasi Hasil penjualan tanah 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Hasil Penjualan Tanah	108.858.139.053,36	4.751.542.987,00	4,36	9.606.778.417,00
Jumlah	108.858.139.053,36	4.751.542.987,00	4,36	9.606.778.417,00

2) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin

Tabel 5.68 Realisasi Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	53.020.000,00	353,47	54.287.333,00
Jumlah	15.000.000,00	53.020.000,00	353,47	54.287.333,00

3) Hasil Gedung dan Bangunan

Tabel 5.69 Realisasi Hasil Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Penjualan Gedung dan Bangunan (Rumah Jabatan/Rumah Dinas)	100.000.000,00	136.197.890,00	136,20	46.076.248,00
Jumlah	100.000.000,00	136.197.890,00	136,20	46.076.248,00

4) Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat

Tabel 5.70 Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan tahun 2021 tidak ada dan tidak dianggarkan.

b) Jasa Giro

Jasa Giro adalah penerimaan dari lain-lain PAD yang sah yang berasal dari hasil penempatan dana pemerintah daerah dalam bentuk rekening, baik yang dilakukan oleh dan atas nama pemerintah daerah dan atau bendaharawan daerah pada PT Bank Lampung dan atau bank pemerintah lainnya yang ditetapkan oleh gubernur yang bersumber kas BUD, kas Dana Kegiatan BOS dan lain-lain.

Realisasi penerimaan Jasa Giro TA 2021 sebesar Rp17.570.837.925,40 atau 60,78% dari target, merupakan penerimaan Jasa Giro yang diterima atas rekening Kas Daerah Provinsi Lampung per 31 Desember 2021 sebesar Rp235.271.145,60 dan sisanya sebesar Rp17.335.566.779,40 dari pemegang kas lainnya yaitu bendahara BOS dan lain-lain.

Tabel 5.71 Realisasi Pendapatan Jasa Giro per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Jasa Giro pada Kas Daerah	28.700.401.324,00	17.286.371.649,41	60,23	
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	180.000.000,00	235.271.145,60	130,71	25.060.186.941,36
Jasa Giro pada Rekening Bos	30.000.000,00	49.195.130,39	163,98	
Jumlah	28.910.401.324,00	17.570.837.925,40	60,78	25.060.186.941,36

1) Jasa Giro pada Kas Daerah

Retribusi Jasa Giro pada Kas Daerah tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.72 Realisasi Rincian Pendapatan Jasa Giro pada Kas Daerah per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Jasa Giro pada Kas Daerah	28.700.401.324,00	17.286.371.649,41	60,23	-
Jumlah	28.700.401.324,00	17.286.371.649,41	60,23	-

2) Jasa Giro pada Kas di Bendahara

Retribusi Jasa Giro pada Kas di Bendahara tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.73 Realisasi Rincian Pendapatan Jasa Giro pada Kas di Bendahara per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	180.000.000,00	235.271.145,60	130,71	-
Jumlah	180.000.000,00	235.271.145,60	130,71	-

3) Jasa Giro pada Rekening Dana BOS

Retribusi Jasa Giro pada Rekening Dana Bos tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.74 Realisasi Rincian Pendapatan Jasa Giro per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Jasa Giro pada Kas Daerah	30.000.000,00	49.195.130,39	163,98	-
Jumlah	30.000.000,00	49.195.130,39	163,98	-

c) Pendapatan TP/TGR

Pendapatan TP/TGR merupakan penerimaan atas penyeteroran/pengembalian secara tunai atau angsuran tuntutan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan berdasarkan hasil tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan atau kekayaan daerah.

Realisasi Pendapatan TP/TGR tahun 2021 sebesar Rp20.115.125,00 atau 2,24 % apabila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp3.384.875,00 atau 14,40%

Tabel 5.75 Realisasi Pendapatan TP/TGR per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TPTGR)	900.000.000,00	20.115.125,00	2,24	23.500.000,00
Jumlah	900.000.000,00	20.115.125,00	2,24	23.500.000,00

Tabel 5.76 Rincian Pendapatan TP/TGR per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021(Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TPTGR)	900.000.000,00	20.115.125,00	2,24	23.500.000,00
Jumlah	900.000.000,00	20.115.125,00	2,24	23.500.000,00

d) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah penerimaan yang berasal dari sejumlah denda atas keterlambatan pihak

ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama.

Realisasi pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tahun 2021 sebesar Rp59.861.406,00 atau 121,66% dari anggaran, apabila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp202.574.361,00 atau 77,19%.

Tabel 5.77 Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021(Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	49.202.288,00	59.861.406,00	121,66	262.435.767,00
Jumlah	49.202.288,00	59.861.406,00	121,66	262.435.767,00

(1) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tahun 2021 terdiri dari :

Tabel 5.78 Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021(Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	49.202.288,00	59.861.406,00	121,66	262.435.767,00
Jumlah	49.202.288,00	59.861.406,00	121,66	262.435.767,00

e) Pendapatan Denda Pajak

Pendapatan denda pajak merupakan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Lampung dari Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak.

Tabel 5.79 Realisasi Pendapatan Denda Pajak per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	7.430.132.293,00	7.522.036.978,00	101,24	17.606.536.127,00
Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	613.075.001,00	449.566.524,00	73,33	645.956.290,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	1.327.360,00	53,09	5.724.963,00
Pajak Air Permukaan	2.000.000,00	3.815.671,00	190,78	705.317,00
Jumlah	8.047.707.294,00	7.976.746.533,00	99,12	18.258.922.697,00

Realisasi Pendapatan denda Pajak tahun 2021 sebesar Rp7.976.746.533,00 atau 99,12%, apabila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp10.282.176.164,00 atau 56,31%.

1) Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor(PKB)

Retribusi Denda Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.80 Realisasi Rincian Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
PKB-Mobil Penumpang-Sedan	192.474.104,00	160.232.563,00	83,25	-
PKB-Mobil Penumpang-Jeep	459.847.570,00	578.037.672,00	125,70	-
PKB-Mobil Penumpang-Minibus	2.591.867.102,00	2.845.172.061,00	109,77	-
PKB-Mobil Bus-Microbus	17.948.352,00	25.057.173,00	139,61	-
PKB-Mobil Bus-Bus	11.884.042,00	6.731.978,00	56,65	-
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	726.605.982,00	712.975.161,00	98,12	-
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	729.181.759,00	918.542.101,00	125,97	-
PKB-Mobil Barang/Beban- Truck	773.185.730,00	666.917.004,00	86,26	-
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	12.424.024,00	13.252.192,00	106,67	-
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	1.911.471.579,00	1.594.071.173,00	83,39	-
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	1.144.849,00	1.022.820,00	89,34	-
PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	1.954.775,00	-	-	-
PKB-Mobil Roda Tiga	142.425,00	25.080,00	17,61	-
Jumlah	7.430.132.293,00	7.522.036.978,00	101,24	-

2) Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Retribusi Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.81 Realisasi Rincian Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
PKB-Mobil Penumpang-Sedan	2.839.847,00	10.125.300,00	356,54	-
PKB-Mobil Penumpang-Jeep	32.668.909,00	46.303.500,00	141,74	-
PKB-Mobil Penumpang-Minibus	214.051.003,00	171.671.450,00	80,20	-
PKB-Mobil Bus-Microbus	2.305.348,00	1.586.020,00	68,80	-
PKB-Mobil Bus-Bus	750.000,00	9.289.350,00	1.238,58	-
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	87.003.303,00	46.037.500,00	52,91	-
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	56.683.300,00	46.579.310,00	82,17	-
PKB-Mobil Barang/Beban- Truck	63.780.016,00	15.830.140,00	24,82	-
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	4.924.298,00	825.000,00	16,75	-
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	146.616.858,00	101.219.954,00	69,04	-
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	952.119,00	99.000,00	10,40	-
PKB-Mobil Roda Tiga	500.000,00	-	-	-
Jumlah	613.075.001,00	449.566.524,00	73,33	-

3) Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor(PBBKB)

Retribusi Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.82 Realisasi Rincian Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBNKB) per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Denda PBBKB-Bahan Bakar Solar	2.500.000,00	1.327.360,00	53,09	5.724.963,00
Jumlah	2.500.000,00	1.327.360,00	53,09	5.724.963,00

4) Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan

Retribusi Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.83 Realisasi Rincian Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Denda Pajak Air Permukaan	2.000.000,00	3.815.671,00	190,78	705.317,00
Jumlah	2.000.000,00	3.815.671,00	190,78	705.317,00

f) Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pendapatan Denda Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp4.587.075,00 atau 76,45%.

Tabel 5.84 Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Denda Retribusi Jasa Usaha	6.000.000,00	4.587.075,00	76,45	-
Jumlah	6.000.000,00	4.587.075,00	76,45	-

Tabel 5.85 Rincian Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.000.000,00	4.587.075,00	76,45	-
Jumlah	6.000.000,00	4.587.075,00	76,45	-

g) Pendapatan Dari Pengembalian

Pendapatan Pengembalian merupakan pendapatan yang berasal dari tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Inspektorat dan BPK RI sebesar Rp7.343.531.081,00 atau 49,71%.

Tabel 5.86 Realisasi Pendapatan dari Pengembalian per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020(Rp)
Pendapatan dari Pengembalian Lain-lain	-	-	-	10.376.786.228,00
Jumlah	-	-	-	10.376.786.228,00

Tabel 5.87 Realisasi Pendapatan dari Pengembalian per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020(Rp)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	14.171.801.266,00	6.545.510.191,00	46,19	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000,00	306.255.606,00	306,26	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	500.000.000,00	488.258.125,00	97,65	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.483.792,00	3.507.159,00	236,36	-
Jumlah	14.773.285.058,00	7.343.531.081,00	49,71	-

1) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.88 Realisasi Rincian Pendapatan dari Pengembalian per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020(Rp)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	14.171.801.266,00	6.545.510.191,00	46,19	-
Jumlah	14.171.801.266,00	6.545.510.191,00	46,19	-

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2021 sebesar Rp6.545.510.191,00 dengan persentase sebesar 46,19%.

2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.89 Realisasi Rincian Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020(Rp)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000,00	306.255.606,00	306,26	
Jumlah	100.000.000,00	306.255.606,00	306,26	-

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan tahun 2021 sebesar Rp306.255.606,00 dengan persentase sebesar 306,26%.

3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.90 Realisasi Rincian Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020(Rp)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	500.000.000,00	488.258.125,00	97,65	
Jumlah	500.000.000,00	488.258.125,00	97,65	-

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas tahun 2021 sebesar Rp488.258.125,00 dengan persentase sebesar 97,65%.

4) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.91 Realisasi Rincian Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020(Rp)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.483.792,00	3.507.159,00	236,36	-
Jumlah	1.483.792,00	3.507.159,00	236,36	-

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja tahun 2021 sebesar Rp3.507.159,00 dengan persentase sebesar 236,36%.

h) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pendapatan atas Layanan yang diberikan oleh Provinsi Lampung kepada masyarakat berupa layanan kesehatan dan layanan lab.lingkungan dengan rincian:

Tabel 5.92 Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) TA. 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan BLUD	282.013.941.800,00	442.442.374.535,42	156,89	339.281.603.795,47
Jumlah	282.013.941.800,00	442.442.374.535,42	156,89	339.281.603.795,47

Tabel 5.93 Realisasi Rincian Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

TA. 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moloek	260.000.000.000,00	408.468.488.222,19	157,10	322.419.051.264,14
Rumah Sakit Jiwa	13.000.000.000,00	15.403.117.352,21	118,49	16.862.552.531,33
Lab.Kesehatan	7.234.770.000,00	15.299.905.000,00	211,48	-
Lab.Lingkungan	1.779.171.800,00	3.270.863.961,02	183,84	-
Jumlah	282.013.941.800,00	442.442.374.535,42	156,89	339.281.603.795,47

Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun 2021 sebesar Rp442.442.473.535,42 atau 156,89% dari target, bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp103.160.770.739,95 atau 30,41%.

Pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) instansi yang ditetapkan untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah yaitu UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup hal ini Sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/478/VI.02/HK/2020 Tanggal 26 oktober 2021 tentang Penetapan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Sebagai Perangkat Daerah Provinsi Lampung Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah dan Keputusan Gubernur Nomor : G/602/VI.02/HK/2020 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Sebagai Perangkat Daerah Provinsi Lampung Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah

i) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Dana Bergulir yang diterima oleh Provinsi Lampung selama TA 2021 sebesar Rp172.963.255,15,00 .

Tabel 5.94 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	172.963.255,15	-	0,00
Jumlah	-	172.963.255,15	0,00	-

Tabel 5.95 Realisasi Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	172.963.255,15	-	0,00
Jumlah	-	172.963.255,15	0,00	-

j) Penerimaan Lain-lain

Pendapatan dari Penerimaan Lain-lain yang diterima oleh Provinsi Lampung selama TA 2021 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi.

Tabel 5.96 Realisasi Penerimaan Lain-lain per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	0,00	-	5.782.365.000,00
Penerimaan Lainnya/pendapatan pengembalian	-	0,00	-	234.429.612,39
Jumlah	-	-	0,00	6.016.794.612,39

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan dana transfer yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan. Pendapatan transfer yang diterima oleh Provinsi Lampung selama TA 2021 terdiri dari:

Tabel 5.97 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021(Rp)	Realisasi 2021(Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.145.956.082.000,00	4.201.782.231.009,00	101,35	2.461.886.209.957,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	7.462.102.000,00	7.374.451.000,00	98,83	-
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	-	-	-	46.434.098.000,00
Jumlah	4.153.418.184.000,00	4.209.156.682.009,00	101,34	2.508.320.307.957,00

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2021 sebesar 101.34% dari target, bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp1.700.836.374.052,00 atau 67.81%.

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah, terdiri:

Tabel 5.98 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Dana Perimbangan	4.128.566.334.000,00	4.184.392.483.009,00	101,35	2.461.886.209.957,00
Dana Insentif Daerah	17.389.748.000,00	17.389.748.000,00	100,00	-
Jumlah	4.145.956.082.000,00	4.201.782.231.009,00	101,35	2.461.886.209.957,00

a) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pemerintah Provinsi Lampung menganggarkan pendapatan dan perimbangan Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp4.128.566.334.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.184.392.483.009,00 atau sebesar 101,35 %.

Tabel 5.99 Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	111.108.050.000,00	183.140.967.609,00	164,83	123.204.760.040,00
Dana Bagi Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	21.148.581.000,00	42.401.390.658,00	200,49	34.589.203.086,00
Dana Alokasi Umum	1.726.296.248.000,00	1.726.296.248.000,00	100,00	1.732.551.921.000,00
Dana Alokasi Khusus	2.270.013.455.000,00	2.232.553.876.742,00	98,35	571.540.325.831,00
Jumlah	4.128.566.334.000,00	4.184.392.483.009,00	101,35	2.461.886.209.957,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2021 sebesar 101,35% dari target, bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.722.506.273.052,00 atau 69,97%. Kontribusi penurunan terbesar berasal dari dana alokasi khusus.

1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak merupakan pendapatan yang berasal dari bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak penghasilan PPh Pasal 25, Pasal 29 terdiri dari:

Tabel 5.100 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
DBH dari Pajak Bumi dan Bangunan	21.073.311.000,00	54.026.163.560,00	256,37	16.851.808.783,00
DBH dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	83.296.490.000,00	119.091.327.678,00	142,97	-
DBH dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29	5.405.376.000,00	8.458.452.607,00	156,48	106.352.951.257,00
DBH Hasil Cukai Hasil Tembakau	1.332.873.000,00	1.565.023.764,00	117,42	-
Jumlah	111.108.050.000,00	183.140.967.609,00	164,83	123.204.760.040,00

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2021 sebesar 164,53% dari target, bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp59.936.207.569,00 atau 48,65%.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan bagi hasil Iuran Hak pengusahaan hutan, provisi sumber daya alam, dana reboisasi dan lain lain terdiri:

**Tabel 5.101 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/
Sumber Daya Alam Per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	-	-	-	4.051.372,00
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	969.518.000,00	1.587.886.063,00	163,78	344.613.250,00
Bagi Hasil Iuran Tetap (Land-rent)	-	-	-	228.023.258,00
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	-	-	-	1.421.716.534,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	12.922.212.000,00	24.428.479.997,00	189,04	22.150.757.800,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	1.762.514.000,00	1.967.545.315,00	111,63	4.194.587.051,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	3.963.084.000,00	10.444.691.736,00	263,55	4.432.714.651,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	1.812.739.170,00
DBH-SDA Mineral dan Batubara-Royalty	1.287.130.000,00	3.701.481.747,00	287,58	-
DBH-SDA Mineral dan Batubara-Landrent	244.123.000,00	271.305.800,00	111,13	-
Jumlah	21.148.581.000,00	42.401.390.658,00	200,49%	34.589.203.086,00

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam tahun 2021 sebesar 200,49% dari target, bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp7.812.187.572,00 atau 22,59%

3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemerintah Provinsi Lampung selama tahun 2021 sebesar Rp1.726.296.248.000,00 atau terealisasi 100,00% dari total anggaran sebesar Rp1.726.296.248.000,00, bila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp6.225.673.000,00 atau 0,36%.

Tabel 5.102 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Dana Alokasi Umum	1.726.296.248.000,00	1.726.296.248.000,00	100,00	1.732.551.921.000,00
Jumlah	1.726.296.248.000,00	1.726.296.248.000,00	100,00	1.732.551.921.000,00

4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima Pemerintah Provinsi Lampung selama tahun 2021 sebesar Rp310.503.401.613,00 atau terealisasi 94,11% dari total anggaran sebesar Rp329.951.588.000,00, bila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp47.109.912.743,00 atau 17,89%.

**Tabel 5.103 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Dana Alokasi Khusus Fisik	329.951.588.000,00	310.503.401.613,00	94,11	263.393.488.870,00
Jumlah	329.951.588.000,00	310.503.401.613,00	94,11	263.393.488.870,00

**Tabel 5.104 Realisasi Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
DAK Fisik- Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	114.809.573.000,00	107.846.263.096,00	106,46	-
DAK Fisik- Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	4.085.960.000,00	3.509.187.965,00	116,44	-
DAK Fisik- Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	102.332.138.000,00	98.759.986.164,00	103,62	-
DAK Fisik- Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	200.000.000,00	199.290.000,00	100,36	-
DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	-	4.598.645.740,00	0,00	-
DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	9.215.872.000,00	7.831.709.217,00	117,67	-
DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	5.818.618.000,00	-	0,00	-
DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	3.254.776.000,00	2.574.830.437,00	126,41	-
DAK Fisik- Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar	7.576.882.000,00	6.520.011.500,00		-
Pembangunan Pertanian			116,21	-
DAK Fisik- Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	7.333.270.000,00	7.164.680.594,00	102,35	-
DAK Fisik- Bidang Jalan-Reguler-Jalan	9.476.712.000,00	8.999.225.000,00	105,31	-
DAK Fisik- Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	38.586.183.000,00	36.878.221.000,00	104,63	-
DAK Fisik- Bidang Irigasi-Penugasan	5.500.000.000,00	5.103.366.000,00	107,77	-
DAK Fisik- Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan	2.584.000.000,00	2.541.000.000,00	101,69	-
DAK Fisik- Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	19.177.604.000,00	17.976.984.900,00	106,68	-
Jumlah	329.951.588.000,00	310.503.401.613,00	94,11	-

5) Dana Alokasi Khusus-Non Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK)-Non Fisik yang diterima Pemerintah Provinsi Lampung selama tahun 2021 sebesar Rp1.922.050.475.129,00 atau terealisasi 99,07% dari total anggaran sebesar Rp1.940.061.867.000,00, bila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp1.613.903.638.168,00 atau 523,74%.

**Tabel 5.105 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus-Non Fisik
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.940.061.867.000,00	1.922.050.475.129,00	99,07	308.146.836.961,00
Jumlah	1.940.061.867.000,00	1.922.050.475.129,00	99,07	308.146.836.961,00

Tabel 5.106 Anggaran dan Realisasi Rincian Dana Alokasi Khusus-Non Fisik per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
DAK Non Fisik-BOS Reguler	1,593,765,290,000.00	1,590,303,879,000.00	99.78	-
DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	4,020,000,000.00	3,070,000,000.00	76.37	-
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	17,340,000,000.00	10,410,000,000.00	60.03	-
DAK Non Fisik-TPG PNSD	307,879,685,000.00	307,879,685,000.00	100.00	-
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1,479,000,000.00	1,479,000,000.00	100.00	-
DAK Non Fisik-TKG PNSD	126,622,000.00	37,987,000.00	30.00	-
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	3,100,000,000.00	3,073,695,000.00	99.15	-
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	1,750,000,000.00	1,557,220,650.00	88.98	-
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6,032,243,000.00	-	-	-
DAK Non Fisik-PK2UKM	2,352,080,000.00	2,315,794,900.00	98.46	-
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1,247,150,000.00	953,416,579.00	76.45	-
DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	969,797,000.00	-	-	-
DAK Non Fisik-Dana Fasilitas Penanaman Modal	-	507,467,000.00	-	-
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	462,330,000.00	-	-
Jumlah	1,940,061,867,000.00	1,922,050,475,129.00	99.07	-

b) Dana Insentif Daerah (DID)

Pada TA 2021 Dana Insentif Daerah terealisasi sebesar Rp.17.389.748.000,00 yaitu 100% dari target.

Tabel 5.107 Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Dana Insentif Daerah	17.389.748.000,00	17.389.748.000,00	100,00	46.434.098.000,00
Jumlah	17.389.748.000,00	17.389.748.000,00	100,00	46.434.098.000,00

Tabel 5.108 Anggaran dan Realisasi Rincian Dana Insentif Daerah per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Dana Insentif Daerah	17.389.748.000,00	17.389.748.000,00	100,00	46.434.098.000,00
Jumlah	17.389.748.000,00	17.389.748.000,00	100,00	46.434.098.000,00

2) Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun 2021 yang terealisasi sebesar 7.374.451.000,00 atau 98.83% .

Tabel 5.109 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	7.462.102.000,00	7.374.451.000,00	98,83	-
Jumlah	7.462.102.000,00	7.374.451.000,00	98,83	-

Tabel 5.110 Anggaran dan Realisasi Rincian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.462.102.000.00	7.374.451.000.00	98.83	-
Jumlah	7.462.102.000.00	7.374.451.000.00	98.83	-

c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah yang dapat berbentuk uang, barang dan/atau jasa. Rincian realisasi dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.111 Lain-lain pendapatan Yang Sah per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	-	-	-	496.679.695,00
Lainnya	-	-	-	-
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	-	-	8.450.197.163,00
Pendapatan Lainnya	-	-	-	1.659.765.807.998,00
Jumlah	-	-	-	1.668.712.684.856,00

Tabel 5.112 Lain-lain pendapatan Yang Sah per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Hibah	48.475.094.235,00	10.565.423.805,00	21,80	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	77.392.950,00	-	-
Jumlah	48.475.094.235,00	10.642.816.755,00	21,96	-

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.113 Realisasi Pendapatan Hibah Per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	34.890.816.500,00	728.924.325,00	2,09	-
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	949.484,00	-	-
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	3.693.698.000,00	3.570.499.996,00	96,66	-
Sumbangan Pihak Ketiga	9.890.579.735,00	6.265.050.000,00	63,34	-
Jumlah	48.475.094.235,00	10.565.423.805,00	21,80	-

Realisasi Pendapatan Hibah tahun 2021 sebesar Rp10.565.423.805,00 dengan persentase sebesar 21,80%.

a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.114 Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	34.890.816.500,00	728.924.325,00	2,09	-
Jumlah	34.890.816.500,00	728.924.325,00	2,09	-

Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat tahun 2021 sebesar Rp728.924.325,00 dengan persentase sebesar 2,09%.

b) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.115 Realisasi Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri Per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	949.484,00	-	-
Jumlah	-	949.484,00	-	-

Realisasi Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri tahun 2021 sebesar Rp949.484,00.

c) Pendapatan Hibah dari Badan /Lembaga/Organisasi Dalam Negeri

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.116 Realisasi Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri Per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	3.693.698.000,00	3.570.499.996,00	96,66	-
Jumlah	3.693.698.000,00	3.570.499.996,00	96,66	-

Realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri tahun 2021 sebesar Rp3.570.499.996,00 dengan persentase sebesar 96,66%.

d) Sumbangan Pihak Ketiga

Pendapatan Hibah dari Sumbangan Pihak Ketiga tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.117 Realisasi Pendapatan Hibah dari Sumbangan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Sumbangan Pihak Ketiga	9.890.579.735,00	6.265.050.000,00	63,34	-
Jumlah	9.890.579.735,00	6.265.050.000,00	63,34	-

Realisasi Pendapatan Hibah dari Sumbangan Pihak Ketiga tahun 2021 sebesar Rp6.265.050.000,00 dengan persentase sebesar 63,34%.

2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.118 Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	-	77.392.950,00	-	-
Jumlah	-	77.392.950,00	-	-

**Tabel 5.119 Rincian Realisasi Pendapatan atas Pengembalian Hibah
Per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	77.392.950,00	-	-
Jumlah	-	77.392.950,00	-	-

Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2021 sebesar Rp77.392.950,00

2. BELANJA

Belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode TA 2021 yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah Provinsi Lampung. Belanja Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer.

Tabel 5.120 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Operasi	5.352.014.058.398,64	5.151.247.340.067,92	96,25	4.864.108.842.521,80
Belanja Modal	924.522.377.462,60	849.692.114.832,21	91,91	752.528.210.219,89
Belanja Tak Terduga	30.000.000.000,00	126.400.000,00	0,42	119.312.701.296,00
Transfer	1.250.961.416.087,30	1.096.585.546.691,00	87,66	1.231.408.694.144,94
Jumlah	7.557.497.851.948,54	7.097.651.401.591,13	93,92	6.967.358.448.182,63

Realisasi Belanja dan Transfer tahun 2021 sebesar 93,92% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja dan transfer tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp130.292.953.408,50 atau 1,87%. Belanja yang mengalami kenaikan yaitu belanja operasi dan belanja modal sedangkan Belanja Tak Terduga dan Transfer mengalami penurunan.

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Provinsi Lampung yang memberi manfaat jangka pendek. Pos Belanja Operasi terdiri atas:

Tabel 5.121 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Pegawai	2.001.141.758.353,85	1.934.758.007.514,97	96,68	1.971.312.365.234,00
Belanja Barang dan Jasa	1.594.555.860.763,50	1.506.510.161.999,83	94,48	1.423.341.867.179,80
Belanja Bunga	22.500.000.000,00	22.161.585.802,00	98,50	31.583.615.813,00
Belanja Hibah	1.728.580.062.281,29	1.682.887.389.922,12	97,36	1.437.518.594.295,00
Belanja Bantuan Sosial	5.236.377.000,00	4.930.194.829,00	94,15	352.400.000,00
Jumlah	5.352.014.058.398,64	5.151.247.340.067,92	96,25	4.864.108.842.521,80

Realisasi Belanja Operasi tahun 2021 sebesar 96,25% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja operasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp287.138.497.546,12 atau 5,90%.

1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2021 sebesar 96,68% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja pegawai tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp36.554.357.719,03 atau 1,85%. Komponen belanja pegawai yang mengalami kenaikan terbesar yaitu Belanja Gaji dan Tunjangan

Tabel 5.122 Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.121.550.054.844,67	1.091.420.825.569,00	97,31%	1.449.676.872.027,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	319.203.859.559,33	304.394.575.665,97	95,36%	262.234.297.114,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	391.865.745.566,85	373.122.228.120,00	95,22%	
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	65.428.300.000,00	63.039.297.234,00	96,35%	
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.153.896.709,00	1.591.051.300,00	73,87%	
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD Serta KDH/WKDH	5.437.800.006,00	5.437.440.000,00	99,99%	19.167.800.000,00
Belanja Pegawai BOS	89.075.839.868,00	91.480.259.135,00	102,70%	80.309.536.393,00
Belanja Pegawai BLUD	6.426.261.800,00	4.272.330.491,00	66,48%	2.479.767.600,00
Honorarium PNS		-	-	33.903.256.900,00
Honorarium Non-PNS		-	-	119.378.621.000,00
Uang Lembur		-	-	4.162.214.200,00
Jumlah	2.001.141.758.353,85	1.934.758.007.514,97	96,68	1.971.312.365.234,00

a) Belanja Gaji dan Tunjangan

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan tahun 2021 sebesar 97,31% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Gaji dan Tunjangan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp358.256.046.458,00 atau 24,71%, namun penurunan ini disebabkan berubahnya nomenklatur pada rincian objek belanja.

Tabel 5.123 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Gaji Pokok ASN	836.607.122.424,51	820.113.990.902,00	98,03%	715.561.224.450,00
Belanja Tunjangan Keluarga	82.609.271.051,37	80.065.532.683,00	96,92%	69.986.039.307,00
Belanja Tunjangan Jabatan	15.428.719.659,00	14.086.505.000,00	91,30%	14.483.764.600,00
Belanja Tunjangan Fungsional	57.235.603.045,00	52.916.011.034,00	92,45%	45.061.499.003,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum	15.683.790.071,33	13.967.244.372,00	89,06%	12.771.530.000,00
Belanja Tunjangan Beras	49.430.859.144,48	46.886.265.030,00	94,85%	41.228.416.300,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.123.734.944,73	867.588.802,00	77,21%	715.349.611,00
Belanja Pembulatan Gaji	85.332.074,22	11.012.908,00	12,91%	9.496.957,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	63.345.622.430,03	62.506.674.838,00	98,68%	59.544.669.094,00
Belanja Uang Paket		-	-	225.720.000,00
Belanja Tunjangan Badan Musyawarah		-	-	51.156.000,00
Belanja Tunjangan Komisi		-	-	141.723.000,00
Belanja Tunjangan Badan Anggaran		-	-	71.514.000,00
Belanja Tunjangan Badan Kehormatan		-	-	12.984.750,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya		-	-	31.581.000,00
Belanja Tunjangan Perumahan		-	-	20.635.764.752,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian		-	-	36.000.000,00
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD		-	-	432.000.000,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru		-	-	302.070.624.604,00
Belanja Tambahan Penghasilan Guru		-	-	2.320.500.000,00
Belanja Tunjangan Khusus Guru		-	-	1.707.567.000,00
Belanja Tunjangan Transportasi		-	-	16.766.600.000,00
Belanja Tunjangan Reses		-	-	3.825.000.000,00
Gaji Ketiga Belas		-	-	70.982.326.533,00
Tunjangan Hari Raya		-	-	71.003.821.066,00
Jumlah	1.121.550.054.844,67	1.091.420.825.569,00	97,31%	1.449.676.872.027,00

(1) Belanja Gaji Pokok ASN

Realisasi Belanja Gaji Pokok ASN pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 98,03% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.124 Realisasi Belanja Gaji Pokok per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Gaji Pokok PNS	835.506.004.824,51	819.270.134.902,00	98,06	715.561.224.450,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	1.101.117.600,00	843.856.000,00	76,64	-
Jumlah	836.607.122.424,51	820.113.990.902,00	98,03	715.561.224.450,00

(2) Belanja Tunjangan Keluarga ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga ASN pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 96,92% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.125 Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga ASN per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	82.482.360.027,00	79.984.014.081,00	96,97	69.986.039.307,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	126.911.024,00	81.518.602,00	64,23	-
Jumlah	82.609.271.051,00	80.065.532.683,00	96,92	69.986.039.307,00

(3) Belanja Tunjangan Jabatan ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan ASN pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 91,30% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.126 Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan ASN per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	15.428.719.659,00	14.086.505.000,00	91,30	14.483.764.600,00
Jumlah	15.428.719.659,00	14.086.505.000,00	91,30	14.483.764.600,00

(4) Belanja Tunjangan Fungsional ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional ASN pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 92,45% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.127 Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional ASN per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	57.235.603.045,00	52.916.011.034,00	92,45	45.061.499.003,00
Jumlah	57.235.603.045,00	52.916.011.034,00	92,45	45.061.499.003,00

(5) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 89,06% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.128 Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	15,607,750,071.33	13,915,649,372.00	89.16%	2,771,530,000.00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	76,040,000.00	51,595,000.00	67.85%	-
Jumlah	15,683,790,071.33	13,967,244,372.00	89.06%	2,771,530,000.00

(6) Belanja Tunjangan Beras ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Beras ASN pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 94,85% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.129 Realisasi Belanja Tunjangan Beras ASN
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Tunjangan Beras PNS	49,341,748,744.48	46,824,563,190.00	94.90%	41,228,416,300.00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	89,110,400.00	61,701,840.00	69.24%	-
Jumlah	49,430,859,144.48	46,886,265,030.00	94.85%	41,228,416,300.00

(7) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 77,21% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.130 Realisasi Belanja Tunjangan Beras ASN
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1,123,734,944.73	867,588,802.00	77.21%	715,349,611.00
Jumlah	1,123,734,944.73	867,588,802.00	77.21%	715,349,611.00

(8) Belanja Pembulatan Gaji ASN

Realisasi Belanja Pembulatan Gaji ASN pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 12,90% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.131 Realisasi Belanja Pembulatan Gaji ASN
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	85.328.042,22	11.009.525,00	12,90%	9.496.957,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.032,00	3.383,00	83,90%	-
Jumlah	85.332.074,22	11.012.908,00	12,90%	9.496.957,00

(9) Belanja Jaminan Kesehatan ASN

Realisasi Belanja Jaminan Kesehatan ASN pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 98,68% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.132 Realisasi Belanja jaminan Kesehatan ASN
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Jaminan Kesehatan PNS	62,845,622,430.03	62,431,606,969.00	99.34%	59,544,669,094.00
Belanja Jaminan Kesehatan PPPK	500,000,000.00	75,067,869.00	15.01%	-
Jumlah	63,345,622,430.03	62,506,674,838.00	98.68%	59,544,669,094.00

b) Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Belanja Tambahan Penghasilan PNS merupakan belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, rincian:

**Tabel 5.133 Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS
per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	217.260.456.372,33	208.294.956.177,97	95,87%	684.000.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	3.853.871.400,00	3.703.443.600,00	96,10%	
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.179.467.600,00	237.600.000,00	20,14%	
Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	768.000.000,00	768.000.000,00	100,00%	
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	96.142.064.187,00	91.390.575.888,00	95,06%	
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	-	-	0,00	261.550.297.114,00
Jumlah	319.203.859.559,33	304.394.575.665,97	95,36	262.234.297.114,00

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS tahun 2021 sebesar 95,36% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Tambahan Penghasilan PNS tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp42.160.278.551,97 atau 16,08%.

(1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 95,87% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.134 Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan
Beban Kerja ASN per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	217,260,456,372.33	208,294,956,177.97	95.87%	-
Jumlah	217,260,456,372.33	208,294,956,177.97	95.87%	-

(2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN

Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 96,10% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.135 Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan
Tempat Bertugas ASN per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	3.853.871.400.00	3.703.443.600.00	96.10%	-
Jumlah	3.853.871.400.00	3.703.443.600.00	96.10%	-

(3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN

Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 20,14% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.136 Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1,179,467,600.00	237,600,000.00	20.14%	-
Jumlah	1,179,467,600.00	237,600,000.00	20.14%	-

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN

Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 100% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.137 Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	768,000,000.00	768,000,000.00	100.00%	-
Jumlah	768,000,000.00	768,000,000.00	100.00%	-

(5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN

Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 95,06% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.138 Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	96,097,064,187.00	91,349,575,888.00	95.06%	-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	45,000,000.00	41,000,000.00	91.11%	-
Jumlah	96,142,064,187.00	91,390,575,888.00	95.06%	-

c) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Pada Tahun Anggaran 2020 merupakan rincian objek dari Belanja Tambahan Penghasilan PNS. Pada Tahun 2021 terjadi Reklasifikasi kode rekening menjadi objek dari rekening Belanja Pegawai.

Tabel 5.139 Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	62,203,000,171.00	49,052,136,060.00	78.86%	-
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	308,131,181,806.00	305,603,357,260.00	99.18%	-
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	839,122,000.00	177,772,800.00	21.19%	-
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1,660,500,000.00	1,152,000,000.00	69.38%	-
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	23,325,000.00	2,100,000.00	9.00%	-
Belanja Honorarium	19,008,616,589.85	17,134,862,000.00	90.14%	-
Jumlah	391,865,745,566.85	373,122,228,120.00	95.22%	-

(1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

Realisasi Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 78,86% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.140 Realisasi Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	27,486,000,171.00	18,605,221,503.00	67.69%	-
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	18,120,000,000.00	14,280,092,594.00	78.81%	-
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	16,450,000,000.00	16,027,016,595.00	97.43%	-
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	147,000,000.00	139,805,368.00	95.11%	-
Jumlah	62,203,000,171.00	49,052,136,060.00	78.86%	-

(2) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD

Realisasi Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 99,18% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.141 Realisasi Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja TPG PNSD	308,131,181,806.00	305,603,357,260.00	99.18%	-
Jumlah	308,131,181,806.00	305,603,357,260.00	99.18%	-

(3) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 21,19% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.142 Realisasi Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja TKG PNSD	839,122,000.00	177,772,800.00	21.19%	-
Jumlah	839,122,000.00	177,772,800.00	21.19%	-

(4) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 69,38% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.143 Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Tamsil Guru PNSD	1,660,500,000.00	1,152,000,000.00	69.38%	-
Jumlah	1,660,500,000.00	1,152,000,000.00	69.38%	-

(5) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN

Realisasi Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 9,00% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.144 Realisasi Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	23,325,000.00	2,100,000.00	9.00%	-
Jumlah	23,325,000.00	2,100,000.00	9.00%	-

(6) Belanja Honorarium

Realisasi Belanja Honorarium pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 90,14% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.145 Realisasi Belanja Honorarium per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	17,030,268,086.00	15,301,462,000.00	89.85%	-
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1,885,348,503.85	1,756,400,000.00	93.16%	-
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPB.J)	93,000,000.00	77,000,000.00	82.80%	-
Jumlah	19,008,616,589.85	17,134,862,000.00	90.14%	-

d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD merupakan Belanja pegawai dilingkungan anggota DPRD. Pada Tahun 2021 rekening Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD di reklasifikasi dari objek dari rekening Belanja Pegawai.

Tabel 5.146 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Uang Representasi DPRD	2,696,400,000.00	2,682,900,000.00	99.50%	-
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	300,996,000.00	190,368,000.00	63.25%	
Belanja Tunjangan Beras DPRD	316,837,920.00	173,663,160.00	54.81%	
Belanja Uang Paket DPRD	269,640,000.00	229,770,000.00	85.21%	
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	3,909,780,000.00	3,890,205,000.00	99.50%	
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	409,248,000.00	282,858,750.00	69.12%	
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	348,565,500.00	31,581,000.00	9.06%	
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	15,300,000,000.00	15,210,000,000.00	99.41%	
Belanja Tunjangan Reses DPRD	3,825,000,000.00	3,795,000,000.00	99.22%	
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	68,991,364.00	38,928,765.00	56.43%	
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	21,323,541,216.00	20,377,022,559.00	95.56%	
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	16,351,500,000.00	16,137,000,000.00	98.69%	
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	307,800,000.00	-	0.00%	
Jumlah	65,428,300,000.00	63,039,297,234.00	96.35%	-

(1) Belanja Uang Representasi DPRD

Realisasi Belanja Uang Representasi DPRD pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 99,50% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.147 Realisasi Belanja Uang Representasi DPRD per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Uang Representasi DPRD	2,696,400,000.00	2,682,900,000.00	99.50%	-
Jumlah	2,696,400,000.00	2,682,900,000.00	99.50%	-

(2) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga DPRD pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 63,25% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.148 Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga DPRD per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	300,996,000.00	190,368,000.00	63.25%	
Jumlah	300,996,000.00	190,368,000.00	63.25%	-

(3) Belanja Tunjangan Beras DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Beras DPRD pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 54,81% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.149 Realisasi Belanja Tunjangan Beras DPRD per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Tunjangan Beras DPRD	316,837,920.00	173,663,160.00	54.81%	
Jumlah	316,837,920.00	173,663,160.00	54.81%	-

(4) Belanja Uang Paket DPRD

Realisasi Belanja Uang Paket DPRD pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 85,21% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.150 Realisasi Belanja Uang Paket DPRD per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Uang Paket DPRD	269,640,000.00	229,770,000.00	85.21%	-
Jumlah	269,640,000.00	229,770,000.00	85.21%	-

(5) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 99,50% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.151 Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	3,909,780,000.00	3,890,205,000.00	99.50%	-
Jumlah	3,909,780,000.00	3,890,205,000.00	99.50%	-

(6) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 69,12% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.152 Realisasi Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	409,248,000.00	282,858,750.00	69.12%	-
Jumlah	409,248,000.00	282,858,750.00	69.12%	-

(7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 9,06% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.153 Realisasi Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	348,565,500.00	31,581,000.00	9.06%	-
Jumlah	348,565,500.00	31,581,000.00	9.06%	-

(8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 99,41% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.154 Realisasi Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	15,300,000,000.00	15,210,000,000.00	99.41%	-
Jumlah	15,300,000,000.00	15,210,000,000.00	99.41%	-

(9) Belanja Tunjangan Reses DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Reses DPRD pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 99,22% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.155 Realisasi Belanja Tunjangan Reses DPRD per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Komunikasi Reses DPRD	3,825,000,000.00	3,795,000,000.00	99.22%	-
Jumlah	3,825,000,000.00	3,795,000,000.00	99.22%	-

(10) Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

Realisasi Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 56,43% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.156 Realisasi Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	68,991,364.00	38,928,765.00	56.43%	-
Jumlah	68,991,364.00	38,928,765.00	56.43%	-

(11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 95,56% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.157 Realisasi Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	585,030,000.00	188,245,500.00	32.18%	-
Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	406,920,000.00	256,319,157.00	62.99%	-
Belanja Jaminan Kematian DPRD	58,650,000.00	19,516,686.00	33.28%	-
Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	20,272,941,216.00	19,912,941,216.00	98.22%	-
Jumlah	21,323,541,216.00	20,377,022,559.00	95.56%	-

(12) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Transportasi DPRD pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 98,69% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.158 Realisasi Belanja Tunjangan Transportasi DPRD per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	16,351,500,000.00	16,137,000,000.00	98.69%	-
Jumlah	16,351,500,000.00	16,137,000,000.00	98.69%	-

(13) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD

Realisasi Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 0,00% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.159 Realisasi Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	307,800,000.00	-	0.00%	-
Jumlah	307,800,000.00	-	0.00%	-

e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH merupakan gaji dan tunjangan Kepala Daerah beserta Wakil Kepala Daerah.

Tabel 5.160 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	75,600,000.00	75,600,000.00	100.00	15,246,750,000.00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9,072,024.00	9,072,000.00	100.00	
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136,080,009.00	136,080,000.00	100.00	
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6,083,298.00	6,083,280.00	100.00	
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3,223,649.00	3,202,980.00	99.36	
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3,300.00	1,360.00	41.21	
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1,923,834,429.00	1,361,011,680.00	70.74	4,971,750,000.00
Jumlah	2,153,896,709.00	1,591,051,300.00	73.87	20,218,500,000.00

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2021 sebesar 73,87% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH

Realisasi Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 100,00% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.161 Realisasi Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	75,600,000.00	75,600,000.00	100.00%	
Jumlah	75,600,000.00	75,600,000.00	100.00%	-

(2) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH

Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 100,00% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.162 Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9,072,024.00	9,072,024.00	100.00	-
Jumlah	9,072,024.00	9,072,024.00	100.00	-

(3) Belanja Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH

Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 100,00% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.163 Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136,080,009.00	136,080,000.00	100.00	-
Jumlah	136,080,009.00	136,080,000.00	100.00	-

(4) Belanja Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH

Realisasi Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 100,00% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.164 Realisasi Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.298,00	6.083.280,00	100,00%	-
Jumlah	6.083.298,00	6.083.280,00	100,00%	-

(5) Belanja Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH

Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 99,36% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.165 Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3,223,649.00	3,202,980.00	99.36%	-
Jumlah	3,223,649.00	3,202,980.00	99.36%	-

(6) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH

Realisasi Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 41,21% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.166 Realisasi Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3,300.00	1,360.00	41.21%	-
Jumlah	3,300.00	1,360.00	41.21%	-

(7) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH Atas Pemungutan Pajak

Realisasi Insentif bagi KDH/WKDH Atas Pemungutan Pajak pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 70,74% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.167 Realisasi Insentif bagi KDH/WKDH Atas Pemungutan Pajak
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH	860,000,000.00	570,928,497.00	66.39%	-
Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	597,834,600.00	447,125,146.00	74.79%	-
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	461,999,829.00	340,263,405.00	73.65%	-
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	4,000,000.00	2,694,632.00	67.37%	-
Jumlah	1,923,834,429.00	1,361,011,680.00	70.74%	-

f) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH merupakan belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD serta belanja penunjang operasional KDH/WKDH dengan rincian:

Tabel 5.168 Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Operasional DPRD	432,000,000.00	432,000,000.00	100.00	14,940,000,000.00
Belanja Operasional KDH/WKDH	5,005,800,006.00	5,005,440,000.00	99.99	4,227,800,000.00
Jumlah	5,437,800,006.00	5,437,440,000.00	99.99	19,167,800,000.00

Realisasi Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2021 sebesar 99,99% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp13.730.360.000,00 atau 71,63% dikarenakan adanya perubahan nomenklatur.

g) Belanja Pegawai BOS

Belanja Pegawai BOS merupakan akun untuk menampung belanja pegawai yang didanai dari BOS.

Tabel 5.169 Realisasi Belanja Pegawai BOS per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Pegawai BOS	89,075,839,868.00	91,480,259,135.00	102.70	80,309,536,393.00
Jumlah	89,075,839,868.00	91,480,259,135.00	102.70	80,309,536,393.00

Realisasi Belanja Pegawai BOS tahun 2021 sebesar 102,70% dibanding anggarannya.

h) Belanja Pegawai BLUD

Belanja Pegawai BLUD merupakan akun yang digunakan untuk menampung belanja pegawai pada unit BLUD terdiri:

Tabel 5.170 Realisasi Belanja Pegawai BLUD per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek	5.697.100.000,00	3.741.378.500,00	65,67	1.308.437.000,00
Belanja Pegawai BLUD Unit Kerja Laboratorium Lingkungan Hidup	535.841.800,00	530.951.991,00	99,09	-
Belanja Pegawai BLUD Unit Kerja Laboratorium Kesehatan	193.320.000,00	-	0,00	-
Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit Jiwa		-	0,00	1.171.330.600,00
Jumlah	6.426.261.800,00	4.272.330.491,00	66,48%	2.479.767.600,00

Realisasi Belanja Pegawai BLUD tahun 2021 sebesar 66,48% dibanding anggarannya hal ini disebabkan adanya reklasifikasi belanja barang dan jasa BLUD yang merupakan belanja pegawai BLUD. Bila dibandingkan dengan belanja Pegawai BLUD tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.792.562.891,00 atau 72,29%.

Pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) instansi yang ditetapkan untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah yaitu UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup hal ini Sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/478/VI.02/HK/2020 Tanggal 26 oktober 2021 tentang Penetapan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Sebagai Perangkat Daerah Provinsi Lampung Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah dan Keputusan Gubernur Nomor : G/602/VI.02/HK/2020 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Sebagai Perangkat Daerah Provinsi Lampung Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.

i) Honorarium PNS

Honorarium PNS merupakan akun yang digunakan untuk menampung belanja honorarium diantaranya honorarium panita pelaksana kegiatan lintas SKPD, honorarium tim pengadaan barang dan jasa, honorarium tim pemeriksa barang dan jasa dan lainnya, pada tahun 2021 terjadi perubahan pengklasifikasian Honorarium PNS merupakan sub rincian dari Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif.

Tabel 5.171 Realisasi Honorarium PNS Per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD	-	-	0,00	10.455.468.900,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	0,00	2.177.450.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	-	-	0,00	486.380.000,00
Honorarium Tenaga Operator	-	-	0,00	5.997.715.000,00
Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	-	-	0,00	8.541.072.500,00
Honorarium TPHD	-	-	0,00	-
Honorarium Paramedis	-	-	0,00	209.750.000,00
Uang Piket	-	-	0,00	2.170.375.000,00
Uang Pembinaan	-	-	0,00	75.000.000,00
Honorarium PPTK	-	-	0,00	3.790.045.500,00
Jumlah	-	-	0,00	33.903.256.900,00

j) Honorarium Non-PNS

Honorarium Non-PNS merupakan akun untuk menampung belanja honorarium pegawai, honorer/tidak tetap, honorarium tenaga tukang/operator/asisten dan lainnya terdiri:

Tabel 5.172 Realisasi Honorarium Non-PNS Per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	-	-	0,00	92.845.187.000,00
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	-	-	0,00	21.994.174.000,00
Honorarium TPHD	-	-	0,00	-
Uang Piket	-	-	0,00	3.288.960.000,00
Uang Pembinaan	-	-	0,00	1.250.300.000,00
Jumlah	-	-	0,00	119.378.621.000,00

Belanja Honorarium Non-PNS tahun 2021 tidak ada realisasi hal ini disebabkan tahun 2021 terjadi perubahan pengklasifikasian Honorarium PNS merupakan sub rincian dari Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif.

k) Uang Lembur

Uang Lembur merupakan akun untuk menampung belanja lembur PNS dan belanja lembur Non-PNS

Tabel 5.173 Realisasi Uang Lembur per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Uang Lembur PNS	-	-	0,00%	4.162.214.200,00
Jumlah	-	-	0,00%	4.162.214.200,00

Belanja uang lembur tahun 2021 tidak dianggarkan sehingga tidak ada realisasi.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa merupakan akun untuk menampung belanja bahan pakai habis, bahan /material, jasa kantor dan lainnya. Realisasi belanja barang dan jasa terdiri atas:

Tabel 5.174 Realisasi Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Barang	270.825.533.032,15	253.012.760.612,00	93,42%	
Belanja Jasa	632.791.948.595,60	581.706.947.212,14	91,93%	
Belanja Pemeliharaan	46.029.786.450,75	44.084.291.740,00	95,77%	127.218.348.736,00
Belanja Perjalanan Dinas	166.783.759.046,92	150.032.999.938,00	89,96%	112.101.289.419,00
Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	12.633.042.200,00	11.894.232.697,00	94,15%	7.525.569.500,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	156.644.138.904,00	167.125.259.950,27	106,69%	188.236.578.749,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	308.947.652.534,08	298.653.669.850,42	96,67%	284.337.665.425,00
Belanja Bahan Pakai Habis	-	-	0,00%	47.726.438.800,99
Belanja Bahan/Material	-	-	0,00%	13.800.961.249,60
Belanja Jasa Kantor	-	-	0,00%	79.028.211.385,52
Belanja Premi Asuransi	-	-	0,00%	70.075.030.468,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-	-	0,00%	19.392.357.384,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-	0,00%	51.048.740.777,43
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	-	-	0,00%	19.932.771.200,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	-	0,00%	1.520.833.400,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	-	0,00%	5.264.737.490,00
Belanja Makanan dan Minuman	-	-	0,00%	75.605.049.974,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	0,00%	2.444.614.000,00
Belanja Pakaian Kerja	-	-	0,00%	344.917.500,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	-	-	0,00%	3.352.534.350,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	0,00%	477.450.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	-	-	0,00%	4.247.123.735,00
Belanja Jasa Konsultasi	-	-	0,00%	14.304.123.470,00
Belanja Jasa Keamanan	-	-	0,00%	2.148.605.000,00
Belanja Akomodasi, Transportasi dan Uang Saku Peserta	-	-	0,00%	16.599.774.546,00
Belanja Hibah Barang Jasa yang diserahkan pada Masyarakat/pihak ketiga	-	-	0,00%	178.598.588.270,26
Belanja Bantuan Sosial Barang dan Jasa yang diserahkan pada Masyarakat/pihak ketiga	-	-	0,00%	2.921.882.116,00
Belanja Restitusi Pajak	-	-	0,00%	53.788.615,00
Belanja Jasa Pihak Ketiga	-	-	0,00%	44.935.905.653,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur	-	-	0,00%	33.369.332.416,00
Belanja Barang dan Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	0,00%	16.728.643.550,00
Jumlah	1.594.655.860.763,50	1.506.510.161.999,83	94,47%	1.423.341.867.179,80

Realisasi belanja Barang dan Jasa tahun 2021 sebesar 94,48% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Barang dan Jasa tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp83.168.294.820,03 atau 5,84%.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terdapat temuan belanja yang tidak didukung dengan bukti sebesar Rp5.430.000,00 dan telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp5.430.000,00

a) Belanja Barang

Belanja Barang merupakan akun yang digunakan untuk menampung belanja barang pakai habis dan belanja barang tak habis pakai Tahun 2021 yang terdiri dari :

Tabel 5.175 Realisasi Belanja barang per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Barang Pakai Habis	270,585,446,728.15	252,789,522,862.00	93.42%	-
Belanja Barang Tak pakai habis	240,086,304.00	223,237,750.00	92.98%	-
Total	270,825,533,032.15	253,012,760,612.00	93.42%	-

(1) Belanja Barang Pakai Habis

Belanja Barang Pakai Habis tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.176 Realisasi Belanja barang Habis Pakai per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja alat tulis kantor	-	-	-	28,656,973,383.99
Belanja dokumen/ administrasi tender	-	-	-	3,655,000.00
Belanja alat listrik dan elektronik	-	-	-	2,066,605,121.00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	-	-	-	313,267,900.00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	-	-	-	2,508,892,740.00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	-	-	-	2,441,025,837.00
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	-	-	-	65,050,000.00
Belanja pengisian tabung gas	-	-	-	22,490,300.00
Belanja Peralatan Kesehatan/Laboratorium/Radiologi	-	-	-	3,873,226,070.00
Belanja Pantry	-	-	-	220,386,150.00
Belanja Bahan dan Alat Sanitasi	-	-	-	90,127,400.00
Belanja Linen/Perlengkapan Ruang Pasien	-	-	-	60,248,000.00
Belanja Pakan	-	-	-	1,246,837,414.00
Belanja Laundry	-	-	-	400,405,035.00
Belanja Alat Peraga/Pelatihan/Praktek/ Pameran/Alat Bantu	-	-	-	1,371,695,650.00
Belanja Dokumentasi / Dekorasi	-	-	-	1,267,727,300.00
Belanja alat/Perlengkapan Pertukangan	-	-	-	542,775,000.00
Belanja Souvenir/Cinder Mata/Piala/Trophy/Hadiah	-	-	-	2,575,050,500.00
Jumlah	-	-	-	47,726,438,800.99

Tabel 5.177 Realisasi Belanja Barang Habis Pakai per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	70.683.400,00	68.475.000,00	96,88%	
Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.699.329.000,00	1.629.071.974,00	95,87%	
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.783.497.736,00	2.401.201.472,00	86,27%	
Belanja Bahan-Bahan Baku	101.331.000,00	80.702.500,00	79,64%	
Belanja Bahan-Barang dalam Proses	2.564.150.000,00	2.185.633.000,00	85,24%	
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	924.831.400,00	895.330.550,00	96,81%	
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	97.900.000,00	96.029.000,00	98,09%	
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	51.971.500,00	49.041.500,00	94,36%	
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	112.000.000,00	72.000.000,00	64,29%	
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	19.051.236.526,00	14.629.101.451,00	76,79%	
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	53.548.000,00	51.917.000,00	96,95%	
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	5.212.000,00	5.212.000,00	100,00%	
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	53.825.000,00	53.100.000,00	98,65%	
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	99.520.000,00	96.745.880,00	97,21%	
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	10.000.000,00	9.980.000,00	99,80%	
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	101.321.000,00	41.643.000,00	41,10%	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37.817.116.057,65	37.303.762.045,00	98,64%	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12.736.315.123,25	12.520.786.366,00	98,31%	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	61.756.533.189,27	60.234.678.067,00	97,54%	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	405.503.480,00	372.218.700,00	91,79%	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	814.660.555,00	213.195.840,00	26,17%	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	24.738.600,00	24.081.000,00	97,34%	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.283.592.750,00	1.207.766.950,00	94,09%	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.611.489.203,00	2.592.277.200,00	99,26%	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	375.317.002,00	363.690.097,00	96,90%	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	181.878.500,00	181.051.700,00	99,55%	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.973.295.000,00	2.905.317.500,00	97,71%	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	26.238.915.439,75	22.589.606.240,00	86,09%	
Belanja Obat-Obatan-Obat	1.867.055.756,00	1.846.196.573,00	98,88%	
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	684.043.120,00	634.961.750,00	92,82%	
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	934.502.000,00	926.891.000,00	99,19%	
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	210.375.000,00	210.375.000,00	100,00%	
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	1.142.674.600,00	1.121.064.400,00	98,11%	
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	424.213.000,00	417.403.210,00	98,39%	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.846.470.950,23	57.157.595.839,00	93,94%	
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14.478.526.000,00	13.447.965.355,00	92,88%	
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	35.236.500,00	33.281.000,00	94,45%	
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan	2.290.395.000,00	2.147.999.000,00	93,78%	
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan	920.116.840,00	882.002.553,00	95,86%	
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan	3.226.234.000,00	3.167.690.000,00	98,19%	
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.541.566.000,00	1.168.044.000,00	75,77%	
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	456.100.000,00	455.680.000,00	99,91%	
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1.797.750.000,00	1.797.734.000,00	100,00%	
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	77.875.000,00	77.875.000,00	100,00%	
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	60.000.000,00	59.400.000,00	99,00%	
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	367.750.000,00	365.000.000,00	99,25%	
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	112.750.000,00	111.775.000,00	99,14%	
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	193.109.000,00	186.659.600,00	96,66%	
Belanja Pakaian Siaga	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%	
Belanja Pakaian Teknik	12.250.000,00	12.250.000,00	100,00%	
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	443.875.000,00	441.525.000,00	99,47%	
Belanja Pakaian Kerja Bengkel	12.100.000,00	12.100.000,00	100,00%	
Belanja Pakaian Batik Tradisional	998.500.000,00	912.409.000,00	91,38%	
Belanja Pakaian Olahraga	2.436.067.500,00	2.305.829.550,00	94,65%	
Belanja Pakaian Jas/Safari	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00%	
Jumlah	270.585.446.728,15	252.789.522.862,00	93,42%	-

Realisasi Belanja Barang Habis Pakai tahun 2021 sebesar 93,42% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan Belanja Barang Habis Pakai tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp205.063.084.061,01 atau 429,66%. Hal ini disebabkan adanya perubahan pada rekening belanja barang habis pakai menampung lebih banyak akun pada realisasi 2021.

(2) Belanja Barang Tak Habis Pakai

Realisasi Belanja Barang Tak Pakai Habis pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 92,98% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.178 Realisasi Barang Tak Habis Pakai
per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Komponen-Komponen Peralatan	240,086,304.00	223,237,750.00	92.98%	4,162,214,200.00
Jumlah	240,086,304.00	223,237,750.00	92.98%	4,162,214,200.00

b) Belanja Jasa

Belanja Jasa merupakan akun yang digunakan untuk menampung belanja antara lain belanja jasa kantor, belanja iuran asuransi, belanja jasa sewa, belanja jasa konsultasi, belanja beasiswa pendidikan ASN serta belanja kursus/sosialisasi dan bimbingan teknis. Belanja Jasa terdiri dari :

Tabel 5.179 Realisasi Belanja Jasa per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Jasa Kantor	338.781.677.646,25	304.357.827.762,14	89,84%	-
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	164.883.696.203,00	160.781.365.763,00	97,51%	-
Belanja Sewa Tanah	303.130.000,00	297.046.740,00	97,99%	-
Belanja Sewa Peralatan Mesin	24.817.177.531,10	23.413.239.866,00	94,34%	-
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	28.065.557.725,00	24.072.462.769,00	85,77%	-
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	250.500.000,00	225.275.000,00	89,93%	-
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	55.000.283.990,25	50.473.509.445,00	91,77%	-
Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	12.215.112.000,00	10.735.348.222,00	87,89%	-
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	24.200.000,00	24.124.464,00	99,69%	-
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	686.750.000,00	499.000.000,00	72,66%	-
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	7.763.863.500,00	6.827.747.181,00	87,94%	-
Total	632.791.948.595,60	581.706.947.212,14	91,93%	-

(1) Belanja Jasa Kantor

Realisasi Belanja Jasa Kantor tahun 2021 sebesar 89,84% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan Belanja Jasa Kantor tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp225.329.616.376,62 atau 285,13%. Realisasi Belanja Jasa Kantor tahun 2021 terdiri:

Tabel 5.180 Realisasi Belanja Jasa Kantor per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2020
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Telepon	-	-	0.00%	1,717,335,395.00
Belanja Air	-	-	0.00%	606,407,155.00
Belanja Listrik	-	-	0.00%	15,483,343,172.00
Belanja Surat Kabar/Majalah	-	-	0.00%	3,281,063,000.00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet	-	-	0.00%	14,410,103,026.35
Belanja Paket/Pengiriman	-	-	0.00%	813,969,740.00
Belanja Sertifikasi	-	-	0.00%	181,659,480.00
Belanja Jasa Transaksi Keuangan	-	-	0.00%	513,784,940.00
Belanja Publikasi	-	-	0.00%	24,006,266,736.00
Belanja Jasa Service Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	-	-	0.00%	1,873,644,656.00
Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	0.00%	2,426,359,156.00
Belanja Jasa Pemenang Lomba	-	-	0.00%	256,500,000.00
Belanja Jasa Tol/Parkir	-	-	0.00%	9,000,000.00
Belanja Iuran/PBB	-	-	0.00%	190,405,451.00
Belanja Jasa Sosial	-	-	0.00%	327,438,030.00
Belanja Jasa Pendidikan/Kesehatan Panti Sosial	-	-	0.00%	428,403,000.00
Belanja Perawatan/Pengobatan	-	-	0.00%	35,210,000.00
Belanja Jasa Kebersihan	-	-	0.00%	5,661,270,170.17
Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	-	-	0.00%	3,633,500.00
Belanja Jasa Pelayanan Medis	-	-	0.00%	6,452,696,778.00
Belanja Jasa Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran/Laboratorium	-	-	0.00%	15,000,000.00
Belanja Jasa Bunga	-	-	0.00%	9,350,000.00
Belanja Jasa Pengepakan Barang (Wrapping)	-	-	0.00%	4,500,000.00
Belanja Jasa Event Organizer	-	-	0.00%	320,868,000.00
Total	-	-	0.00%	79,028,211,385.52

Tabel 5.181 Realisasi Belanja Jasa Kantor per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	31.174.926.600,00	27.439.238.600,00	88,02%	-
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.765.651.200,00	7.805.109.000,00	89,04%	-
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	118.800.000,00	23.400.000,00	19,70%	-
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.209.400.000,00	2.171.850.000,00	98,30%	-
Honorarium Rohaniwan	55.600.000,00	46.000.000,00	82,73%	-
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	252.622.000,00	251.167.000,00	99,42%	-
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	19.200.000,00	9.600.000,00	50,00%	-
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	168.378.504,00	158.100.000,00	93,90%	-
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.693.200.000,00	1.641.500.000,00	96,95%	-
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	15.929.650.000,00	15.878.850.000,00	99,68%	-
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	61.565.129.512,00	45.439.072.122,00	73,81%	-
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	424.955.000,00	424.625.000,00	99,92%	-
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	268.450.000,00	268.350.000,00	99,96%	-
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	722.338.960,00	722.338.960,00	100,00%	-
Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	13.557.395.119,00	13.325.475.660,00	98,29%	-
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.026.060.000,00	1.019.400.000,00	99,35%	-
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	425.324.000,00	425.324.000,00	100,00%	-
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	11.701.788.000,00	10.842.873.000,00	92,66%	-
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.527.126.000,00	1.516.256.000,00	99,29%	-
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	82.392.701.200,00	80.943.396.400,00	98,24%	-
Belanja Jasa Tenaga Ahli	15.747.988.516,00	14.130.010.700,00	89,73%	-
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.619.832.000,00	6.508.944.260,00	98,32%	-
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.446.925.000,00	2.409.750.000,00	98,48%	-
Belanja Jasa Tenaga Supir	22.800.000,00	16.800.000,00	73,68%	-
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	208.133.900,00	205.433.900,00	98,70%	-
Belanja Jasa Audit/Surveillace ISO	45.000.000,00	30.455.400,00	67,68%	-
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	13.605.000,00	12.005.000,00	88,24%	-
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	3.144.716.200,00	3.105.621.220,00	98,76%	-
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	204.713.780,00	123.487.654,00	60,32%	-
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	335.540.000,00	331.291.124,00	98,73%	-
Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	12.800.000,00	12.800.000,00	100,00%	-
Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	50.000.000,00	48.000.000,00	96,00%	-
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	826.060.100,00	821.841.600,00	99,49%	-
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.240.607.500,00	962.112.000,00	77,55%	-
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	215.172.000,00	209.875.000,00	97,54%	-
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	553.890.000,00	552.935.127,00	99,83%	-
Belanja Jasa Kalibrasi	81.424.400,00	81.329.850,00	99,88%	-
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	27.000.000,00	24.600.000,00	91,11%	-
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	423.900.000,00	401.627.000,00	94,75%	-
Belanja Jasa Jalan/Tol	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00%	-
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	26.226.501.000,00	23.843.238.460,00	90,91%	-
Belanja Jasa Operator Kapal	69.600.000,00	69.600.000,00	100,00%	-
Belanja Tagihan Telepon	2.130.285.667,25	1.530.358.423,00	71,84%	-
Belanja Tagihan Air	623.164.400,00	450.053.373,00	72,22%	-
Belanja Tagihan Listrik	17.755.434.888,00	14.825.010.332,00	83,50%	-
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.606.546.000,00	3.569.436.300,00	98,97%	-
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	10.943.874.380,00	10.357.562.405,00	94,64%	-
Belanja Paket/Pengiriman	804.530.520,00	714.225.081,16	88,78%	-
Belanja Registrasi/Keanggotaan	36.500.000,00	36.500.000,00	100,00%	-
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	946.753.400,00	570.991.131,00	60,31%	-
Belanja Lembur	8.799.282.900,00	7.826.708.899,98	88,95%	-
Belanja Medical Check Up	593.400.000,00	196.297.780,00	33,08%	-
Jumlah	338.781.677.646,25	304.357.827.762,14	89,84%	-

(2) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 97,51% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.182 Realisasi Iuran Jaminan/Asuransi per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	160,042,832,659.00	156,865,686,700.00	98.01%	-
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3,292,597,044.00	2,704,505,600.00	82.14%	-
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	549,912,000.00	274,232,992.00	49.87%	-
Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja bagi Non ASN	377,244,000.00	341,015,240.00	90.40%	-
Belanja Asuransi Barang Milik	621,110,500.00	595,925,231.00	95.95%	-
Total	164,883,696,203.00	160,781,365,763.00	97.51%	-

(3) Belanja Sewa Tanah

Realisasi Sewa Tanah pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 97,99% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.183 Realisasi Belanja Sewa Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	254,880,000.00	249,080,000.00	97.72%	-
Belanja Sewa Tanah Pertanian	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	-
Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	10,500,000.00	10,500,000.00	100.00%	-
Belanja Sewa Tanah Lapangan PBB	1,000,000.00	716,740.00	71.67%	-
Belanja Sewa Lapangan Lainnya	33,750,000.00	33,750,000.00	100.00%	-
Total	303,130,000.00	297,046,740.00	97.99%	-

(4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Realisasi Sewa Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 94,34% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.184 Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	927,550,000.00	871,540,000.00	93.96%	-
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	823,600,000.00	823,058,516.00	99.93%	-
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1,209,554,860.35	869,393,000.00	71.88%	-
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	105,252,000.00	95,252,000.00	90.50%	-
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	192,100,000.00	189,222,000.00	98.50%	-
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	74,500,000.00	74,350,000.00	99.80%	-
Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	371,045,000.00	367,300,000.00	98.99%	-
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%	-
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	-
Belanja Sewa Alat-Alat Peternakan	26,555,000.00	26,448,800.00	99.60%	-
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4,485,355,000.00	4,441,790,050.00	99.03%	-
Belanja Sewa Mebel	209,049,970.75	148,115,000.00	70.85%	-
Belanja Sewa Alat Pendingin	82,800,000.00	42,200,000.00	50.97%	-
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	171,893,600.00	162,338,300.00	94.44%	-
Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	25,270,000.00	22,270,000.00	88.13%	-
Belanja Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	20,500,000.00	15,500,000.00	75.61%	-
Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	4,196,650,000.00	4,143,860,000.00	98.74%	-
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	5,536,600,000.00	5,507,400,000.00	99.47%	-
Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	33,800,000.00	33,800,000.00	100.00%	-
Belanja Sewa Peralatan Cetak	27,000,100.00	6,995,600.00	25.91%	-
Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	59,850,000.00	56,850,000.00	94.99%	-
Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	73,200,000.00	73,200,000.00	100.00%	-
Belanja Sewa Alat Laboratorium Umum	104,000,000.00	97,713,800.00	93.96%	-
Belanja Sewa System/Power Supply	6,000,000.00	-	0.00%	-
Belanja Sewa Peralatan Umum	317,400,000.00	273,650,000.00	86.22%	-
Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	475,960,000.00	278,160,000.00	58.44%	-
Belanja Sewa Peralatan Mainframe	198,592,000.00	198,000,000.00	99.70%	-
Belanja Sewa Peralatan Jaringan	4,537,740,000.00	4,069,972,800.00	89.69%	-
Belanja Sewa Elektronik/Electric	248,700,000.00	248,700,000.00	100.00%	-
Belanja Sewa Suara	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%	-
Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	15,160,000.00	15,160,000.00	100.00%	-
Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	200,000,000.00	199,500,000.00	99.75%	-
Jumlah	24,817,177,531.10	23,413,239,866.00	94.34%	-

(5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Realisasi Sewa Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 85,77% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.185 Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	2,149,888,000.00	2,014,760,000.00	93.71%	
Belanja Sewa Bangunan Gudang	463,220,000.00	456,400,780.00	98.53%	
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	16,973,796,000.00	14,560,394,000.00	85.78%	
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	18,000,000.00	12,500,000.00	69.44%	
Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	37,000,000.00	37,000,000.00	100.00%	
Belanja Sewa Bangunan Terbuka	135,820,000.00	134,540,000.00	99.06%	
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	123,400,000.00	32,400,000.00	26.26%	
Belanja Sewa Bangunan Parkir	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%	
Belanja Sewa Taman	166,335,000.00	152,585,000.00	91.73%	
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	
Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	78,600,000.00	78,540,000.00	99.92%	
Belanja Sewa Asrama	86,000,000.00	81,500,000.00	94.77%	
Belanja Sewa Hotel	7,639,498,725.00	6,317,842,989.00	82.70%	
Belanja Sewa Panti Asuhan	180,000,000.00	180,000,000.00	100.00%	
Jumlah	28,065,557,725.00	24,072,462,769.00	85.77%	-

(6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Realisasi Sewa Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 89,93% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.186 Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Sewa Audio Visual	46.000.000,00	45.975.000,00	99,95%	
Belanja Sewa Musik Lainnya	105.000.000,00	79.800.000,00	76,00%	
Belanja Sewa Alat Musik	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%	
Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00%	
Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	65.500.000,00	65.500.000,00	100,00%	
Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%	
Jumlah	250.500.000,00	225.275.000,00	89,93%	-

(7) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 91,77% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.187 Realisasi Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	100.000.000,00	99.900.000,00	99,90%	
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	6.845.000.000,00	6.832.302.500,00	99,81%	
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	849.350.000,00	789.559.500,00	92,96%	
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	551.001.000,00	534.711.860,00	97,04%	
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultasi Rekayasa Teknik	400.000.000,00	399.261.000,00	99,82%	
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	210.842.000,00	209.637.450,00	99,43%	
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	14.745.805.600,00	12.190.540.100,00	82,67%	
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	14.402.711.000,00	14.298.745.000,00	99,28%	
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultasi Jasa Rekayasa Konstruksi	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00%	
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	2.026.248.000,00	2.023.199.000,00	99,85%	
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	500.000.000,00	493.776.335,00	98,76%	
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	615.804.000,00	610.624.000,00	99,16%	
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	317.000.000,00	316.066.000,00	99,71%	
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	663.026.000,00	636.066.750,00	95,93%	
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	5.529.825.136,00	5.389.803.950,00	97,47%	
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.620.000.654,25	1.617.169.000,00	99,83%	
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	4.177.431.000,00	2.699.565.000,00	64,62%	
Belanja Jasa Konsultasi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	28.250.000,00	19.794.000,00	70,07%	
Belanja Jasa Konsultasi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal	473.835.600,00	470.250.000,00	99,24%	
Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Konsultasi Lingkungan	491.000.000,00	389.853.000,00	79,40%	
Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	400.000.000,00	399.531.000,00	99,88%	
Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	45.654.000,00	45.654.000,00	100,00%	
Jumlah	55.000.283.990,25	50.473.509.445,00	91,77%	-

(8) Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 87,89 % dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.188 Realisasi Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi
per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	180,000,000.00	179,400,000.00	99.67%	
Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Transportasi	450,000,000.00	247,260,000.00	54.95%	
Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Telematika	1,315,000,000.00	1,104,808,892.00	84.02%	
Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	1,665,000,000.00	914,500,000.00	54.92%	
Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	265,000,000.00	199,303,330.00	75.21%	
Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Kuangan	186,282,000.00	185,782,000.00	99.73%	
Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Pendidikan	200,000,000.00	199,600,000.00	99.80%	
Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Kesehatan	310,000,000.00	308,800,000.00	99.61%	
Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Kependudukan	415,000,000.00	414,100,000.00	99.78%	
Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	252,000,000.00	251,058,500.00	99.63%	
Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1,357,036,000.00	1,335,437,000.00	98.41%	
Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultasi Manajemen	1,687,000,000.00	1,672,287,400.00	99.13%	
Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	3,667,794,000.00	3,460,511,100.00	94.35%	
Belanja Jasa Konsultasi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultasi Penelitian Kepariwisataa-an	100,000,000.00	99,250,000.00	99.25%	
Belanja Jasa Konsultasi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultasi Perencanaan Kepariwisataa-an	165,000,000.00	163,250,000.00	98.94%	
Jumlah	12,215,112,000.00	10,735,348,222.00	87.89%	-

(9) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)

Realisasi Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 99,69% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.189 Realisasi Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)
per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	24,200,000.00	24,124,464.00	99.69%	
Jumlah	24,200,000.00	24,124,464.00	99.69%	-

(10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS merupakan akun untuk menampung belanja beasiswa tugas belajar dan belanja bantuan biaya pendidikan izin belajar PNS. Belanja Beasiswa Tugas Belajar tahun 2021 terdiri:

**Tabel 5.190 Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja beasiswa tugas belajar S2	133,149,999.00	93,550,000.00	70.26	114,400,000.00
Belanja beasiswa tugas belajar S3	553,600,001.00	405,450,000.00	73.24	363,050,000.00
Jumlah	686,750,000.00	499,000,000.00	72.66	477,450,000.00

Realisasi Belanja Beasiswa Tugas Belajar tahun 2021 sebesar 72,66% dibanding anggarannya.

(11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS merupakan akun untuk menampung belanja kursus singkat/sosialisasi dan belanja bimbingan teknis. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS tahun 2021 terdiri:

Tabel 5.191 Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2,391,387,500.00	1,801,233,941.00	75.32%	1,305,221,910.00
Belanja Sosialisasi	731,362,000.00	678,468,000.00	92.77%	259,222,000.00
Belanja Bimbingan Teknis	4,614,114,000.00	4,321,045,240.00	93.65%	2,682,679,825.00
Belanja Diklat Kepemimpinan	27,000,000.00	27,000,000.00	100.00%	-
Jumlah	7,763,863,500.00	6,827,747,181.00	87.94%	4,247,123,735.00

Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS tahun 2021 sebesar 87,94% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp2.580.623.446,00 atau 60,76%.

a) Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan merupakan akun untuk menampung diantaranya belanja pemeliharaan jalan, belanja pemeliharaan gedung, belanja pemeliharaan perlengkapan kantor. Belanja Pemeliharaan tahun 2021 terdiri:

Tabel 5.192 Realisasi Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Pemeliharaan Tanah	217,540,000.00	217,329,000.00	99.90%	-
Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin	31,221,341,600.00	29,901,364,924.00	95.77%	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12,786,154,350.75	12,247,611,211.00	95.79%	31,788,854,590.00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1,702,750,500.00	1,616,386,605.00	94.93%	81,962,774,031.00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	102,000,000.00	101,600,000.00	99.61%	-
Belanja Pemeliharaan Jembatan	-	-	0.00	1,712,813,270.00
Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	-	-	0.00	1,744,839,400.00
Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	-	-	0.00	1,305,075,727.00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	-	-	0.00	5,444,843,063.00
Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum	-	-	0.00	5,010,000.00
Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	-	-	0.00	843,088,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Alat Rumah Tangga	-	-	0.00	123,159,000.00
Belanja Pemeliharaan komputer dan Jaringan	-	-	0.00	1,320,876,500.00
Belanja Pemeliharaan Alat Berat	-	-	0.00	216,184,600.00
Belanja Pemeliharaan Mesin / Alat alat Bengkel	-	-	0.00	54,750,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi	-	-	0.00	750,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio	-	-	0.00	-
Belanja Pemeliharaan Alat - alat Kedokteran	-	-	0.00	197,756,955.00
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium	-	-	0.00	145,479,000.00
Belanja Pemeliharaan Drainase	-	-	0.00	348,094,600.00
Belanja Pemeliharaan Alat Musik	-	-	0.00	4,000,000.00
Jumlah	46,029,786,450.75	44,084,291,740.00	95.77	127,218,348,736.00

Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2021 sebesar 95,77% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan Belanja Pemeliharaan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp83.134.056.996,00 atau 65,35%. Belanja

Pemeliharaan yang mengalami kenaikan diantaranya belanja pemeliharaan jalan, belanja pemeliharaan peralatan kantor, belanja pemeliharaan komputer dan jaringan, dan belanja pemeliharaan drainase namun ada belanja mengalami penurunan diantaranya belanja pemeliharaan jaringan air minum serta belanja pemeliharaan rumah jabatan/rumah dinas.

(1) Belanja Pemeliharaan Tanah

Realisasi Pemeliharaan Tanah pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 99,90% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.193 Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	200,000,000.00	199,789,000.00	99.89%	
Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir	17,540,000.00	17,540,000.00	100.00%	
Jumlah	217,540,000.00	217,329,000.00	99.90%	-

(2) Belanja Peralatan Mesin

Realisasi Belanja Pemeliharaan Mesin pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 95,77% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.194 Realisasi Belanja Pemeliharaan Mesin
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	37,110,000.00	37,040,000.00	99.81%	
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	74,220,000.00	74,120,000.00	99.87%	
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	266,065,000.00	214,235,000.00	80.52%	
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik	166,405,500.00	166,110,000.00	99.82%	
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	142,630,000.00	139,830,000.00	98.04%	
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	14,000,000.00	13,900,000.00	99.29%	
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	15,670,692,500.00	15,170,933,551.00	96.81%	
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5,494,131,100.00	5,308,223,126.00	96.62%	
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40,700,000.00	38,627,000.00	94.91%	
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	553,720,000.00	551,229,698.00	99.55%	
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	153,360,000.00	153,360,000.00	100.00%	
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	640,000.00	-	0.00%	
Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	
Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	16,250,000.00	16,167,000.00	99.49%	
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	50,956,000.00	50,956,000.00	100.00%	
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	5,260,400.00	4,777,400.00	90.82%	
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	28,190,000.00	28,052,300.00	99.51%	
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3,571,579,000.00	3,174,725,789.00	88.89%	
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	630,800,000.00	612,797,500.00	97.15%	
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	161,030,200.00	160,286,000.00	99.54%	
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	958,340,000.00	909,139,800.00	94.87%	
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	9,068,200.00	9,050,000.00	99.80%	
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	305,700,800.00	302,130,000.00	98.83%	
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	32,500,000.00	32,250,000.00	99.23%	
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00%	
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya	480,000.00	320,000.00	66.67%	
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	3,840,000.00	3,840,000.00	100.00%	
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	59,000,000.00	59,000,000.00	100.00%	
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	20,700,000.00	17,200,000.00	83.09%	
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	26,992,500.00	26,992,500.00	100.00%	
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	100,000,000.00	99,270,600.00	99.27%	
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	20,000,000.00	-	0.00%	
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	9,900,000.00	9,900,000.00	100.00%	
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	80,000,400.00	80,000,000.00	100.00%	
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	67,000,000.00	63,542,260.00	94.84%	
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat	10,000,000.00	9,240,000.00	92.40%	
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	35,000,000.00	34,944,500.00	99.84%	
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	790,740,000.00	788,585,900.00	99.73%	
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	110,500,000.00	106,500,000.00	96.38%	
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	176,970,000.00	169,310,000.00	95.67%	
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	90,000,000.00	90,000,000.00	100.00%	
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	37,600,000.00	34,415,000.00	91.53%	
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	157,000,000.00	157,000,000.00	100.00%	
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	892,270,000.00	841,064,000.00	94.26%	
Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja	10,000,000.00	2,500,000.00	25.00%	
Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	85,000,000.00	84,800,000.00	99.76%	
JUMLAH	31,221,341,600.00	29,901,364,924.00	95.77%	-

(3) Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan

Realisasi Pemeliharaan Peralatan Gedung Bangunan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 95,79% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.195 Realisasi Belanja Peralatan Gedung Bangunan per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6,179,989,800.75	5,762,121,311.00	93.24%	-
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	148,740,000.00	148,285,400.00	99.69%	-
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	23,760,000.00	23,750,000.00	99.96%	-
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	4,703,221,150.00	4,622,897,000.00	98.29%	-
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	8,640,000.00	8,640,000.00	100.00%	-
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat	16,692,000.00	-	0.00%	-
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat	83,808,000.00	83,384,300.00	99.49%	-
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	600,000,000.00	599,448,000.00	99.91%	-
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung	13,721,000.00	-	0.00%	-
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	1,350,000.00	-	0.00%	-
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	40,260,000.00	40,020,000.00	99.40%	-
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	7,200,000.00	7,200,000.00	100.00%	-
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	100,000,000.00	99,000,000.00	99.00%	-
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00%	-
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	294,978,400.00	290,248,200.00	98.40%	-
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja	148,585,200.00	147,962,200.00	99.58%	-
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	309,310,000.00	308,756,000.00	99.82%	-
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	35,611,000.00	35,611,000.00	100.00%	-
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan	9,813,800.00	9,813,800.00	100.00%	-
Belanja Pemeliharaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	35,474,000.00	35,474,000.00	100.00%	-
Jumlah	12,786,154,350.75	12,247,611,211.00	95.79	-

(4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 94,93% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.196 Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	1,350,000,000.00	1,345,476,605.00	99.66%	0.00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%	0.00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%	0.00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	25,782,900.00	25,700,000.00	99.68%	0.00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	90,000,000.00	86,954,000.00	96.62%	0.00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	216,317,600.00	141,206,000.00	65.28%	0.00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	6,150,000.00	2,550,000.00	41.46%	0.00
Jumlah	1,702,750,500.00	1,616,386,605.00	94.93%	-

(5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Realisasi Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 99,61% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.197 Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	0.00
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	100,000,000.00	99,600,000.00	99.60%	0.00
Jumlah	102,000,000.00	101,600,000.00	99.61%	-

b) Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2021 sebesar 89,96% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp37.931.710.519,00 atau 33,84%. Belanja Perjalanan Dinas tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5.198 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	166.783.759.046,92	150.032.999.938,00	89,96%	
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	0,00%	55.647.138.644,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	-	-	0,00%	56.454.150.775,00
Jumlah	166.783.759.046,92	150.032.999.938,00	89,96%	112.101.289.419,00

(1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri tahun 2021 sebesar 89,96% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.199 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	114.553.772.691,67	101.401.959.712,00	88,52%	-
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	405.203.000,00	402.129.100,00	99,24%	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.445.523.061,50	16.257.019.810,00	88,14%	-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	24.218.841.200,00	23.397.395.400,00	96,61%	-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9.160.419.093,75	8.574.495.916,00	93,60%	-
Jumlah	166.783.759.046,92	150.032.999.938,00	89,96%	-

c) **Belanja Uang/Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Realisasi belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar 94,15% dibanding anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.200 Realisasi Belanja Uang/Jasa yang dibagikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.336.842.200,00	3.281.742.000,00	98,35%	7.525.569.500,00
Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.296.200.000,00	8.612.490.697,00	92,65%	16.728.643.550,00
Jumlah	12.633.042.200,00	11.894.232.697,00	94,15%	24.254.213.050,00

(1) **Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.201 Realisasi Belanja Uang yang dibagikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	906.842.200,00	872.742.000,00	96,24%	-
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	2.430.000.000,00	2.409.000.000,00	99,14%	-
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.	-	-	0,00%	6.564.600.000,00
Uang untuk diberikan kepada masyarakat	-	-	0,00%	960.969.500,00
Jumlah	3.336.842.200,00	3.281.742.000,00	98,35	7.525.569.500,00

Realisasi Belanja Uang yang dibagikan kepada Pihak ketiga tahun 2021 sebesar 98,35% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan Realisasi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp4.243.827.500,00 atau 56,39%.

(2) **Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.202 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4,893,763,000.00	4,545,863,000.00	92,89%	-
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	4,402,437,000.00	4,066,627,697.00	92,37%	-
Belanja Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	0,00%	11,000,000.00
Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	0,00%	16,717,643,550.00
Jumlah	9,296,200,000.00	8,612,490,697.00	92,65%	16,728,643,550.00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga tahun 2021 sebesar 92,65%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp8.116.152.853,00 atau 48,52%.

d) Belanja Barang Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Belanja Barang Jasa BOS merupakan akun untuk mencatat belanja barang dan jasa BOS. Belanja Barang Jasa BOS tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5.203 Realisasi Belanja Barang Jasa BOS
per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa BOS	156.644.138.904,00	167.125.259.950,27	106,69%	188.236.578.749,00
Jumlah	156.644.138.904,00	167.125.259.950,27	106,69%	188.236.578.749,00

Realisasi Belanja Barang Jasa Bos tahun 2021 sebesar 106,69% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Barang Jasa BOS tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp21.111.318.798,73 atau 11,22%.

e) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Belanja Barang dan Jasa BLUD merupakan akun untuk menampung belanja barang dan jasa BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek, Rumah Sakit Jiwa, Laboratorium Lingkungan Hidup dan Laboratorium Kesehatan. Belanja Jasa BLUD Tahun 2021 terdiri:

**Tabel 5.204 Realisasi Belanja dan Jasa BLUD
per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek	287.645.204.083,68	280.682.405.955,79	97,58%	273.457.558.091,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit Jiwa	15.970.853.450,40	15.075.122.497,63	94,39%	-
Laboratorium Lingkungan Hidup	294.205.000,00	530.412.397,00	180,29%	-
Laboratorium Kesehatan	5.037.390.000,00	2.365.729.000,00	46,96%	10.880.107.334,00
Jumlah	308.947.652.534,08	298.653.669.850,42	96,67%	284.337.665.425,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2021 sebesar 96,67% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja barang dan Jasa BLUD tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp14.316.004.425,42 atau 5,03%.

Pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) instansi yang ditetapkan untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah yaitu UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup hal ini Sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/478/VI.02/HK/2020 Tanggal 26 oktober 2021 tentang Penetapan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Sebagai Perangkat Daerah Provinsi Lampung Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah dan Keputusan Gubernur Nomor : G/602/VI.02/HK/2020 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Sebagai Perangkat Daerah Provinsi Lampung Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.

f) Belanja Bahan/Material

Belanja Bahan/Material pada merupakan akun tempat menampung diantaranya belanja bahan baku bangunan, belanja bahan/bibit tanaman, belanja bibit ternak dan lainnya. Pada Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat rincian Belanja Bahan/Material.

Tabel 5.205 Realisasi Belanja Bahan/ Material per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja bahan baku bangunan	-	-	0,00%	2.128.070.114,00
Belanja bahan/bibit tanaman	-	-	0,00%	533.408.000,00
Belanja bibit ternak	-	-	0,00%	15.333.000,00
Belanja bahan obat-obatan	-	-	0,00%	1.786.053.847,60
Belanja bahan kimia dan Pupuk	-	-	0,00%	662.494.850,00
Belanja Tas Kegiatan	-	-	0,00%	1.202.090.000,00
Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga	-	-	0,00%	226.642.150,00
Belanja Perlengkapan /Peralatan Olahraga	-	-	0,00%	269.575.500,00
Belanja Specimen	-	-	0,00%	8.155.400,00
Belanja bahan pakan ternak	-	-	0,00%	151.800.500,00
Belanja Bahan Kompensasi	-	-	0,00%	102.730.000,00
Belanja Publikasi	-	-	0,00%	1.217.440.500,00
Belanja Spanduk	-	-	0,00%	1.469.652.000,00
Belanja Bahan Pangan (Dapur Umum Bencana Alam)	-	-	0,00%	26.000.000,00
Belanja Bahan Peralatan Kerja	-	-	0,00%	483.012.800,00
Belanja Bahan Perlengkapan / Peralatan Kesehatan / Ke	-	-	0,00%	1.033.784.752,00
Belanja Bahan Suku Cadang Alat Berat/Besar/Bengkel	-	-	0,00%	222.850.000,00
Belanja Bahan Laboratorium	-	-	0,00%	1.528.067.836,00
Belanja Bahan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	-	-	0,00%	695.308.000,00
Belanja Benih/Induk Ikan	-	-	0,00%	13.000.000,00
Belanja Wallpaper Kantor	-	-	0,00%	25.492.000,00
Jumlah	-	-	0,00%	13.800.961.249,60

g) Belanja Premi Asuransi

Belanja Premi Asuransi merupakan akun untuk menampung belanja premi asuransi kesehatan dan belanja premi asuransi barang. Pada Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat rincian Belanja Premi Asuransi.

Tabel 5.206 Realisasi Belanja Premi Asuransi per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	-	-	0,00%	68.933.269.331,00
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	-	-	0,00%	402.283.750,00
Belanja Premi Asuransi Jiwa	-	-	0,00%	511.962.787,00
Belanja Asuransi Pertanian	-	-	0,00%	227.514.600,00
Jumlah	-	-	0,00%	70.075.030.468,00

h) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor merupakan akun untuk menampung terkait kendaraan bermotor diantaranya belanja jasa *service*, belanja penggantian suku cadang, belanja bahan bakar minyak/gas pelumas. Pada Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat rincian Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor :

Tabel 5.207 Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Jasa Service	-	-	0,00	4.255.780.634,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	-	-	0,00	3.543.107.951,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	-	-	0,00	8.107.206.859,00
Belanja Jasa KIR	-	-	0,00	20.460.903,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	-	-	0,00	424.971.187,00
Belanja Pembelian Ban	-	-	0,00	2.386.658.950,00
Belanja Pembelian ACCU	-	-	0,00	654.170.900,00
Jumlah	-	-	0,00	19.392.357.384,00

i) Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Cetak dan Penggandaan merupakan akun untuk menampung belanja cetak, penggandaan dan penjiilidan. Pada Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat rincian Belanja Cetak dan Penggandaan :

Tabel 5.208 Realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja cetak	-	-	0,00	34.403.651.054,00
Belanja Penggandaan	-	-	0,00	13.863.729.615,43
Belanja Penjiilidan	-	-	0,00	2.781.360.108,00
Jumlah	-	-	0,00	51.048.740.777,43

j) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Belanja Sewa Gedung merupakan akun untuk menampung diantaranya belanja sewa gedung/kantor/tempat, belanja sewa ruang rapat, belanja sewa gudang. Pada Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat rincian Belanja Sewa Gedung tahun 2021 terdiri:

Tabel 5.209 Realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	-	-	0,00	10.602.200.200,00
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	-	-	0,00	8.825.571.000,00
Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	-	-	0,00	6.000.000,00
Belanja Sewa Gudang	-	-	0,00	446.500.000,00
Belanja Sewa Taman	-	-	0,00	52.500.000,00
Jumlah	-	-	0,00	19.932.771.200,00

k) Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Belanja Sewa Sarana Mobilitas merupakan akun untuk menampung belanja sewa sarana mobilitas darat dan belanja sewa sarana mobilitas air. Belanja Sewa Sarana Mobilitas tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.210 Realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	-	-	0,00	1.515.833.400,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	-	-	0,00	5.000.000,00
Jumlah	-	-	0,00	1.520.833.400,00

l) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan merupakan akun untuk menampung diantaranya belanja sewa meja/kursi, belanja sewa proyektor, belanja sewa generator. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan tahun 2021 terdiri:

**Tabel 5.211 Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja sewa a meja kursi	-	-	0.00%	715,854,490.00
Belanja sewa a proyektor	-	-	0.00%	400,000.00
Belanja sewa a generator	-	-	0.00%	70,000,000.00
Belanja sewa a tenda	-	-	0.00%	2,912,213,800.00
Belanja sewa a pakaian adat/tradisional	-	-	0.00%	3,500,000.00
Belanja Sew a Sound System dan elektronik	-	-	0.00%	1,121,234,200.00
Belanja sewa a Partisi	-	-	0.00%	1,600,000.00
Belanja Sew a Peralatan Elektronik	-	-	0.00%	255,550,000.00
Belanja Sew a Tanaman	-	-	0.00%	138,135,000.00
Belanja Sew a peralatan Praktek	-	-	0.00%	4,250,000.00
Belanja Sew a Peralatan Olah Raga	-	-	0.00%	42,000,000.00
Jumlah	-	-	0.00%	5,264,737,490.00

m) Belanja Makan Minum

Belanja Makan Minum merupakan akun untuk menampung diantaranya belanja makan dan minuman harian pegawai, belanja makan dan minuman rapat, belanja makan dan minuman tamu. Pada Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat rincian Belanja Makan Minum :

**Tabel 5.212 Realisasi Belanja Makan Minum
per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja makanan dan minuman harian pegawai	-	-	0,00	11.132.500.185,00
Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	0,00	18.181.689.389,00
Belanja makanan dan minuman tamu	-	-	0,00	15.048.069.100,00
Belanja makanan dan minuman pasien	-	-	0,00	641.820.500,00
Belanja makanan dan minuman Pantii sosial	-	-	0,00	3.677.315.600,00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta	-	-	0,00	26.923.655.200,00
Jumlah	-	-	0,00	75.605.049.974,00

n) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya merupakan akun penampungan diantaranya untuk belanja pakaian dinas KDH dan WKDH, Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH), Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL). Pada Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat rincian Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya :

**Tabel 5.213 Realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	-	-	0,00	620.545.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	-	-	0,00	432.550.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	0,00	368.050.000,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	-	-	0,00	36.500.000,00
Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas	-	-	0,00	565.724.000,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	-	-	0,00	421.245.000,00
Jumlah	-	-	0,00	2.444.614.000,00

o) Belanja Pakaian Kerja

Belanja Pakaian Kerja merupakan akun untuk menampung belanja pakaian kerja lapangan dan belanja atribut kelengkapan kantor. Pada Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat rincian Belanja Pakaian Kerja tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.214 Realisasi Belanja Pakaian Kerja per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja pakaian kerja lapangan	-	-	0,00	307.417.500,00
Belanja Atribut Kelengkapan Kantor	-	-	0,00	37.500.000,00
Jumlah	-	-	0,00	344.917.500,00

p) Belanja Pakaian Kerja Hari-hari Tertentu

Belanja Pakaian Kerja Khusus merupakan akun untuk menampung diantaranya belanja pakaian adat daerah, belanja pakaian batik tradisional, belanja pakaian olah raga. Pada Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat rincian Belanja Pakaian Kerja Khusus:

Tabel 5.215 Realisasi Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja pakaian adat daerah	-	-	0,00	804.100.000,00
Belanja pakaian batik tradisional	-	-	0,00	748.600.000,00
Belanja pakaian olahraga	-	-	0,00	650.136.000,00
Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus	-	-	0,00	167.725.000,00
Belanja pakaian Pasien/ kelayan Panti sosial	-	-	0,00	255.090.000,00
Belanja Pakaian Peserta	-	-	0,00	726.883.350,00
Jumlah	-	-	0,00	3.352.534.350,00

q) Belanja Jasa Konsultansi

Belanja Jasa Konsultansi merupakan akun tempat menampung belanja jasa konsultansi appraisal, belanja jasa konsultansi pengawas non fisik, belanja jasa konsultansi appraisal. Pada Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat rincian Belanja Jasa Konsultansi:

Tabel 5.216 Realisasi Belanja Jasa Konsultansi per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	-	-	-	3.015.441.400,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Non Fisik	-	-	-	10.384.140.690,00
Belanja Jasa Konsultansi Appraisal	-	-	-	307.216.900,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Non Fisik	-	-	-	428.844.480,00
Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi	-	-	-	168.480.000,00
Jumlah	-	-	-	14.304.123.470,00

r) Belanja Jasa Keamanan

Belanja Jasa Keamanan merupakan akun untuk menampung belanja jasa keamanan untuk kepolisian dan belanja jasa keamanan untuk penjaga malam. Pada Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat rincian Belanja Jasa Keamanan:

Tabel 5.217 Realisasi Belanja Jasa Keamanan per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Jasa Keamanan Kepolisian	-	-	0,00%	378.250.000,00
Belanja Jasa Keamanan Penjaga Malam	-	-	0,00%	1.264.630.000,00
Belanja Jasa Keamanan POL PP	-	-	0,00%	2.500.000,00
Belanja Jasa Keamanan Satpam	-	-	0,00%	503.225.000,00
Jumlah	-	-	0,00%	2.148.605.000,00

s) Belanja Akomodasi Transportasi dan uang saku peserta

Belanja Akomodasi Transportasi dan Uang Saku Peserta merupakan akun untuk menampung belanja transportasi peserta non PNS, belanja uang saku peserta non PNS dan belanja akomodasi tamu. Pada Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat rincian Belanja Akomodasi Transportasi dan Uang Saku Peserta:

Tabel 5.218 Realisasi Belanja Akomodasi Transportasi dan Uang Saku Peserta per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Transportasi Peserta Non PNS	-	-	0,00	1.968.716.000
Belanja Uang Saku Peserta Non PNS	-	-	0,00	12.551.210.000
Belanja Akomodasi Tamu	-	-	0,00	2.079.848.546
Jumlah	-	-	0,00	16.599.774.546,00

t) Belanja Hibah Barang Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Belanja Hibah Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga merupakan akun untuk menampung Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga. Pada Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat rincian Belanja Hibah Barang Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga:

Tabel 5.219 Realisasi Belanja Hibah Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	0,00	176.993.212.270,26
Belanja Hibah Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	0,00	1.605.376.000,00
Jumlah	-	-	0,00	178.598.588.270,26

u) Belanja Bantuan Sosial Barang Jasa yang Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga

Belanja Bantuan Sosial Barang Jasa yang Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga merupakan akun untuk menampung Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga. Pada Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat rincian Belanja Bantuan Sosial Barang Jasa yang Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga :

Tabel 5.220 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang Jasa yang Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	0,00	1.765.615.900,00
Belanja Bantuan Sosial Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	0,00	1.156.266.216,00
Jumlah	-	-	0,00	2.921.882.116,00

v) Belanja Restitusi Pajak

Belanja Restitusi Pajak merupakan akun untuk menampung belanja restitusi PKB dan belanja restitusi BBNKB. Pada Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat rincian Belanja Restitusi Pajak :

**Tabel 5.221 Realisasi Belanja Restitusi Pajak
per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Restitusi PKB	-	-	-	52.798.615,00
Belanja Restitusi BBNKB	-	-	-	990.000,00
Jumlah	-	-	-	53.788.615,00

w) Belanja Jasa Pihak Ketiga

Belanja Jasa Pihak Ketiga merupakan akun untuk menampung belanja jasa pihak ketiga. Pada Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat rincian Belanja Jasa Pihak Ketiga:

**Tabel 5.222 Realisasi Belanja Jasa Pihak Ketiga
per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Jasa Pihak Ketiga	-	-	-	44.935.905.653,00
Jumlah	-	-	-	44.935.905.653,00

x) Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur merupakan akun untuk menampung belanja jasa narasumber/tenaga ahli/instruktur. Pada Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat rincian Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur:

**Tabel 5.223 Realisasi Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur
per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur	-	-	0,00	33.369.332.416,00
Jumlah	-	-	0,00	33.369.332.416,00

3) Belanja Bunga

Belanja Bunga merupakan akun untuk menampung belanja bunga utang pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu PT SMI. Rincian Belanja Bunga tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.224 Realisasi Belanja Bunga per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan bukan Bank	22,500,000,000.00	22,161,585,802.00	98.50%	31,583,615,813.00
Jumlah	22,500,000,000.00	22,161,585,802.00	98.50%	31,583,615,813.00

a) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank – BUMN Jangka Panjang

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank – BUMN Jangka Panjang tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.225 Realisasi Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan
Bukan Bank – BUMN Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan bukan Bank - BUMN Jangka Panjang	22,500,000,000.00	22,161,585,802.00	98.50%	31,583,615,813.00
Jumlah	22,500,000,000.00	22,161,585,802.00	98.50%	31,583,615,813.00

(1) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank – BUMN Jangka Panjang

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank – BUMN Jangka Panjang tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.226 Realisasi Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank – BUMN Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan bukan Bank - BUMN Jangka Panjang	22,500,000,000.00	22,161,585,802.00	98.50%	31,583,615,813.00
Jumlah	22,500,000,000.00	22,161,585,802.00	98.50%	31,583,615,813.00

4) Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan akun untuk menampung belanja hibah kepada pemerintah pusat, belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi, belanja hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar. Belanja Hibah tahun 2021 terdiri:

Tabel 5.227 Realisasi Belanja Hibah per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	47.543.843.300,00	45.270.942.200,00	95,22%	12.282.638.250,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	152.735.033.576,29	113.448.386.675,20	74,28%	
Belanja Hibah kepada BUMN	3.555.401.000,00	-	0,00%	
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	222.035.654.405,00	209.196.254.046,92	94,22%	45.880.796.445,00
Belanja Hibah Dana BOS	1.302.710.130.000,00	1.314.971.807.000,00	100,94%	
Belanja Hibah Bos Kepada Satuan Pendidikan Dasar	-	-	0,00%	1.374.593.490.000,00
Belanja Hibah kepada Partai Politik	-	-	0,00%	4.761.669.600,00
Jumlah	1.728.580.062.281,29	1.682.887.389.922,12	97,36%	1.437.518.594.295,00

Realisasi Belanja Hibah tahun 2021 sebesar 97,36% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Hibah tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp245.368.795.627,12 atau 17,07%.

a) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.228 Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	11,506,513,500.00	11,506,513,500.00	100.00%	-
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	36,037,329,800.00	33,764,428,700.00	93.69%	-
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	-	-	0.00	12,282,638,250.00
Jumlah	47,543,843,300.00	45,270,942,200.00	95.22%	12,282,638,250.00

Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat tahun 2021 sebesar 95,22% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp32.988.303.950,00 atau 268,58%.

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat merupakan hibah yang diberikan kepada Korem 043 Gatam, Polda Lampung, Brigif III Marinir Piabung, Angkatan laut (Lanal) Lampung Komando Resor Militer (Denpom) Lampung dan Kepolisian Resort Kabupaten Pesawaran.

(1) Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5.229 Realisasi Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat
Per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	11,506,513,500.00	11,506,513,500.00	100.00%	-
Jumlah	11,506,513,500.00	11,506,513,500.00	100.00%	-

(2) Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5.230 Realisasi Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat
Per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	36.037.329.800,00	33.764.428.700,00	93,69%	-
Jumlah	36.037.329.800,00	33.764.428.700,00	93,69%	-

b) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5.231 Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	3,780,000,000.00	3,780,000,000.00	100.00%	-
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	147,661,107,576.29	108,384,337,675.20	73.40%	-
Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1,293,926,000.00	1,284,049,000.00	99.24%	-
Jumlah	152,735,033,576.29	113,448,386,675.20	74.28%	-

Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2021 sebesar 74,28% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5.232 Realisasi Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	3,780,000,000.00	3,780,000,000.00	100.00%	
Jumlah	3,780,000,000.00	3,780,000,000.00	100.00%	-

Realisasi Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2021 sebesar 100% dibanding anggarannya.

(2) Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5.233 Realisasi Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	147,661,107,576.29	108,384,337,675.20	73.40%	-
Jumlah	147,661,107,576.29	108,384,337,675.20	73.40%	-

Realisasi Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2021 sebesar 73,40% dibanding anggarannya.

(3) Belanja Hibah Jasa Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi Belanja Hibah Jasa Kepada Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5.234 Realisasi Belanja Hibah Jasa Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1,293,926,000.00	1,284,049,000.00	99.24%	
Jumlah	1,293,926,000.00	1,284,049,000.00	99.24%	-

Realisasi Belanja Hibah Jasa Kepada Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2021 sebesar 99,24% dibanding anggarannya.

c) Belanja Hibah Kepada BUMN

Realisasi Belanja Hibah Kepada BUMN tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5.235 Realisasi Belanja Hibah Kepada BUMN
Per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Hibah Uang kepada BUMN	3,555,401,000.00			
Jumlah	3,555,401,000.00	-	-	-

(1) Belanja Hibah Kepada BUMN

Realisasi Belanja Hibah Kepada BUMN tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5.236 Realisasi Belanja Hibah Kepada BUMN
Per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Hibah Uang kepada BUMN	3,555,401,000,00			
Jumlah	3,555,401,000,00	-	-	-

d) Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.237 Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	148.752.013.125,00	143.622.456.454,92	96,55%	
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	44.925.922.000,00	41.825.715.241,00	93,10%	
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	28.207.719.280,00	23.613.082.351,00	83,71%	
Belanja Hibah Koperasi	150.000.000,00	135.000.000,00	90,00%	
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	-	-	0,00%	45.880.796.445,00
Jumlah	222.035.654.405,00	209.196.254.046,92	94,22%	45.880.796.445,00

Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi tahun 2021 sebesar 94,22% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 5.238 Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	82.924.769.695,00	82.179.408.780,00	99,10%	
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	65.377.243.430,00	60.993.047.674,92	93,29%	
Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00%	
Jumlah	148.752.013.125,00	143.622.456.454,92	96,55%	-

(2) Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 5.239 Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	21.270.734.500,00	20.060.570.400,00	94,31%	
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	22.518.484.500,00	20.889.449.661,00	92,77%	
Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.136.703.000,00	875.695.180,00	77,04%	
Jumlah	44.925.922.000,00	41.825.715.241,00	93,10%	-

(3) Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 5.240 Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	18.531.310.000,00	14.305.010.000,00	0,00	
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.676.409.280,00	9.308.072.351,00		
Jumlah	28.207.719.280,00	23.613.082.351,00	-	-

(4) Belanja Hibah Kepada Koperasi

Realisasi Belanja Hibah Kepada Koperasi Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 5.241 Realisasi Belanja Hibah Koperasi per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi	150.000.000,00	135.000.000,00	90,00%	
Jumlah	150.000.000,00	135.000.000,00	90,00%	-

e) Belanja Hibah Dana BOS

Realisasi Belanja Hibah BOS Tahun 2021 sebesar Rp1.314.971.807.000,- dengan persentase sebesar 100,94% dari Anggarannya yang terdiri dari :

**Tabel 5.242 Realisasi Belanja Hibah Dana BOS
per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	952.567.090.000,00	957.437.858.000,00	100,51%	
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	155.798.690.000,00	158.292.037.000,00	101,60%	
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	189.572.240.000,00	194.602.498.000,00	102,65%	
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdus	4.772.110.000,00	4.639.414.000,00	97,22%	
Jumlah	1.302.710.130.000,00	1.314.971.807.000,00	100,94%	-

(1) Belanja Hibah Uang Dana BOS Yang Diterima Oleh Satdikdas Negeri

Belanja Hibah BOS Uang Dana BOS Yang Diterima Satdikdas Negeri tahun 2021 terdiri:

**Tabel 5.243 Realisasi Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar
per 31 Desember 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Satuan Pendidikan Dasar Kota Bandar Lampung	0,00	0,00	0,00	157,085,180,000,00
Satuan Pendidikan Dasar kota Metro	0,00	0,00	0,00	36,706,050,000,00
Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Selatan	0,00	0,00	0,00	161,285,560,000,00
Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Tengah	0,00	0,00	0,00	209,695,150,000,00
Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Utara	0,00	0,00	0,00	99,949,960,000,00
Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Barat	0,00	0,00	0,00	45,679,590,000,00
Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Tulang Bawang	0,00	0,00	0,00	75,212,890,000,00
Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Tanggamus	0,00	0,00	0,00	93,608,510,000,00
Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Timur	0,00	0,00	0,00	157,320,570,000,00
Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Pesawaran	0,00	0,00	0,00	65,512,430,000,00
Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Way Kanan	0,00	0,00	0,00	82,702,620,000,00
Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Pringsewu	0,00	0,00	0,00	73,396,760,000,00
Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Tulang Bawang Barat	0,00	0,00	0,00	47,746,700,000,00
Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Mesuji	0,00	0,00	0,00	39,481,240,000,00
Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Pesisir Barat	0,00	0,00	0,00	26,424,280,000,00
Satuan Pendidikan Dasar SLB Swasta (SOLB/SMP LB)	0,00	0,00	0,00	2,786,000,000,00
Jumlah	-	-	0,00	1,374,593,490,000,00

**Tabel 5.244 Realisasi Belanja Hibah BOS Uang Dana BOS Yang Diterima
Satdikdas Negeri per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	952.567.090.000,00	957.437.858.000,00	100,51%	
Jumlah	952.567.090.000,00	957.437.858.000,00	100,51%	-

Realisasi Belanja Hibah BOS Uang Dana BOS Yang Diterima Satdikdas Negeri tahun 2021 sebesar Rp957.437.858.000,- dengan persentase 100,51% dari anggarannya.

(2) Belanja Hibah Uang Dana BOS Yang Diterima Oleh Satdikdas Swasta

Belanja Hibah BOS Uang Dana BOS Yang Diterima Satdikdas Swasta tahun 2021 terdiri:

**Tabel 5.245 Realisasi Belanja Hibah BOS Uang Dana BOS Yang Diterima
Satdikdas Swasta per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	155,798,690,000.00	158,292,037,000.00	101.60%	
Jumlah	155,798,690,000.00	158,292,037,000.00	101.60%	-

Realisasi Belanja Hibah BOS Uang Dana BOS Yang Diterima Satdikdas Negeri tahun 2021 sebesar Rp158.292.037.000,- dengan persentase 101,60% dari anggarannya.

(3) Belanja Hibah Uang Dana BOS Yang Diterima Oleh Satdikmen Swasta

Belanja Hibah BOS Uang Dana BOS Yang Diterima Satdikmen Swasta tahun 2021 terdiri:

**Tabel 5.246 Realisasi Belanja Hibah BOS Uang Dana BOS Yang Diterima
Satdikmen Swasta per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	189,572,240,000.00	194,602,498,000.00	102.65%	
Jumlah	189,572,240,000.00	194,602,498,000.00	102.65%	-

Realisasi Belanja Hibah BOS Uang Dana BOS Yang Diterima Satdikdas Negeri tahun 2021 sebesar Rp194.602.498.000,- dengan persentase 102,65% dari anggarannya.

(4) Belanja Hibah Uang Dana BOS Yang Diterima Oleh Satdiksus Swasta

Belanja Hibah BOS Uang Dana BOS Yang Diterima Satdiksus Swasta tahun 2021 terdiri:

**Tabel 5.247 Realisasi Belanja Hibah BOS Uang Dana BOS Yang Diterima
Satdikmen Swasta per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	4,772,110,000.00	4,639,414,000.00	97.22%	
Jumlah	4,772,110,000.00	4,639,414,000.00	97.22%	-

Realisasi Belanja Hibah BOS Uang Dana BOS Yang Diterima Satdikdas Negeri tahun 2021 sebesar Rp4.639.414.000,- dengan persentase 97,22% dari anggarannya

f) Belanja Hibah kepada Partai Politik

Belanja Hibah kepada Partai Politik merupakan hibah yang ditujukan kepada Partai Politik. Pada Tahun 2021 tidak terdapat Belanja Hibah kepada Partai Politik :

Tabel 5.248 Realisasi Belanja Subsidi per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja hibah kepada partai politik	-	-	0,00%	4.761.669.600,00
Jumlah	-	-	0,00%	4.761.669.600,00

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2020 merupakan akun untuk menampung belanja bantuan sosial untuk pemberdayaan sosial, belanja bantuan sosial untuk pemberian perlindungan sosial, belanja bantuan sosial untuk penanggulangan bencana. Belanja Bantuan Sosial tahun 2021 merupakan akun untuk menampung belanja bantuan sosial untuk individu sebagai berikut:

Tabel 5.249 Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Individu	5.236.377.000,00	4.930.194.829,00	94,15%	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberian Perlindungan Sosial	-	-	0,00	341.200.000,00
Belanja Bantuan Sosial akibat resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi	-	-	0,00	11.200.000,00
Jumlah	5.236.377.000,00	4.930.194.829,00	94,15%	352.400.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2021 sebesar 94,15% dibanding anggarannya.

a) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.250 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	4.424.702.000,00	4.043.594.829,00	91,39%	-
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	811.675.000,00	886.600.000,00	109,23%	-
Jumlah	5.236.377.000,00	4.930.194.829,00	94,15%	-

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Untuk Individu tahun 2021 sebesar Rp4.930.194.829,- dengan persentase 94,15% dari anggarannya.

(1) Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu

Belanja Bantuan Sosial Untuk Individu tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.251 Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	4.424.702.000,00	4.043.594.829,00	91,39%	-
Jumlah	4.424.702.000,00	4.043.594.829,00	91,39%	-

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Untuk Individu tahun 2021 sebesar Rp4.043.594.829,- dengan persentase 91,39% dari anggarannya.

(2) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.252 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan
Kepada Individu per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	811,675,000.00	886,600,000.00	109.23%	-
Jumlah	811,675,000.00	886,600,000.00	109.23%	-

Realisasi Belanja Bantuan Sosial barang yang direncanakan kepada individu tahun 2021 sebesar Rp886.600.000,00 atau 109,23% dari anggarannya. Realisasi melebihi anggaran belanja dikarenakan adanya Realisasi terhadap belanja bantuan yang berasal dari dana SATGAS Covid-19 yaitu belanja yang ditujukan untuk pemberian Bantuan Sosial Masyarakat sebesar Rp90.000.000,00 sesuai Laporan Ketua POSKO Satgas Covid-19 Provinsi Lampung Nomor : 045.2/116/VII/POSKO/2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang Laporan Hasil Rapat Rencana Pemeberian Bantuan Sosial Masyarakat Terdampak Penerapan PPKM di Provinsi Lampung berupa sembako dimana sasaran kelompok yang akan menerima bantuan antara lain adalah ojek online, pedagang asongan dan fakir miskin serta tuna netra dengan bantuan yang dialokasikan adalah berupa paket sembako yang berisi Beras, Minyak Goreng, Gula, Sarden dan Mie Instan sebanyak 1.200 paket senilai Rp75.000,00/paket.

b. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan akun untuk menampung belanja tanah, belanja peralatan dan kantor, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya. Belanja Modal tahun 2021 terdiri:

Tabel 5.253 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Tanah	2.440.000.000,00	127.714.760,00	5,23	8.785.013.950,00
Belanja Peralatan dan Mesin	194.703.801.313,56	185.593.022.021,90	95,32	254.349.003.701,00
Belanja Gedung dan Bangunan	255.243.925.324,00	240.978.511.324,58	94,41	182.406.597.671,89
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	437.226.344.008,04	390.107.373.947,73	89,22	280.131.995.852,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	34.868.306.817,00	32.846.817.778,00	94,20	26.855.599.045,00
Belanja Modal Aset Lainnya	40.000.000,00	38.675.000,00	96,69	-
Jumlah	924.522.377.462,60	849.692.114.832,21	91,91	752.528.210.219,89

Realisasi Belanja Modal tahun 2021 sebesar 91,81 % dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan Belanja Modal tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp97.163.904.612,32 atau 12,91%.

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah tahun 2021 terdiri dari :

Tabel 5.254 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Tanah	2,440,000,000.00	127,714,760.00	5.23%	-
Jumlah	2,440,000,000.00	127,714,760.00	5.23%	-

Realisasi Belanja Modal Tanah pada tahun 2021 sebesar Rp127.714.760,00 atau 5,23 %.

a) Belanja Modal Tanah

Belanja Tanah pada tahun 2020 merupakan akun untuk menampung diantaranya pengadaan tanah pengguna lain, pengadaan tanah untuk bangunan gedung serta pengadaan tanah bangunan jalan dan jembatan. Sedangkan pada tahun 2021 yaitu untuk menampung Belanja Modal Tanah Persil dan Belanja Modal Tanah Lapangan. Belanja Modal Tanah tahun 2021 terdiri dari :

Tabel 5.255 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Tanah Persil	2.300.000.000,00	-	0,00	-
Belanja Modal Tanah Lapangan	140.000.000,00	127.714.760,00	91,22%	-
Pengadaan Tanah Pengguna Lain	-	-	0,00	3.632.712.750,00
Pengadaan Tanah Untuk Banguna Gedung	-	-	0,00	5.152.301.200,00
Jumlah	2.440.000.000,00	127.714.760,00	5,23	8.785.013.950,00

(1) Belanja Modal Tanah Persil

Realisasi Belanja Modal Tanah Persil pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.256 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Persil per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Persil	2.300.000.000,00	-	0,00%	-
Jumlah	2.300.000.000,00	-	0,00%	-

(2) Belanja Modal Lapangan

Realisasi Belanja Modal Lapangan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.257 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Lapangan per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Lapangan	140.000.000,00	127.714.760,00	91,22%	-
Jumlah	140.000.000,00	127.714.760,00	91,22%	-

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2021 terdiri dari:

**Tabel 5.258 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2020**

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja modal pengadaan alat berat	-	-	0.00	3,335,650,000.00
Belanja modal alat alat bantu	-	-	0.00	44,289,500.00
Belanja modal angkutan darat bermotor	-	-	0.00	4,090,000,000.00
Belanja modal angkutan darat tak bermotor	-	-	0.00	-
Belanja Modal Pengadaan alat bengkel bermesin	-	-	0.00	302,230,000.00
Belanja Modal Pengadaan alat bengkel tak bermesin	-	-	0.00	40,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan alat ukur	-	-	0.00	40,550,000.00
Belanja Modal Pengadaan alat pengolahan	-	-	0.00	95,043,700.00
Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	-	-	0.00	566,219,240.00
Belanja Modal Pengadaan alat kantor	-	-	0.00	1,382,007,115.00
Belanja Modal Pengadaan alat Rumah Tangga	-	-	0.00	26,974,959,181.00
Belanja modal pengadaan komputer	-	-	0.00	10,483,505,047.00
Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/meubelair	-	-	0.00	6,569,271,550.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	-	-	0.00	2,517,154,554.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	-	-	0.00	407,770,800.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pemancar	-	-	0.00	-
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	-	-	0.00	24,548,272,789.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	-	-	0.00	18,589,971,831.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	-	-	0.00	4,655,977,600.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	-	-	0.00	87,041,073,723.00
Belanja Modal Pengadaan alat-alat persenjataan/keamanan dan perlindungan	-	-	0.00	89,047,910.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	-	0.00	62,576,009,161.00
Jumlah	-	-	0.00	254,349,003,701.00

**Tabel 5.259 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Alat Besar	3.916.505.000,00	3.408.296.918,00	87,02%	-
Belanja modal alat alat angkutan	10.022.932.000,00	9.751.806.193,00	97,29%	-
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	348.397.925,00	169.464.925,00	48,64%	-
Belanja Modal Alat Pertanian	14.485.033.600,00	14.249.597.600,00	98,37%	-
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	31.586.227.455,00	29.421.917.049,90	93,15%	-
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Alat Pemancar	3.050.652.801,00	2.940.766.181,00	96,40%	-
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.807.118.028,00	4.403.839.160,00	75,84%	-
Belanja Modal Alat Laboratorium	37.256.755.258,75	35.146.016.189,00	94,33%	-
Belanja Modal Komputer	28.647.102.923,99	27.796.829.960,00	97,03%	-
Belanja Modal Alat Eksplorasi	425.745.435,00	251.786.800,00	59,14%	-
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	14.133.000.000,00	13.337.756.650,00	94,37%	-
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	21.270.000,00	10.202.000,00	47,96%	-
Belanja Modal Alat Peraga	67.941.500,00	67.909.200,00	99,95%	-
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	198.000.000,00	175.900.000,00	88,84%	-
Belanja Modal Rambu-rambu	485.569.745,75	474.700.000,00	97,76%	-
Belanja Modal Peralatan Olahraga	402.983.000,00	402.300.800,00	99,83%	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	22.210.516.641,07	24.179.388.736,00	108,86%	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	21.638.050.000,00	19.404.543.660,00	89,68%	-
Jumlah	194.703.801.313,56	185.593.022.021,90	95,32%	-

Realisasi Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp185.593.022.021,90 atau 95,32% dibanding anggarannya.

a) Belanja Modal Alat Besar

Belanja Modal Alat Besar pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.260 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Alat Besar Darat	1.100.000.000,00	730.400.000,00	66,40	-
Belanja Modal Alat Bantu	2.816.505.000,00	2.677.896.918,00	95,08	-
Jumlah	3.916.505.000,00	3.408.296.918,00	87,02	-

Realisasi Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp3.408.296.918,00 atau 87,02% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Modal Alat Besar Darat

Belanja Modal Alat Besar pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.261 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar Darat
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Grader	1.100.000.000,00	730.400.000,00	66,40%	-
Jumlah	1.100.000.000,00	730.400.000,00	66,40%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Besar Darat tahun 2021 sebesar Rp730.400.000,00 atau 66,40% dibanding anggarannya.

(2) Belanja Modal Alat Bantu

Belanja Modal Alat Bantu pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.262 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bantu per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Electric Generating Set	195,000,000.00	191,844,545.00	98.38%	-
Belanja Modal Pompa	265,505,000.00	264,265,100.00	99.53%	-
Belanja Modal Mesin Bor	16,000,000.00	13,977,273.00	87.36%	-
Belanja Modal Pengolahan Air Kotor	1,100,000,000.00	1,095,760,000.00	99.61%	-
Belanja Modal Alat Bantu	1,240,000,000.00	1,112,050,000.00	89.68%	-
Jumlah	2,816,505,000.00	2,677,896,918.00	95.08%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Bantu tahun 2021 sebesar Rp2.677.896.918,00 atau 95,08% dibanding anggarannya.

b) Belanja Modal Alat Angkutan

Belanja Modal Alat Angkutan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.263 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	10,022,932,000.00	9,751,806,193.00	97.29%	-
Jumlah	10,022,932,000.00	9,751,806,193.00	97.29%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan tahun 2021 sebesar Rp9.751.806.193,00 atau 97,29% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Modal Angkutan Darat Bermotor

Belanja Modal Angkutan Darat Bermotor pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.264 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Angkutan Darat Bermotor per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.196.402.000,00	6.165.876.118,00	99,51%	-
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.632.330.000,00	3.401.210.075,00	93,64%	-
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	167.200.000,00	157.720.000,00	94,33%	-
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00%	-
Jumlah	10.022.932.000,00	9.751.806.193,00	97,29%	-

Realisasi Belanja Modal Angkutan Darat Bermotor tahun 2021 sebesar Rp9.751.806.193,00 atau 97,29% dibanding anggarannya.

c) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.265 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	153.461.200,00	23.461.200,00	15,29%	-
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	17.112.725,00	17.112.725,00	100,00%	-
Belanja Modal Alat Ukur	177.824.000,00	128.891.000,00	72,48%	-
Jumlah	348.397.925,00	169.464.925,00	48,64%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur tahun 2021 sebesar Rp169.464.925,00 atau 48,64% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin

Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.266 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Fondasi	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	-
Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	15.642.000,00	15.642.000,00	100,00%	-
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	131.819.200,00	1.819.200,00	1,38%	-
Jumlah	153.461.200,00	23.461.200,00	15,29%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin tahun 2021 sebesar Rp23.461.200,00 atau 15,29% dibanding anggarannya.

(2) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin

Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.267 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	17.112.725,00	17.112.725,00	100,00%	-
Jumlah	17.112.725,00	17.112.725,00	100,00%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin tahun 2021 sebesar Rp17.112.725,00 atau 100% dibanding anggarannya.

(3) Belanja Modal Alat Ukur

Belanja Modal Alat Ukur pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.268 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Ukur per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Alat Ukur Universal	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00%	-
Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%	-
Belanja Modal Alat kalibrasi	44.000.000,00	-	-	-
Belanja Modal Alat Ukur Lain-lain	44.244.000,00	44.161.000,00	99,81%	-
Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	33.000.000,00	32.450.000,00	98,33%	-
Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	48.480.000,00	44.180.000,00	91,13%	-
Jumlah	177.824.000,00	128.891.000,00	72,48%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Ukur tahun 2021 sebesar Rp128.891.000,00 atau 72,48% dibanding anggarannya.

d) Belanja Modal Alat Pertanian

Belanja Modal Alat Pertanian pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.269 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Alat Pengolahan	14.485.033.600,00	14.249.597.600,00	98,37%	-
Jumlah	14.485.033.600,00	14.249.597.600,00	98,37%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Ukur tahun 2021 sebesar Rp14.249.597.600,00 atau 98,99% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Modal Alat Pengolahan

Belanja Modal Alat Pengolahan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.270 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pengolahan per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	4.699.500,00	4.699.500,00	100,00%	-
Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.336.398.100,00	1.312.864.200,00	98,24%	-
Belanja Modal Alat Panen	11.859.250.000,00	11.842.125.000,00	99,86%	-
Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	1.123.346.000,00	935.901.500,00	83,31%	-
Belanja Modal Alat-alat Peternakan	93.566.000,00	86.233.400,00	92,15%	-
Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	67.774.000,00	67.774.000,00	100,00%	-
Jumlah	14.485.033.600,00	14.249.597.600,00	98,37%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Pengolahan tahun 2021 sebesar Rp14.249.597.600,00 atau 98,37% dibanding anggarannya.

e) Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.271 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Alat Kantor	10.489.814.135,00	10.014.984.584,90	95,47%	-
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	18.710.367.470,00	17.570.100.315,00	93,91%	-
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.386.045.850,00	1.836.832.150,00	76,98%	-
Jumlah	31.586.227.455,00	29.421.917.049,90	93,15%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga tahun 2021 sebesar Rp29.421.917.049,90 atau 93,15% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Alat Kantor

Belanja Modal Alat Kantor pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.272 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Mesin Ketik	2.952.000,00	2.952.000,00	100,00%	-
Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin jumlah	232.308.000,00	175.096.820,00	75,37%	-
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	404.504.399,00	396.905.000,00	98,12%	-
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	9.850.049.736,00	9.440.030.764,90	95,84%	-
Jumlah	10.489.814.135,00	10.014.984.584,90	95,47%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga tahun 2021 sebesar Rp10.014.984.584,90 atau 95,09% dibanding anggarannya.

(2) Belanja Alat Rumah Tangga

Belanja Modal Alat Tangga pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.273 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Rumah Tangga per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Mebel	14.270.993.200,00	13.813.446.332,00	96,79%	-
Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	63.750.000,00	63.750.000,00	100,00%	-
Belanja Modal Alat Pembersih	317.552.000,00	317.552.000,00	100,00%	-
Belanja Modal Alat Pendingin	2.085.300.600,00	1.542.846.700,00	73,99%	-
Belanja Modal Alat Dapur	76.910.400,00	74.589.500,00	96,98%	-
Belanja Modal Alat rumah Tangga Lainnya	1.740.542.070,00	1.655.465.783,00	95,11%	-
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	155.319.200,00	102.450.000,00	65,96%	-
Jumlah	18.710.367.470,00	17.570.100.315,00	93,91%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Rumah Tangga tahun 2021 sebesar Rp17.570.100.315,00 atau 93,91% dibanding anggarannya.

(3) Belanja Modal Meja dan Kursi Rapat

Belanja Modal Alat Meja dan Kursi Rapat pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.274 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Meja dan Kursi Rapat per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	440,257,750.00	410,139,750.00	93.16%	-
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	104,088,700.00	103,933,000.00	99.85%	-
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	247,508,800.00	237,663,700.00	96.02%	-
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	466,415,200.00	465,616,200.00	99.83%	-
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya	786,100,000.00	298,450,000.00	37.97%	-
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	341,675,400.00	321,029,500.00	93.96%	-
Jumlah	2,386,045,850.00	1,836,832,150.00	76.98%	-

Realisasi Belanja Modal Meja dan Kursi Rapat tahun 2021 sebesar Rp1.836.832.150,00 atau 76,98% dibanding anggarannya.

f) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.275 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Alat Studio	2,696,393,301.00	2,592,671,600.00	96.15%	-
Belanja Modal Alat Komunikasi	354,259,500.00	348,094,581.00	98.26%	-
Jumlah	3,050,652,801.00	2,940,766,181.00	96.40%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tahun 2021 sebesar Rp2.940.766.181,00 atau 96,40% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Modal Alat Studio

Belanja Modal Alat Studio pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.276 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	414,505,001.00	389,891,000.00	94.06%	-
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	927,734,000.00	926,049,500.00	99.82%	-
Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	168,607,500.00	150,975,600.00	89.54%	-
Belanja Modal Peralatan Cetak	255,777,800.00	229,669,000.00	89.79%	-
Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/ Peralatan Ukur Tanah	38,009,000.00	37,950,000.00	99.84%	-
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	891,760,000.00	858,136,500.00	96.23%	-
Jumlah	2,696,393,301.00	2,592,671,600.00	96.15%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Studio tahun 2021 sebesar Rp2.592.671.600,00 atau 96,15% dibanding anggarannya.

(2) Belanja Modal Alat Komunikasi

Belanja Modal Alat Komunikasi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.277 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Komunikasi
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	67,895,000.00	66,579,712.00	98.06%	-
Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	3,400,000.00	3,400,000.00	100.00%	-
Belanja Modal Alat Digital dan Konvensional	33,000,000.00	32,359,869.00	98.06%	-
Belanja Modal Alat Komunikasi Satelite	19,392,000.00	19,338,000.00	99.72%	-
Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	230,572,500.00	226,417,000.00	98.20%	-
Jumlah	354,259,500.00	348,094,581.00	98.26%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Komunikasi tahun 2021 sebesar Rp348.094.581,00 atau 98,26% dibanding anggarannya.

g) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.278 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Alat Kedokteran	2,142,768,314.00	1,918,385,743.00	89.53%	-
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3,664,349,714.00	2,485,453,417.00	67.83%	-
Jumlah	5,807,118,028.00	4,403,839,160.00	75.84%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan tahun 2021 sebesar Rp4.403.839.160,00 atau 75,84% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Modal Alat Kedokteran

Belanja Modal Alat Kedokteran pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.279 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1,329,604,900.00	1,191,725,760.00	89.63%	-
Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medik	110,125,000.00	110,125,000.00	100.00%	-
Belanja Modal Alat Kesehatan Radioterapi	100,000,286.00	99,990,000.00	99.99%	-
Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	603,038,128.00	516,544,983.00	85.66%	-
Jumlah	2,142,768,314.00	1,918,385,743.00	89.53%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran tahun 2021 sebesar Rp1.918.385.743,00 atau 89,53% dibanding anggarannya.

(2) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum

Belanja Modal Alat Kesehatan Umum pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.280 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kesehatan Umum
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	3,664,349,714.00	2,485,453,417.00	67.83%	-
Jumlah	3,664,349,714.00	2,485,453,417.00	67.83%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Kesehatan Umum tahun 2021 sebesar Rp2.485.453.417,00 atau 67,83% dibanding anggarannya

h) Belanja Modal Alat Laboratorium

Belanja Modal Alat Laboratorium pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.281 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	13.729.912.538,75	12.117.472.740,00	88,26%	-
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	20.539.249.000,00	20.141.768.529,00	98,06%	-
Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	194.496.920,00	167.349.920,00	86,04%	-
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	2.584.000.000,00	2.541.000.000,00	98,34%	-
Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	199.196.800,00	178.425.000,00	89,57%	-
Belanja Modal alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumental	9.900.000,00	-	0,00%	-
Jumlah	37.256.755.258,75	35.146.016.189,00	94,33%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium tahun 2021 sebesar Rp35.146.016.189,00 atau 94,59% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium

Belanja Modal Unit Alat Laboratorium pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.282 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Unit Alat Laboratorium per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	277.215.368,00	261.067.000,00	94,17%	-
Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	1.041.574.000,00	-	0,00%	-
Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	2.768.775.000,00	2.610.300.000,00	94,28%	-
Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	474.273.000,00	446.963.740,00	94,24%	-
Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi	1.633.996.000,00	1.541.382.000,00	94,33%	-
Belanja Modal Alat Laboratorium pertanian	18.500.000,00	8.500.000,00	45,95%	-
Belanja Modal Alat Laboratorium .	6.726.000,00	6.690.000,00	99,46%	-
Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	6.920.000.000,00	6.849.640.000,00	98,98%	-
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	588.853.170,75	392.930.000,00	66,73%	-
Jumlah	13.729.912.538,75	12.117.472.740,00	88,26%	-

Realisasi Belanja Modal Unit Alat Laboratorium tahun 2021 sebesar Rp12.117.472.740,00 atau 88,26% dibanding anggarannya.

(2) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah

Belanja Modal Alat Peraga Praktek sekolah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.283 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	20.539.249.000,00	20.141.768.529,00	98,06%	-
Jumlah	20.539.249.000,00	20.141.768.529,00	98,06%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Peraga Praktek sekolah tahun 2021 sebesar Rp20.141.768.529,00 atau 98,06% dibanding anggarannya.

(3) Belanja Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan

Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.284 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Proteks Radiasi/Proteksi Lingkungan per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Alat Kesehatan Kerja	194.496.920,00	167.349.920,00	86,04%	-
Jumlah	194.496.920,00	167.349.920,00	86,04%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan tahun 2021 sebesar Rp167.349.920,00 atau 86,04% dibanding anggarannya.

(4) Belanja Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkunga Hidup pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.285 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat
Laboratorium Lingkungan Hidup
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	2.584.000.000,00	2.541.000.000,00	98,34%	
Jumlah	2.584.000.000,00	2.541.000.000,00	98,34%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup tahun 2021 sebesar Rp2.541.000.000,00 atau 98,34% dibanding anggarannya.

(5) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica

Belanja Modal Alat Laboratorium Hydrodinamica pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.286 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat
Laboratorium Hydrodinamica
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Peralatan Umum	199.196.800,00	178.425.000,00	89,57%	
Jumlah	199.196.800,00	178.425.000,00	89,57%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Hydrodinamica tahun 2021 sebesar Rp178.425.000,00 atau 89,57% dibanding anggarannya.

(6) Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi

Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.287 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium
Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	9.900.000,00	-	0,00%	-
Jumlah	9.900.000,00	-	0,00%	-

Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi merupakan belanja modal GPS Ecosounder Kapal tidak ada realisasi hal ini disebabkan harga GPS Dengan spesifikasi yg sesuai lebih tinggi dari harga yang ada di standar satuan harga(SSH) sehingga pengadaan GPS tidak terealisasi.

i) Belanja Modal Komputer

Belanja Modal Alat Komputer pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.288 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Komputer
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Komputer Unit	19.245.456.810,99	19.045.343.258,00	98,96%	-
Belanja Modal Peralatan Komputer	9.401.646.113,00	8.751.486.702,00	93,08%	
Jumlah	28.647.102.923,99	27.796.829.960,00	97,03%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Komputer tahun 2021 sebesar Rp27.796.829.960,00 atau 97,03% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Modal Komputer Unit

Belanja Modal Alat Komputer Unit pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.289 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Komputer Unit per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Komputer Jaringan	616.000.000,00	614.929.000,00	99,83%	-
Belanja Modal Personal Computer	2.968.201.470,00	3.057.232.200,00	103,00%	-
Belanja Modal Komputer Lainnya	15.661.255.340,99	15.373.182.058,00	98,16%	-
Jumlah	19.245.456.810,99	19.045.343.258,00	98,96%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Komputer Unit tahun 2021 sebesar Rp19.045.343.258,00 atau 98,30% dibanding anggarannya.

(2) Belanja Modal Peralatan Komputer

Belanja Modal Alat Peralatan Komputer pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.290 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Peralatan Komputer per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Peralatan Mainframe	154.000.000,00	153.780.000,00	99,86%	-
Belanja Modal Mini Computer	13.033.800,00			-
Belanja Modal Personal Computer	480.876.665,00	521.217.500,00	#####	-
Belanja Modal Peralatan Jaringan	4.622.398.158,00	4.097.218.650,00	88,64%	-
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4.131.337.490,00	3.979.270.552,00	96,32%	-
Jumlah	9.401.646.113,00	8.751.486.702,00	93,08%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Peralatan Komputer tahun 2021 sebesar Rp8.751.486.702,00 atau 93,08% dibanding anggarannya.

j) Belanja Modal Alat Eksplorasi

Belanja Modal Alat Eksplorasi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.291 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Eksplorasi per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Eksplorasi Topografi	27.359.000,00	27.359.000,00	100,00%	-
Belanja Modal Eksplorasi Geofisika	398.386.435,00	224.427.800,00	56,33%	-
Jumlah	425.745.435,00	251.786.800,00	59,14%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Eksplorasi tahun 2021 sebesar Rp251.786.800,00 atau 59,14% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi

Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.292 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat
Eksplorasi Topografi per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Eksplorasi Topografi Lainnya	27,359,000.00	27,359,000.00	100.00%	-
Jumlah	27,359,000.00	27,359,000.00	100.00%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi tahun 2021 sebesar Rp27.359.000,00 atau 100,00% dibanding anggarannya.

(2) Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika

Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.293 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat
Eksplorasi Geofisika per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Eksplorasi Geofisika	238,361,435.00	224,427,800.00	94.15%	-
Jumlah	238,361,435.00	224,427,800.00	94.15%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika tahun 2021 sebesar Rp224.427.800,00 atau 94,15% dibanding anggarannya.

k) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian

Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.294 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Produksi,
Pengolahan dan Pemurnian per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Sumur	14,133,000,000.00	13,337,756,650.00	94.37%	-
Jumlah	14,133,000,000.00	13,337,756,650.00	94.37%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian tahun 2021 sebesar Rp13.337.756.650,00 atau 94,37% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Modal Sumur

Belanja Modal Sumur pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.295 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Sumur
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Sumur Pemboran	14,133,000,000.00	13,337,756,650.00	94.37%	-
Jumlah	14,133,000,000.00	13,337,756,650.00	94.37%	-

Realisasi Belanja Modal Sumur tahun 2021 sebesar Rp13.337.756.650,00 atau 94,37% dibanding anggarannya.

l) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.296 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Alat Deteksi	11,270,000.00	10,202,000.00	90.52%	-
Belanja Modal Alat SAR	10,000,000.00	-	0.00%	-
Jumlah	21,270,000.00	10,202,000.00	47.96%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Eksplorasi tahun 2021 sebesar Rp10.202.000,00 atau 47,96% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Modal Alat Deteksi

Belanja Modal Alat Deteksi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.297 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Deteksi
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Alat Deteksi	11,270,000.00	10,202,000.00	90.52%	-
Jumlah	11,270,000.00	10,202,000.00	90.52%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Deteksi tahun 2021 sebesar Rp10.202.000,00 atau 90,52% dibanding anggarannya.

(2) Belanja Modal SAR

Belanja Modal Alat SAR pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.298 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat SAR
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Alat SAR	10,000,000.00	-	0.00%	-
Jumlah	10,000,000.00	-	0.00%	-

Belanja Modal Alat SAR tahun 2021 merupakan belanja alat keselamatan berupa *Life Jacket* dan tidak ada realisasi disebabkan terjadinya penumpukan permintaan belanja pada triwulan 3 (tiga) sehingga kas di Bendahara Pengeluaran tidak cukup.

m) Belanja Modal Alat Peraga

Belanja Modal Alat Peraga pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.299 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Peraga
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	67,941,500.00	67,909,200.00	99.95%	-
Jumlah	67,941,500.00	67,909,200.00	99.95%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Peraga tahun 2021 sebesar Rp67.909.200,00 atau 99,95% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan

Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.300 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	5,927,000.00	5,895,000.00	99.46%	
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	62,014,500.00	62,014,200.00	100.00%	-
Jumlah	67,941,500.00	67,909,200.00	99.95%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan tahun 2021 sebesar Rp67.909.200,00 atau 99,95% dibanding anggarannya.

n) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi

Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.301 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	198,000,000.00	175,900,000.00	88.84%	-
Jumlah	198,000,000.00	175,900,000.00	88.84%	-

Realisasi Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi tahun 2021 sebesar Rp175.900.000,00 atau 88,84% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi

Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.302 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	198,000,000.00	175,900,000.00	88.84%	-
Jumlah	198,000,000.00	175,900,000.00	88.84%	-

Realisasi Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi tahun 2021 sebesar Rp175.900.000,00 atau 88,84% dibanding anggarannya.

o) Belanja Modal Rambu – Rambu

Belanja Modal Rambu - rambu pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.303 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Rambu - rambu per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	480,569,745.75	469,700,000.00	97.74%	-
Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	-
Jumlah	485,569,745.75	474,700,000.00	97.76%	-

Realisasi Belanja Modal Rambu - rambu tahun 2021 sebesar Rp474.700.000,00 atau 97,76% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Modal Rambu – Rambu Lalu Lintas Darat

Belanja Modal Rambu – Rambu Lalu Lintas Darat pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.304 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Rambu – Rambu Lalu Lintas Darat per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	480,569,745.75	469,700,000.00	97.74%	-
Jumlah	480,569,745.75	469,700,000.00	97.74%	-

Realisasi Belanja Modal Rambu - rambu Lalu Lintas Darat tahun 2021 sebesar Rp469.700.000,00 atau 97,74% dibanding anggarannya.

(2) Belanja Modal Rambu – Rambu Lalu Lintas Udara

Belanja Modal Rambu – Rambu Lalu Lintas Udara pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.305 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Rambu – Rambu Lalu Lintas Udara per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Visual Approach Slope Indicator (VASI)	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	-
Jumlah	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	-

Realisasi Belanja Modal Rambu - rambu Lalu Lintas Udara tahun 2021 sebesar Rp5.000.000,00 atau 100% dibanding anggarannya.

p) Belanja Modal Peralatan Olahraga

Belanja Modal Peralatan Olahraga pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.306 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Peralatan Olahraga	402,983,000.00	402,300,800.00	99.83%	-
Jumlah	402,983,000.00	402,300,800.00	99.83%	-

Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga tahun 2021 sebesar Rp402.300.800,00 atau 99,83% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Modal Unit Peralatan Olahraga

Belanja Modal Peralatan Olahraga pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.307 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	402,983,000.00	402,300,800.00	99.83%	-
Jumlah	402,983,000.00	402,300,800.00	99.83%	-

Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga tahun 2021 sebesar Rp402.300.800,00 atau 99,83% dibanding anggarannya.

q) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.308 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	22,210,516,641.07	24,179,388,736.00	108.86%	-
Jumlah	22,210,516,641.07	24,179,388,736.00	108.86%	-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS tahun 2021 sebesar Rp24.179.388.736,00 atau 108,86% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Peralatan dan Mesin BOS

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.309 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan & Mesin BOS per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	22,210,516,641.07	24,179,388,736.00	108.86%	-
Jumlah	22,210,516,641.07	24,179,388,736.00	108.86%	-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS tahun 2021 sebesar Rp24.179.388.736,00 atau 108,86% dibanding anggarannya.

r) Belanja Peralatan dan Mesin BLUD

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.310 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	21,638,050,000.00	19,404,543,660.00	89.68%	-
Jumlah	21,638,050,000.00	19,404,543,660.00	89.68%	-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD tahun 2021 sebesar Rp19.404.543.660,00 atau 89,68% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Peralatan dan Mesin BLUD

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.311 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan & Mesin BLUD per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	21,638,050,000.00	19,404,543,660.00	89.68%	-
Jumlah	21,638,050,000.00	19,404,543,660.00	89.68%	-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD tahun 2021 sebesar Rp19.404.543.660,00 atau 89,68% dibanding anggarannya.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5.312 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja modal Bangunan Gedung	251.942.622.324,00	238.076.715.012,58	94,50%	-
Belanja modal Monumen	100.000.000,00	99.464.080,00	99,46%	-
Belanja modal Bangunan Menara	150.000.000,00	101.000.000,00	67,33%	-
Belanja Modal Tugu Titik kontrol/Pasti	904.964.000,00	844.246.000,00	93,29%	-
Belanja Modal Bangunan dan Gedung BLUD	1.950.799.000,00	1.857.086.232,00	95,20%	-
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	0,00%	182.376.839.671,89
Belanja modal Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	-	-	0,00%	29.758.000,00
Jumlah	255.048.385.324,00	240.978.511.324,58	94,48%	182.406.597.671,89

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2021 sebesar 94,48% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp58.571.913.652,69 atau 32,11%.

(a) Belanja Modal Bangunan Gedung

Belanja Modal Bangunan Gedung pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.313 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	250.766.978.324,00	236.901.945.012,58	94,47%	-
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.175.644.000,00	1.174.770.000,00	99,93%	-
Jumlah	251.942.622.324,00	238.076.715.012,58	94,50%	-

Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung tahun 2021 sebesar Rp238.076.715.012,58 atau 94,50% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.314 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	27,848,469,174.00	26,542,864,461.31	95.31%	
Belanja Modal Bangunan Gudang	2,734,099,000.00	2,664,436,500.00	97.45%	
Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	2,150,000,000.00	1,731,833,000.00	80.55%	
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2,752,841,000.00	1,782,387,000.00	64.75%	
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	440,000,000.00	424,756,000.00	96.54%	
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4,207,542,500.00	3,845,334,950.00	91.39%	
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	116,872,515,500.00	110,974,507,780.89	94.95%	
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	18,659,885,350.00	17,509,012,549.00	93.83%	
Belanja Modal Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	526,925,000.00	491,116,000.00	93.20%	
Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	30,400,000.00	30,200,000.00	99.34%	
Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	18,000,000.00	17,809,020.00	98.94%	
Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/ Bandara	3,953,897,500.00	3,835,100,000.00	97.00%	
Belanja Modal Bangunan Terbuka	349,101,800.00	252,226,590.00	72.25%	
Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan	600,000,000.00	588,002,000.00	98.00%	
Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	1,611,332,500.00	1,496,928,173.00	92.90%	
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	65,674,049,500.00	62,451,850,933.38	95.09%	
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	298,796,000.00	283,458,150.00	94.87%	
Belanja Modal Bangunan Parkir	21,120,000.00	21,089,000.00	99.85%	
Belanja Modal Taman	265,397,000.00	264,995,000.00	99.85%	
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1,752,606,500.00	1,694,037,905.00	96.66%	
Jumlah	250,766,978,324.00	236,901,945,012.58	94.47%	-

Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja tahun 2021 sebesar Rp236.901.945.012,58 atau 94,47% dibanding anggarannya.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.315 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Panti Asuhan	25,000,000.00	24,940,000.00	99.76%	-
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1,150,644,000.00	1,149,830,000.00	99.93%	
Jumlah	1,175,644,000.00	1,174,770,000.00	99.93%	-

Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal tahun 2021 sebesar Rp1.174.770.000,00 atau 99,93% dibanding anggarannya.

(b) Belanja Modal Monumen

Belanja Modal Monumen pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.316 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Monumen per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	100,000,000.00	99,464,080.00	99.46%	-
Jumlah	100,000,000.00	99,464,080.00	99.46%	-

Realisasi Belanja Modal Monumen tahun 2021 sebesar Rp99.464.080.000,00 atau 99,46% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti

Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.317 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Monumen per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Bangunan Peninggalan	100,000,000.00	99,464,080.00	99.46%	-
Jumlah	100,000,000.00	99,464,080.00	99.46%	-

Realisasi Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti tahun 2021 sebesar Rp99.464.080.000,00 atau 99,46% dibanding anggarannya.

(c) Belanja Menara

Belanja Modal Menara pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.318 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Menara per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Menara Perambuan	150,000,000.00	101,000,000.00	67.33%	-
Jumlah	150,000,000.00	101,000,000.00	67.33%	-

Realisasi Belanja Modal Menara tahun 2021 sebesar Rp101.000.000.000,00 atau 67,33% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Modal Menara Perambuan

Belanja Modal Menara Perambuan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.319 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Menara Perambuan per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Menara Perambuan Lainnya	150,000,000.00	101,000,000.00	67.33%	-
Jumlah	150,000,000.00	101,000,000.00	67.33%	-

Realisasi Belanja Modal Menara Perambuan tahun 2021 sebesar Rp101.000.000.000,00 atau 67,33% dibanding anggarannya.

(d) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.320 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Tugu Tanda/Batas	904,964,000.00	844,246,000.00	93.29%	-
Jumlah	904,964,000.00	844,246,000.00	93.29%	-

Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti tahun 2021 sebesar Rp844.246.000.000,00 atau 93,29% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas

Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Perambuan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.321 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tugu Tanda Batas per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	-
Belanja Modal Pagar	311,964,000.00	309,188,000.00	99.11%	
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	590,000,000.00	532,058,000.00	90.18%	-
Jumlah	904,964,000.00	844,246,000.00	93.29%	-

Realisasi Belanja Modal Menara Perambuan tahun 2021 sebesar Rp844.246.000.000,00 atau 93,29% dibanding anggarannya.

(e) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.322 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung & Bangunan BLUD per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1,950,799,000.00	1,857,086,232.00	95.20%	-
Jumlah	1,950,799,000.00	1,857,086,232.00	95.20%	-

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD tahun 2021 sebesar Rp1.857.086.232,00 atau 95,20% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.323 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1,950,799,000.00	1,857,086,232.00	95.20%	-
Jumlah	1,950,799,000.00	1,857,086,232.00	95.20%	-

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD tahun 2021 sebesar Rp1.857.086.232,00 atau 95,20% dibanding anggarannya.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan akun untuk menampung diantaranya belanja modal jalan jembatan, bangunan air, instalansi serta Jaringan. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2021 terdiri:

**Tabel 5.324 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	374.792.852.629,25	343.181.109.263,00	91,57%	-
Belanja Modal Bangunan Air	62.070.538.878,79	46.568.611.434,73	75,03%	-
Belanja Modal Instalasi	76.664.200,00	76.514.200,00	99,80%	-
Belanja Modal Jaringan	226.288.300,00	224.435.300,00	99,18%	-
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	60.000.000,00	56.703.750,00	94,51%	-
Belanja Modal Pengadaan Jalan	-	-	0,00%	261.223.246.496,00
Belanja Modal Pengadaan Jembatan	-	-	0,00%	7.120.608.180,00
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	-	-	0,00%	8.662.699.900,00
Belanja Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	-	-	0,00%	9.984.098,00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	-	-	0,00%	189.905.000
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	-	-	0,00%	2.103.483.300,00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	-	-	0,00%	202.454.378
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Bersih	-	-	0,00%	87.623.000,00
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	-	-	0,00%	0,00
Belanja modal Pengadaan Instalasi Gas	-	-	0,00%	196.207.000,00
Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	-	-	0,00%	335.784.500,00
Jumlah	437.226.344.008,04	390.107.373.947,73	89,22%	280.131.995.852,00

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2021 sebesar 89,22% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp109.975.378.095,73 atau 39,26%.

(a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Belanja Modal Jalan dan Jembatan merupakan akun untuk menampung belanja modal jalan dan Belanja Modal Jembatan. Belanja Modal Jalan dan Jembatan tahun 2021 terdiri:

**Tabel 5.325 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan
per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Jalan	356.644.904.629.25	326.875.261.447.00	91.65%	0.00
Belanja Modal Jembatan	18.147.948.000.00	16.305.847.816.00	89.85%	0.00
Jumlah	374.792.852.629.25	343.181.109.263.00	91.57%	-

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Jalan tahun 2021 sebesar 91,57% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Modal Jalan

Belanja Modal Jalan dan Jembatan merupakan akun untuk menampung belanja modal jalan provinsi, Jalan Khusus, Jalan Lainnya. Belanja Modal Jalan dan Jembatan tahun 2021 terdiri:

**Tabel 5.326 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan
per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Jalan Provinsi	299.689.295.249.25	273.546.508.586.00	91.28%	222.879.944.335.00
Belanja Modal Jalan Khusus	45.895.786.400.00	43.723.206.000.00	95.27%	216.364.441.00
Belanja Modal Jalan Lainnya	11.059.822.980.00	9.605.546.861.00	86.85%	-
Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Jalan	0.00	0.00	0.00%	101.142.000.00
Konsultasi Perencanaan	0.00	0.00	0.00%	22.891.668.170.00
Konsultasi Pengawasan	0.00	0.00	0.00%	15.134.127.550.00
Jumlah	356.644.904.629.25	326.875.261.447.00	91.65	261.223.246.496.00

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Jalan tahun 2021 sebesar 91,65% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp65.652.014.961,00 atau 25,13%.

(2) Belanja Modal Jembatan

Belanja Modal Pengadaan Jembatan Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.327 Realisasi Belanja Modal Jembatan per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Jembatan Provinsi	18,147,948,000.00	16,305,847,816.00	89.85%	7,116,010,930.00
Belanja Modal Pengadaan Jembatan Khusus	0.00	0.00	0.00%	4,597,250.00
Jumlah	18,147,948,000.00	16,305,847,816.00	89.85	7,120,608,180.00

Realisasi Belanja Modal Jembatan tahun 2021 sebesar 89,85% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp9.185.239.636,00 atau 129,00%.

(b) Belanja Modal Bangunan Air

Belanja Modal Bangunan Air pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.328 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	35,588,727,028.79	29,963,988,723.73	84.20%	-
Belanja Modal Pengaman Sungai/ Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	26,292,258,150.00	16,415,069,011.00	62.43%	-
Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	189,553,700.00	189,553,700.00	100.00%	-
Jumlah	62,070,538,878.79	46,568,611,434.73	75.03%	-

Realisasi Belanja Modal Bangunan Air tahun 2021 sebesar Rp46.568.611.434,73 atau 75,03% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi

Belanja Modal Bangunan Air Irigasi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.329 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Irigasi per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	365,808.06	-	0.00%	-
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	35,588,361,220.73	29,963,988,723.73	84.20%	-
Jumlah	35,588,727,028.79	29,963,988,723.73	84.20%	-

Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Irigasi tahun 2021 sebesar Rp29.963.988.723,73 atau 84,20% dibanding anggarannya.

(2) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam

Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.330 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Pengaman Sungai/ Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	26,292,258,150.00	16,415,069,011.00	62.43%	
Jumlah	26,292,258,150.00	16,415,069,011.00	62.43%	-

Realisasi Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam tahun 2021 sebesar Rp16.415.069.011,00 atau 62,43% dibanding anggarannya.

(3) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku

Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.331 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	189.553.700,00	189.553.700,00	100,00%	-
Jumlah	189.553.700,00	189.553.700,00	100,00%	-

Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku tahun 2021 sebesar Rp189.553.700,00 atau 100,00% dibanding anggarannya.

(c) Belanja Modal Instalasi

Belanja Modal Instalasi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.332 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Instalasi per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	6,664,200.00	6,664,200.00	100.00%	-
Belanja Modal Instalasi Pengaman	70,000,000.00	69,850,000.00	99.79%	
Jumlah	76,664,200.00	76,514,200.00	99.80%	-

Realisasi Belanja Modal Instalasi tahun 2021 sebesar Rp76.514.200,00 atau 99,80% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku

Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.333 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	6,664,200.00	6,664,200.00	100.00%	-
Jumlah	6,664,200.00	6,664,200.00	100.00%	-

Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku tahun 2021 sebesar Rp6.664.200,00 atau 100,00% dibanding anggarannya.

(2) Belanja Modal Instalasi Pengaman

Belanja Modal Instalasi Pengaman pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.334 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Instalasi Pengaman per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Instalasi Pengaman	70,000,000.00	69,850,000.00	99.79%	
Jumlah	70,000,000.00	69,850,000.00	99.79%	-

Realisasi Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam tahun 2021 sebesar Rp69.850.000,00 atau 99,79% dibanding anggarannya.

(d) Belanja Modal Jaringan

Belanja Modal Jaringan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.335 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jaringan per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Jaringan Air Minum	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	-
Belanja Modal Jaringan Listrik	213,000,000.00	211,147,000.00	99.13%	
Belanja Modal Jaringan Telepon	3,288,300.00	3,288,300.00	100.00%	
Jumlah	226,288,300.00	224,435,300.00	99.18%	-

Realisasi Belanja Modal Jaringan tahun 2021 sebesar Rp224.435.300,00 atau 99,18% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Modal Jaringan Air Minum

Belanja Modal Jaringan Air Minum pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.336 anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jaringan Air Minum per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Jaringan Pembawa	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	-
Jumlah	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	-

Realisasi Belanja Jaringan Air Minum tahun 2021 sebesar Rp10.000.000,00 atau 100,00% dibanding anggarannya.

(2) Belanja Modal Jaringan Listrik

Belanja Modal Jaringan Listrik pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.337 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jaringan Listrik per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Jaringan Distribusi	193,000,000.00	191,230,000.00	99.08%	
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	20,000,000.00	19,917,000.00	99.59%	
Jumlah	213,000,000.00	211,147,000.00	99.13%	-

Realisasi Belanja Modal Jaringan Listrik tahun 2021 sebesar Rp211.147.000,00 atau 99,13% dibanding anggarannya.

(3) Belanja Modal Jaringan Telepon

Belanja Modal Jaringan Telepon pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.338 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jaringan Telepon per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	3,288,300.00	3,288,300.00	100.00%	
Jumlah	3,288,300.00	3,288,300.00	100.00%	-

Realisasi Belanja Modal Jaringan Telepon tahun 2021 sebesar Rp3.288.300,00 atau 100,00% dibanding anggarannya.

(e) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.339 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	60,000,000.00	56,703,750.00	94.51%	-
Jumlah	60,000,000.00	56,703,750.00	94.51%	-

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD tahun 2021 sebesar Rp56.703.750,00 atau 94,51% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.340 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	60,000,000.00	56,703,750.00	94.51%	-
Jumlah	60,000,000.00	56,703,750.00	94.51%	-

(f) Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi Pada tahun 2020 merupakan akun untuk menampung belanja pengadaan bangunan pelengkap irigasi. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.341 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	0.00	0.00	0.00%	8,584,874,900.00
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	0.00	0.00	0.00%	77,825,000.00
Jumlah	-	-	0.00%	8,662,699,900.00

(g) Belanja Modal Pengadaan Pengamanan Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam

Belanja modal pengadaan pengamanan sungai dan penanggulangan bencana alam Tahun 2020 merupakan akun untuk menampung belanja modal pengadaan pengamanan sungai. Belanja modal pengadaan pengamanan sungai dan penanggulangan bencana alam sebagai berikut:

Tabel 5.342 Realisasi Belanja modal pengadaan pengamanan sungai per 31 Desember 2020

Uraian	1 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja modal pengadaan pengamanan sungai	-	-	0.00%	9,984,098.00
Jumlah	-	-	0.00%	9,984,098.00

(h) Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah

Belanja modal pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Tahun 2020 merupakan akun untuk menampung belanja modal pengadaan bangunan pengambilan pengembangan Sumber Air. Belanja modal Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebagai berikut:

Tabel 5.343 Realisasi Belanja modal pengadaan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja modal pengadaan pengembangan sumber air dan air tanah	0.00	0.00	0.00%	189,905,000.00
Jumlah	-	-	0.00%	189,905,000.00

(i) Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku Tahun 2020 merupakan akun untuk menampung belanja pengadaan bangunan pengambil air bersih/baku. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku sebagai berikut:

Tabel 5.344 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	0,00	0,00	0,00%	397.500.000,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih	0,00	0,00	0,00%	1.705.983.300,00
Jumlah	-	-	0,00%	2.103.483.300,00

(j) Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor tahun 2020 merupakan akun untuk menampung belanja pengadaan instalasi air kotor. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor terdiri dari:

Tabel 5.345 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	0.00	0.00	0.00%	202,454,378.00
Jumlah	-	-	0.00%	202,454,378.00

(k) Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih Tahun 2020 merupakan akun untuk menampung belanja pengadaan air tanah dalam, pengadaan air bersih/air tanah. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih terdiri dari :

Tabel 5.346 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dalam	0,00	0,00	0,00%	71.145.500,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air baku lainnya	0,00	0,00	0,00%	16.477.500,00
Jumlah	-	-	-	87.623.000,00

(l) Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gas

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gas Tahun 2020 merupakan akun untuk menampung belanja pengadaan instalasi jaringan pipa gas. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gas sebagai berikut:

Tabel 5.347 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja modal Pengadaan Instalasi Gas	-	-	0.00	196,207,000.00
Jumlah	-	-	0.00	196,207,000.00

(m) Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik

Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik tahun 2020 merupakan akun untuk menampung pengadaan jaringan distribusi, pengadaan jaringan transmisi. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik sebagai berikut:

Tabel 5.348 Realisasi Belanja Pengadaan Jaringan Listrik per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	0.00	0.00	0.00	166,006,500.00
Belanja modal Pengadaan Jaringan Transmisi	0.00	0.00	0.00	169,778,000.00
Jumlah	-	-	0.00	335,784,500.00

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tahun 2021 merupakan akun untuk menampung belanja modal bahan perpustakaan, belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, belanja modal hewan, belanja modal tanaman serta belanja modal aset tidak berwujud. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :

**Tabel 5.349 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	698.544.500,00	687.840.000,00	98,47%	771.946.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	1.529.030.000,00	1.527.365.000,00	99,89%	
Belanja Modal Hewan	100.000.000,00	99.100.000,00	99,10%	212.900.000,00
Belanja Modal Tanaman	0,00	195.350.000,00	0,00%	73.690.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	161.026.000,00	153.112.800,00	95,09%	
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.647.548.300,00	1.521.966.426,00	92,38%	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	29.783.033.017,00	27.407.222.431,00	92,02%	25.616.623.245,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	949.125.000,00	1.254.861.121,00	132,21%	
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00%	171.857.700,00
Belanja Modal Barang Alat Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00%	8.582.100,00
Jumlah	34.868.306.817,00	32.846.817.778,00	94,20%	26.855.599.045,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 sebesar 93,68% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp5.991.218.733,00 atau 22,31%.

(a) Belanja Modal Bahan Perpustakaan

Belanja Modal Bahan Perpustakaan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.350 Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	522.000.000,00	512.600.000,00	98,20%	0,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam Dalam Bentuk Mikro	154.044.500,00	152.740.000,00	99,15%	0,00
Belanja modal Kartografi, Neskah dan Lukisan	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00%	0,00
Jumlah	698.544.500,00	687.840.000,00	98,47%	-

Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan tahun 2021 sebesar Rp687.840.000,00 atau 98,47% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak

Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.351 Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Buku Umum	310.000.000,00	300.900.000,00	97,06%	0,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	212.000.000,00	211.700.000,00	99,86%	0,00
Jumlah	522.000.000,00	512.600.000,00	98,20%	-

Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak tahun 2021 sebesar Rp512.600.000,00 atau 98,20% dibanding anggarannya.

(2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam Dalam Mikro

Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam Dalam Mikro tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.352 Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan
Terekam Dalam Mikro per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Audio Visual	154,044,500.00	152,740,000.00	99.15%	0.00
Jumlah	154,044,500.00	152,740,000.00	99.15%	-

Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam Dalam Mikro tahun 2021 sebesar Rp152.740.000,00 atau 99,15% dibanding anggarannya

(3) Belanja Modal Kartografi, Naskah dan Lukisan

Belanja Modal Kartografi, Naskah dan Lukisan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.353 Realisasi Belanja Modal Kartografi, Naskah dan Lukisan
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja modal Lukisan dan Ukiran	22,500,000.00	22,500,000.00	100.00%	0.00
Jumlah	22,500,000.00	22,500,000.00	100.00%	-

Realisasi Belanja Modal Kartografi, Naskah dan Lukisan tahun 2021 sebesar Rp22.500.000,00 atau 100,00% dibanding anggarannya.

(b) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.354 Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak
Kesenian/Kebudayaan/Olahraga per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Barang Bercorak	1,394,030,000.00	1,392,540,000.00	99.89%	0.00
Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	135,000,000.00	134,825,000.00	99.87%	0.00
Jumlah	1,529,030,000.00	1,527,365,000.00	99.89%	-

Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga tahun 2021 sebesar Rp1.527.365.000,00 atau 99,89% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.355 Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	1,394,030,000.00	1,392,540,000.00	99.89%	0.00
Jumlah	1,394,030,000.00	1,392,540,000.00	99.89%	-

Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian tahun 2021 sebesar Rp1.392.540.000,00 atau 99,89% dibanding anggarannya.

(2) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan

Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.356 Realisasi Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah	135,000,000.00	134,825,000.00	99.87%	0.00
Jumlah	135,000,000.00	134,825,000.00	99.87%	-

Realisasi Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan tahun 2021 sebesar Rp134.825.000,00 atau 99,87% dibanding anggarannya

(c) Belanja Modal Hewan

Belanja Modal Hewan Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.357 Realisasi Belanja Modal Hewan per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Hewan Ternak	100,000,000.00	99,100,000.00	99.10%	212,900,000.00
Jumlah	100,000,000.00	99,100,000.00	99.10%	212,900,000.00

Realisasi Belanja Modal Hewan tahun 2021 sebesar Rp99.100.000,00 atau 99,10% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp113.800.000,00 atau 53,45%.

(1) Belanja Modal Hewan Ternak

Belanja Modal Hewan Ternak pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.358 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Hewan Ternak per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Ternak Potong	100,000,000.00	99,100,000.00	99.10%	-
Jumlah	100,000,000.00	99,100,000.00	99.10%	-

Realisasi Belanja Jaringan Air Minum tahun 2021 sebesar Rp99.100.000,00 atau 99,10% dibanding anggarannya.

(d) Belanja Modal Tanaman

Belanja Modal Pengadaan Tanaman Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.359 Realisasi Belanja Modal Tanaman per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Tanaman	-	195.350.000,00	0,00%	73.690.000,00
Jumlah	-	195.350.000,00	0,00%	73.690.000,00

Realisasi Belanja Modal Tanaman tahun 2021 sebesar Rp193.350.000,00 atau 99,90% dibanding anggarannya.

(e) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi

Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.360 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	161,026,000.00	153,112,800.00	95.09%	-
Jumlah	161,026,000.00	153,112,800.00	95.09%	-

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi tahun 2021 sebesar Rp153.112.800,00 atau 95,09% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi

Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.361 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	161,026,000.00	153,112,800.00	95.09%	-
Jumlah	161,026,000.00	153,112,800.00	95.09%	-

Realisasi Belanja Jaringan Air Minum tahun 2021 sebesar Rp153.112.800,00 atau 95,09% dibanding anggarannya.

(f) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.362 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1,647,548,300.00	1,521,966,426.00	92.38%	-
Jumlah	1,647,548,300.00	1,521,966,426.00	92.38%	-

Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud tahun 2021 sebesar Rp1.521.966.426,00 atau 92,38% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.363 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Lisensi dan Franchise	162,789,000.00	72,586,426.00	44.59%	-
Belanja Modal Software	358,125,500.00	334,432,000.00	93.38%	-
Belanja Modal Kajian	150,000,000.00	147,984,000.00	98.66%	-
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	976,633,800.00	966,964,000.00	99.01%	-
Jumlah	1,647,548,300.00	1,521,966,426.00	92.38%	-

Realisasi Belanja Jaringan Air Minum tahun 2021 sebesar Rp1.521.966.426,00 atau 92,38% dibanding anggarannya.

(g) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS Lainnya merupakan akun untuk menampung belanja aset tetap lainnya yang berasal dari belanja operasional sekolah. Tahun 2021 terdiri dari.

**Tabel 5.364 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS
per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	29,783,033,017.00	27,407,222,431.00	92.02%	25,616,623,245.00
Jumlah	29,783,033,017.00	27,407,222,431.00	92.02%	25,616,623,245.00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS tahun 2021 sebesar 92,02% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.790.599.186,00 atau 6,99%.

(1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS merupakan akun untuk menampung belanja aset tetap lainnya yang berasal dari belanja operasional sekolah. Tahun 2021 terdiri dari.

**Tabel 5.365 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS
per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	29,783,033,017.00	27,407,222,431.00	92.02%	-
Jumlah	29,783,033,017.00	27,407,222,431.00	92.02%	-

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS tahun 2021 sebesar 92,02% dibanding anggarannya.

(h) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BLUD

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BLUD Tahun 2021 terdiri dari :

**Tabel 5.366 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BLUD
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BLUD	949,125,000.00	1,254,861,121.00	132.21%	-
Jumlah	949,125,000.00	1,254,861,121.00	132.21%	-

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BLUD tahun 2021 sebesar 132,21% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BLUD

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BLUD Tahun 2021 terdiri dari :

**Tabel 5.367 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BLUD
per 31 Desember 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BLUD	949,125,000.00	1,254,861,121.00	132.21%	-
Jumlah	949,125,000.00	1,254,861,121.00	132.21%	-

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BLUD tahun 2021 sebesar 132,21% dibanding anggarannya.

6) Belanja Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya - BLUD Tahun 2021 terdiri dari :

Tabel 5.368 Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya - BLUD per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Aset Lainnya - BLUD	40,000,000.00	38,675,000.00	96.69%	-
Jumlah	40,000,000.00	38,675,000.00	96.69%	-

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya - BLUD tahun 2021 sebesar 96,69% dibanding anggarannya.

(1) Belanja Modal Aset Lainnya - BLUD

Belanja Modal Aset Lainnya - BLUD Tahun 2021 terdiri dari :

Tabel 5.369 Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya - BLUD per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Aset Lainnya - BLUD	40,000,000.00	38,675,000.00	96.69%	-
Jumlah	40,000,000.00	38,675,000.00	96.69%	-

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya - BLUD tahun 2021 sebesar 96,69% dibanding anggarannya.

(i) Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan

Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan merupakan akun untuk menampung belanja pengadaan pahatan, lukisan, alat kesenian, benda-benda bersejarah, barang kerajinan, pengadaan alat olah raga. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.370 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Pengadaan Benda-benda Bersejarah	-	-	0.00%	171,857,700.00
Jumlah	-	-	0.00%	171,857,700.00

(j) Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya

Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya merupakan akun untuk menampung belanja pengadaan alat olah raga lainnya. Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.371 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya per 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	-	-	0.00%	8,582,100.00
Jumlah	-	-	0.00%	8,582,100.00

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.372 Realisasi Belanja Tidak Terduga per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	126.400.000,00	0,42%	119.312.701.296,00
Jumlah	30.000.000.000,00	126.400.000,00	0,42%	119.312.701.296,00

Realisasi belanja tidak terduga tahun 2021 adalah sebesar Rp126.400.000,00 atau 0,42% dari anggaran.

Selain itu Belanja Tidak Terduga merupakan Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

1) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.373 Realisasi Belanja Tidak Terduga per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	126.400.000,00	0,42%	119.312.701.296,00
Jumlah	30.000.000.000,00	126.400.000,00	0,42%	119.312.701.296,00

Realisasi belanja tidak terduga tahun 2021 adalah sebesar Rp126.400.000,00 atau 0,42% dari anggaran.

a) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.374 Realisasi Belanja Tidak Terduga per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	126.400.000,00	0,42%	119.312.701.296,00
Jumlah	30.000.000.000,00	126.400.000,00	0,42%	119.312.701.296,00

Realisasi belanja tidak terduga tahun 2021 adalah sebesar Rp126.400.000,00 atau 0,42% dari anggaran.

(1) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.375 Realisasi Belanja Tidak Terduga per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	126.400.000,00	0,42%	119.312.701.296,00
Jumlah	30.000.000.000,00	126.400.000,00	0,42%	119.312.701.296,00

Realisasi belanja tidak terduga tahun 2021 adalah sebesar Rp126.400.000,00 atau 0,42% dari anggaran.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah. Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Lampung selama TA 2021 merupakan realisasi belanja dana bagi hasil ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan Belanja Transfer/Bantuan Keuangan kepada Desa.

Tabel 5.376 Realisasi Belanja Transfer Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Bagi Hasil	1,250,961,416,087.30	1,096,585,546,691.00	87.66	1,231,408,694,144.94
Jumlah	1,250,961,416,087.30	1,096,585,546,691.00	87.66	1,231,408,694,144.94

Realisasi Belanja Transfer Daerah tahun 2021 sebesar 87,66% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan belanja transfer daerah tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp134.823.147.453,94 atau 10,95%.

1) Transfer Bagi Hasil Kabupaten/Kota

Transfer Bagi Hasil Kabupaten/Kota merupakan transfer bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota yang ada di wilayah Pemerintah Provinsi Lampung. Transfer Bagi Hasil Kabupaten/Kota tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5.377 Realisasi Transfer Bagi Hasil Kabupaten/Kota
per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota	0.00	108,035,619,732.00	0.00%	132,571,863,786.61
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Lampung Utara	0.00	81,802,510,658.00	0.00%	92,439,261,617.63
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Lampung Selatan	0.00	100,621,532,166.00	0.00%	111,753,717,301.74
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Lampung Barat	0.00	55,206,420,973.00	0.00%	62,140,456,604.26
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Tanggamus	0.00	72,373,886,433.00	0.00%	79,130,592,199.93
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Tulang Bawang	0.00	65,335,334,969.00	0.00%	73,809,441,641.15
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Lampung Tengah	0.00	104,203,008,649.00	0.00%	115,682,278,908.33
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Way Kanan	0.00	70,512,881,516.00	0.00%	77,377,656,931.50
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Lampung Timur	0.00	97,019,317,086.00	0.00%	113,410,191,254.05
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pesawaran	0.00	65,005,028,235.00	0.00%	69,617,577,495.09
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pringsewu	0.00	63,005,010,254.00	0.00%	71,430,610,320.92
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Tulang Bawang Barat	0.00	56,844,750,001.00	0.00%	61,513,503,973.00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Mesuji	0.00	52,326,296,698.00	0.00%	58,196,649,674.17
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pesisir Barat	0.00	51,802,830,469.00	0.00%	55,972,412,999.97
Jumlah	1,250,961,416,087.30	1,096,585,546,691.00	87.66%	1,231,408,694,144.94

Realisasi Belanja Transfer Daerah Kabupaten/Kota tahun 2021 sebesar Rp1.096.585.546.691,00 atau 87,66% dibanding anggarannya. Bila dibandingkan dengan Belanja Transfer Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp134.823.147.453,94 atau 10,95%.

3. SURPLUS/DEFISIT

Surplus/defisit merupakan selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Dalam tahun 2021 pendapatan ditargetkan sebesar Rp7.538.150.772.809,50 dan terealisasi sebesar Rp7.469.469.346.029,05 atau 99,09% sedangkan belanja dan transfer dianggarkan Rp7.557.497.851.948,54 dan terealisasi sebesar Rp7.097.651.401.591,13 atau 93,92%. Surplus sebesar Rp371.817.944.437,92 diperoleh berdasarkan transaksi kas dari pendapatan, belanja, dan transfer. Secara lebih lengkap, hal tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.378 Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
PENDAPATAN	7.538.150.772.809,50	7.469.469.346.029,05	99,09	7.019.319.471.883,36
BELANJA DAN TRANSFER	7.557.497.851.948,54	7.097.651.401.591,13	93,92	6.967.358.448.182,63
SURPLUS/DEFISIT	(19.347.079.139,04)	371.817.944.437,92	-1921,83	51.961.023.700,73

4. PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi Lampung baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Lampung terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

a. Penerimaan Pembiayaan

Pos Penerimaan Pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang perlu dibayar kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Realisasi penerimaan pembiayaan pada TA 2021 adalah sebesar Rp182.638.158.429,09 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.379 Penerimaan Pembiayaan per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	190.917.079.139,04	182.638.158.429,09	99,99	336.132.388.142,31
Total	190.917.079.139,04	182.638.158.429,09	95,66%	336.132.388.142,31

Penggunaan SiLPA sebelumnya adalah sebesar Rp182.638.158.429,09 yang berasal dari selisih dari Saldo anggaran lebih awal per 1 Januari 2021 sebesar Rp190.917.079.139,04 dan kas tekor RSUDAM tahun 2020 sebesar Rp7.941.143.422,00 dan koreksi SILPA akibat utang pfk RSUDAM sebesar Rp337.777.287,84 serta koreksi perhitungan kas bendahara pengeluaran tahun 2020 sebesar Rp0,11. Bila dibandingkan dengan Penggunaan SiLPA Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp153.494.229.713,22 atau 45,66%.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran pembiayaan tersebut antara

lain untuk pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode TA tertentu dan pembentukan dana cadangan. Anggaran pengeluaran pembiayaan tahun 2021 sebesar Rp171.570.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp171.176.332.704,00.

Tabel 5.380 Pengeluaran Pembiayaan per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Penyertaan Modal	30,390,000,000.00	30,000,000,000.00	98.72%	56,000,000,000.00
Pembayaran Pokok Utang	141,180,000,000.00	141,176,332,704.00	100.00%	141,176,332,704.00
Jumlah	171,570,000,000.00	171,176,332,704.00	99.77%	197,176,332,704.00

1) Penyertaan Modal

Realisasi penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp30.000.000.000,00 kepada PT.Bank Lampung.

Tabel 5.381 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
PT.Bank Lampung	30.390.000.000,00	30.000.000.000,00	98,72%	56.000.000.000,00
Jumlah	30.390.000.000,00	30.000.000.000,00	98,72%	56.000.000.000,00

2) Pembayaran Pokok Utang

Realisasi Pembayaran Pokok Utang merupakan akun untuk menampung pembayaran pokok pinjaman kepada Lembaga Keuangan Non Bank sebesar Rp141.176.332.704,00 atau 99,77% dari anggaran. Pembayaran Pokok Utang terdiri dari :

Tabel 5.382 Penyertaan Modal Pembayaran Pokok Utang per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Non Bank	141.180.000.000,00	141.176.332.704,00	99,98	70.588.166.352,00
Jumlah	141.180.000.000,00	141.176.332.704,00	99,98	70.588.166.352,00

5. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. SiLPA selama TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.383 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
PENDAPATAN	7.538.150.772.809,50	7.469.414.380.489,05	99,09	7.019.319.471.883,36
BELANJA DAN TRANSFER	7.557.497.851.948,54	7.097.934.213.338,97	93,92	6.967.358.448.182,63
SURPLUS/DEFISIT	(19.347.079.139,04)	371.480.167.150,08	(1.920,08)	51.961.023.700,73
PEMBIAYAAN NETTO	19.347.079.139,04	11.799.603.012,93	60,99	138.956.055.438,31
SILPA	-	383.279.770.163,01		190.917.079.139,04

SiLPA TA 2021 sebesar Rp383.279.770.163,01 mengalami kenaikan sebesar Rp192.362.691.023,97 atau 100,76% bila dibandingkan dengan SiLPA TA 2020 sebesar Rp190.917.079.139,04.

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih TA 2021 terdiri dari:

Tabel 5.384 Laporan Perubahan SAL Per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	190.917.079.139,04	336.132.388.142,31
Penggunaan SAL	182.638.158.429,09	336.132.388.142,31
Sub Total	8.278.920.709,95	-
SILPA/SIKPA	383.279.770.163,01	190.917.079.139,04
Sub Total	391.558.690.872,96	190.917.079.139,04
Koreksi Tahun Sebelumnya	-	-
Lain-lain	(8.278.920.709,95)	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	383.279.770.163,01	190.917.079.139,04

Saldo anggaran lebih awal per 1 Januari 2021 sebesar Rp190.917.079.139,04 dengan penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp182.638.158.429,09. Lain-lain sebesar Rp8.278.920.709,95 merupakan koreksi terhadap SILPA yang berasal dari kas tekor RSUAM tahun 2020 sebesar Rp8.278.920.709,95 dan koreksi perhitungan kas bendahara pengeluaran tahun 2020 sebesar Rp0,11. Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp383.279.770.163,01 per 31 Desember 2021.

C. NERACA

Neraca atau laporan posisi keuangan (*balance sheet*) adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tertentu. Secara garis besar neraca terdiri atas Aset (aktiva), Kewajiban (*liabilities*), dan Ekuitas.

Tabel 5.385 Rincian Neraca Pemerintah Provinsi Lampung TA 2021 dan 2020

Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
Aset	11.837.317.488.112,62	11.231.997.705.317,72
Kewajiban	959.973.266.315,71	873.388.365.230,16
Ekuitas	10.877.344.221.796,91	10.358.609.340.087,56
Kewajiban + Ekuitas	11.837.317.488.112,62	11.231.997.705.317,72

1. ASET

Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Pemerintah Provinsi Lampung yang terdiri atas:

Tabel 5.386 Rincian Aset pada Neraca Pemerintah Provinsi Lampung TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Aset Lancar	572.290.805.763,49	417.250.657.840,82
2	Investasi Jangka Panjang	571.054.436.311,69	487.396.970.917,00
3	Aset Tetap	10.552.863.682.500,96	10.182.106.235.517,66
4	Aset Lainnya	141.108.563.536,48	145.243.841.042,25
	Jumlah	11.837.317.488.112,62	11.231.997.705.317,72

Berdasarkan rincian aset sebagaimana digambarkan pada tabel di atas terlihat bahwa komposisi terbesar atas aset merupakan kelompok Aset Tetap yaitu 89,14% terhadap total keseluruhan aset Provinsi Lampung TA 2021.

a. Aset Lancar

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar tersebut antara lain terdiri atas kas dan setara kas. Adapun rincian Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.387 Rincian Aset Lancar Provinsi Lampung per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	219.673.534.356,09	119.824.886.780,03
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	400,05	268.460,11
3	Kas di Bendahara Penerimaan		1.903.800.000,00
4	Kas di BLUD	163.013.619.856,24	59.957.946.534,08
5	Kas di Bendahara BOS	1.831.774.299,34	790.828.430,07
6	Kas Lainnya	702.817.729,29	498.205.512,75
7	Investasi Jangka Pendek	-	-
8	Piutang Pajak	-	10.682.279,00
9	Penyisihan Piutang Pajak	-	(53.411,40)
10	Piutang Pajak Netto	-	10.628.867,60
11	Piutang Retribusi	-	4.180.000,00
12	Penyisihan Piutang Retribusi	-	(20.900,00)
13	Piutang Retribusi Netto	-	4.159.100,00
14	Beban Dibayar Dimuka	241.966.300,00	231.242.245,83
15	Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran	8.799.028.852,57	8.559.317.214,74
16	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penj. Angs	(17.514.976,80)	(14.901.472,19)
17	Bag. Lancar Tagihan Penj. Angsuran Netto	8.781.513.875,77	8.544.415.742,55
18	Bag. Lancar TPTGR	9.937.500,00	5.932.004,17
19	Penyisihan Bagian Lancar TPTGR	-	(29.660,02)
20	Bagian TPTGR Netto	9.937.500,00	5.902.344,15
21	Piutang Lainnya	80.106.914.493,86	78.837.524.872,00
22	Penyisihan Piutang Lainnya	(400.041.986,78)	(429.523.104,13)
23	Piutang Lainnya Netto	79.706.872.507,08	78.408.001.767,87
24	Persediaan	98.328.768.939,63	147.070.372.055,77
Jumlah		572.290.805.763,49	417.250.657.840,81

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa secara umum aset lancar Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2021 sebesar Rp572.290.805.763,49 mengalami peningkatan sebesar Rp155.040.147.922,67 atau 37,15 % apabila dibandingkan tahun 2020.

1) Kas di Kas Daerah

Per 31 Desember 2021
(Rp)
219.673.534.356,09

Per 31 Desember 2020
(Rp)
119.824.886.780,03

Kas di kas daerah merupakan kas dan setara kas yang ada pada Giro Bank Lampung Nomor 380.00.06.00001.1 a.n. Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung (**Lampiran 1**). Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp219.673.534.356,09

Dari saldo kas di kas daerah sebesar Rp219.673.534.356,09 diantaranya merupakan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp4.971.563.740,00 berupa sisa DAK Non Fisik dan DAK Fisik. Rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.388 Uraian Kas Di Kas Daerah per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Saldo RKUD Tahun 2021
1	Silpa DID 2021	1.589.822.727,00
2	Silpa DAK Non Fisik 2021 terdiri dari :	4.121.862.346,00
	- TPP Guru	2.529.473.356,00
	- TKG Guru	572.310.720,00
	- Tamsil Guru	508.500.000,00
	- BOK Tambahan	125.727.700,00
	- PK2UKM (Koperasi)	48.705.800,00
	- Adminduk (Disdukcapil)	207.156.670,00
	- BOP-MTB (Museum Taman Budaya)	36.435.100,00
	- Perlindungan Perempuan	93.553.000,00
3	Silpa DAK Fisik 2020 terdiri dari :	849.701.394,00
	- Pendidikan (Reguler)	371.530.450,00
	- Kesehatan dan KB (Reguler)	99.393.800,00
	- Pertanian (Penugasan)	54.161.900,00
	- Kelautan (Penugasan)	324.615.244,00
4	Kewajiban pada pihak ketiga	73.377.450.631,92
4	Kelebihan Setor RS Bandar Negara Husada	3.050.843.355,00
	Sisa Saldo	136.683.853.902,17
	Jumlah Total	219.673.534.356,09

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Desember 2021

(Rp)

400,05

Per 31 Desember 2020

(Rp)

268.460,11

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan pos untuk menampung saldo kas yang berasal dari sisa lebih belanja yang masih berada di bendahara pengeluaran dan belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 400,05. Sedangkan saldo per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp268.460,11

Tabel 5.389 Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)		Per 31 Desember 2020 (Rp)
		Jumlah	Tanggal Setor	
1	Satuan Polisi Pamong Praja	0,05	13-01-2022	
2	Dinas Kesehatan	400,00	31-01-2022	
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa			72.800,00
10	Dinas Energi dan SDM			195.660,11
	Jumlah	400,05	-	268.460,11

3) Kas di Bendahara Penerimaan

Per 31 Desember 2021

(Rp)

0,00

Per 31 Desember 2020

(Rp)

1.903.800.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pos untuk menampung saldo pendapatan/penerimaan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum disetor ke kas daerah. Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp,00.

**Tabel 5.390 Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan
Per 31 Desember 2021 dan 2020**

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Dinas Kesehatan		1.891.800.000,00
2	Dinas Perhubungan		12.000.000,00
	Jumlah	-	1.903.800.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2020 pada Dinas Kesehatan merupakan Pendapatan di UPTD Laboratorium Kesehatan dari PCR mobile, sedangkan pada Dinas Perhubungan pendapatan dari pemanfaatan aset milik daerah yang berada di Perum Damri.

4) Kas di BLUD

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
163.013.619.856,24	59.957.946.534,08

Kas di BLUD merupakan kas yang ada dalam penguasaan Bendahara BLUD pada Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek (RSUAM), Laboratorium Keliling, Laboratorium Kesehatan dan Rumah Sakit Jiwa. Rincian Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.391 Rincian Kas di Bendahara BLUD Per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	BLUD	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	RSAM	158.057.938.712,24	55.342.304.083,68
2	RSJ	3.600.869.068,98	
3	LABKES	852.545.440,00	
4	LABLINK	502.266.635,02	4.615.642.450,40
	Jumlah	163.013.619.856,24	59.957.946.534,08

Bahwa pada pemeriksaan tahun 2021 :

1. Terdapat temuan kekurangan penerimaan sebesar Rp 19.405.000 dari rekening BLUD Labling tidak dapat ditelusuri penggunaannya dan telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke Kas daerah
2. Terdapat temuan selisih penerimaan antara tanda bukti pembayaran dengan rekapan penerimaan sebesar Rp31.065.000,00 pada BLUD Labkesda dan telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke rekening BLUD Labkesda

5) Kas di Bendahara BOS

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1.831.774.299,34	790.828.430,07

Kas di Bendahara BOS merupakan sisa kas BOS dan Pajak yang belum disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 1.831.774.299,34.

Tabel 5.392 Rincian Kas di Bendahara BOS Per 31 Desember 2021

No	Uraian	Uraian Saldo BOS			
		Bos Reg	Bos Afkin	Pajak belum disetor (PFK)	Total
1	SMA/SLBN	-	-	1.301.797.412,00	1.301.797.412,00
2	SMK	0,34	-	529.976.887,00	529.976.887,34
		-	-	-	-
	Total	0,34	-	1.831.774.299,00	1.831.774.299,34

6) Kas Lainnya

Per 31 Desember 2021

(Rp)

702.817.729,29

Per 31 Desember 2020

(Rp)

498.205.512,75

Kas Lainnya merupakan sisa dana yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Kas Daerah, kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD dan Kas di Bendahara BOS. Kas Lainnya timbul akibat masih adanya penerimaan atas Rekening BLUD pada KUMKM Dinas Koperasi dan UPTD Modal Usaha Bidang Pertanian sampai dengan tahun 2021, saldo kas penerimaan Satgas Covid 19 pada Biro Umum, uang jaminan pasien yang belum tercatat di RSUDAM dan uang jaminan botol pada Labkesda. Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 061/9101/SJ tanggal 11 Desember 2017 perihal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang menyatakan kedua UPTD ini tidak termasuk yang direkomendasikan. Akibatnya, KUMKM Dinas Koperasi dan UPTD Modal Usaha Bidang Pertanian pada akhir bulan September 2019 tidak termasuk sebagai UPTD Provinsi Lampung. Rincian Kas Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.393 Rincian Kas Lainnya Per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Satker	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	UPTD Koperasi dan UMKM	523.822.566,06	9.050.653,97
2	UPTD Modal Usaha Bidang Pertanian	62.561.023,23	71.243.565,22
3	Biro Umum (Satgas Covid 19)	22.174.140,00	
4	RSUDAM	92.960.000,00	
5	Labkesda	1.300.000,00	-
Jumlah		702.817.729,29	80.294.219,19

7) Investasi Jangka Pendek

Per 31 Desember 2021

(Rp)

0,00

Per 31 Desember 2020

(Rp)

0,00

Saldo Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00.

8) Piutang Pajak (*Netto*)

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>10.628.867,60</u>

Piutang pajak merupakan pos untuk menampung hak Pemerintah Provinsi Lampung berupa saldo tagihan pajak daerah kepada pihak ketiga (wajib pajak daerah) berdasarkan surat ketetapan pajak yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan kedepan. Piutang pajak per 31 Desember 2021 netto sebesar Rp0,00.

9) Piutang Retribusi (*Netto*)

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>4.159.100,00</u>

Piutang retribusi merupakan pos untuk menampung hak Pemerintah Provinsi Lampung berupa saldo tagihan retribusi daerah kepada pihak ketiga (wajib retribusi daerah) berdasarkan surat ketetapan retribusi, yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan ke depan. Saldo Piutang Retribusi pada tahun 2021 sebesar Rp0,00.

10) Beban Dibayar Dimuka

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
<u>241.966.300,00</u>	<u>231.242.245,83</u>

Beban dibayar di muka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun anggaran berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut. Beban dibayar dimuka antara lain terdiri dari sewa rumah, asuransi yang dibayar dalam jangka waktu tertentu tetapi belum semuanya dinikmati jasanya. Saldo Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp241.966.300,00 terdiri dari:

Tabel 5.394 Rincian Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021

No	SKPD	Uraian	Jangka Waktu	Belanja LRA (Rp)	Beban Jasa LO (Rp)	Belanja Dibayar dimuka (Rp)
1	Dinas Sosial	Sewa Rumah RPTC	08-2021 s/d 08-2022	60.000.000,00	25.000.000,00	35.000.000,00
		Sewa Rumah singgah	09-2021 s/d 09-2022	120.000.000,00	40.000.000,00	80.000.000,00
		Sub Jumlah		180.000.000,00	65.000.000,00	115.000.000,00
2	Setwan	Asuransi All Risk	21-10-2021 s/d 21-10-2022	131.341.900,00	32.835.475,00	98.506.425,00
		Asuransi All Risk	29-10-2021 s/d 29-10-2022	18.070.000,00	4.517.500,00	13.552.500,00
		Asuransi All Risk Ktr	23-10-2021 s/d 23-10-2022	19.876.500,00	4.969.125,00	14.907.375,00
		Sub Jumlah		169.288.400,00	42.322.100,00	126.966.300,00
		Jumlah		349.288.400,00	107.322.100,00	241.966.300,00

**Tabel 5.395 Rincian Belanja Dibayar Dimuka DPRD dan Dinas Sosial Prov. Lampung
per 31 Desember 2021**

No	Keterangan	Jangka Waktu	Nomor Kontrak Asuransi	Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Nama Pihak Asuransi	Aset Yang diasuransikan
	Dinas Sosial						
1	Sewa Rumah RPTC	15-08-2021 s.d 15-08-2022	027/1785/V.07/B.IV/VII/2021	15 Agustus 2021	60.000.000,00	Salmah	
2	Sewa Rumah Singgah di Jakarta	04-09-2021 s.d 04-09-2022	027/1830/V.07/B.IV/2021	4 September 2021	120.000.000,00	Ir. Alexander Manik	
	DPRD						
1	Asuransi All Risk	21-10-2021 s/d 21-10-2022	35022221000293	22-10-2021	131.341.900,00	PT. Asuransi Ramayana	Kend Dinas/Operasional
2	Asuransi All Risk	29-10-2021 s/d 29-10-2022	35010521000021	29-10-2021	18.070.000,00	PT. Asuransi Ramayana	Rumdin dan Gedung pertemuan Ketua DPRD
3	Asuransi All Risk	23-10-2021 s/d 23-10-2022	35010521000020	22-10-2021	19.876.500,00	PT. Asuransi Ramayana	Gedung Kantor DPRD Prov. Lampung

11) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (Netto)

Per 31 Desember 2021

(Rp)

8.781.513.875,77

Per 31 Desember 2020

(Rp)

8.544.415.742,55

Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran merupakan hak Pemerintah Provinsi Lampung dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu 12 bulan kedepan. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun. Piutang bagian lancar penjualan angsuran merupakan bagian dari Tagihan Penjualan Tanah Kavling dan Rumah Dinas per 31 Desember 2021 (**Lampiran 3a dan 3b**). Sedangkan Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Provinsi Lampung Tahun 2021 terdiri atas:

**Tabel 5.396 Rincian Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
per 31 Desember 2021**

No.	Uraian	Piutang Bag. Lancar Penj. Angs (Rp)	Penyisihan Piutang Bag. Lancar Penj. Angs (Rp)	Piutang Bag. Lancar Penj. Angs. Netto (Rp)
1	Penjualan Tanah Kavling	8.471.407.945,25	16.720.718,94	8.454.687.226,31
2	Penjualan Rumah Dinas	327.620.907,32	794.257,86	326.826.649,46
	Jumlah	8.799.028.852,57	17.514.976,80	8.781.513.875,77

12) Piutang Bagian Lancar TP/TGR (Netto)

Per 31 Desember 2021

(Rp)

9.937.500,00

Per 31 Desember 2020

(Rp)

5.902.344,15

Piutang bagian lancar TP/TGR merupakan hak Pemerintah Provinsi Lampung yang berasal dari kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara/daerah, yang merupakan nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih (diharapkan dapat diterima) dalam jangka waktu

12 bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP) setelah dilakukan proses pengklasifikasian dan perhitungan terhadap TP/TGR ke dalam kelompok piutang (bagian lancar tuntutan ganti rugi) dan aset lainnya maka atas TP/TGR tersebut yang termasuk dalam kelompok bagian lancar TP/TGR (*netto*) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp9.937.500,00 dan Rp5.902.344,15 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.397 Rincian Piutang Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Nama	TP/ TGR	Tahun Kejadian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	RISMAN SUJANA, S.Sos	TGR	2021	9.937.500,00	
2	DESTRA YUDHA SETIAWAN, SH	TGR	2017		5.932.004,17
Jumlah Bagian Lancar TPTGR (Bruto)				9.937.500,00	5.932.004,17
Penyisihan Bagian Lancar TPTGR				0	29.660,02
Jumlah Bagian Lancar TPTGR (Netto)				9.937.500,00	5.902.344,15

13) Piutang Lainnya (*Netto*)

Per 31 Desember 2021

(Rp)

79.706.872.507,08

Per 31 Desember 2020

(Rp)

78.408.001.767,88

Tabel 5.398 Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Piutang Jamkesda Kota, Piutang Pasien Dalam Perawatan, Piutang TGR, Piutang Pasien Umum, BPJS dan Piutang Lain-lain (RSUDAM)	55.285.619.596,86	45.900.730.476,00
2	Piutang Jasa Pembinaan Dana Bergulir	-	146.237.000,00
3	Piutang Pasien Jaminan dan Non-Jaminan (RSJ)	1.399.550.472,00	1.055.520.248,00
4	Lebih setor pajak	98.517.049,00	98.517.049,00
5	Piutang Trf Bagi Hasil Pemerintah Pusat	19.498.605.202,00	27.811.897.925,00
6	Piutang Trf Bantuan Keuangan Kab Lampura	3.824.622.174,00	3.824.622.174,00
Jumlah		80.106.914.493,86	78.837.524.872,00
Penyisihan Piutang Lainnya		400.041.986,78	429.523.104,13
Piutang Lainnya Netto		79.706.872.507,08	78.408.001.767,87

Tabel 5.399 Rincian Piutang Lainnya dan penyisihan per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Penyisihan Piutang Lainnya	Piutang Lainnya Netto
1	Piutang Jamkesda Kota, Piutang Pasien Dalam Perawatan, Piutang TGR, Piutang Pasien Umum, BPJS dan Piutang Lain-lain (RSUDAM)	55.285.619.596,86	276.428.097,98	55.009.191.498,88
2	Piutang Jasa Pembinaan Dana Bergulir	-	-	-
3	Piutang Pasien Jaminan dan Non-Jaminan (RSJ)	1.399.550.472,00	6.997.751,92	1.392.552.720,08
4	Lebih setor pajak	98.517.049,00	-	98.517.049,00
5	Piutang Transfer Bagi Hasil Pemerintah Pusat	19.498.605.202,00	97.493.026,01	19.401.112.175,99
6	Piutang Trf Bantuan Keuangan Kab Lampura	3.824.622.174,00	19.123.110,87	3.805.499.063,13
Jumlah		80.106.914.493,86	400.041.986,78	79.706.872.507,08

Saldo Piutang Lainnya (*Netto*) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp79.706.872.507,08 dan Rp78.408.001.767,87. Rincian lebih lanjut Piutang Lainnya dijelaskan sebagai berikut:

a) Piutang Lainnya RSAM

Piutang Lainnya pada RSAM merupakan piutang retribusi yang berasal dari pasien tidak mampu, Jamkesmasda, Diklat, BPJS, TGR, dan Askes Gakin per 31 Desember 2021 setelah dilakukan penyisihan adalah sebesar Rp55.285.619.596,86 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.400 Rincian Piutang Lainnya RSAM per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Piutang Jamkesda Kota	7.498.541.116,00	7.302.775.792,00
2	Piutang Pasien Dalam Perawatan	2.163.867.543,00	1.752.813.087,00
3	Piutang TGR		7.941.143.422,00
4	Piutang Pasien Umum	33.096.900,00	260.352.583,00
5	Diklat		-
6	BPJS	36.679.097.800,00	26.260.427.919,00
7	Piutang lain lain	8.911.016.237,86	2.383.217.673,00
	Jumlah	55.285.619.596,86	45.900.730.476,00
	Penyisihan Piutang Lainnya	276.428.097,98	162.593.009,17
	Piutang Lainnya Netto	55.009.191.498,88	45.738.137.466,83

Kas tekor RSUDAM sebesar Rp9.214.634.012,00 setelah dikurangi koreksi sebesar Rp222.512.411 dan yang telah disetor pada tahun 2020 Rp1.496.003.000 dan pada tahun 2021 Rp1.535.358.390,14 (terdapat kelebihan setor sebesar Rp4.428.043,86) sehingga sisa saldo sebesar Rp6.183.272.621,86

b) Piutang Jasa Pembinaan Dana Bergulir

Piutang Jasa Pembinaan Dana Bergulir merupakan piutang yang diharapkan akan diterima pada dinas yang mengelola dana bergulir dari tahun 2003 sampai 2021. Sedangkan nilai piutang atas jasa dana bergulir *netto* per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.401 Daftar Piutang Jasa Pembinaan Dana Bergulir per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	SKPD	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Dinas Koperasi	-	146.237.000,00
2	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	-	-
	Jumlah Piutang Jasa Pembinaan Dana Bergulir (Bruto)	-	146.237.000,00
	Penyisihan Piutang Jasa Pembinaan Dana Bergulir	-	36.559.250,00
	Piutang Jasa Pembinaan Dana Bergulir (Netto)	-	109.677.750,00

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 900/2276/III.12/2013 tanggal 28 Agustus 2013 perihal persetujuan penggabungan/penyerahan Aset Dana Bergulir telah dilakukan penggabungan pengelolaan BLUD Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Piutang jasa dana bergulir

pada UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM berasal dari tunggakan pembayaran jasa pinjaman atas penyaluran dana bergulir di 15 kabupaten/kota dari tahun 2003 s.d. 2019. Besarnya jasa pembinaan terhadap dana bergulir pada Dinas Koperasi dan UMKM adalah sebesar 6% per tahun dari nilai dana yang disalurkan.

c) Piutang Pasien Jaminan dan Non-Jaminan pada RSJ Daerah

Pencatatan piutang pasien jaminan dan non jaminan pada RSJ dilakukan sejak penerapan PPK-BLUD tanggal 5 April 2014. Piutang ini merupakan klaim atau hak yang dimiliki RSJD Provinsi Lampung yang diperoleh dari pelayanan terhadap pasien jaminan/BPJS termasuk pasien jamkesda yang belum terealisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 setelah penyisihan sebesar Rp1.392.552.720,08 Rincian Piutang pasien jaminan dan non jaminan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.402 Daftar Piutang Pasien Jaminan dan Non Jaminan pada RSJD per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Piutang	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	BPJS dalam Program JKN	959.388.372,00	754.740.438,00
2	Pemkot Kota Balam dalam Program Jamkesda	367.368.000,00	247.824.700,00
3	Kemenkes dalam Program Rehabilitasi 100 ribu Pecandu Narkoba	72.794.100,00	52.995.110,00
	Jumlah Piutang Pasien Jaminan dan Non Jaminan (Bruto)	1.399.550.472,00	1.055.560.248,00
	Penyisihan Piutang Pasien Jaminan dan Non Jaminan	6.997.751,92	5.277.601,24
	Jumlah Piutang Pasien Jaminan dan Non Jaminan (Netto)	1.392.552.720,08	1.050.282.646,76

d) Lebih Setor Pajak

Lebih setor pajak sebesar Rp98.517.049,00 terjadi pada tahun 2017. Lebih setor pajak disebabkan oleh adanya pengeluaran tiga SP2D yang potongan pajaknya telah dibayarkan, tetapi pengeluaran belanja dibatalkan (SP2D batal), satu SP2D dengan kelebihan bayar pajak dan Dinas Perhubungan yang salah menyetorkan pajak ke rekening kas umum daerah.

Tabel 5.403 Daftar Lebih Setor Pajak per 31 Desember 2021

No.	No SP2D	SKPD	Tanggal SP2D	Jumlah (Rp)	Ket
1	920/07879/SP2D-LS/VI.02/2017	Dinas Pengairan dan Pemukiman	29-12-2017	20.670.936,00	SP2D Batal
2	920/07893/SP2D-LS/VI.02/2017	Dinas Pengairan dan Pemukiman	29-12-2017	20.669.340,00	SP2D Batal
3	920/08372/SP2D-LS/VI.02/2017	Dinas Pengairan dan Pemukiman	29-12-2017	58.283.771,00	SP2D Batal
4	920/07999/SP2D-LS/VI.02/2017	Dinas Pekerjaan Umum dan PUPR	29-12-2017	2,00	Lebih setor pajak
5		Dinas Perhubungan		(1.107.000,00)	Salah Setor Pajak
	TOTAL		-	98.517.049,00	

e) Piutang Transfer Bagi Hasil Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Bagi Hasil Pemerintah Pusat adalah kurang salur dana bagi hasil pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2021 sebesar Rp19.401.112.175,99 (*netto*). Berdasarkan PMK Nomor 129/PMK.07/2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021 sebesar Rp19.498.605.202,00;

f) Piutang Transfer Bantuan Keuangan Kab Lampung Utara

Piutang Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten Lampung adalah kurang salur transfer bantuan keuangan pemerintah daerah ke Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 untuk bantuan ongkos transit daerah calon jemaah haji dari Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp3.805.499.063,13 (*netto*) yang terdiri dari:

Tabel 5.404 Daftar Kurang Salur Bantuan Keuangan

Tahun Anggaran	SK Gubernur	Nilai (Rp)
2017	SK Gubernur No. G/277/B.03/HK/2017 dan Surat Kementerian Agama Kanwil Provinsi Lampung No. B.1165/KW.08.4/3/Hj.00/09/2017	1.521.342.180,00
2018	SK Gubernur No. G/272/B.03/HK/2018 dan Surat Kementerian Agama Kanwil Provinsi Lampung No. B.1116/KW.08.4/1/Hj.00/08/2018	1.124.521.392,00
2019	SK Gubernur No. G/332/B.03/HK/2019 dan Surat Kementerian Agama Kanwil Provinsi Lampung No. B.1148/KW.08.4/3/Hj.00/08/2019	1.178.758.602,00
	Total	3.824.622.174,00
	Penyisihan Piutang	19.123.110,87
	Netto	3.805.499.063,13

1) Persediaan

Per 31 Desember 2021

(Rp)

98.328.768.939,63

Per 31 Desember 2020

(Rp)

147.070.372.055,77

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan masa manfaat 12 bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan tersebut terdiri atas persediaan barang habis pakai, persediaan bahan atau material, persediaan barang cetakan, dan hewan ternak. Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp98.328.768.939,63 dan Rp147.070.372.055,77. Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2021 terdiri dari:

Tabel 5.405 Saldo Persediaan per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	ATK	6.369.707.294,09
2	Beras	939.469.090,00
3	Obat	23.248.161.857,76
4	Bahan Makanan	1.887.361.001,67
5	Bahan Perlengkapan Lab.	945.058.365,00
6	Alkes	31.627.099.607,83
7	Bahan Bangunan, Listrik dan Kimia	2.200.678.191,00
8	Barang/Jasa (Hibah)	18.146.982.651,68
9	Reklas Aset BM	3.231.516.254,00
10	Persediaan Bahan Pakai Habis Bantuan Covid 19	9.732.734.626,60
	Jumlah	98.328.768.939,63

b. Investasi Jangka Panjang

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
571.054.436.311,69	487.396.970.917,00

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Menurut sifat penanaman investasinya, investasi jangka panjang dibagi menjadi dua yaitu investasi non permanen dan investasi permanen. Saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp571.054.436.311,69 dan Rp487.396.970.917,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.406 Daftar Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Investasi Non Permanen	8.134.873.715,52	8.968.848.651,01
2	Investasi Permanen	562.919.562.596,17	478.428.122.265,99
Jumlah		571.054.436.311,69	487.396.970.917,00

1) Investasi Non Permanen

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
8.134.873.715,52	8.968.848.651,01

Investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi tersebut berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Saldo Investasi non permanen per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp8.134.873.715,52 dan Rp8.968.848.651,01.

Investasi non permanen yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung berupa dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat. Sejak diberlakukannya penggabungan pengelolaan BLUD Bidang Pertanian melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 900/2276/III.12/2013 tanggal 28 Agustus 2013. Rincian dana bergulir per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.407 Daftar Investasi Non permanen Dana Bergulir
per 31 Desember 2021 dan 2020**

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Dinas Koperasi dan UMKM	5.619.314.647,81	6.443.868.651,01
2	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	2.515.559.067,71	2.524.980.000,00
Jumlah		8.134.873.715,52	8.968.848.651,01

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Lampung mengatur penatausahaan terhadap dana bergulir sesuai dengan waktu jatuh temponya (*aging schedule*) sehingga diketahui jumlah dana bergulir yang dapat ditagih, dana

bergulir yang memungkinkan dapat ditagih, dana bergulir yang diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang tidak dapat tertagih. Berdasarkan tabel di atas terjadi penurunan nilai investasi non permanen per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan kondisi per 31 Desember 2020. Penurunan tersebut dikarenakan semakin tingginya piutang yang diragukan dapat ditagih dan piutang yang tidak dapat ditagih:

Tabel 5.408 Mutasi Investasi Dana Bergulir per 31 Desember 2021

No.	Satker	Saldo Awal 2019 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2021 (Rp)
			Koreksi Tambah (Rp)	Koreksi Kurang (Rp)	
1	Dinas Koperasi dan UMKM	12.000.000.000,00	-	6.380.685.352,19	5.619.314.647,81
2	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	22.099.900.000,00	-	19.484.440.932,29	2.515.559.067,71
Jumlah		34.099.900.000,00	-	25.865.126.284,48	8.134.873.715,52

Nilai dana bergulir yang dicatat pada neraca Tahun 2021 adalah nilai investasi yang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah saldo awal dikurangi penyisihan yang terdiri dari nilai piutang dana bergulir yang dapat ditagih, dana bergulir yang memungkinkan dapat ditagih, dana bergulir yang diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang tidak dapat tertagih sebesar Rp25.865.126.284,48. Dana bergulir yang dapat ditagih diakui apabila batas waktu setelah jatuh tempo 0 s.d. 1 tahun dengan persentase penyisihan 25%. Dana bergulir yang memungkinkan dapat ditagih diakui apabila batas waktu setelah jatuh tempo antara lebih dari 1 tahun s.d. 2 tahun dengan persentase penyisihan 50%. Dana bergulir yang diragukan dapat ditagih diakui apabila batas waktu setelah jatuh tempo lebih dari 2 tahun s.d. 3 tahun dengan persentase penyisihan 75%. Dana bergulir yang tidak dapat ditagih diakui apabila batas waktu setelah jatuh tempo diatas 3 tahun dengan persentase penyisihan 100% Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) diperoleh dengan mengurangi nilai perolehan dengan penyisihan dana bergulir yang dapat ditagih (kualitas lancar) dan dana bergulir yang memungkinkan dapat ditagih (kualitas kurang lancar), dana bergulir yang diragukan dapat ditagih (kualitas ragu-ragu) dan dana bergulir tidak dapat ditagih (kualitas macet).

Dengan adanya proses penggabungan BLUD, maka seperti pada tabel di atas nilai investasi non permanen berupa dana bergulir berada pada dua satker pengelola BLUD yaitu Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

a) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung

Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung disalurkan melalui UPTD Perkuatan Modal KUMKM kepada LKM/UMKM dari Tahun 2003 sampai dengan 2019. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah terobosan untuk meningkatkan peran dan kontribusi KUMKM dalam pertumbuhan ekonomi daerah yang ditempuh melalui penguatan modal usaha daerah. Jumlah dana yang disalurkan lewat program dana bergulir melalui KUMKM atau yang dikenal dengan Dana Abadi UMKM PPK-BLUD per 31 Desember 2019 mencapai Rp60.960.500.000,00 yang disalurkan kepada 2.677 KUMKM di 15 kabupaten/kota dengan pencapaian

penyaluran per tahun sebagai berikut:

- 1) Tahun 2003 sebesar Rp4.550.000.000,00 kepada 232 KUMKM;
- 2) Tahun 2004 sebesar Rp3.015.000.000,00 kepada 160 KUMKM;
- 3) Tahun 2005 sebesar Rp2.962.500.000,00 kepada 182 KUMKM;
- 4) Tahun 2006 sebesar Rp4.225.000.000,00 kepada 233 KUMKM;
- 5) Tahun 2007 sebesar Rp742.500.000,00 kepada 38 KUMKM;
- 6) Tahun 2008 sebesar Rp3.205.000.000,00 kepada 147 KUMKM;
- 7) Tahun 2009 sebesar Rp3.840.000.000,00 kepada 186 KUMKM;
- 8) Tahun 2010 sebesar Rp3.384.000.000,00 kepada 153 KUMKM;
- 9) Tahun 2011 sebesar Rp3.972.500.000,00 kepada 181 KUMKM;
- 10) Tahun 2012 sebesar Rp4.461.500.000,00 kepada 170 KUMKM;
- 11) Tahun 2013 sebesar Rp2.885.000.000,00 kepada 128 KUMKM;
- 12) Tahun 2014 sebesar Rp4.987.500.000,00 kepada 196 KUMKM;
- 13) Tahun 2015 sebesar Rp3.855.000.000,00 kepada 146 KUMKM;
- 14) Tahun 2016 sebesar Rp4.210.000.000,00 kepada 134 KUMKM;
- 15) Tahun 2017 sebesar Rp4.105.000.000,00 kepada 158 KUMKM;
- 16) Tahun 2018 sebesar Rp4.020.000.000,00 kepada 150 KUMKM;
- 17) Tahun 2019 sebesar Rp2.540.000.000,00 kepada 83 KUMKM.

Dana bergulir KUMKM bersumber dari APBD murni Provinsi Lampung yaitu sebesar Rp12.000.000.000,00 yang disalurkan melalui beberapa tahapan yaitu TA 2003 sebesar Rp4.550.000.000,00, TA 2004 sebesar Rp5.450.000.000,00 dan TA 2006 sebesar Rp2.000.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2020 pengembalian terhadap pokok dari dana bergulir tersebut mencapai nilai sebesar Rp51.171.614.983,00. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp1.257.654.300,00 dibandingkan pengembalian atas pokok dana bergulir pada Tahun 2019 yang hanya mencapai Rp49.913.960.683,00. Hal tersebut menjadi indikasi yang cukup baik atas kinerja pengelolaan dana bergulir berupa KUMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung. Namun demikian terdapat kendala atau permasalahan yang ditemui terkait pengelolaan BLUD tersebut antara lain:

- 1) Lemahnya jaminan atas pinjaman KUMKM yang diberikan pada UPTD BLUD sehingga tidak dapat diproses secara hukum dikarenakan seluruh perjanjian masih bersifat di bawah tangan dan belum dapat diperlakukan sebagai akte autentik;
- 2) KUMKM yang belum memahami teknis penyetoran angsurannya pada UPTD BLUD;
- 3) Masih ada penerima KUMKM yang beranggapan bahwa dana pinjaman pada UPTD BLUD tidak wajib dikembalikan karena merupakan dana bantuan dari pemerintah;

- 4) Kurangnya sarana mobilitas dan anggaran operasional pada UPTD BLUD dalam rangka penagihan dan verifikasi lapangan yang mencakup 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Sampai dengan 31 Desember 2021 tunggakan terhadap pokok adalah sebesar Rp8.917.752.454,00 yang terdiri atas tunggakan terhadap pokok yang belum jatuh tempo yaitu pinjaman tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp3.066.193.000,00 dan tunggakan terhadap pokok yang sudah jatuh tempo pinjaman dari tahun 2003 s.d. 2017 sebesar Rp5.851.559.454,00. Dari hasil penatausahaan terhadap dana bergulir UMKM PPK-BLUD sebesar Rp12.000.000.000,00 sebagai investasi non permanen per 31 Desember 2021 diperoleh hasil penatausahaan terdiri atas penyisihan piutang sebesar Rp6.448.974.829,00 sehingga nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp5.619.314.647,81 (Rp12.000.000.000,00 – Rp6.380.685.352,19).

Tabel 5.408 Rincian Dana Bergulir Koperasi Tahun 2021

No	Kategori	Persentase Penyisihan	Nilai	Penyisihan	Sisa
1	Belum jatuh tempo	0%	0	0	
2	Dapat ditagih/lancar	25%	2.205.862.000,00	551.465.500,00	
3	Memungkinkan dapat ditagih/kurang lancar	50%	1.193.711.000,00	596.855.500,00	
4	Ditragukan dapat ditagih/ragu-ragu	75%	870.102.500,00	652.576.875,00	
5	Tidak dapat ditagih/macet	100%	4.579.787.477,19	4.579.787.477,19	
Jumlah			8.849.462.977,19	6.380.685.352,19	
	Kas		3.150.537.022,81		
	Koreksi angsuran				
	Total		12.000.000.000,00	6.380.685.352,19	5.619.314.647,81

Penjelasan atas koreksi angsuran UMKM yang belum terverifikasi sebesar Rp68.289.476,81 merupakan setoran dari peminjam yang menyetor via transfer di ATM, sehingga pada saat pengecekan dana yang masuk tidak terlihat siapa yang menyetor. Selain itu, juga terdapat peminjam yang membayar angsuran, namun menyuruh orang lain yang menyetor dan menggunakan nama penyetor bukan nama UMKM yang meminjam. Atas hal tersebut, saldo pembayaran mengurangi nilai pinjaman. Tetapi belum dikurangi di anama UMKM yang bersangkutan. Namun, pada saat pembayaran sudah lunas, UMKM membawa bukti setornya, dari bukti setor itu akan terlihat UMKM mana yang sudah membayar, tapi belum terverifikasi sebelumnya.

b) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

• Lembaga Pengelola

Pengelolaan Dana Bergulir pada UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian adalah unit kerja yang telah ditetapkan dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD; yang dalam hal ini UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian pada Dinas Ketahanan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung yang telah dibentuk dan ditetapkan sebagai PPK-BLUD. Untuk tahun 2020 pengelolaan Dana Bergulir yang dikelola UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian per 30 September 2019 dilikuidasi/dibubarkan berdasar Surat Menteri Dalam

Negeri RI Nomor 061/9101/SJ/ tanggal 11 Desember 2017 perihal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang menyatakan UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian tidak direkomendasikan. Maka per 30 September 2019 UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian tidak termasuk sebagai UPTD Provinsi Lampung.

Dasar pembentukan dan penetapan unit kerja UPTD PMUBP menerapkan PPK-BLUD adalah :

1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD pada Dinas Daerah Provinsi Lampung;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD pada Dinas Daerah Provinsi Lampung;
 3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pola Tata Kelola , Renstra, dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Daerah Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian;
 4. Peraturan Gubernur lampung Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Tarif Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perkuatan Modal Usaha Bidang pertanian Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
 5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/436/B.V/HK/2011 Tanggal 8 Juni 2011 Tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung sebagai Instansi Pemerintah Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
 6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Nomor : 821.1/602/KDS/2014 tentang Penunjukan Pelaksanaan Operasional Barang Milik Daerah Provinsi Lampung Pada Dinas Pertanian Tanaman Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 7. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 061/9101/SJ/ tanggal 11 Desember 2017 perihal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang menyatakan UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian tidak direkomendasikan.
 8. Disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nota Dinas Kepala BPKAD Provinsi Lampung Nomor 900/261/VI.02/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Permintaan Audit Dana Bergulir.
- **Penggabungan Aset Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)**
Proses penggabungan aset Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) pada SPKD lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, sebelum

dilikuidasi/dibubarkan per 30 September 2019, telah dilaksanakan berdasarkan beberapa tahapan telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Rapat Tanggal 5 Juli 2011 di Ruang Rapat Asisten Setda Provinsi Lampung Tentang Koordinasi Penataan BLUD lingkup sektor Pertanian kedalam UPTD BLUD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian;
2. Rapat Tanggal 18 Agustus 2011 di Ruang Rapat Asisten Setda Provinsi Lampung Tentang Tindak lanjut Koordinasi Penataan BLUD lingkup sektor Pertanian kedalam UPTD BLUD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian;
3. Tanggal 11 Oktober 2011 di Ruang Rapat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tentang Penggabungan BLUD Bidang Pertanian, Dinas Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan;
4. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 900/2276/III.12/2013 Tanggal 28 Agustus 2013 Perihal Persetujuan Penggabungan/Penyerahan Aset Dana Bergulir

• **Rekapitulasi Aset Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)**

Aset dana bergulir yang saat ini dikelola oleh BLUD Unit kerja UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung merupakan Aset gabungan dari beberapa SKPD lingkup pertanian yaitu :

1. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung;
2. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung;
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung; dan
4. Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Lampung.

Jumlah aset investasi non permanen (dana bergulir) yang telah digabungkan dari 4 SKPD tersebut diatas terdiri dari :

Tabel 5.409 Jumlah Aset Investasi Non Permanen

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	
	• Dana Bergulir APBD Tahun 2006	4.780.000.000.00
	• Dana Bergulir APBD Tahun 2007	8.380.650.000.00
	• Pernyataan Modal Tahun 2014	300.000.000.00
2	Dinas Perkebunan :	
	• Dana Bergulir APBD Tahun 2006	1.425.000.000.00
	• Dana Bergulir APBD Tahun 2007	4.345.300.000.00
3	Dinas Perikanan dan Kelautan:	
	• Dana Bergulir APBD Tahun 2007	1.145.000.000.00
4	Dinas Peternakan :	
	• Dana Bergulir APBD Tahun 2009	1.723.950.000.00
Jumlah		22.099.900.000.00

Dasar penggabungan aset tersebut diatas telah dituangkan dalam berita acara serah terima berita acara aset oleh masing-masing SKPD pengelola dana bergulir (Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan), dan telah disetujui oleh Gubernur Lampung c.q. Sekretaris Daerah Lampung.

- **Penyerahan Aset**

Aset yang akan digabung atau diserahterimakan kepada BLUD Dinas Pertanian adalah :

1. Aset Investasi Non Permanen yang dikelola oleh SKPD Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada BLUD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
2. Dokumen pendukung aset yang diserahkan.
3. Aset dana bergulir dipilah berdasarkan tingkat ketertagihannya (tertagih, diragukan tertagih dan tidak tertagih).
4. Aset kategori tidak tertagih dan diragukan tertagih masih menjadi tanggungjawab pihak yang menyerahkan sampai aset tersebut dapat ditagih dan diserahkan ke BLUD (termasuk bila aset tersebut akan dihibahkan).
5. Dalam rangka penanganan aset yang tidak tertagih (macet) akan diupayakan dilakukan penghibahan melalui pembentukan tim yang bertugas melakukan menginventarisasi dan menilai aset pasca dilakukan serah terima aset dana bergulir serta memberikan rekomendasi atas aset tersebut.

- **Perkembangan Aset Investasi Non Permanen**

Jumlah Aset Non Permanen yang dikelola BLUD Dinas Pertanian per Desember 2021 berjumlah Rp21.187.900.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana bergulir bersumber dari Dinas Perkebunan merupakan dana Perkuatan Modal Usaha kelompok (PMUK) kepada kelompok Tani/kelompok usaha dan lembaga mandiri yang mengakar dimasyarakat (LM-3) sebesar Rp1.425.000.000,00 pada Tahun 2006 dan sebesar Rp4.345.300.000,00 pada Tahun 2007. Atas penyaluran dana bergulir yang bersumber dari APBD tahun 2006 *tidak dikenakan bunga pinjaman, dan jangka waktu pinjaman dana maksimal 3 tahun dan tanggal jatuh tempo 2009.*

Dana bergulir dari APBD tahun 2007 wajib dikembalikan maksimal 4 tahun untuk PMUK penyambungan kopi dan rehap lada dengan jatuh tempo pengembalian dana bergulir tahun 2011, 7 tahun untuk pengembangan karet rakyat dengan jatuh tempo pengembalian dana bergulir tahun 2014 dan 5 tahun untuk UPHKOPI SEMI BASAH dengan jatuh tempo pengembalian dana bergulir tahun 2011 . Penerima PMUK dana bergulir tahun 2007 dikenakan jasa pembinaan dan

pengembangan kelompok 7% dari nilai bantuan yang diterima secara flat. Dana yang dikembalikan oleh anggota kelompok tani/kelompok usaha tidak disetorkan terlebih dahulu ke Dinas Perkebunan melainkan langsung digulirkan kembali oleh ketua kelompok tani/kelompok usaha kepada anggota yang lain.

Perkembangan dana bergulir yang bersumber dari dinas perkebunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 5.770.300.000,- (terdiri dari piutang tertagih sebesar Rp 0,-, Piutang Memungkinkan tertagih Rp. 0,-, Piutang diragukan tertagih sebesar Rp. 0,-, dan piutang tidak tertagih sebesar Rp. 5.770.300.000,-) (Piutang tidak tertagih Rp. 5.770.300.000) dari jumlah piutang tersebut per 31 Desember 2021 belum terdapat angsuran Pengembalian dari kelompok tani/kelompok usaha (0%).

Adapun permasalahan piutang dana bergulir sebagai berikut :

Perkembangan dan Permasalahan dana bergulir :

a) TA 2006

- (1) Dana bergulir TA 2006 tidak wajib dikembalikan tetapi hanya bergulir di kelompok.
- (2) Dana bergulir TA 2006 tidak ada agunan
- (3) Piutang sudah lewat jatuh tempo (tidak tertagih)

b) TA 2007

- (1) Dana bergulir TA 2007 jatuh tempo pada 2012, 2013, dan 2014
- (2) Dana bergulir tidak mungkin tertagih akibat tanaman kopi sebagian besar mati pada musim kemarau serta bibit ternak kambing mati
- (3) Kurang optimalnya monitoring dan pembinaan terhadap kelompok penerima bantuan pasca penyaluran.
- (4) Unit Pengolahan Hasil (UPH) kopi kurang berkembang.

2. Dana bergulir yang bersumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan dana bergulir yang disalurkan kepada kelompok nelayan dari APBD TA 2007 sebesar Rp1.145.000.000,00. Dana tersebut digulirkan kepada 23 kelompok pembudidaya ikan pada 9 kabupaten/kota. Dana ini disalurkan dengan jangka waktu pengembalian selama 2 tahun/4 kali musim tanam sejak disalurkan dana dan jatuh tempo pada tahun 2010 atas pinjaman dana, kelompok nelayan dikenakan jasa pembinaan sebesar 6 % per tahun. Sampai dengan 31 Desember 2020 telah ada pengembalian dana dari kelompok nelayan sebesar Rp 124.900.000,-. Dan pembayaran jasa pembinaan sebesar Rp. 6.525.000,-. Pengembalian dana tersebut berasal dari 6 kelompok sedangkan jasa pembinaan berasal dari 2 kelompok. Jadi terdapat jumlah tersisa nilai investasi pokok yang tidakterttagih atas 23 kelompok sebesar Rp. 1.020.100.000,-(Rp. 1.145.000.000- Rp. 124.900.000) dan sisa jasa pembinaan yang tidak tertagih sampai 30 Desember 2021 sebesar Rp. 62.175.000,00.

Adapun permasalahan dana bergulir sebagai berikut :

- a) Terjadinya bencana banjir yang menyerang kolam pembudidayaan ikan;
 - b) Kegagalan panen karena terjadi serangan hama penyakit;
 - c) Adanya dana pengembalian yang disetorkan oleh anggota pada ketua kelompok namun oleh ketua kelompok tidak disetorkan ke rekening BLUD;
 - d) Pinjaman telah jatuh tempo (kategori piutang tak tertagih).
3. Dana bergulir bidang Peternakan merupakan penyaluran dana bergulir dalam bentuk ternak sapi pada kelompok tani pada tahun 2009 sebesar Rp1.343.550.000,00 perguliran ternak sapi ini melalui 2 kegiatan yaitu kegiatan bimbingan teknis untuk pembibitan dan penggemukan sapi dan kegiatan demplot pengembangan sapi dan jagung. Untuk kegiatan penggemukan sapi, petani harus mengembalikan dana bergulir penggemukan sapi paling lambat 31 Desember 2010 atau sekurang-kurangnya peternak telah melakukan kerja sama penggemukan sapi sebanyak 3 kali periode penggemukan dengan pembagian petani mendapat sebesar 80 % dari penambahan berat badan setelah dikurangi biaya operasional, dari hasil penggemukan tersebut diperoleh sebagai berikut :
- a) **Periode 1 :**
 - Peternak mendapat pembagian Rp36.220.465,00
 - Pemerintah mendapat pembagian Rp274.927.160,00
 - b) **Periode 2 :**
 - Peternak mendapat pembagian Rp24.343.330,00
 - Pemerintah mendapat pembagian Rp296.728.870,00
 - c) **Periode 3 :**
 - Peternak mendapat pembagian Rp59.087.200,00
 - Pemerintah mendapat pembagian Rp311.735.390,00

Untuk sapi pembibitan sebanyak 10 ekor betina disebarkan kepada kelompok “BUDIDAYA” kelompok budidaya Karang Endah Terbanggi Besar Lampung Tengah kepada 20 penggaduuh untuk dikembangkan dengan perjanjian induk akan digulirkan ke anggota kelompok lain apabila sudah menghasilkan anak dan setelah 5 tahun induk akan dikembalikan ke pemerintah untuk saat ini jumlah ternak yang ada terdiri induk betina 20 ekor.

Sapi pejantan (pemacek) sebanyak 1 ekor ditempatkan di BIBD terbanggi besar Lampung tengah ternak pejantan ini berfungsi sebagai pemacek untuk diambil spermanya untuk dibuat semen beku untuk insinminasi buatan (kawin suntik).

Kegiatan ternak demplot pengembangan integrasi sapi dan jagung sebanyak 15 ekor jantan, dan 150 ekor betina disebarkan kepada 15 kelompok, dimana masing-masing kelompok menerima 1 ekor jantan dan 10 ekor betina yang disebarkan di 9 kabupaten/kota dalam perjanjian tiap kelompok berkewajiban mengembalikan 21 ekor anak

setelah 5 tahun (1 ekor induk mengembalikan 2 ekor anak, 1 ekor pejantan dan induk mengembalikan 3 ekor anak, jumlah dan keberadaan ternak sampai 31 Desember 2014 yaitu jumlah induk 140 ekor (jantan 13 ekor, betina 127 ekor), anak sejumlah 80 ekor (jantan 16 ekor, betina 64 ekor). Dari kegiatan ternak pembibitan penggemukan dan pemacek sebesar Rp557.400.000,00, yang masuk dalam inventasi non permanen adalah 40 ekor sapi bakalan sebesar Rp356.400.000,00 dan pemacek (jantan) 1 ekor di UPTD BIBD nilai awal sebesar Rp24.000.000,00. Sedangkan 20 ekor sapi betina sebesar Rp177.000.000,00 sudah dihibahkan ke kelompok.

Investasi atas 40 ekor sapi bakalan sebesar Rp356.400.000,00 telah dilakukan 3 kali periode penggemukan dimana pembagian keuntungan kepada pemerintah sebesar Rp311.735.390,00. Dari hasil pembagian pemerintah tersebut telah disetorkan ke kas daerah sebesar Rp311.735.390,00 sesuai bukti setor pada tanggal 7 Februari 2012. Jadi terdapat jumlah sisa nilai investasi (kemungkinan tertagih dan tidak tertagih) sebesar Rp1.343.550.000,00 ($Rp1.723.950.000,00 - Rp311.735.390,00 - Rp44.664.610,00 - 24.000.000,00$). Rincian sebagai berikut :

- a) Ternak Sapi Bakalan (jantan atau penggemukan) telah dilakukan penjualan dengan bagi hasil ke Pemerintah sebesar Rp311.735.390,00 (telah disetor ke Kas Daerah).
- b) Hasil Penjualan terdapat selisih kurang yang belum dikembalikan ke Pemerintah (terjadi kerugian) sebesar Rp44.664.610,00
- c) Persediaan sapi pemacek/pejantan sebesar Rp24.000.000,00

Dari dana yang digulirkan pada tahun 2009 ke 16 Poktan yang tersebar di 9 Kabupaten diwilayah Provinsi Lampung sebesar Rp. 1.343.550.000,00 terdapat pengembalian dana bergulir dari pokok ditahun 2014 yang terdiri dari 1 kelompok tani di Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 77.700.000,00 dan 3 kelompok di kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 177.000.000,00 . ($Rp. 77.700.000,00 + Rp. 177.000.000,00 = Rp. 254.770.000,00$) terdapat nilai investasi pokok yang tidak tertagih sebesar Rp. 1.088.780.000,00.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 pengembalian dana bergulir dari BLUD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung sebesar Rp. 254.770.000,00.

4. Dana bergulir yang bersumber dari Dinas Pertanian TPH menyalurkan dana bergulir kepada kelompok tani dan LUEP sejak tahun 2006. Dana yang disalurkan bersumber dari APBD Provinsi Lampung TA 2006 sebesar Rp4.780.000.000,00, APBD TA 2007 sebesar Rp8.380.650.000,00 dan Dana Penyertaan Modal Tahun 2014 sebesar Rp300.000.000,00.

Pada Tahun 2006 dana PMUK bergulir disalurkan kepada 96 kelompok tani di 42 desa pada 8 kabupaten/kota. Jangka Waktu Pengembalian selama 1 Tahun (12 Bulan) sejak tanggal transfer. Jatuh tempo pengembalian dana ini pada bulan Desember 2007.

Untuk Dana Bergulir pada Tahun 2006 sampai dengan September 2019 jumlah pengembalian dana oleh kelompok tani sebesar Rp2.699.400.000,00 (56,47%), sehingga terdapat tunggakan sebesar Rp2.080.600.000,00 (Rp4.780.000.000,00 - Rp2.699.400.000,00).

Tahun 2007 alokasi dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp8.380.650.000,00 diperuntukan pengadaan saprodi. Dana disalurkan kepada kelompok tani dan LUEP berjumlah 164 yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Jangka waktu pengembalian dana selama 1 tahun (12 bulan) sejak tanggal transfer jatuh tempo pengembalian dana ini pada bulan Desember 2008. Sampai dengan September 2019 dana yang telah dikembalikan oleh kelompok tani dan LUEP sebesar Rp1.498.150.000,00 (17,88%), sehingga terdapat tunggakan sebesar Rp6.882.500.000,00 (Rp8.380.650.000,00 – Rp1.498.150.000,00).

Sejak tahun 2008 pengelola dana PMUK telah menggulirkan kembali pengembalian dana (*revolving*) sebanyak 11 periode perguliran yaitu tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 dengan total perguliran sebesar Rp22.745.317.000,00 sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat pengembalian dana atas penyaluran angsuran pokok (*revolving fund*) sebesar Rp18.420.927.500,00 dengan Jangka waktu pengembalian dana selama 1 tahun (12 bulan) sejak tanggal transfer dana ke rekening kelompok tani.

Sampai dengan 31 Desember 2021 dana PMUK yang telah disalurkan seluruhnya (TA. 2006 sampai dengan 2020 sebesar Rp44.164.817.500,-(sudah termasuk Sub bidang Peternakan, Perikanan dan Perkebunan dengan total pengembalian angsuran Pokok sebesar Rp. 22.647.147.500,00 (51%), Angsuran jasa sebesar Rp. 1.834.178.250,00 . Untuk sisa pinjaman pokok dan jasa masing-masing (pokok Rp. 21.166.670,00 dan jasa Rp. 474.074.500,00) Jadi terdapat tunggakan angsuran dari hasil pengguliran TA. 2006 sampai dengan TA 2020 yang kemungkinan dapat tertagih sebesar Rp. 2.025.000.000,00, Memungkinkan tertagih sebesar Rp. 777.000.000,00, Diragukan untuk ditagih sebesar Rp. 153.000.000,00 dan tidak tertagih sebesar Rp. 18.211.670.000,00.

Keseluruhan dana bergulir yang dicatat sebagai investasi non permanen (dana bergulir) pada BLUD UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian TPH Provinsi Lampung per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 44.164.817.500,00 (terdiri dari Pertanian sebesar Rp. 35.905.967.500,00 Perkebunan sebesar Rp. 5.770.300.000,00, Perikanan dan kelautan sebesar Rp. 1.145.000.000,00, dan Peternakan sebesar Rp. 1.343.550.000,00.

Pengembalian terhadap pokok dana bergulir tersebut sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp. 23.490.477.500,00 (53%) dari batas akhir jatuh tempo TA. 2020, (terdiri dari Pertanian sebesar Rp872.000.000,00 Perkebunan sebesar Rp. 0,00, Perikanan dan

Kelautan sebesar Rp124.900.000,00, Peternakan dan Kesehatan hewan sebesar Rp254.770.000,00 sehingga terdapat tunggakan pokok sebesar Rp20.674.340.000,00 dan jasa sebesar Rp474.074.500,00

Tabel 5.410 Dana Bergulir Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

No	Kategori	Persentase Penyisihan	Nilai	Penyisihan	Sisa
1	Belum jatuh tempo	0%	0	0	
2	Dapat ditagih/lancar	25%	-	-	
3	Memungkinkan dapat ditagih/kurang lancar	50%	975.000.000,00	487.500.000,00	
4	Diragukan dapat ditagih/ragu-ragu	75%	385.000.000,00	288.750.000,00	
5	Tidak dapat ditagih/macet	100%	18.808.090.932,29	18.808.090.932,29	
Jumlah			20.168.090.932,29	19.584.340.932,29	
	Kas		1931809.068,00		
	Koreksi angsuran				
	Total		22.099.900.000,29	19.584.340.932,29	2.515.559.068,00

Penjelasan atas koreksi angsuran pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura yang belum terverifikasi sebesar Rp86.579.067,71 merupakan setoran KPKNL sebesar Rp33.402.685 dan sisanya sebesar Rp53.176.382,71 masih belum bias dijelaskan atas selisih tersebut.

2) Investasi Permanen

**Per 31 Desember 2021
(Rp)**

562.919.562.596,17

**Per 31 Desember 2020
(Rp)**

478.428.122.265,99

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung berupa penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. Investasi Permanen Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp562.919.562.596,17 dan Rp478.428.122.265,99. Adapun rincian Investasi Permanen Pemerintah Provinsi Lampung secara lengkap pada tabel berikut.

Tabel 5.411 Daftar Investasi Permanen Per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Investasi	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
I. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH			
1	PT Bank Lampung	528.745.380.224,76	434.313.693.573,34
2	PT Wahana Raharja	5.102.522.865,85	8.352.566.061,09
3	PT Lampung Jasa Utama	26.095.462.505,56	32.785.665.631,56
	Jumlah I	559.943.365.596,17	475.451.925.265,99
II. INVESTASI PERMANEN LAINNYA			
4	PT Sarana Lampung Ventura	1.074.211.000,00	1.074.211.000,00
5	Asuransi Bangun Askrida	500.000.000,00	500.000.000,00
6	PT Kawasan Industri Lampung	401.986.000,00	401.996.000,00
7	PT Riau Airlines	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Jumlah II	2.976.197.000,00	2.976.207.000,00
	Jumlah I+II	562.919.562.596,17	478.428.132.265,99

a) Penyertaan Modal Pemerintah

Per 31 Desember 2021
(Rp)

559.943.365.596,17

Per 31 Desember 2020
(Rp)

475.451.925.265,99

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp559.943.365.596,17 dan Rp475.451.925.265,99. Peningkatan penyertaan modal pada Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2021 berasal dari peningkatan penyertaan modal saham pada PT Bank Lampung, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.412 Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Investasi	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	PT Bank Lampung	528.745.380.224,76	434.313.693.573,34
2	PT Wahana Raharja	5.102.522.865,85	8.352.566.061,09
3	PT Lampung Jasa Utama	26.095.462.505,56	32.785.665.631,56
	Jumlah I	559.943.365.596,17	475.451.925.265,99

Atas pencatatan Penyertaan Modal Pemerintah Pemerintah Provinsi Lampung di atas secara lengkap dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

(1) Investasi Pemerintah Provinsi Lampung pada PT Bank Lampung

Berdasarkan laporan *Unaudited* yang disampaikan PT Bank Lampung (**Lampiran 4**) jumlah keseluruhan modal disetor per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp528.745.380.224,76. Jumlah tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi Lampung, 15 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Lampung serta direksi dan karyawan PT Bank Lampung. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah Lampung menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung, saham/modal pemerintah yang ada pada PT Bank Lampung ditetapkan sebesar Rp35.000.000.000,00 (Pasal 7 ayat 2 huruf a). Sedangkan sampai 31 Desember 2020 penyertaan modal Pemerintah Provinsi

Lampung pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung sesuai dengan sertifikat saham sudah mencapai Rp163.039.620.000,00. Dengan demikian persentase kepemilikan atas modal disetor yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2021 adalah sebesar 42,86%.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam SAP tentang metode penilaian investasi dijelaskan bahwa jika nilai kepemilikan atas penyertaan modal sebesar antara 20% sampai 50% atau jika kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan maka atas kepemilikan penyertaan modal tersebut menggunakan metode ekuitas dalam penilaiannya. Dari ketentuan tersebut, secara lebih lengkap dijelaskan pula bahwa dalam kondisi tertentu kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*.

Adapun ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain meliputi:

- Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Sebagai pihak yang melakukan penyertaan modal pada PT Bank Lampung, selain nilai kepemilikan atas penyertaan modal antara 20% sampai 50%. Pemerintah Provinsi Lampung juga memiliki peran yang cukup signifikan pada PT Bank Lampung selaku perusahaan *investee*, terutama dalam penentuan direktur utama dan pergantian kepengurusan pada PT Bank Lampung. Atas dasar tersebut, maka sejak Tahun 2011 penilaian investasi pada PT Bank Lampung menggunakan metode ekuitas. Dengan menggunakan metode ekuitas, penyertaan modal pada PT Bank Lampung dicatat sebesar investasi awal yaitu sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan (*equity*). Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh PT Bank Lampung Tahun 2021 *unaudited*, besarnya laba bersih yang diperoleh untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan besarnya dividen tunai PT Bank Lampung yang diberikan ke Pemerintah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 5.413 Daftar Investasi Bank Lampung per 31 Desember 2010 dan 2020

Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
Laba Bersih PT Bank Lampung	175.152.875.387,00	192.617.020.316,00
Deviden Tunai	33.261.046.724,08	29.729.274.051,14
Persentase Kepemilikan Modal Saham	42,86%	35,79%

Hasil perhitungan dengan menggunakan metode equity (*equity method*). atas persentase modal saham Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.414 Daftar Investasi Awal Bank Lampung per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
Investasi awal	434.313.693.573,34	368.100.795.957,57
Kepemilikan Tahun 2020 =35,79% (35,79% X Rp 192.617.020.316,00)		
Kepemilikan Tahun 2021 =42,86% (42,86% X Rp 175.152.875.387,00)	75.066.747.345,15	68.942.171.666,91
Deviden	(33.261.046.724,08)	(29.729.274.051,14)
Koreksi Terlalu Besar mencatat investasi awal	(6.374.013.969,65)	
Penyertaan Modal	59.000.000.000,00	27.000.000.000,00
Investasi akhir	528.745.380.224,76	434.313.693.573,34

Nilai Laba yang diperhitungkan Tahun 2021 yang tercatat di Laporan Keuangan tahun 2020 sebesar Rp68.942.171.666,91 (35,79% x Rp192.617.020.316,00) merupakan nilai Laba PT Bank Lampung sebelum audit. Nilai Laba yang diperhitungkan Tahun 2020 setelah audit sebesar Rp62.568.157.697,27 (35,79% x 174.808.710.125,00). Sehingga nilai laba yang diperhitungkan tahun 2020 terlalu besar sebesar Rp6.374.013.969,64 (Rp68.942.171.666,91 – Rp62.568.157.697,27) dan perlu dilakukan koreksi terhadap investasi awal Tahun 2020. Pada Tahun 2021 ada penambahan penyertaan modal sebesar Rp30.000.000.000,00 yang ditambah dengan penyertaan modal Tahun 2020 sebesar Rp29.000.000.000,00 yang baru disahkan RUPS PT. Bank Lampung di Tahun 2021, maka total penambahan penyertaan modal di Tahun 2021 sebesar Rp59.000.000.000,00.

Investasi Pemerintah Provinsi Lampung pada PT Wahana Raharja

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2011 pasal 9 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wahana Raharja menjadi Perseroan Terbatas Wahana Raharja dinyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada PT Wahana Raharja adalah seluruh hak dan kekayaan sebagaimana dimaksud yang tercatat dalam neraca keuangan (*audited*) pada saat perubahan bentuk badan hukum PD Wahana Raharja menjadi PT Wahana Raharja disampaikan untuk disahkan oleh DPRD sebagai modal dasar perseroan.

Perusahaan Daerah Wahana Raharja telah berubah menjadi PT Wahana Raharja melalui Akta Notaris Siti Agustina Sari, S.H., M.Kn. Nomor 166 tanggal 29 November 2013 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHV-03224.AH.01.02 Tahun 2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan Laporan Keuangan PT Wahana Raharja per 31 Desember 2019 (**Lampiran 5**) nilai modal disetor

Pemerintah Provinsi Lampung adalah sebesar Rp19.563.000.000,00 dari total modal disetor sebesar Rp19.558.000.000,00 dan tunai dari PT Wahana Raharja sebesar Rp35.000.000,00 dengan besarnya presentase kepemilikan tahun 2021 sebesar 99,97% maka jumlah nilai penyertaan modal per 31 Desember 2021 adalah sebesar:

Tabel 5.415 Nilai Penyertaan Modal per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Laba/Rugi Bersih	(2.540.308.382,00)	(1.507.190.668,67)
Dividen Tunai	-	-
Persentase Kepemilikan		
Modal Ditempatkan	19.563.000.000,00	19.563.000.000,00
Penyertaan Pemerintah Provinsi	19.558.000.000,00	19.558.000.000,00
%	99,97	99,97

Tabel 5.416 Nilai Penyertaan Modal per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Investasi Awal	8,352,566,061.09	10,123,070,740.05
Nilai Lab/Rugi yang diperhitungkan	(2,539,659,118.50)	(1,506,805,454.06)
Dividen yang diterima		
Koreksi kurang mencatat investasi awal	(710,384,076.74)	(263,699,224.90)
Tambahan Penyertaan Modal	-	-
Jumlah	5,102,522,865.85	8,352,566,061.09

Berdasarkan laporan keuangan PT Wahana Raharja per 31 Desember 2021 (*unaudited*) (**Lampiran 6**), PT Wahana Raharja mengalami kerugian yang mengurangi saldo investasi sebesar Rp2.540.308.382,00.

Nilai rugi yang diperhitungkan Tahun 2020 yang tercatat di Laporan Keuangan Tahun 2020 sebesar Rp1.506.805.454,06 (99,97% x Rp1.507.190.668,67). Merupakan nilai rugi PT. Wahana Raharja sebelum audit. Nilai rugi yang diperhitungkan Tahun 2020 setelah audit sebesar Rp2.217.189.530,80 (99,97% x Rp2.217.756.355,00). Sehingga nilai rugi yang diperhitungkan Tahun 2020 terlalu kecil sebesar Rp710.384.076,74 (Rp2.217.189.530,80 – Rp1.506.805.454,06) dan perlu dilakukan koreksi terhadap investasi awal Tahun 2021. Sehingga saldo akhir investasi permanen pada PT. Wahana Raharja per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.102.522.865,85.

(2) Investasi Pemerintah Provinsi Lampung pada PT Lampung Jasa Utama

Investasi permanen Pemerintah Provinsi Lampung pada PT Lampung Jasa Utama per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.417 Daftar Investasi PT Lampung Jasa Utama per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Laba/Rugi Bersih	(3.781.930.922,00)	(2.633.615.433,00)
Dividen Tunai	-	3.430.654,00
Persentase Kepemilikan	100,00%	100,00%
Modal Ditempatkan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
Penyertaan Pemerintah Provinsi	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
%	100,00	100,00

Tabel 5.418 Daftar Investasi PT Lampung Jasa Utama per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
Investasi Awal	32.785.665.631,56	35.422.657.094,56
Nilai Laba/Rugi yang diperhitungkan	(3.781.930.922,00)	(2.633.615.433,00)
Dividen	-	(3.430.654,00)
Koreksi terlalu besar mencatat investasi awal	(2.908.272.204,00)	54.624,00
Tambahan Penyertaan Modal	-	-
Saldo Akhir Penyertaan Modal	26.095.462.505,56	32.785.665.631,56

Berdasarkan laporan keuangan PT Lampung Jasa Utama per 31 Desember 2021 (*unaudited*) (**Lampiran 6**), PT Lampung Jasa Utama mengalami kerugian sebesar Rp.3.781.930.922,00 Pada Tahun 2021 PT Lampung Jasa Utama tidak membagikan Dividen.

Nilai Rugi yang diperhitungkan Tahun 2020 yang tercatat di Laporan Keuangan tahun 2020 sebesar Rp2.633.615.433,00 merupakan nilai Rugi PT Lampung Jasa Utama sebelum audit. Nilai Rugi yang diperhitungkan Tahun 2020 setelah audit sebesar Rp5.541.887.637,00. Sehingga nilai Rugi yang diperhitungkan Tahun 2020 terlalu kecil sebesar Rp2.908.272.204,00 (Rp5.541.887.637,00 - Rp2.633.615.433,00) dan perlu dilakukan koreksi terhadap investasi awal tahun 2021. Sehingga saldo akhir investasi permanen pada PT Lampung Jasa Utama per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp26.095.462.505,56.

b) Investasi Permanen Lainnya

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
2.976.197.000,00	2.976.197.000,00

Saldo Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp2.976.197.000,00 dan Rp2.976.197.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.419 Daftar Investasi Permanen Lainnya Per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Investasi	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	PT Sarana Lampung Ventura	1.074.211.000,00	1.074.211.000,00
2	Asuransi Bangun Askrida	500.000.000,00	500.000.000,00
3	PT Kawasan Industri Lampung	401.986.000,00	401.986.000,00
4	PT Riau Airlines	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Jumlah	2.976.197.000,00	2.976.197.000,00

Nilai Investasi Permanen Lainnya Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2021 tidak ada perubahan dibandingkan tahun 2020. Secara ringkas, mutasi penambahan dan pengurangan Investasi Permanen Tahun 2021, dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.420 Rekapitulasi Investasi Permanen per 31 Desember 2021

No.	Investasi (Rp)	Saldo Awal		Penambahan Investasi Permanen Th 2020	Pengurangan Investasi Permanen Th 2020	Saldo Akhir		Nilai Investasi hasil konfirmasi (Rp)
		Nilai (Rp)	Kepemilikan			Nilai (Rp)	Kepemilikan	
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah							
1	PT. Bank Lampung	434.313.693.573,340	42,86	134.066.747.345,15	39.635.060.693,720	528.745.380.224,765	35,79	528.745.380.224,77
2	PT. Wahana Raharja	8.352.566.061,090	99,97	0,00	3.250.043.195,240	5.102.522.865,850	99,97	5.102.522.865,85
3	PT. LJU	32.785.665.631,56	100,00	0,00	6.690.203.126,00	26.095.462.505,558	100,00	26.095.462.505,56
	Investasi Permanen Lainnya							
1	PT. Sarana Lampung Ventura	1.074.211.000,00	5,63	0,00	0,00	1.074.211.000,000		1.074.211.000,00
2	Asuransi Bangun As	500.000.000,000	0,13	0,00	0,00	500.000.000,000		500.000.000,00
3	PT Kawasan Industri	401.986.000,000	4,64	0,00	0,00	401.986.000,000		401.986.000,00
4	PT Riau Airlines	1.000.000.000,000		0,00	0,00	1.000.000.000,000		1.000.000.000,00
Jumlah		478.428.122.265,99		134.066.747.345,15	49.575.307.014,96	562.919.562.596,17		562.919.562.596,17

Data perhitungan Investasi Permanen, selalu mengalami koreksi dikarenakan laporan keuangan yang disampaikan oleh *Investee* pada saat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan Laporan *Unaudited*

b. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan) untuk digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Untuk diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi beberapa kriteria yaitu:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Nilai Aset Tetap Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2021 secara keseluruhan diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.421 Rincian Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Lampung TA 2021

ASET TETAP	SALDO 31 DES 2020	MUTASI 2021		SALDO 31 DES 2021
		PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
A. TANAH	2.242.116.753.568,03	56.239.157.982,00	77.926.855,00	2.298.277.984.695,03
B. PERALATAN DAN MESIN	2.092.241.141.623,76	202.304.002.806,87	6.084.562.749,00	2.288.460.581.681,63
C. GEDUNG DAN BANGUNAN	3.172.032.002.720,21	316.317.135.912,45	17.224.168.361,00	3.471.124.970.271,66
D. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	6.520.033.956.336,10	430.646.979.193,03	1.568.452.000,00	6.949.112.483.529,13
E. ASET TETAP LAINNYA	240.863.550.492,49	24.205.554.602,11	100.587.500,00	264.968.517.594,60
F. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	702.953.025.316,75	49.178.918.115,84	70.166.802.284,00	681.965.141.148,59
J U M L A H	14.970.240.430.057,34	1.078.891.748.612,30	95.222.499.749,00	15.953.909.678.920,64

Dengan penjelasan berupa:

- 1) Nilai Saldo Awal Aset Tetap TA 2021 sebesar Rp14.970.240.430.057,34.
- 2) Penambahan Aset Tetap selama TA 2021 sebesar Rp1.078.891.748.612,30 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.422 Rincian Penambahan Aset Tetap TA 2021

No.	Keterangan Perolehan	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal Intracountable	756.896.695.076,46
2	Hutang Pengadaan Aset	34.015.183.423,95
3	Belanja Barang Jasa Dikapitalisasi sebagai Aset	17.618.052.699,95
4	<i>Appraisal</i>	65.871.944.798,00
5	Hibah dari Pihak Lain	97.556.160.204,94
6	Reklasifikasi Aset	68.765.926.286,00
7	Temuan (Pencatatan Baru)	16,00
8	P3D Bidang Pendidikan dan Kehutanan TA 2021	29.601.643.709,00
9	Bertambah Akibat Lain-lain (Koreksi Pencatatan)	8.566.142.398,00
	Jumlah	1.078.891.748.612,30

- 3) Pengurangan Aset Tetap selama TA 2021 sebesar Rp95.222.499.749,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.423 Rincian Pengurangan Aset Tetap TA 2021

Keterangan	Nilai (Rp)
Hibah ke Pihak Lain	401.000.000,00
Penghapusan TA 2021	7.435.745.519,00
Reklasifikasi Aset	77.910.007.207,00
Berkurang Akibat Lain-Lain	
- Double Catat	12.000.000,00
- Koreksi Kurang P3D	118.851.225,00
- Koreksi Pencatatan	9.344.895.798,00
Jumlah	95.222.499.749,00

Penjelasan atas Nilai Aset Tetap berdasarkan data pada tabel di atas sebagai berikut:

1) Nilai Saldo Neraca Aset Tetap Per 31 Desember 2020

Saldo Neraca Aset Tetap Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp14.970.240.430.057,34 dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp4.788.134.194.539,68 sehingga nilai buku per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.182.106.235.517,66 (*audited*).

2) Penambahan Aset Tetap selama TA 2021

a) Belanja Modal TA 2021

Nilai Belanja Modal TA 2021 pada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung adalah sebesar Rp849.692.114.832,21 atau mengalami kenaikan sebesar Rp97.163.904.612,32 atau 12,91% dari Total Belanja Modal TA 2020 sebesar Rp752.528.210.219,89 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.424 Nilai Realisasi Belanja Modal Per OPD TA 2021

NO.	Nama Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	212.071.291.337,23
2	Dinas Kesehatan	9.800.704.079,87
3	RSUD dr. H. Abdul Moeloek	82.461.638.867,38
4	Rumah Sakit Jiwa	4.305.531.977,00
5	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	347.420.105.563,00
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	16.720.276.781,00
7	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	45.295.582.019,73
8	Badan Penanggulangan Bencana	21.610.519.468,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	78.186.000,00
10	Dinas Sosial	653.272.220,00
11	Dinas Tenaga Kerja	147.702.500,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	650.999.600,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	4.460.363.071,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.093.397.000,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	921.985.434,00
16	Dinas Perhubungan	1.176.626.175,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	5.083.491.388,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	499.138.000,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	505.203.200,00
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	20.017.942.049,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	555.718.000,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.002.237.011,00
23	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	414.409.000,00
24	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	18.153.328.350,00
25	Dinas Perkebunan	2.742.840.000,00
26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.662.191.400,00
27	Dinas Kehutanan	1.355.120.221,00
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	203.673.300,00
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.060.445.800,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	2.759.376.319,00
31	Badan Pendapatan Daerah	5.484.100.631,00
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.073.671.180,00
33	Badan Kepegawaian Daerah	417.094.000,00
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	308.554.000,00
35	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	77.402.500,00
36	Badan Penghubung	1.986.824.200,00
37	Sekretariat Daerah Provinsi	
	- Biro Umum	17.536.042.590,00
	- Biro Administrasi Pimpinan	115.094.000,00
	- Biro Kesejahteraan Rakyat	241.960.200,00
	- Biro Pengadaan Barang dan Jasa	585.434.000,00
	- Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	148.478.000,00
	- Biro Hukum	236.128.500,00
	- Biro Organisasi	148.611.800,00
	- Biro Administrasi Pembangunan	132.358.400,00
	- Biro Perekonomian	228.440.000,00
38	Sekretariat DPRD	6.554.033.700,00
39	Inspektorat Provinsi	385.436.000,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	149.155.000,00
	Jumlah	849.692.114.832,21

Berdasarkan data hasil Rekonsiliasi Aset Tetap oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, diperoleh nilai belanja modal yang dapat diakui sebagai aset tetap adalah sebesar Rp756.896.695.076,46 dengan Rincian sebagai berikut :

Tabel 5.425 Realisasi Belanja Modal yang diakui sebagai aset per 31 desember 2021

NO.	Nama Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	208.556.970.944,89
2	Dinas Kesehatan	7.987.602.833,87
3	RSUD dr. H. Abdul Moeloek	80.333.933.472,38
4	Rumah Sakit Jiwa	3.869.953.855,00
5	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	313.284.787.848,32
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	14.829.398.309,00
7	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	34.232.069.093,00
8	Badan Penanggulangan Bencana	1.132.732.607,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	78.186.000,00
10	Dinas Sosial	596.800.198,00
11	Dinas Tenaga Kerja	147.702.500,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	628.729.600,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	4.460.363.071,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	662.532.000,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	836.343.170,00
16	Dinas Perhubungan	913.570.575,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	4.875.492.941,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	499.138.000,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	390.285.200,00
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	16.783.126.999,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	476.318.000,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.842.592.011,00
23	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	355.592.000,00
24	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	18.024.789.450,00
25	Dinas Perkebunan	2.698.690.924,00
26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.645.566.400,00
27	Dinas Kehutanan	1.189.540.064,00
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	203.673.300,00
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	971.528.800,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	2.492.698.319,00
31	Badan Pendapatan Daerah	5.173.674.571,00
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.263.101.180,00
33	Badan Kepegawaian Daerah	246.594.000,00
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	275.700.000,00
35	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	77.402.500,00
36	Badan Penghubung	1.986.824.200,00
37	Sekretariat Daerah Provinsi	
	- Biro Umum	9.095.599.040,00
	- Biro Administrasi Pimpinan	115.094.000,00
	- Biro Kesejahteraan Rakyat	241.960.200,00
	- Biro Pengadaan Barang dan Jasa	584.338.000,00
	- Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	148.478.000,00
	- Biro Hukum	236.128.500,00
	- Biro Organisasi	148.611.800,00
	- Biro Administrasi Pembangunan	120.598.400,00
	- Biro Perekonomian	178.440.000,00
38	Sekretariat DPRD	4.468.851.200,00
39	Inspektorat Provinsi	385.436.000,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	149.155.000,00
	Jumlah	756.896.695.076,46

Terdapat perbedaan hasil rekonsiliasi aset tetap terhadap LRA Belanja Modal Pemerintah Provinsi Lampung, sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 5.426 Penjelasan Selisih Belanja Modal pada LRA dengan Hasil Rekonsiliasi Aset

	Tanah	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	JU	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
LRA	127.714.760,00	185.593.022.021,90	240.978.511.324,58	390.107.373.947,73	32.846.817.778,00	849.653.439.832,21
PENAMBAHAN ASET TETAP DARI BELANJA MODAL (HASIL REKON ASET)	-	166.798.243.372,87	169.996.377.010,78	352.576.560.881,43	23.279.476.113,00	712.650.657.378,08
						-
SELISIH	(127.714.760,00)	(18.794.778.649,03)	(70.982.134.313,80)	(37.530.813.066,30)	(9.567.341.665,00)	(137.002.782.454,13)
						-
KETERANGAN SELISIH						-
TIDAK MENJADI ASET TETAP	(127.714.760,00)	(22.833.882.260,03)	(14.583.201.522,31)	(51.927.600.987,41)	(3.303.545.226,00)	(92.775.944.755,75)
KIB F	-	(31.545.711,00)	(44.156.792.987,38)	(57.699.000,00)		(44.246.037.698,38)
REKLAS BIDANG BARANG (BERKURANG)	-	(4.379.128.619,00)	(13.897.946.963,11)	(178.410.500,00)	(7.486.612.721,00)	(25.942.098.803,11)
REKLAS BIDANG BARANG (BERTAMBAH)	-	8.449.777.941,00	1.655.807.159,00	14.632.897.421,11	1.222.816.282,00	25.961.298.803,11
						-
	(127.714.760,00)	(18.794.778.649,03)	(70.982.134.313,80)	(37.530.813.066,30)	(9.567.341.665,00)	(137.002.782.454,13)

Pada tabel di atas, terdapat realisasi belanja modal yang tidak dapat diakui sebagai aset tetap sebesar Rp92.795.419.755,75 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.427 Hasil Rekonsiliasi Belanja Modal TA 2021

No	Kualifikasi	Nilai (Rp)
1	Aset Ekstrakomtabel	1.543.214.420,00
2	Aset Tidak Berwujud	2.536.916.433,00
3	Hibah Kepada Pihak Lain	33.261.915.928,68
4	Pembayaran Hutang Retensi TA 2020	27.439.899.011,07
5	Tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	
	- Barang Habis Pakai	3.451.489.447,00
	- Beban Lain-lain	24.561.984.516,00
	Jumlah	92.795.419.755,75

Selain Belanja Modal sebagaimana tersebut di atas, terdapat penambahan Nilai Aset Tetap yang berasal dari:

b) Retensi dan Utang Pengadaan Aset Tetap

Retensi merupakan anggaran pemeliharaan aset yang akan dibayarkan melalui belanja pada tahun berikutnya. Retensi TA 2021 dan utang pengadaan aset tetap yang akan dibayarkan pada TA 2022 sudah dikapitalisasi/diakui sebagai aset pada tahun 2021 adalah sebesar Rp34.015.183.423,95 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.428 Daftar Retensi TA 2021

No.	Nama Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	237.156.522,00
2	RSUD dr. H. Abdul Moeloek	2.984.972.400,46
3	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	24.561.498.585,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	732.867.235,00
5	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	4.746.497.089,00
6	Badan Penanggulangan Bencana	22.805.800,00
7	Dinas Pemuda dan Olahraga	658.670.609,49
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	51.970.996,00
9	Dinas Kehutanan	18.744.187,00
	Jumlah	34.015.183.423,95

c) Belanja Operasional yang Dikapitalisasi sebagai Aset

Belanja Operasional TA 2021 yang menambah nilai aset tetap adalah sebesar Rp17.618.052.699,95 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.429 Penambahan Aset Tetap dari Belanja Barang dan Jasa TA 2021

No.	Nama Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.344.730.497,95
2	Dinas Kesehatan	2.342.138.494,00
3	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	223.806.000,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	1.134.316.900,00
5	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	2.712.035.661,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	21.230.000,00
7	Dinas Sosial	115.000.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20.000.000,00
9	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	140.544.750,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	56.500.000,00
11	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.464.265.723,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	108.547.750,00
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	83.904.000,00
14	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	395.619.209,00
15	Dinas Perkebunan	317.041.300,00
16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	444.971.500,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	308.756.000,00
18	Badan Pendapatan Daerah	1.384.644.915,00
Jumlah		17.618.052.699,95

d) Penilaian Aset (Appraisal)

Hasil Penilaian terhadap aset tetap milik Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp65.871.944.798,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.430 Hasil Penilaian (appraisal) terhadap aset tetap TA 2021

No.	Nama Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.434.929.844,00
2	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	262.099.992,00
3	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	52.454.299.989,00
4	Sekretariat Daerah - Biro Umum	430.999.999,00
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	212.999.999,00
6	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	584.099.976,00
7	Dinas Pemuda dan Olahraga	68.799.999,00
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.423.715.000,00
Jumlah		65.871.944.798,00

(f) Hibah dari Pihak Lain

Aset tetap yang diperoleh dari hibah dari pihak lain kepada Pemerintah Provinsi Lampung pada TA 2021 adalah sebesar Rp97.556.160.204,94 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.431 Aset tetap yang diperoleh dari hibah pada TA 2021

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Hibah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	26.861.458.957,00
2	Hibah Kementerian Pendidikan	26.992.229.785,11
3	Hibah Kementerian Pertanian	131.883.600,00
4	Hibah Kementerian Tenaga Kerja	4.946.221.692,00
5	Hibah Kementerian Perhubungan	2.353.360.000,00
6	Hibah Kementerian Kehutanan	103.215.000,00
7	Hibah Komite Sekolah	4.974.277.000,00
8	Hibah dari PT Bukit Asam	5.435.550.000,00
9	Hibah SMKN PP SEMBAWA	999.986.000,00
10	Hibah dari Kab. Pringsewu	4.798.580.887,00
11	Hibah dari Kab. Lampung Timur	2.741.300.000,00
12	Hibah dari Kab. Lampung Tengah	3.998.635.482,83
13	Hibah dari Kota Metro	3.490.884.586,00
14	Hibah dari Kab Way Kanan	405.284.015,00
15	Hibah dari kab. Lampung Barat	3.263.444.000,00
16	Hibah dari Kab. Tanggamus	6.059.849.200,00
Jumlah		97.556.160.204,94

Selain data aset yang berasal dari hibah pada tabel di atas, terdapat aset tetap BMN yang belum diakumulasikan ke Nilai Neraca Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung dikarenakan belum dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yaitu senilai Rp279.554.000,00 pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung dan senilai Rp Rp9.674.627.363,82 pada Rumah Sakit Umum dr. H. Abdul Moeloek.

(h) Reklasifikasi Aset Bertambah

Reklasifikasi aset bertambah merupakan koreksi pencatatan terhadap aset tetap akibat koreksi kualifikasi aset baik dari ekstrakountable ke intracountable atau dari Aset Lain – lain ke intracountable maupun reklas antar KIB Intracountable. Pada Tahun 2021 terdapat reklasifikasi aset bertambah sebesar Rp68.765.926.286,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.432 Reklasifikasi dari Aset KDP ke Aset Gedung dan Bangunan TA 2021

No.	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger - MCK	97.372.000,00
2	RSUD dr. H. Abdul Moeloek - Gedung Neurologi	427.177.000,00
3	RSUD dr. H. Abdul Moeloek - Gedung Non Bedah	61.100.263.300,00
4	SMK Pertanian Pembangunan - Gedung B	2.875.639.756,00
5	Dinas Pemuda dan Olahraga - Gd. Lapangan Tembak	4.265.474.228,00
6	Biro Umum - Pick Up Double Cabin	1,00
7	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Jeep	1,00
	Jumlah	68.765.926.286,00

(i) Temuan Baru

Terdapat penambahan aset tetap senilai Rp.16,00 yang berasal dari pencatatan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung yang belum tercatat pada Buku Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.433 Tanah, Gedung dan bangunan yang belum tercatat pada TA 2021

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang - Design kemasan Pangan Olahan	1,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Tanah Makan Raden Inten II	1,00
3	Inspektorat Provinsi - SELASAR	1,00
4	Inspektorat Provinsi - PAGAR	1,00
5	Rumah Sakit Jiwa - Gedung IPSRS	1,00
6	Rumah Sakit Jiwa - Kamar Jenazah RSJD	1,00
7	Rumah Sakit Jiwa - Bangunan Incenerator	1,00
8	Rumah Sakit Jiwa - Gedung Fisioterapi	1,00
9	Sekretariat Dinas Kesehatan - Pos Jaga	1,00
10	Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga - Kantin Kolam Renang Pahoman	1,00
11	Sekretariat Dinas Tenaga Kerja - Bangunan Pagar	1,00
12	SMAN 1 PADANG CERMIN - Tanah SMAN 1 Padan Cermin	1,00
13	SMKN 1 NEGERI BESAR - Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1,00
14	UPTD PSDA Wil I - Tanah Rumah Penjaga Pintu Air	2,00
15	USB SMAN 2 Rebang Tangkas - Tanah SMAN 2 Rebang Tangkas	1,00
		16,00

(j) P3D

Pada TA 2021 terdapat penambahan aset yang berasal dari pelimpahan P3D senilai Rp29.601.643.709,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Pelimpahan Sarana dan Prasarana (P3D) Pelabuhan Perikanan Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ke Pemerintah Provinsi Lampung dengan nilai perolehan sebesar Rp24.028.653.006,00
- Pelimpahan Sarana dan Prasarana (P3D) Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Penangkaran Penyu di Jl. Lintas Barat Sumatera Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat dengan nilai perolehan aset intra sebesar Rp1.762.879.000,00
- Pelimpahan Sarana dan Prasarana (P3D) bidang pendidikan menengah TA 2021 dari Kota Metro ke Pemerintah Provinsi Lampung dengan penambahan nilai perolehan aset sebesar Rp3.810.111.703,00

(k) Bertambah Akibat Lainnya

Terdapat penambahan aset tetap dari bertambah akibat lainnya sebesar Rp8.566.142.398,00 pada TA 2021 dikarenakan adanya koreksi pencatatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.434 Bertambah Akibat Lainnya TA 2021

Keterangan	Nilai (Rp)
Koreksi Pencatatan Bertambah	
- UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau	60.000.000,00
- Dinas Pemuda dan Olahraga	2.522.154.000,00
- Rumah Sakit Jiwa	3.483.988.398,00
- SMAN 1 Terusan Nunyai (Lampung Tengah)	2.500.000.000,00
Jumlah	8.566.142.398,00

3) Pengurangan Aset Tetap selama TA 2021

Terdapat pengurangan aset senilai Rp95.222.499.749,00 dengan Rincian pengurangan aset tetap berupa:

(a) Hibah ke Pihak Lain

Terdapat pengurangan aset tetap senilai Rp401.000.000,00 berupa hibah kepada pihak lain, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.435 Hibah ke Pihak Lain TA 2021

No.	UPB Pemberi Hibah	Penerima Hibah	Nilai (Rp)
1	UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau	Sekolah Usaha Perikanan Menengah	5.000.000,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Desa Tanjung Agung Kab Pesawaran	198.000.000,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Desa Negara Batin Kab Lampung Timur	198.000.000,00
	Jumlah		401.000.000,00

(b) Penghapusan Aset Tetap TA 2021

Terdapat penghapusan aset tetap senilai Rp7.435.745.519,00 pada TA. 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.436 Penghapusan Aset Tetap TA 2021

No.	Nama UPB	Nilai (Rp)
1	SMAN 3 Bandar Lampung	147.438.000,00
2	SMKN 2 Bandar Lampung	80.000.000,00
3	SMKN 8 Bandar Lampung	79.207.000,00
4	SMAN 1 NATAR (Lampung Selatan)	44.823.750,00
5	SMAN 1 TANJUNG SARI (Lampung Selatan)	28.805.000,00
6	SMKN 1 Talang Padang (Tanggamus)	269.155.000,00
7	SMKN 1 Metro	77.464.800,00
8	SMAN 1 Bandar Sribawono (Lampung Timur)	64.163.000,00
9	SMAN 1 Labuhan Ratu (Lampung Timur)	326.164.939,00
10	SMAN 1 Sekampung Udik (Lampung Timur)	398.711.625,00
11	SMAN 1 Terusan Nunyai (Lampung Tengah)	2.890.000.000,00
12	SMAN 1 Trimurjo (Lampung Tengah)	149.250.000,00
13	RSUD dr. H. Abdul Moeloek	34.844.000,00
14	UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Mardi Guna	106.799.000,00
15	Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	111.880.000,00
16	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I (Bandar Lampung)	814.640.550,00
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	314.150.855,00
18	Sekretariat Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	1.498.248.000,00
	Jumlah	7.435.745.519,00

(c) Berkurang Akibat Reklasifikasi Aset

Reklasifikasi aset berkurang merupakan koreksi pencatatan terhadap aset tetap akibat koreksi kualifikasi aset baik dari intracountable ke ekstracountable atau dari intracountable ke Aset Lain – lain maupun reklas antar KIB Intracountable. Pada Tahun 2021 terdapat reklasifikasi aset berkurang sebesar Rp77.910.007.207,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.437 Berkurang Akibat Reklasifikasi Aset TA.2021

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	RSUD dr. H. Abdul Moeloek	64.773.414.338,00
2	UPTD Balai Pembibitan Ternak Kambing Saburai	4.955.000,00
3	SMKN 2 Bandar Lampung	498.300.000,00
4	SMKN 8 Bandar Lampung	131.500.000,00
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	499.347.400,00
6	Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	229.656.600,00
7	Inspektorat Provinsi	396.833.572,00
8	Sekretariat Badan Pendapatan Daerah	3.071.374.166,00
9	SMAN 1 Way Jepara (Lampung Timur)	304.804.847,00
10	SMKN 1 SUKOHARJO (Pringsewu)	197.402.300,00
11	SMAN 1 Bandar Sribawono (Lampung Timur)	18.730.000,00
12	Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga	4.501.946.228,00
13	Rumah Sakit Jiwa	277.231.000,00
14	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Way Pisang	31.500.000,00
15	UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger	97.372.000,00
16	SMK Pertanian Pembangunan	2.875.639.756,00
	Jumlah	77.910.007.207,00

(d) Berkurang Akibat Lainnya

Terdapat pengurangan aset tetap dari berkurang akibat lainnya sebesar Rp9.475.747.023,00 pada TA 2021 dikarenakan adanya koreksi pencatatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.438 Berkurang Akibat Lainnya TA 2021

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Double Catat Tanah Dinas Kehutanan	12.000.000,00
2	Koreksi Pencatatan Aset P3D	118.851.225,00
3	Koreksi Pencatatan Aset:	
	- SMAN 1 PAGELARAN (Pringsewu)	173.250.000,00
	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.499.806.400,00
	- Sekretariat Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	665.697.000,00
	- Rumah Sakit Jiwa	3.483.988.398,00
	- Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga	2.522.154.000,00
	Jumlah	9.475.747.023,00

Mutasi per jenis Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 53 Tahun 2014 yang telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 101 Tahun 2016, sejak Tahun 2015 dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung, Nilai Aset Intrakomtabel berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Renovasi sudah disusutkan berdasarkan masa manfaat yang telah ditentukan, dan nilai aset berupa Tanah, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak disusutkan.

Nilai Aset Tetap Intrakomtabel Pemerintah Provinsi Lampung TA 2021 sebesar Rp14.970.240.430.057,30 merupakan hasil penambahan dan pengurangan yang terjadi pada tahun 2021 terhadap nilai Saldo Awal per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.764.592.008.041,70. Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap yang terjadi pada TA 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.298.277.984.695,03 atau mengalami kenaikan/bertambah sebesar Rp56.161.231.127,00 atau 2,44% dari nilai per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.242.116.753.568,03 (*audited*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.439 Rincian Nilai Tanah per 31 Desember 2021

KIB	ASET TETAP	SALDO 31 DES 2020	MUTASI 2021		SALDO 31 DES 2021
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
A.	TANAH	2.242.116.753.568,03	56.239.157.982,00	77.926.855,00	2.298.277.984.695,03

Penjelasan atas Mutasi Tanah pada tahun 2021 sebagai berikut:

a) Penambahan TA 2021 sebesar Rp56.239.157.982,00 yaitu berupa:

- (1) Penambahan 1 bidang tanah seluas 400 m2 dengan nilai perolehan Rp60.000.000,00 SMAN 1 Gunung Alip (Tanggamus) yang berasal dari Hibah Komite
- (2) Penambahan 1 bidang tanah seluas 9.800 m2 yang berasal dari hibah masyarakat di SMAN 1 Padang Ratu dengan nilai perolehan sebesar Rp1,00

- (3) Pencatatan Kembali tanah seluas 40.000,00 m² di Desa Way Gelang Kota Agung, Tanggamus sebesar Rp60.000.000,00 akibat koreksi SK Hibah tanah SUPM ke BPSDMKP Kementerian Kelautan dan Perikanan
- (4) Penilaian Aset (*Appraisal*) terhadap tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang masih bernilai Rp1,00 sebesar Rp55.999.499.975,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Penilaian terhadap tanah di bawah jalan pada 11 ruas jalan Provinsi dengan total nilai Rp52.454.299.989,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.440 Hasil *Appraisal* Tanah di Bawah Jalan TA 2021

No.	Nama Barang	Nilai Awal	Nilai Appraisal	Nilai Total
1	Tanah Jalan Ruas Tanjung Kari - Pugung Raharjo (R.010)	1	1.976.799.999,00	1.976.800.000,00
2	Tanah Jalan Ruas Sp. Empat - Blambangan Umpu (R.076)	1	14.223.599.999,00	14.223.600.000,00
3	Tanah Jalan Ruas Bumiharjo - Sp. Way Tuba (R.080)	1	1.557.399.999,00	1.557.400.000,00
4	Tanah Jalan Ruas Negara Ratu - Gunung Betuah (R.072)	1	837.899.999,00	837.900.000,00
5	Tanah Jalan Ruas Bandar Abung - Bandar Sakti (R.063)	1	653.299.999,00	653.300.000,00
6	Tanah Jalan Ruas Pakuan Ratu - Bumi Harjo (R.079)	1	721.099.999,00	721.100.000,00
7	Tanah Jalan Ruas Negara Ratu - Sp. Tujok (R.067)	1	17.268.999.999,00	17.269.000.000,00
8	Tanah Jalan Ruas Ketapang - Negara Ratu (R.071)	1	497.899.999,00	497.900.000,00
9	Tanah Jalan Ruas Abung Raya Barat (Kotabumi) (R.061.11)	1	963.699.999,00	963.700.000,00
10	Tanah Jalan Ruas Jalan Raya Gunung Sakti (Menggala) (R.085.11)	1	8.213.799.999,00	8.213.800.000,00
11	Tanah Jalan Ruas Panaragan Jaya - Sp Panaragan (R.069)	1	5.539.799.999,00	5.539.800.000,00
Jumlah			52.454.299.989,00	

- Penilaian terhadap 8 bidang tanah rumah penjaga air pada UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I dengan total nilai sebesar Rp262.099.992,00.
- Penilaian terhadap 6 bidang tanah pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung sebesar Rp3.195.899.994,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.441 Hasil *Appraisal* Tanah Bangunan Pendidikan TA 2021

No.	Nama UPB	Nilai (Rp)
1	Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.499.999.999,00
2	SMKN 1 NEGERI BESAR (Way kanan)	236.999.999,00
3	SMKN 1 Purbolinggo	503.399.999,00
4	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII (Tuba, Mesuji)	869.999.999,00
5	SMAN 1 PADANG CERMIN (Pesawaran)	22.599.999,00
6	USB SMAN 2 Rebang Tangkas (Way Kanan)	62.899.999,00
Jumlah		3.195.899.994,00

- Penilaian terhadap 1 bidang tanah Tanah Gedung Kantor Palang Merah Indonesia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 87.200.000,00.
- (5) Temuan Baru 6 bidang Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang belum tercatat senilai Rp6,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Satu bidang tanah rumah jaga pintu bendungan Daerah Irigasi Way Bulok di Desa Banjar Masin Kabupaten Tanggamus seluas 502 m² senilai Rp1,00;

- Satu bidang tanah kawasan penyangga Saluran Irigasi UPTD PSDA Wilayah I di Desa Banjar Agung Udik Kabupaten Tanggamus seluas 1540 m2 dengan nilai perolehan Rp1,00
 - Satu bidang tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan SMAN 1 Padang Cermin di Desa Hanura Kab. Pesawaran seluas 188 m2 dengan nilai perolehan Rp1,00;
 - Satu bidang tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan SMAN 2 Rebang Tangkas di Desa Air Ringkih Kab. Way Kanan seluas 12.580 m2 dengan nilai perolehan Rp1,00;
 - Satu bidang tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan SMKN 1 Negeri Besar di Desa Tegal Mukti Kab. Way Kanan seluas 47.390 m2 dengan nilai Perolehan Rp1,00 ;
 - Satu bidang tanah Situs Makam Pahlawan Nasional Raden Inten II di Desa Gedung Harta Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan seluas 10.000 m2 dengan nilai perolehan Rp1,00.
- (6) Pelimpahan 2 bidang tanah yang berasal dari P3D bidang Kelautan dan Perikanan dengan total perolehan Rp119.658.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- Pelimpahan 1 bidang tanah Konservasi Penangkaran penyu dari Kabupaten Pesisir Barat seluas 2.856 m2 di Jl. Lintas Barat Sumatra Pekon Muara Tembulih, Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat dengan nilai perolehan Rp32.702.000,00
 - Pelimpahan 1 bidang tanah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kuala Penet dari Kabupaten Lampung Timur seluas 21.739 m2 di Desa Kuala Penet Labuhan Maringgai Lampung Timur dengan nilai perolehan Rp86.956.000,00
- b) Pengurangan TA 2021 sebesar Rp77.926.855,00 dengan rincian sebagai berikut:
- koreksi pencatatan Double Catat Tanah Eks IPH pada Sekretariat Dinas Kehutanan sebesar Rp12.000.000,00 yang berdasarkan inventarasi fisik dan administrasi, merupakan satu bagian/ satu hamparan dengan tanah kantor Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (sertifikat menyatu) .
 - pelepasan Hak terhadap tanah rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung akibat SK Pelepasan Hak Sewa Beli dengan nilai perolehan aset sebesar Rp65.926.855,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.442 Data Pelepasan Hak Sewa Beli Tanah TA 2021

No.	Nama Barang	No BA	Nilai (Rp)
1	Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	G/402/VI.02/HK/2020	15,000,000.00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SK Pelepasan Hak 2021	10,626,855.00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	G/406/VI.02/HK/2020	8,800,000.00
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	G/391/VI.02/HK/2020	31,500,000.00
	Jumlah	-	65,926,855.00

1) Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.288.460.581.681,63 atau meningkat/bertambah sebesar Rp196.219.440.057,87 atau 9,38% dari nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.092.241.141.623,76 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.443 Penambahan dan Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin TA 2021

Uraian	Saldo 31 Desember 2020	Bertambah	Berkurang	Saldo 31 Desember 2021
1. ALAT BESAR	64.075.268.501,00	6.851.296.607,00	7.920.000,00	70.918.645.108,00
2. ALAT ANGKUTAN	248.917.897.939,00	18.259.234.295,00	427.500.000,00	266.749.632.234,00
3. ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	96.052.790.528,00	7.473.102.980,00	67.243.300,00	103.458.650.208,00
4. ALAT PERTANIAN	20.163.291.861,50	16.372.510.530,00	40.432.000,00	36.495.370.391,50
5. ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	493.134.404.238,80	53.995.766.101,87	2.439.982.534,00	544.690.187.806,67
6. ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	42.596.276.038,00	5.381.886.747,00	79.708.000,00	47.898.454.785,00
7. ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	542.299.971.560,00	14.689.367.374,00	4.500.000,00	556.984.838.934,00
8. ALAT LABORATORIUM	218.697.712.347,68	29.029.887.473,00	12.325.000,00	247.715.274.820,68
9. ALAT PERSENJATAAN	2.377.852.444,00	67.395.976,00	-	2.445.248.420,00
10. ALAT KOMPUTER	340.069.874.402,50	48.263.423.477,00	3.004.951.915,00	385.328.345.964,50
11. ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-
12. ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-
13. ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	71.230.000,00	-	-	71.230.000,00
14. ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-
15. ALAT KESELAMATAN KERJA	1.478.244.514,00	273.823.500,00	-	1.752.068.014,00
16. ALAT PERAGA	3.073.426.000,00	1.064.910.496,00	-	4.138.336.496,00
17. PERALATAN PROSES/PRODUKSI	278.069.034,00	13.094.000,00	-	291.163.034,00
18. RAMBU - RAMBU	11.899.012.824,33	183.520.400,00	-	12.082.533.224,33
19. PERALATAN OLAH RAGA	7.055.819.390,95	384.782.850,00	-	7.440.602.240,95
	2.092.241.141.623,76	202.304.002.806,87	6.084.562.749,00	2.288.460.581.681,63

Rincian mutasi peralatan mesin Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Penambahan Aset Peralatan dan Mesin

Penambahan saldo peralatan dan mesin sebesar Rp202.304.002.806,87 pada tabel berikut:

Tabel 5.444 Penambahan Peralatan dan Mesin TA 2021

No.	Uraian	Nilai (Rp)	
1	Belanja Modal		
	- LRA Peralatan dan Mesin	185.593.022.021,90	
	- Tidak Menjadi Aset Tetap	(22.833.882.260,03)	
	- Reklas Ke KIB F	(31.545.711,00)	
	- Reklas per jenis aset tetap (Bertambah)	8.449.777.941,00	
	- Reklas per jenis aset tetap (Berkurang)	(4.379.128.619,00)	
	Jumlah Belanja Modal yang Menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	166.798.243.372,87	166.798.243.372,87
2	Belanja Barang Jasa yang dikapitalisasi sebagai aset		1.301.772.994,00
3	Appraisal		643.999.998,00
4	Hibah Dari Pihak Lain		30.787.211.318,00
5	Reklas dari Ekstracountable		2,00
6	Koreksi Pencatatan P3D		2.772.775.122,00
	Jumlah		202.304.002.806,87

(2) Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin

Pengurangan saldo peralatan dan mesin sebesar Rp6.084.562.749,00 pada tabel berikut:

Tabel 5.445 Pengurangan Peralatan dan Mesin TA 2021

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Hibah kepada Pihak Lain	396.000.000,00
2	Penghapusan	761.073.364,00
3	Reklasifikasi Aset	4.749.648.885,00
4	Berkurang Akibat Lainnya	
	- Koreksi Pencatatan	173.250.000,00
	- Koreksi Pencatatan P3D	4.590.500,00
	Jumlah	6.084.562.749,00

2) Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.471.124.970.271,66 atau meningkat/bertambah sebesar Rp299.092.967.551,45 atau 9,43% dari nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.172.032.002.720,21 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.446 Rincian Aset Gedung dan Bangunan TA 2021

Uraian	Saldo 31 Desember 2020	Bertambah	Berkurang	Saldo 31 Desember 2021
1. BANGUNAN GEDUNG	3.059.109.950.359,21	311.044.483.186,45	17.224.168.361,00	3.352.930.265.184,66
2. MONUMEN	15.704.901.566,00	50.000.000,00	-	15.754.901.566,00
3. BANGUNAN MENARA	431.803.000,00	808.542.000,00	-	1.240.345.000,00
4. TUGU TITIK KONTROL/PASTI	96.785.347.795,00	4.414.110.726,00	-	101.199.458.521,00
	3.172.032.002.720,21	316.317.135.912,45	17.224.168.361,00	3.471.124.970.271,66

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Lampung pada Tahun 2021:

(1) Penambahan Aset Gedung dan Bangunan

Penambahan saldo gedung dan bangunan sebesar Rp316.317.135.912,45 pada tabel berikut:

Tabel 5.447 Penambahan Aset Gedung dan Bangunan TA 2021

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal	
	- LRA Gedung dan Bangunan	240.978.511.324,58
	- Tidak Menjadi Aset Tetap	(14.583.201.522,31)
	- Reklas Ke KIB F	(44.156.792.987,38)
	- Reklas per jenis aset tetap (Bertambah)	1.655.807.159,00
	- Reklas per jenis aset tetap (Berkurang)	(13.897.946.963,11)
	Jumlah Belanja Modal yang Menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	169.996.377.010,78
		169.996.377.010,78
2	Belanja barang jasa yang dikapitalisasi sebagai aset	11.983.949.479,95
3	Appraisal	9.084.114.904,00
4	Retensi dan Utang Pengadaan Aset Tetap	2.339.940.737,94
5	Hibah dari pihak lain	38.348.174.922,00
6	Temuan baru belum tercatat	10,00
7	Reklasifikasi Aset	68.668.554.284,00
8	Pelimpahan P3D bidang Pendidikan dan Kehutanan	8.790.876.165,78
9	Bertambah Akibat Lainnya	
	- Koreksi Pencatatan	7.105.148.398,00
	Jumlah	316.317.135.912,45

(2) Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan

Pengurangan saldo gedung dan bangunan sebesar Rp17.224.168.361,00 pada tabel berikut:

Tabel 5.448 Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan TA 2021

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Hibah ke Pihak Lain	5.000.000,00
2	Penghapusan	5.074.195.300,00
3	Reklasifikasi Aset	4.319.391.038,00
4	Berkurang Akibat Lainnya	
	- Koreksi Pencatatan	7.770.651.798,00
	- Koreksi P3D	54.930.225,00
	Jumlah	17.224.168.361,00

3) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.949.112.483.529,13 atau bertambah sebesar Rp429.078.527.193,03 atau 6,58% dari Saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.520.033.956.336,10 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.449 Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021

Uraian	Saldo 31 Desember 2020	Bertambah	Berkurang	Saldo 31 Desember 2021
1. JALAN DAN JEMBATAN	5.881.369.387.106,51	361.012.158.092,15	-	6.242.381.545.198,66
2. BANGUNAN AIR	572.330.004.527,59	66.238.362.268,73	1.568.452.000,00	636.999.914.796,32
3. INSTALASI	43.909.517.536,00	1.261.701.309,00	-	45.171.218.845,00
4. JARINGAN	22.425.047.166,00	2.134.757.523,15	-	24.559.804.689,15
	6.520.033.956.336,10	430.646.979.193,03	1.568.452.000,00	6.949.112.483.529,13

(1) Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Mutasi tambah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Provinsi Lampung pada Tahun 2021 sebesar Rp430.646.979.193,03 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.450 Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal	
	- LRA JII	390.107.373.947,73
	- Tidak Menjadi Aset Tetap	(51.927.600.987,41)
	- Reklas Ke KIB F	(57.699.000,00)
	- Reklas per jenis aset tetap (Bertambah)	14.632.897.421,11
	- Reklas per jenis aset tetap (Berkurang)	(178.410.500,00)
	Jumlah Belanja Modal yang Menjadi Aset Tetap JII	352.576.560.881,43
2	Belanja barang jasa yang dikapitalisasi sebagai aset	4.074.676.474,00
3	Appraisal	127.899.994,00
4	Retensi dan Utang Pengadaan Aset Tetap	29.214.291.420,55
5	Hibah dari pihak lain	25.538.714.949,83
6	Reklasifikasi Aset	97.372.000,00
7	P3D Bidang Pendidikan dan Kehutanan	17.616.469.473,22
8	Bertambah Akibat Lainnya	
	- Koreksi Pencatatan	1.400.994.000,00
	Jumlah	430.646.979.193,03

(2) Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Mutasi kurang Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Provinsi Lampung pada Tahun 2021 sebesar Rp1.568.452.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.451 Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi Aset ke Aset Lain-lain (Proses Penghapusan)	167,458,000.00
2	Berkurang Akibat Lainnya - Koreksi Pencatatan	1,400,994,000.00
	Jumlah	1,568,452,000.00

4) Aset Tetap Lainnya

Mutasi tambah kurang Aset Tetap Lainnya TA 2021

Tabel 5.452 Rincian Aset Tetap Lainnya TA 2021

No.	Uraian	Saldo 31 Desember 2020	Bertambah	Berkurang	Saldo 31 Desember 2021
1	BAHAN PERPUSTAKAAN	206.255.445.150,37	23.145.349.522,11	832.000,00	229.399.962.672,48
2	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/ OLAHRAGA	16.847.618.971,12	556.680.098,00	94.800.500,00	17.309.498.569,12
3	HEWAN	2.153.655.000,00	114.100.000,00	4.955.000,00	2.262.800.000,00
4	BIOTA PERAIRAN	49.275.000,00	3.855.000,00	-	53.130.000,00
5	TANAMAN	639.051.700,00	-	-	639.051.700,00
6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	644.393,00	-	-	644.393,00
7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	14.917.860.278,00	385.569.982,00	-	15.303.430.260,00
		240.863.550.492,49	24.205.554.602,11	100.587.500,00	264.968.517.594,60

Nilai Aset Tetap Lainnya yang tercatat dalam neraca aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp264.968.517.594,60 atau meningkat/bertambah sebesar Rp24.104.967.102,11 atau 10,01% dari nilai Aset Tetap Lainnya pada 31 Desember 2020 senilai Rp240.863.550.492,49, hal tersebut dikarenakan adanya penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya pada TA 2021.

(1) Penambahan Aset Tetap Lainnya TA 2021

Penambahan saldo Aset Tetap Lainnya sebesar Rp24.205.554.602,11 pada tabel berikut:

Tabel 5.453 Penambahan Aset Tetap Lainnya TA 2021

No.	Uraian	Nilai (Rp)	
1	Belanja Modal		
	- LRA Aset Tetap Lainnya	32.846.817.778,00	
	- Tidak Menjadi Aset Tetap	(3.303.545.226,00)	
	- Reklas Ke KIB F		
	- Reklas per jenis aset tetap (Bertambah)	1.222.816.282,00	
	- Reklas per jenis aset tetap (Berkurang)	(7.486.612.721,00)	
	Jumlah Belanja Modal yang Menjadi Aset Tetap Lainnya	23.279.476.113,00	23.279.476.113,00
2	Hibah		562.749.014,11
3	Belanja Operasional yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap lainnya		45.034.600,00
4	Retensi dibayarkan TA 2022 sudah diakui sebagai aset		16.429.927,00
5	P3D		301.864.948,00
	Jumlah		24.205.554.602,11

(2) Pengurangan Aset Tetap Lainnya TA 2021

Pengurangan Saldo Aset Tetap Lainnya sebesar Rp100.587.500,00 pada tabel berikut :

Tabel 5.454 Pengurangan Aset Tetap Lainnya TA 2021

No.	Uraian	Nilai
1	Penghapusan TA 2021	36.302.000,00
2	Koreksi Nilai Aset Akibat P3D	59.330.500,00
3	Reklas Hewan Ternak Mati ke Aset Lain-Lain untuk diproses penghapusan	4.595.000,00
Jumlah		100.227.500,00

5) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan Pemerintah Provinsi Lampung merupakan aset tetap yang masih dalam proses pembangunan yang belum selesai sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Tabel 5.455 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2021

Uraian	Saldo 31 Desember 2020	Bertambah	Berkurang	Saldo 31 Desember 2021
Konstruksi Dalam Pengerjaan	702.953.025.316,75	49.178.918.115,84	70.166.802.284,00	681.965.141.148,59
	702.953.025.316,75	49.178.918.115,84	70.166.802.284,00	681.965.141.148,59

Adapun nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2021 adalah sebesar Rp681.965.141.148,59 atau berkurang sebesar Rp20.987.884.168,16 atau 2,29% dari nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp702.953.025.316,75 (*audited*), hal tersebut karena adanya penambahan dan pengurangan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada TA 2021.

a. Penambahan Konstruksi dalam Pengerjaan

Penambahan aset konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp46.919.608.115,84, yang terdiri dari:

Tabel 5.456 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2021

No	UPB	Nama Pekerjaan	Nilai Total
1	Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga	Pematangan Lahan DOJO Karate PKOR Way Halim	2.467.065.392,00
2	Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga	Gedung Lapangan Tembak Kota Baru	580.168.228,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Posko Kota Baru Lampung Selatan (Pondasi)	57.510.000,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Pembangunan Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Ex Terminal Sabah Balau	1.673.058.916,00
5	RSUD dr. H. Abdul Moeloek	Instalasi Rehab Medis / IRM (PBH) pekerjaan kusen, sekat alur masuk, plafon, pekerjaan lantai	316.298.520,00
6	RSUD dr. H. Abdul Moeloek	Pembangunan Gedung Bedah Terpadu	38.095.536.185,84
7	RSUD dr. H. Abdul Moeloek	Pengawasan Pembangunan Gedung Bedah Terpadu	476.865.400,00
8	Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga	Gedung E-Sport	783.253.000,00
9	Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga	Lapangan Tembak Kotabaru	368.831.772,00
10	Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga	Gedung Youth Center	987.072.000,00
11	Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN PP Lampung	630.428.550,00
12	Sekretariat Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Pembangunan Box Culvert Ruas Tegal Mukti - Tajab di Kabupaten Way Kanan - 2	213.202.000,00
13	Sekretariat Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Tegal Mukti - Tajab di Kabupaten Way Kanan - 2	57.699.000,00
14	Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga	Perencanaan DOJO Karate PKOR Way Halim	99.671.000,00
15	Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga	Pengawasan Pematangan Lahan DOJO Karate PKOR Way Halim	99.762.000,00
16	Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengawasan Pembangunan Lanjutan SMK PP Lampung Selatan	13.186.152,00
17	RSUD dr. H. Abdul Moeloek	Hibah Optimalisasi fasilitas Penanganan Covid-19 untuk Gedung Peawatan Kelas 1 RSUAM dari Kementerian PUPR	2.259.310.000,00
			49.178.918.115,84

b. Pengurangan Konstruksi dalam Pengerjaan

Pengurangan sebesar Rp70.166.802.284,00 terdiri dari :

- Reklasifikasi aset Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai senilai Rp68.668.554.284,00 ke aset Gedung dan Bangunan, yang terdiri dari :

Tabel 5.457 Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2021

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai Total
1	Gedung B	1	2.875.639.756,00
2	Gedung Non Bedah	1	61.100.263.300,00
3	Gedung Lapangan Tembak	1	4.265.474.228,00
4	Gedung Neurologi (Konsultan Perencanaan)	1	427.177.000,00
			68.668.554.284,00

- Penghapusan aset Pintu Gerbang Kota Baru yang berlokasi di Depan Mapolda Lampung berdasarkan SK Penghapusan No G/717/VI.02/HK/2021 tanggal 21 Desember 2021 senilai Rp1.498.248.000,00

Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Lampung pada 31 Desember 2020 (Audited) adalah sebesar Rp4.788.134.194.539,68, sementara Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.401.045.996.419,68 sehingga Nilai Buku Aset Pemerintah Provinsi Lampung pada TA 2021 sebesar Rp10.552.863.682.500,96, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.458 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2021

NO	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 Desember 2020	PENYUSUTAN -		AKUMULASI PENYUSUTAN 31 Desember 2021	NILAI BUKU
				SEMESTER I	SEMESTER II		
1	2	3	4	5	6	7	8
					-		
1	TANAH	2.298.277.984.695,03					2.298.277.984.695,03
2	PERALATAN DAN MESIN	2.288.460.581.681,63	1.389.930.550.237,11	112.161.640.809,28	113.433.467.467,00	1.615.525.658.513,39	672.934.923.168,24
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	3.471.124.970.271,66	567.995.224.986,00	30.551.500.112,00	31.469.130.528,00	630.015.855.626,00	2.841.109.114.645,66
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	6.949.112.483.529,13	2.832.255.565.285,95	160.687.992.630,00	160.157.520.696,00	3.153.101.078.611,95	3.796.011.404.917,18
5	ASET TETAP LAINNYA	264.968.517.594,64	1.794.985.286,65	247.063.518,76	361.354.862,94	2.403.403.668,34	262.565.113.926,26
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	681.965.141.148,59					681.965.141.148,59
	JUMLAH	15.953.909.678.920,64	4.791.976.325.795,71	303.648.197.070,04	305.421.473.553,94	5.401.045.996.419,68	10.552.863.682.500,96

Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 pada tabel adalah senilai Rp4.791.976.325.795,71 yang merupakan nilai penyusutan aset per 31 Desember 2021 terhadap total aset Pemerintah Provinsi Lampung senilai Rp15.953.909.678.920,64 . Nilai penyusutan ini berubah dari nilai penyusutan audited 2020 akibat adanya penambahan dan pengurangan aset pada TA 2021 dengan tahun perolehan aset di bawah tahun 2021

c. Dana Cadangan

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00.

d. Aset Lainnya

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
<u>141.108.563.536,48</u>	<u>145.243.841.042,25</u>

Aset Lainnya merupakan pos untuk mencatat Aset nonlancar lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Investasi Jangka Panjang, Dana Cadangan, dan Aset Tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), serta Aset Lain-lain.

Jumlah Aset Lainnya yang tercatat dalam neraca Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2021 adalah sebesar

Tabel 5.459 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021
1	Taghan Penj. Angsuran	19.754.329.721,37
2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.484.375,00
3	Aset Tidak Berwujud	6.849.652.272,23
4	Aset Lain-lain	114.502.097.167,88
	Jumlah	141.108.563.536,48

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
<u>19.754.329.721,37</u>	<u>26.469.583.431,50</u>

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.754.329.721,37 terdiri dari Piutang Angsuran Penjualan Rumah Dinas sebesar Rp186.800.450,48 dan Piutang Angsuran Penjualan Tanah Kavling sebesar Rp19.567.529.270,89 (**Lampiran 3 dan 4**).

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
<u>2.484.375,00</u>	<u>00,00</u>

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Negara. Menurut SAP disebutkan bahwa Tuntutan Ganti Rugi dicatat dalam neraca pemerintah daerah ke dalam kelompok Aset Lancar (Piutang) dan Aset Lainnya.

Penyajianannya ke dalam kelompok Aset Lancar dinyatakan sebagai bagian lancar TPTGR yang nilainya adalah sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan, sedangkan atas tuntutan ganti rugi (TGR) tersebut disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Jumlah TGR yang masuk dalam kelompok Aset Lainnya dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.484.375,00. Secara lebih jelas, jumlah TGR yang masuk dalam

kelompok Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.460 Rincian Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Nama	Tahun Kejadian	Saldo per 31 des 2021 (Rp)	Saldo per 31 des 2020 (Rp)
1	Risman Sujana, S.Sos	2021	2.484.375,00	0,00
Jumlah			2.484.375,00	0,00

3) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp0,00.

4) Aset Tidak Berwujud (*Netto*)

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
<u>6.849.652.272,23</u>	<u>6.874.732.756,92</u>

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non moneter yang bisa diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik secara nyata serta dimiliki guna menghasilkan maupun menyerahkan barang dan jasa, disewakan ataupun hanya bertujuan administrasi. Saldo Aset Tidak berwujud (*Netto*) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp6.849.652.272,23 dan Rp6.874.732.756,92

Tabel 5.451 Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Satker	Saldo per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo per 31 Des 2020 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7.548.543.429,00	7.218.543.429,00
2	DINAS KESEHATAN	1.526.378.033,00	1.339.866.600,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK	169.879.000,00	169.879.000,00
4	RUMAH SAKIT JIWA	317.904.000,00	317.904.000,00
5	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	84.390.000,00	74.820.000,00
6	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	641.578.600,00	641.578.600,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	65.000.000,00	65.000.000,00
8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	341.855.000,00	291.855.000,00
9	DINAS PERHUBUNGAN	448.151.000,00	448.151.000,00
10	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	388.734.500,00	388.734.500,00
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	289.613.000,00	99.507.000,00
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	39.600.000,00	39.600.000,00
13	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	54.850.000,00	49.850.000,00
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	154.800.000,00	97.900.000,00
15	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	147.984.000,00	-
16	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	47.000.000,00	-
17	DINAS KEHUTANAN	10.000.000,00	10.000.000,00
18	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	173.261.000,00	173.261.000,00
19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	69.000.000,00	
20	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.405.992.840,00	1.790.772.840,00
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.847.859.500,00	1.672.884.500,00
22	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.638.955.000,00	1.638.955.000,00
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	219.500.000,00	49.000.000,00
24	BIRO PEREKONOMIAN	50.000.000,00	-
25	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	216.552.500,00	216.552.500,00
26	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	800.340.000,00	800.340.000,00
27	BIRO ORGANISASI	74.662.500,00	74.662.500,00
28	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	59.910.000,00	59.910.000,00
29	SEKRETARIAT DPRD	739.627.000,00	305.477.000,00
	JUMLAH	20.571.920.902,00	18.035.004.469,00
	Amortisasi	(13.722.268.629,77)	(11.160.271.712,08)
	Aset Tak Berwujud Netto	6.849.652.272,23	6.874.732.756,92

5) Aset Lain-lain (*Netto*)

Per 31 Desember 2021
(Rp)
114.502.097.167,88

Per 31 Desember 2020
(Rp)
111.899.524.853,83

Aset Lain-lain merupakan pos untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi atau tidak dapat dikelompokkan sebagai aset tetap akibat aset tersebut dalam kondisi rusak berat, akan dihibahkan atau sudah diusulkan proses penghapusannya. Saldo Aset Lain-lain yang tercatat pada neraca per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp114.502.097.167,88 atau mengalami peningkatan sebesar Rp2.602.572.314,05 atau 2,32% dari nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp111.899.524.853,83.

Tabel 5.462 Rincian Aset Lain-lain Per 31 Desember 2021

No.	Satker	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)	Penyisihan/Akumulasi Penyusutan (Rp)	Netto (Rp)
1	BPKAD	Penjualan Angsuran Roda Dua	105.025.000,00	(105.025.000,00)	-
		Penjualan Angsuran Rumdis	737.399.737,20	(534.768.130,47)	202.631.606,73
		Penjualan Angsuran tanah kavling	5.683.255.129,86	(3.479.532.441,34)	2.203.722.688,52
2	PPKD	TP/TGR	866.882.321,32	(832.996.380,07)	33.885.941,25
3	Dinas Koperasi	Piutang Jasa Dana Bergulir	724.833.252,00	(676.137.502,00)	48.695.750,00
4	Dinas Pertanian	Piutang Jasa Dana Bergulir	474.074.500,00	(474.074.500,00)	-
5	RSUAM	Piutang BLUD	690.070.842,50	(257.713.241,25)	432.357.601,25
6	BPBD	Kas Tekor	64.730.718,00		64.730.718,00
7	PPKD	Penyertaan Modal pemerintah	200.000.000,00		200.000.000,00
8	Dinas Pertanian	Dana Bergulir	176.480.000,00		176.480.000,00
9	BPKAD	Aset Lain-lain	240.666.888.521,70	(129.527.295.659,57)	111.139.592.862,13
		Jumlah	250.389.640.022,58	(135.887.542.854,70)	114.502.097.167,88

Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Tagihan Penjualan Angsuran – Biro Perlengkapan

(1) Penjualan Angsuran Roda Dua

Merupakan reklasifikasi atas tagihan penjualan angsuran kendaraan roda dua sebesar Rp105.025.000,00 karena pembayaran angsuran diperkirakan lebih dari 12 bulan dan telah dilakukan penyisihan seluruhnya sehingga memiliki saldo *netto* sebesar Rp0,00.

(2) Penjualan Angsuran Rumah Dinas

Merupakan reklasifikasi atas tagihan penjualan angsuran rumah dinas sebesar Rp737.399.737,20 karena pembayaran angsuran diperkirakan lebih dari 12 bulan dan telah dilakukan penyisihan seluruhnya (**Lampiran 3**) sehingga memiliki saldo *netto* sebesar Rp202.631.606,73.

(3) Penjualan Angsuran Tanah Kavling

Merupakan reklasifikasi atas tagihan penjualan angsuran tanah kavling sebesar Rp5.683.255.129,86 karena pembayaran angsuran diperkirakan lebih dari 12 bulan dan telah dilakukan penyisihan seluruhnya (data **Lampiran 4**) sehingga memiliki saldo *netto* sebesar Rp 2.203.722.688,52

(b) TP/TGR – PPKD

Merupakan reklasifikasi atas piutang TP/TGR yang kemungkinan diterima lebih dari 12 bulan sebesar Rp866.882.321,32 dan telah dilakukan penyisihan seluruhnya sehingga memiliki saldo *netto* sebesar Rp33.885.941,25. Selain nilai saldo TP/TGR diatas, terdapat 2 (dua) nilai kerugian yang telah dihapuskan melalui Keputusan Gubernur Lampung yaitu atas nama M. Harun Krisna (Alm) nomor G/619/B.IX/HK/2014 tanggal 20 Agustus 2014 senilai Rp34.425.000,00 dan atas nama M. Zein Alie (Alm) nomor G/620/B.IX/HK/2014 tanggal 20 Agustus 2014 senilai Rp53.519.000,00.

(c) Piutang Jasa Dana Bergulir – Dinas Koperasi dan UMKM

Merupakan reklasifikasi atas piutang jasa pembinaan dana bergulir pada Dinas Koperasi dan UMKM sebesar Rp724.833.252,00 yang kemungkinan diterima lebih dari 12 bulan dengan penyisihan piutang sebesar Rp676.137.502,00 sehingga memiliki saldo *netto* sebesar Rp48.695.750,00 (Rp724.833.252,00 - Rp676.137.502,00).

(d) Piutang Jasa Dana Bergulir – Dinas Pertanian

Merupakan reklasifikasi atas piutang jasa pembinaan dana bergulir pada Dinas Pertanian sebesar Rp474.074.500,00 yang kemungkinan diterima lebih dari 12 bulan dan telah dilakukan penyisihan seluruhnya sehingga memiliki saldo *netto* sebesar Rp0,00.

(e) Piutang BLUD – RSUAM

Merupakan reklasifikasi atas piutang BLUD pada RSUAM sebesar yang kemungkinan diterima lebih dari 12 bulan dengan penyisihan piutang sebesar Rp690.070.842,50 sehingga memiliki saldo *netto* sebesar Rp432.357.601,25 (Rp690.070.842,50 – Rp257.713.241,25).

Tabel 5.463 Penyisihan Piutang pada RSUAM per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Kategori Piutang			Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
		Kurang Lancar (1-3 th) (Rp)	Diragukan (3-12 th) (Rp)	Macet (> 12 th) (Rp)		
1	Pasien Umum	218.305.450,00	471.765.392,50		690.070.842,50	257.713.241,25
2	Pasien Tak Mampu				-	-
3	Pasien Jamkesda Kabupaten				-	-
4	Pasien Jamkesda Kota			0	-	-
5	Diklat		-	0	-	-
6	BPJS		-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	690.070.842,50	257.713.241,25

(f) Kas Tekor – BPBD

Merupakan reklasifikasi kas di Bendahara Pengeluaran yang sudah tidak layak diklasifikasi sebagai kas karena merupakan kas tekor Tahun Anggaran 2008 dan 2009 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp64.730.718,00.

(g) Penyertaan Modal Pemerintah – PPKD

Merupakan reklasifikasi atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Lampung Rp200.000.000,00 yang terdapat pada PT Sumatera Promotion Center dan PT Sumatera Shipping Lines masing-masing sebesar Rp100.000.000,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP Penyertaan Modal tahun 2011. BPK Perwakilan Lampung merekomendasikan untuk membuat Peraturan Daerah Terhadap Penyertaan Modal Provinsi Lampung pada PT SPC dan PT SSL. Pembuatan Peraturan Daerah tersebut harus didahului dengan penelusuran terhadap status penyertaan modal terhadap kedua perusahaan tersebut. Informasi yang didapatkan mengenai pelaksanaan kegiatan operasional PT SPC dan PT SSL diketahui bahwa kedua perusahaan tersebut tidak beroperasi dengan baik dan mempunyai kinerja yang rendah hingga saat ini, khususnya pada PT SSL yang belum cukup

mampu untuk bersaing dengan perusahaan asing. Sampai dengan Tahun Anggaran 2016 kedua perusahaan tersebut belum memberikan kontribusi dividen kepada Pemerintah Provinsi Lampung maupun memberikan laporan tertulis secara periodik dalam bentuk laporan keuangan tahunan yang seharusnya menjadi bahan kontrol bagi Pemerintah Provinsi Lampung atas status atau posisi penyertaan modal pada kedua perusahaan tersebut sejak pertama kali dilakukan penyertaan modal Tahun 2000 masing-masing sebesar Rp100.000.000.00. Sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang SAP pada Lampiran I. Pernyataan Nomor 06 tentang Investasi Paragraf 6, yang menyatakan bahwa investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dengan begitu penyertaan modal pada PT SPC dan PT SSL sudah tidak efektif dan tidak memberikan nilai manfaat pada Pemerintah Provinsi Lampung sehingga tidak dapat dikelompokkan lagi menjadi investasi dan direklasifikasi ke dalam kelompok Aset Lain-lain. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Lampung merencanakan untuk melakukan penelusuran terhadap status penyertaan modal Pemerintah Provinsi Lampung pada Tahun 2016 dan sesuai dengan hasil Rakor Gubernur se-Sumatera tanggal 31 Mei s.d. 2 Juni 2012 untuk mengagendakan pembahasan usulan pemberhentian kerjasama dengan kedua Perusahaan tersebut.

(h) Dana Bergulir – Dinas Pertanian

Merupakan reklasifikasi atas investasi non permanen (dana bergulir) bidang pertanian sebesar Rp176.480.000,00 berupa hewan ternak karena hewan ternak tersebut sudah tidak ada (mati) dan sedang menunggu proses penghapusan. Pada TA 2013 terjadi penambahan ternak yang mati sebesar Rp105.690.000,00 dan atas permasalahan tersebut telah dilakukan koordinasi antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura selaku SKPD pengelola BLUD Bidang Pertanian setelah terjadi proses penggabungan dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk selanjutnya bersama Biro Aset dan Perlengkapan Daerah akan menindaklanjuti proses penghapusan atas kematian ternak tersebut. Untuk sementara dalam penyajian investasi non-permanen pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, nilai tersebut dimasukkan dalam kategori piutang yang tidak dapat tertagih.

(i) Aset Tetap – Bidang Aset BPKAD

Tabel 5.464 Aset Lain-Lain Yang Berasal Dari Aset Tetap TA 2021

KIB	ASET	SALDO 31 DES 2020	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO 31 DES 2021
A.	TANAH	5.104.147.123,70	-	200.000.000	4.904.147.123,70
B.	PERALATAN DAN MESIN	24.170.915.499,00	4.835.903.885	174.000.000	28.832.819.384,00
C.	GEDUNG DAN BANGUNAN	16.440.879.378,00	4.292.619.038	4.841.184.571	15.892.313.845,00
D.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	189.555.911.285,00	167.458.000	-	189.723.369.285,00
E.	ASET TETAP LAINNYA	1.304.436.884,00	9.802.000	-	1.314.238.884,00
F.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan				-
	JUMLAH.....	236.576.290.169,70	9.305.782.923,00	5.215.184.571,00	240.666.888.521,70

Khusus aset-lain-lain yang terkait dengan aset tetap sampai dengan perhitungan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp240.666.888.521,70 atau mengalami penurunan sebesar Rp4.090.598.352,00 atau 1,72% dari nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp236.576.290.169,70

Pada TA 2021 terdapat Peningkatan/Penambahan nilai aset Lain-Lain Pemerintah Provinsi Lampung berasal dari :

(1) Penambahan sebesar Rp9.305.782.923,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Reklasifikasi pencatatan aset dari intra ke aset lain-lain terhadap aset yang berada dalam proses penghapusan dengan nilai perolehan aset sebesar Rp 9.112.580.923,00
- b. Reklasifikasi pencatatan aset dari intra ke aset lain-lain terhadap 1 unit sepeda motor pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Way Pisang Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang mengalami kehilangan dan berada dalam proses TPTGR dengan nilai perolehan sebesar Rp31.500.000,00
- c. Hibah bertambah dari Kementerian Tenaga Kerja Provinsi berupa Server, namun aset dalam kondisi rusak berat dengan nilai perolehan sebesar Rp43.615.000,00
- d. Hibah bertambah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa Laptop, namun aset dalam kondisi rusak berat dengan nilai perolehan sebesar Rp11.770.000,00
- e. Penambahan dari P3D bidang pendidikan dari Kota Metro namun aset yang berada dalam kondisi rusak berat dengan nilai perolehan aset sebesar Rp35.717.000,00
- f. Penambahan dari P3D bidang Kelautan dan Perikanan dari Kabupaten Pesisir Barat berupa bangunan Rumah Penjaga Konservasi Penangkaran Penyu di Pekon Muara Tembulih, Kec. Ngambur yang berada dalam kondisi rusak berat dengan nilai perolehan gedung sebesar Rp70.600.000,00

(2) Pengurangan sebesar Rp5.215.184.571,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengurangan akibat penghapusan dengan nilai perolehan sebesar Rp4.800.331.571,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.465 Rincian Penghapusan Aset Lain-Lain Tahun 2021

No	Asal	No. SK Penghapusan	Nilai (dalam Rupiah)
1	SMAN 1 NATAR (Lampung Selatan)	G/719/VI.02/HK/2021	3,900,000.00
2	SMKN 1 Kota Agung Timur (Tanggamus)	G/308/VI.02/HK/2021	78,000,000.00
3	SMAN 1 Sekampung Udik (Lampung Timur)	G/308/VI.02/HK/2021	86,600,000.00
4	SMKN 3 Metro	G/213/VI.02/H.K/2021	982,222,400.00
5	SMKN 3 Metro	G/717/VI.02/HK/2021	312,793,000.00
6	SMAN 4 Metro	G/213/VI.02/HK/2021	100,000,000.00
7	RSUD dr. H. Abdul Moeloek	G/213/VI.02/HK/2021	3,231,316,171.00
8	SMAN 1 Bandar Sribawono (Lampung Timur)	G/308/VI.02/HK/2021	5,500,000.00
			4,800,331,571.00

- b. Pengurangan aset lain-lain akibat koreksi pencatatan double catat tanah gedung anggar berdasarkan BA inventarisasi Aset No. 028/769/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang merupakan bagian dari/ satu hamparan dengan tanah stadion Pahoman dengan nomor sertifikat 74 tanggal 15 Oktober 2012, dengan nilai aset double catat sebesar Rp200.000.000,00.
- c. Pengurangan aset lain-lain akibat koreksi terhadap kesalahan pencatatan Retensi Pembangunan Rumah Sakit Umum Kab.Way Kanan yang aset induknya sudah dihibahkan ke Kabupaten Way Kanan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor BAST/250/III.10/HIBAH/2016 dengan nilai koreksi pencatatan sebesar Rp214.853.000,00

Selain penambahan dan pengurangan data aset lain-lain di atas, terdapat aset lain-lain BMN senilai Rp4.409.363.000,00 pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung yang belum diakumulasikan ke Nilai Aset Lain-Lain Milik Pemerintah Provinsi Lampung dikarenakan belum dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Serta aset lain-lain RSAM sesuai Laporan Audit KAP Tahun 2020 sebesar Rp19.021.874.043 belum dapat diidentifikasi secara detail.

Rincian Aset Lain – lain sebagai berikut:

(1) Tanah

Nilai aset lain – lain berupa tanah sebagai berikut:

Tabel 5.466 Rincian Aset Tanah Pada Aset Lain-Lain Tahun 2021

Uraian	Saldo 31 Desember 2020	Bertambah	Berkurang	Saldo 31 Desember 2021
Tanah	5.104.147.123,70		200.000.000,00	4.904.147.123,70
	5.104.147.123,70	-	200.000.000,00	4.904.147.123,70

Tanah yang tercatat dalam Aset Lain-lain Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.904.147.123,70 atau berkurang sebesar 3,92% terhadap nilai saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.104.147.123,70.

Pengurangan ini terjadi akibat koreksi pencatatan terhadap aset yang mengalami double catat yaitu tanah gedung anggar yang berdasarkan BA inventarisasi Aset No. 028/769/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang merupakan bagian dari/ satu hamparan dengan tanah stadion Pahoman dengan nomor sertifikat 74 tanggal 15 Oktober 2012, dengan nilai aset double catat sebesar Rp200.000.000,00.

Sepuluh bidang tanah yang masih tercatat di aset lain-lain pada TA 2021 adalah sebesar Rp4.904.147.123,70 yaitu:

- (1) Tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung eks. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II yang terkena untuk pelebaran jalan di Kotabumi, akan tetapi sampai dengan saat ini proses *ruislag* atas aset tersebut dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara belum selesai senilai Rp5.895.000,00;

- (2) Tanah kavling seluas 176.110 m2 senilai Rp3.070.402.122,70 yang diperjualbelikan kepada pegawai negeri.
- (3) Tanah Kavling seluas 20.448 m2 di Desa Sabah Balau Sukarama I Bandar Lampung senilai Rp315.000.000,00
- (4) Tanah Kavling seluas 42.490 m2 di Desa Sabah Balau senilai Rp315.000.000,00
- (5) Tanah Kavling seluas 11.085 m2 di Jl. Pramuka Sumberejo Kamiling Bandar Lampung senilai Rp500.113.900,00
- (6) Tanah kavling seluas 1.600 m2 yang terletak di Jl. Pramuka Sumberejo Kemiling Bandar Lampung senilai Rp72.186.100,00
- (7) Tanah Bangunan Pembibitan pada UPTD Balai Benih Induk di Desa Terbanggi Besar Lampung Tengah senilai Rp4.000.000,00 dengan luas 51.770 m2
- (8) Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) pada SMKN 1 Tegineneng di Jl. Raya Tegineneng-Metro Desa Batanghari Ogan Kec.Tegineneng Kab.Pesawaran senilai Rp578.550.000,00 dengan luas 10.150 m2
- (9) Tanah Persawahan di UPB Padi Way Seputih Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah senilai Rp1,00 dengan luas 42.500 m2.
- (10) Tanah Kavling di Jalan Pramuka seluas 43.969 m2 senilai Rp43.000.000,00 sesuai SK No. G/73.a/B.X/HK/2013 tanggal 8 Februari 2013.

(2) Peralatan dan Mesin

Tabel 5.467 Rincian Aset Peralatan dan Mesin pada Aset Lain-Lain Tahun 2021

Uraian	Saldo 31 Desember 2020	Bertambah	Berkurang	Saldo 31 Desember 2021
1. ALAT BESAR	1.032.597.500,00	5.000.000,00	-	1.037.597.500,00
2. ALAT ANGKUTAN	429.995.000,00	31.500.000,00	-	461.495.000,00
3. ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	576.431.100,00	66.543.300,00	-	642.974.400,00
4. ALAT PERTANIAN	304.584.291,50	38.782.000,00	-	343.366.291,50
5. ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	3.731.492.966,00	1.891.697.295,00	19.000.000,00	5.604.190.261,00
6. ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	973.498.909,00	89.558.000,00	-	1.063.056.909,00
7. ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	78.988.500,00	-	-	78.988.500,00
8. ALAT LABORATORIUM	3.965.940.954,00	9.775.000,00	-	3.975.715.954,00
9. ALAT PERSENJATAAN	4.528.750,00	-	-	4.528.750,00
10. ALAT KOMPUTER	12.928.403.098,50	2.703.048.290,00	155.000.000,00	15.476.451.388,50
11. ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-
12. ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-
13. ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	-	-	-
14. ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-
15. ALAT KESELAMATAN KERJA	4.400.000,00	-	-	4.400.000,00
16. ALAT PERAGA	-	-	-	-
17. PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-
18. RAMBU - RAMBU	9.650.000,00	-	-	9.650.000,00
19. PERALATAN OLAH RAGA	130.404.430,00	-	-	130.404.430,00
	24.170.915.499,00	4.835.903.885,00	174.000.000,00	28.832.819.384,00

Nilai Peralatan dan Mesin yang tercatat pada aset lain-lain per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp28.832.819.384,00 atau bertambah sebesar Rp4.661.903.885,00 atau 19,28% dari Nilai aset lain-lain Per 31 Desember 2020

sebesar Rp24.170.915.499,00, hal tersebut dikarenakan adanya penambahan dan pengurangan aset pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Penambahan senilai Rp4.835.903.885,00 yang berasal dari :

- a. Reklasifikasi pencatatan aset dari intra ke aset lain-lain terhadap aset yang berada dalam proses penghapusan berdasarkan SK Penetapan Nilai Limit dan Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung berupa Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya serta Sisa Hasil Bongkaran Bangunan Nomor G/679/VI.02/HK/2021 tanggal 3 Desember 2021 dengan nilai perolehan aset sebesar Rp4.718.148.885,00
- b. Reklasifikasi pencatatan aset dari intra ke aset lain-lain terhadap 1 unit sepeda motor pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Way Pisang Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang mengalami kehilangan dan berada dalam proses TPTGR dengan nilai perolehan sebesar Rp31.500.000,00
- c. Hibah bertambah dari Kementerian Tenaga Kerja Provinsi berupa Server, namun aset dalam kondisi rusak berat dengan nilai perolehan sebesar Rp43.615.000,00
- d. Hibah bertambah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa Laptop, namun aset dalam kondisi rusak berat dengan nilai perolehan sebesar Rp11.770.000,00
- e. Penambahan dari P3D bidang pendidikan dari Kota Metro namun aset yang berada dalam kondisi rusak berat dengan nilai perolehan aset sebesar Rp30.870.000,00

(3) Gedung dan Bangunan

Nilai aset lain – lain berupa Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 5.468 Rincian Aset Aset Gedung dan Bangunan pada Aset Lain-Lain Tahun 2021

Uraian	Saldo 31 Desember 2020	Bertambah	Berkurang	Saldo 31 Desember 2021
BANGUNAN GEDUNG	15.437.903.528,00	4.292.619.038,00	4.841.184.571,00	14.889.337.995,00
MONUMEN	-	-	-	-
BANGUNAN MENARA	57.698.000,00	-	-	57.698.000,00
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	945.277.850,00	-	-	945.277.850,00
	16.440.879.378,00	4.292.619.038,00	4.841.184.571,00	15.892.313.845,00

Nilai Gedung dan Bangunan yang tercatat pada aset lain-lain per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp15.892.313.845,00 atau berkurang sebesar Rp548.565.533,00 atau 3,347% dari Nilai Gedung dan Bangunan pada aset lain-lain Per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.440.879.378,00 (Audited), hal tersebut dikarenakan adanya penambahan dan pengurangan pada tahun 2020 sebagai berikut :

(a) Penambahan senilai Rp4.292.619.038,00 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Reklasifikasi pencatatan aset dari intra ke aset lain-lain terhadap aset yang berada dalam proses penghapusan berdasarkan SK Penetapan Nilai Limit dan Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung berupa Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya serta Sisa Hasil Bongkaran Bangunan Nomor G/679/VI.02/HK/2021

tanggal 3 Desember 2021 dengan nilai perolehan aset sebesar Rp3.875.774.038,00.

- (2) Reklasifikasi pencatatan aset dari intra ke aset lain-lain terhadap Gedung Administrasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung yang berada dalam proses penghapusan dengan nilai perolehan gedung sebesar Rp277.231.000,00.
 - (3) Reklasifikasi pencatatan aset dari intra ke aset lain-lain terhadap bangunan Gazebo di PKOR pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung yang berada dalam proses penghapusan dengan nilai perolehan gazebo sebesar Rp69.014.000,00.
 - (4) Penambahan dari P3D bidang Kelautan dan Perikanan dari Kabupaten Pesisir Barat berupa bangunan Rumah Penjaga Konservasi Penangkaran Penyu di Pekon Muara Tembulih, Kec. Ngambur yang berada dalam kondisi rusak berat dengan nilai perolehan gedung sebesar Rp70.600.000,00
- (b) Pengurangan sebesar Rp 4.841.184.571,00 yang merupakan pengurangan aset akibat penghapusan dan koreksi pencatatan dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Penghapusan aset gedung dan bangunan pada aset lain-lain senilai Rp4.626.331.571,00

Tabel 5.469 Rincian Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan pada Aset Lain-Lain Tahun 2021

No	Asal	No. SK Penghapusan	Nilai (dalam Rupiah)
1	SMKN 3 Metro	G/213/VI.02/H.K/2021	982,222,400.00
2	SMKN 3 Metro	G/717/VI.02/HK/2021	312,793,000.00
3	SMAN 4 Metro	G/213/VI.02/HK/2021	100,000,000.00
4	RSUD dr. H. Abdul Moeloek	G/213/VI.02/HK/2021	3,231,316,171.00
			4,626,331,571.00

Pengurangan gedung dan bangunan pada aset lain-lain akibat koreksi terhadap kesalahan pencatatan Retensi Pembangunan Rumah Sakit Umum Kab.Way Kanan yang aset induknya sudah dihibahkan ke Kabupaten Way Kanan berdasarkan BAST Hibah Nomor BAST/250/III.10/HIBAH/2016 dengan nilai koreksi pencatatan sebesar Rp214.853.000,00

(4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai aset lain – lain berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Tabel 5.470 Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Aset Lain-Lain Tahun 2021

Uraian	Saldo 31 Desember 2020	Bertambah	Berkurang	Saldo 31 Desember 2021
JALAN DAN JEMBATAN	174,965,855,256.00	-		174,965,855,256.00
BANGUNAN AIR	7,960,851,829.00	167,458,000.00		8,128,309,829.00
INSTALASI	-	-		-
JARINGAN	6,629,204,200.00	-		6,629,204,200.00
	189,555,911,285.00	167,458,000.00	-	189,723,369,285.00

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tercatat pada aset lain-lain per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp189.723.369.285,00 atau mengalami penambahan sebesar Rp167.458.000,00 atau sebesar 0,09% dibandingkan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tercatat pada aset lain-lain Per 31 Desember 2020 sebesar Rp189.555.911.285,00 (Audited), hal tersebut dikarenakan adanya penambahan pada tahun 2021 akibat Reklasifikasi pencatatan aset dari intra ke aset lain-lain terhadap bangunan MCK di PKOR pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung yang berada dalam proses pengapusan dengan nilai perolehan gazebo sebesar Rp167.458.000,00

(5) Aset Tetap Lainnya

Nilai aset lain – lain berupa Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.471 Rincian Aset Tetap Lainnya pada Aset Lain-Lain Tahun 2021

No.	Uraian	Saldo 31 Desember 2020	Bertambah	Berkurang	Saldo 31 Desember 2021
1	BAHAN PERPUSTAKAAN	685,801,439.00	4,847,000.00		690,648,439.00
2	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/ OLAH RAGA	102,212,945.00	-		102,212,945.00
3	HEWAN	59,225,000.00	4,955,000.00		64,180,000.00
4	BIOTA PERAIRAN	-	-		-
5	TANAMAN	457,197,500.00	-		457,197,500.00
6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-		-
7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-		-
		1,304,436,884.00	9,802,000.00	-	1,314,238,884.00

Nilai Aset Tetap Lainnya yang tercatat pada aset lain-lain per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 1.314.238.884,00 atau bertambah sebesar Rp9.802.000,00 atau 0,75% dibandingkan Nilai aset lain-lain Per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.304.436.884,00 (Audited). Hal ini disebabkan oleh karena adanya penambahan aset lain-lain yang berasal dari :

- Reklasifikasi pencatatan Kambing pada UPTD Balai Pembibitan Ternak Kambing Saburai Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Provinsi Lampung dari intra ke aset lain-lain akibat kematian hewan ternak berdasarkan Berita Acara Kematian Ternak Nomor 13/UPTD-PTKS/12/2021 tanggal 26 Desember 2021 dengan nilai perolehan ternak senilai Rp4.955.000,00.
- Penambahan aset lain-lain yang berasal dari penyerahan P3D Kota Metro TA 2021 yang berada dalam kondisi rusak berat dengan nilai perolehan sebesar Rp4.847.000,00

(6) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Pada Tahun 2021, nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah sebesar Rp129.527.295.659,57.

Tabel 5.472 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

ASET LAIN-LAIN	NILAI PEROLEHAN PER 31 DES 2021	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN2 PER 31 DES 2021	NILAI BUKU PER 31 DES 2021
TANAH	4.904.147.123,70	-	4.904.147.123,70
PERALATAN DAN MESIN	28.832.819.384,00	15.095.645.565,57	13.737.173.818,43
GEDUNG DAN BANGUNAN	15.892.313.845,00	5.271.205.054,00	10.621.108.791,00
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	189.723.369.285,00	109.160.445.040,00	80.562.924.245,00
ASET TETAP LAINNYA	1.314.238.884,00	-	1.314.238.884,00
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	-
	240.666.888.521,70	129.527.295.659,57	111.139.592.862,13

2. Kewajiban

**Per 31 Desember 2021
(Rp)**

959.973.266.315,71

**Per 31 Desember 2020
(Rp)**

873.388.365.230,16

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Lampung.

Kewajiban Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp959.973.266.315,72 dan Rp873.388.365.230,16.

Tabel 5.473 Rincian Kewajiban per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Jenis Kewajiban	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
1	Kewajiban Jangka Pendek	880.177.953.822,71	652.416.720.033,16
2	Kewajiban Jangka Panjang	79.795.312.493,00	220.971.645.197,00
	Jumlah	959.973.266.315,71	873.388.365.230,16

a. Kewajiban Jangka Pendek

**Per 31 Desember 2021
(Rp)**

880.177.953.822,71

**Per 31 Desember 2020
(Rp)**

652.416.720.033,16

Kewajiban Jangka Pendek merupakan pos untuk menampung kewajiban Pemerintah Provinsi Lampung yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 bulan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp880.177.953.822,71 dan Rp652.356.860.033,16 yang terdiri atas:

Tabel 5.474 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	1847.716.478,00	337.777.287,84
2	Utang Bunga	3.042.663.621,00	4.781.328.590,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	969.127.250,80	1.165.335.250,00
4	Bag. Lancar Utang Jk Panjang	167.263.263.747,00	167.263.263.747,00
5	Utang Belanja	76.622.860.724,31	14.790.786.751,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	630.432.322.001,60	464.078.228.407,32
	Jumlah	880.177.953.822,71	652.416.720.033,16

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
1.847.716.478,00	337.777.287,84

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum. Saldo Utang PFK Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.847.716.478,00 yang merupakan Utang PFK BOS Rp1.831.774.299,00, Laboratorium Lingkungan Hidup Rp11.508.183,00 dan Rumah Sakit Jiwa sebesar Rp4.433.996,00. Pada tahun 2020 Utang PFK sebesar Rp337.777.287,84.

2) Utang Bunga

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
3.042.663.621,00	4.781.328.590,00

Utang Bunga timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Sertifikat Perbendaharaan Negara (SPN), utang obligasi negara, utang jangka panjang-perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Saldo Utang Bunga Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp3.042.663.621,00 dan Rp4.781.328.590,00.

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.042.663.621,00 merupakan utang bunga yang timbul dari pinjaman Pemerintah Provinsi Lampung kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp599.999.408.000,00. Pinjaman ini bertujuan untuk pembiayaan pekerjaan infrastruktur prioritas di Provinsi Lampung, yaitu untuk pembangunan 6 (enam) ruas jalan provinsi di Provinsi Lampung. Perjanjian pinjaman pembiayaan sesuai dengan Akta Notaris PRATIWI HANDAYANI, S.H. Nomor 04 tanggal 23 Januari 2018.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pemerintah Provinsi Lampung dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus milyar rupiah). Pencairan pinjaman sebesar Rp599.999.408.000,00 dilakukan secara bertahap yaitu:

a. 2 Agustus 2018	Rp117.269.258.600,00
b. 1 November 2018	Rp149.865.831.400,00
c. 7 Desember 2018	Rp110.956.720.000,00
d. 28 Desember 2018	Rp101.792.127.500,00
e. 2 April 2019	<u>Rp120.115.470.500,00</u>
Total	Rp599.999.408.000,00

Pemerintah Provinsi Lampung wajib membayar bunga (*fixed rate*) kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar 6,52% (enam koma lima dua persen) per anum. Bunga dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), yaitu dihitung sejak tanggal penarikan pertama fasilitas pembiayaan dan dibayarkan paling lambat setiap tanggal 25 (dua puluh lima) setiap akhir triwulan.

Setiap masa tenggang pembayaran pokok fasilitas pembiayaan (*grace periode*) berakhir, bulan dan tanggal pembayaran bunga disamakan dengan bulan dan tanggal pembayaran pokok fasilitas pembiayaan, dengan dilakukan penyesuaian terhadap perhitungan hari bunga apabila terdapat perbedaan antara bulan jatuh tempo pembayaran bunga dengan bulan jatuh tempo pembayaran pokok pinjaman.

Bunga akrual Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.042.663.621,00.

3) Pendapatan Diterima Dimuka

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
969.127.250,80	1.165.335.250,00

Pendapatan Diterima Dimuka dicatat sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp969.127.250,80 dan Rp1.165.335.250,00. Pendapatan diterima dimuka berasal dari sewa tanah dan bangunan pada Biro Umum. Rincian pada lampiran 15.

4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
167.263.263.747,00	167.263.263.747,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang Pemerintah Provinsi Lampung yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp167.263.263.747,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.475 Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2021

No.	Jangka Waktu	Nilai (Rp)
1	25/10/2021 - 24/01/2022	35.294.083.176
2	25/01/2022 - 24/04/2022	35.294.083.176
3	25/04/2022 - 24/07/2022	35.294.083.176
4	25/07/2022 - 24/10/2022	35.294.083.176
5	25/10/2022 - 31/12/2022	26.086.931.043
	Jumlah	167.263.263.747

5) Utang Belanja

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
<u>76.622.860.724,31</u>	<u>14.790.786.751,00</u>

Utang Belanja merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja yang telah dimanfaatkan namun belum dilakukan pembayaran. Saldo Utang Belanja Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp76.622.860.724,31 dan Rp14.790.786.751,00. Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp76.470.044.946,92 terdiri dari:

Tabel 5.476 Rincian Utang Belanja TA.2021

No.	Jenis Beban	Nilai (Rp)
1	Utang Belanja Jasa	1956.990.315,00
2	Utang Belanja Pegawai	1143.000.000,00
3	Utang Belanja hibah	42.292.447.337,93
4	Utang Belanja Modal	31230.423.071,38
Jumlah		76.622.860.724,31

6) Utang Jangka Pendek Lainnya

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
<u>630.432.322.001,60</u>	<u>464.078.228.407,32</u>

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan akun yang mencatat kewajiban Pemerintah Provinsi Lampung yang belum dilunasi terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten/Kota, pihak ketiga, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Sewa Menara Siger, dan utang lainnya dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.477 Rincian Kewajiban Jangka Pendek lainnya
per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
1	Utang Dana Bagi Hasil Kab/Kota	546.998.221.424,00	365.335.866.990,00
2	Utang Retensi dan Pihak Ketiga	-	35.562.710.941,32
3	Utang Jaminan Kecelakaan Kerja	155.582.492,00	155.582.492,00
4	Utang Menara Siger	1.264.000.000,00	1.264.000.000,00
5	Utang RSAM	79.896.750.674,60	61.033.413.691,00
6	Utang pada RSJ	1.810.167.830,00	726.654.293,00
7	Utang Lab. Kesehatan	307.599.581,00	726.654.293,00
Jumlah		630.432.322.001,60	464.804.882.700,32

a) Utang Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

Tabel 5.478 Saldo Utang Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota
per 31 Desember 2021 dan 2020

NO	URAIAN	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
1	PKB	140.129.220.237,00	122.720.599.629,00
2	BBNKB	94.178.742.245,00	55.712.979.493,00
3	PBB-KB	232.877.408.795,00	185.851.659.097,00
4	PAP	1.363.905.876,00	1.050.628.771,00
5	Pajak Rokok	78.448.944.271,00	
Jumlah		546.998.221.424,00	365.335.866.990,00

Rincian Utang Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota disajikan pada Lampiran 8.

utang DBH TW III telah dibayar pada tanggal 1 April 2022 sebesar Rp227.945.803.126,00 telah dibayarkan pajak rokok sebesar Rp78.448.944.271,00, kemudian Utang DBH TW IV belum dilakukan pembayaran sebesar Rp240.603.474.027,00

b) Utang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Saldo utang jaminan kecelakaan kerja yang belum dibayar per 31 Desember 2021 sebesar Rp155.582.492.00.

c) Utang Menara Siger

Saldo utang menara siger yang belum dibayar per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.264.000.000.00 merupakan utang kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atas sewa lahan seluas 32.860 m2 yang terletak di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni. Lahan tersebut digunakan untuk pembangunan monumen/tugu Menara Siger yang merupakan *icon* Provinsi Lampung. Perjanjian sewa menyewa lahan tersebut tertuang dalam perjanjian antara PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor Sperj 210/HK.201/ASDP-2013. Nomor G/502/BX/HK/2013.

Jumlah keseluruhan biaya sewa atas lahan untuk pembangunan Menara Siger periode pembangunan pertama tahun 2006 sampai dengan 2010 dan pembangunan kedua periode 2011 adalah sebesar Rp1.764.000.000,00.

Atas biaya sewa tersebut telah dilakukan pembayaran sebesar Rp500.000.000,00 melalui Bank BRI Cabang Roxy Jakarta pada tanggal 14 November 2014. Sehingga utang sewa lahan Menara Siger per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.264.000.000,00.

d) Utang RSAM

Utang pada RSAM adalah utang pengadaan obat-obatan, alkes, dan jasa medik sebesar Rp79.896.750.674,60

e) Utang pada RSJ

Utang pada RSJ adalah utang jasa medik sebesar Rp1.810.167.830,00

g) Utang pada Laboratorium Kesehatan

Utang pada Laboratorium Kesehatan adalah utang pengadaan alat kesehatan dan obat sebesar Rp307.599.581,00

b. Kewajiban Jangka Panjang

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
<u>79.795.312.493,00</u>	<u>220.971.645.197,00</u>

Kewajiban Jangka Panjang merupakan pos untuk menampung kewajiban Pemerintah Provinsi Lampung yang diharapkan akan dibayar kembali atau

jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp79.795.312.493,00 dan Rp220.971.645.197,00 yang terdiri atas:

1) Utang Dalam Negeri

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp)	(Rp)
79.795.312.493,00	220.971.645.197,00

Utang Dalam Negeri merupakan akun yang digunakan untuk mencatat Utang Dalam Negeri pemerintah daerah yang mencakup antara lain: Utang dari Sektor Perbankan, Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, Utang Obligasi, Utang dari Pemerintah Pusat, Utang dari Pemerintah Daerah lainnya, dan Premium (Diskonto) Obligasi. Saldo Utang Dalam Negeri Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp79.795.312.493,00 dan Rp220.971.645.197,00.

Utang Dalam Negeri Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2021 sebesar Rp79.795.312.493,00 merupakan pinjaman Pemerintah Provinsi kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang diharapkan akan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Pinjaman ini bertujuan untuk pembiayaan pekerjaan infrastruktur prioritas di Provinsi Lampung, yaitu untuk pembangunan 6 (enam) ruas jalan provinsi di Provinsi Lampung. Perjanjian pinjaman pembiayaan sesuai dengan Akta Notaris PRATIWI HANDAYANI, S.H. Nomor 04 tanggal 23 Januari 2018.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pemerintah Provinsi Lampung dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus milyar rupiah).

Hutang jangka panjang yang timbul berdasarkan pinjaman pembiayaan ini meliputi akan tetapi tidak terbatas pada pokok, bunga, denda dan biaya atau ongkos-ongkos yang terhitung dan wajib dibayar oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Jangka waktu fasilitas pembiayaan ditetapkan selama 5 (lima) tahun yaitu dimulai sejak tanggal penarikan pertama, termasuk masa tenggang (*grace periode*) pembayaran pokok fasilitas pembiayaan selama 11 (sebelas) bulan. Pemerintah Provinsi Lampung wajib membayar bunga (*fixed rate*) sebesar 6,52% (enam koma lima dua persen) per anum. Bunga dibayarkan setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan), yaitu dihitung sejak tanggal penarikan pertama fasilitas pembiayaan dan dibayarkan paling lambat setia tangga 25 (dua puluh lima) setiap akhir triwulan.

Tabel 5.479 Saldo Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2020

No	Tanggal Penarikan	Jumlah	Pengembalian		Bag. Lancar utang jangka panjang		Utang Jangka Panjang
			Tanggal	Jumlah	Jangka Waktu	Jumlah	
1	02/08/2018	117.269.258.600,00	25/01/2021	35.294.083.176,00	25/10/2021 - 24/01/2022	35.294.083.176	79.795.312.493
2	01/11/2018	149.865.831.400,00	22/04/2021	35.294.083.176,00	25/01/2022 - 24/04/2022	35.294.083.176	
3	07/12/2018	110.956.720.000,00	22/07/2021	35.294.083.176,00	25/04/2022 - 24/07/2022	35.294.083.176	
4	28/12/2018	101.792.127.500,00	22/10/2021	35.294.083.176,00	25/07/2022 - 24/10/2022	35.294.083.176	
5	17/04/2019	120.115.470.500,00			25/10/2022 - 31/12/2022	26.086.931.043	
	Jumlah	599.999.408.000,00		141.176.332.704,00		167.263.263.747	79.795.312.493

2) Utang Luar Negeri

Per 31 Desember 2020

(Rp)

0,00

Per 31 Desember 2019

(Rp)

0,00

Utang Luar Negeri merupakan akun yang digunakan untuk mencatat Utang Luar Negeri yang diperoleh pemerintah daerah. Saldo Utang Luar Negeri per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

3. Ekuitas

Per 31 Desember 2021

(Rp)

10.877.344.221.796,91

Per 31 Desember 2020

(Rp)

10.358.609.340.087,56

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Total Ekuitas Pemerintah Provinsi Lampung per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp10.877.344.221.796,91 dan Rp10.358.609.340.087,56.

D. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan – LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit – LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif Laporan Operasional dan dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter. Serta daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Operasional per 31 Desember 2021 ditutup dengan jumlah Pendapatan Operasional sebesar Rp7.672.233.269.877,33 dan Beban Operasional sebesar Rp7.233.909.116.116,22 serta mengalami surplus sebesar Rp438.324.153.761,11.

Tabel 5.480 Laporan Operasional per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020
1	Pendapatan Operasional – LO	7.672.233.269.877,33	7.190.345.071.951,57
2	Beban Operasional – LO	7.233.909.116.116,22	6.799.237.485.891,26
3	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional – LO	438.324.153.761,11	391.107.586.060,31
4	Pos Luar Biasa	0,00	0,00
5	Surplus/Defisit LO	438.324.153.761,11	391.107.586.060,31

1. PENDAPATAN –LO

Per 31 Desember 2021
(Rp)

7.672.233.269.877,33

Per 31 Desember 2020
(Rp)

7.190.345.071.951,57

Jumlah Pendapatan Operasional per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp7.672.233.269.877,33 dan Rp7.190.345.071.951,57. Pendapatan tahun 2021 bila dibandingkan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp481.888.197.925,77 atau 6,70% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.481 Pendapatan Operasional per 31 Desember 2021

No	Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	3.349.195.361.004,79	2.868.161.448.094,48
2	Pendapatan Transfer - LO	4.200.843.389.286,00	2.515.226.885.350,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	122.194.519.586,54	1.806.956.738.507,09
Jumlah		7.672.233.269.877,33	7.190.345.071.951,57

a. Pendapatan Asli Daerah – LO

Jumlah Pendapatan Asli Daerah – LO per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp3.349.195.361.004,79 dan Rp2.868.161.448.094,48. Pendapatan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp481.033.912.910,31 atau 16,77% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.482 Pendapatan Asli Daerah – LO per 31 Desember 2021

No	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	2.753.022.778.255,00	2.427.359.475.419,56
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	14.856.123.995,20	17.479.399.270,67
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO	87.827.368.082,26	35.679.032.096,95
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO	493.489.090.672,33	387.643.541.307,30
Jumlah		3.349.195.361.004,79	2.868.161.448.094,48

1) Pendapatan Pajak Daerah - LO

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah – LO Per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.753.022.778.255,00 dan Rp2.427.359.475.419,56. Pendapatan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp325.663.302.835,44 atau 13,42% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.483 Pendapatan Pajak Daerah - LO per 31 Desember 2021

No	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	880.359.093.903,00	786.228.389.430,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	613.520.230.500,00	440.909.561.650,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	626.925.543.622,00	536.625.926.088,00
4	Pajak Air Permukaan	5.508.800.796,00	5.098.520.521,56
5	Pajak Rokok	626.709.109.434,00	658.497.077.730,00
Jumlah		2.753.022.778.255,00	2.427.359.475.419,56

Pendapatan Pajak Daerah – LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.753.022.778.255,00 tidak sama dengan jumlah Pendapatan Pajak Daerah – LRA Per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.721.138.045.704,00.

Perbedaan Nilai Pajak Daerah – LO dengan nilai Pajak Daerah – LRA sebesar Rp31.884.732.551,00 yaitu :

1. Mutasi tambah sebesar Rp31.930.224.830,00 berupa Pendapatan Pajak Rokok yang dialokasikan untuk BPJS TA 2021 sebesar Rp31.930.224.830,00;
2. Mutasi kurang sebesar Rp45.492.279,00 berupa piutang PAP TA 2020 yang sudah dibayar.

Perbedaan Realisasi Pajak Rokok LO dengan realisasi Pajak Rokok – LRA sebesar Rp31.930.224.830,00 disebabkan karena adanya pemotongan dana BPJS sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan pada pasal 2 PMK Nomor : 128/PMK.07/2018 yang menyatakan bahwa.

- a) Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
- b) Dukungan penyelenggaraan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kontribusi penerimaan yang bersumber dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota;
- c) Kontribusi pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) realisasi penerimaan yang bersumber dari pajak rokok masing-masing provinsi/kabupaten/kota.

Berdasarkan PMK tersebut Provinsi Lampung memberikan dukungan terhadap program tersebut dengan memberikan kontribusi sebagaimana telah ditetapkan dalam PMK dimaksud.

2) Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah – LO Per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp14.856.123.995,20 dan Rp17.479.399.270,67. Pendapatan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp2.623.275.275,47 atau 15,01% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.484 Pendapatan Retribusi Daerah – LO per 31 Desember 2021

No	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	9.191.718.601,00	6.170.230.166,00
2	Retribusi Jasa Usaha	5.252.105.894,20	10.646.113.704,67
3	Retribusi Perizinan Tertentu	412.299.500,00	663.055.400,00
Jumlah		14.856.123.995,20	17.479.399.270,67

Pendapatan Retribusi Daerah – LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.856.123.995,20 tidak sama dengan Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah – LRA per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.664.095.996,00.

Perbedaan Nilai Retribusi Daerah – LO dengan nilai Retribusi Daerah – LRA sebesar Rp192.027.999,20 yaitu:

1. Mutasi tambah sebesar Rp1.165.335.250,00 berupa pendapatan diterima dimuka pemakaian kekayaan daerah sewa tanah dan Bangunan TA 2020.
2. Mutasi kurang sebesar Rp973.307.250,80 berupa Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa tanah dan Bangunan yang dibayar seluruhnya di TA 2021 dan retribusi Dinas Kehutanan.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp87.827.368.082,26 dan Rp 35.679.032.096,95. Pendapatan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp52.148.335.985,31 atau 146,16% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.485 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
1	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	87.752.487.054,26	35.534.675.524,95
2	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	74.881.028,00	144.356.572,00
Jumlah		87.827.368.082,26	35.679.032.096,95

Perbedaan Nilai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO dengan nilai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA sebesar Rp54.491.440.330,18 yaitu berupa mutasi tambah dan kurang atas penyesuaian perhitungan penyertaan modal pada BUMD karena perubahan perhitungan metode ekuitas.

4) Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

Jumlah Pendapatan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp493.489.090.672,33 dan Rp387.643.541.307,30. Pendapatan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp105.845.549.365,03 atau 27,30% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.486 Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

No	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	129.396.000,00	54.287.333,00
2	Penerimaan Jasa Giro	17.570.837.925,40	25.060.186.941,36
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	19.875.000,00	13.500.000,00
4	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	59.861.406,00	262.435.767,00
5	Pendapatan Denda Pajak	7.976.746.533,00	18.258.922.697,00
6	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	4.587.075,00	-
7	Pendapatan Dari Pengembalian	7.360.242.768,00	8.798.099.875,00
8	Badan Layanan Umum Daerah	460.194.580.709,78	328.988.471.255,47
9	Pendapatan Hasil Dana Bergulir	172.963.255,15	-
10	Penerimaan Lain-lain	-	6.207.637.438,47
Jumlah		493.489.090.672,33	387.643.541.307,30

Pendapatan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp493.489.090.672,33 tidak sama dengan Jumlah Pendapatan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA per 31 Desember 2021 sebesar Rp480.531.777.812,97.

Perbedaan nilai Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO dengan nilai Lain - Lain Pendapatan yang Sah – LRA sebesar Rp12.957.312.859,36 yaitu:

1. Mutasi tambah sebesar Rp 94.532.591.300,68 berupa :
 - a. Piutang Penjualan Angsuran TA 2021 sebesar Rp35.079.038.441,00 yang terdiri dari Bagian Lancar Penjualan sebesar Rp8.799.028.852,57, Aset Lainnya - Tagihan Penjualan Angsuran Rp19.754.329.721,37, dan Aset Lain - Lain berupa Penjualan Angsuran Rp6.525.679.867,06;
 - b. Piutang TP/TGR TA 2021 sebesar Rp879.404.196,32 yang terdiri dari Bagian Lancar TP/TGR sebesar Rp9.937.500,00, Aset Lainnya - Tagihan Penjualan Angsuran Rp2.484.375,00 dan Aset Lain – Lain berupa Piutang TP/TGR Rp866.982.321,32;
 - c. Piutang Jasa Dana Bergulir TA 2021 sebesar Rp1.198.907.752,00 yang merupakan Aset Lain – Lain berupa Piutang Jasa Dana Bergulir;
 - d. Piutang BLUD TA 2021 sebesar Rp 51.191.968.290,50 yang terdiri dari Piutang Lainnya – RSUD AM sebesar Rp49.102.346.976,00 dan RSJ sebesar Rp 1.399.550.472,00, serta Aset Lain – Lain berupa Piutang RSUAM sebesar Rp690.070.842,50.
 - e. Saldo Aset lain2 (TGR RSAM) yang merupakan reklas dari piutang RSAM sebesar Rp6.183.272.620,86.

2. Mutasi kurang sebesar Rp81.575.278.441,32 berupa :
 - a. Piutang Penjualan Angsuran TA 2020 sebesar Rp39.890.403.318,00;
 - b. Piutang TP/TGR TA 2020 sebesar Rp936.966.321,32;
 - c. Piutang Jasa Dana Bergulir TA 2020 sebesar Rp1.199.974.132,00;
 - d. Piutang BLUD TA 2020 sebesar Rp49.569.687.925,00 yang terdiri dari Piutang RSUD AM sebesar Rp48.406.156.321,00 dan Piutang RSJ sebesar Rp1.163.531.604,00;
 - e. Penyesuaian kurang Piutang Awal sebesar Rp10.021.753.255,00 yang terdiri dari penyesuaian PiutangTP/TGR sebesar Rp57.322.000,00, penyesuaian Piutang RSUD AM sebesar Rp9.963.364.875,00, dan penyesuaian Piutang Jasa Dana Bergulir sebesar Rp1.066.380,00.

b. Pendapatan Transfer – LO

Jumlah Pendapatan Pendapatan Transfer – LO per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp4.200.843.389.286,00 dan Rp2.515.226.885.350,00. Pendapatan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.685.616.503.936,00 atau 67,02%.

Perbedaan nilai Pendapatan Transfer – LO dengan nilai Pendapatan Transfer – LRA sebesar Rp8.313.292.723,00 berupa mutasi tambah dari piutang transfer tambah salur Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Tahun 2021 sebesar Rp19.498.605.202,00 dan mutasi kurang piutang DBH Tahun 2020 sebesar Rp27.811.897.925,00.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jumlah Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp122.194.519.586,54 dan Rp1.806.956.738.507,09. Pendapatan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.684.762.218.920,55 atau 93,24%.

Pendapatan Lain - lain Pendapatan yang Sah – LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp122.194.519.586,54 tidak sama dengan Jumlah Pendapatan Lain - lain Pendapatan yang Sah – LRA per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.642.816.755,00.

Perbedaan nilai Lain - lain Pendapatan yang Sah-LO dengan nilai Lain - lain Pendapatan yang Sah – LRA sebesar Rp111.551.702.831,54 yaitu mutasi tambah yang merupakan hibah aset tetap, hibah aset lain-lain, bantuan pemerintah bidang Pendidikan, dan bantuan covid-19 berupa persediaan.

2. BEBAN - LO

a. Beban Operasi

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
7.233.909.116.116,22	6.799.237.485.891,26

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Nilai Beban Operasi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp7.233.909.116.116,22 dan Rp6.799.237.485.891,26 yang terdiri dari:

Tabel 5.487 Beban Operasi per 31 Desember 2021

No	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
1	Beban Pegawai	1.964.392.784.212,97	1.965.546.675.330,00
2	Beban Persediaan	746.474.884.103,71	596.015.443.862,05
3	Beban Jasa	561.718.614.945,02	351.493.179.383,69
4	Beban Pemeliharaan	75.323.747.017,72	122.276.768.127,99
5	Beban Perjalanan Dinas	150.032.999.938,00	133.425.637.700,00
6	Beban Bunga	20.422.920.833,00	29.844.950.845,00
7	Beban Subsidi	-	-
8	Beban Hibah	1.736.187.138.830,12	1.686.698.047.514,26
9	Beban Bantuan Sosial	48.754.652.356,00	68.535.810.830,00
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	611.631.667.541,65	585.913.867.716,92
11	Beban Penyisihan Piutang	1.245.285.707,02	643.280.392,65
12	Beban Transfer	1.278.247.901.125,00	1.156.316.438.148,00
13	Beban Lain-lain	39.476.519.506,01	102.527.386.040,70
Jumlah		7.233.909.116.116,22	6.799.237.485.891,26

Rincian masing-masing beban operasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Beban Pegawai

**Per 31 Desember 2021
(Rp)**

1.964.392.784.212,97

**Per 31 Desember 2020
(Rp)**

1.965.546.675.330,00

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp1.964.392.784.212,97 dan Rp1.965.546.675.330,00. Beban Pegawai tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.153.891.117,03 atau 0,06%. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.488 Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
1	Beban Pegawai	1.964.392.784.212,97	0,00
1	Beban Pegawai (Tidak Langsung)	0,00	1.726.295.320.621,00
2	Beban Pegawai (Langsung)	0,00	239.251.354.709,00
Jumlah		1.964.392.784.212,97	1.965.546.675.330,00

Perbedaan Beban Pegawai Tahun 2021 dengan nilai Belanja Pegawai sebesar Rp29.634.776.698,00 yaitu berasal dari mutasi tambah berupa Hutang Jasa Pelayanan RSJ TA 2021 sebesar Rp1.233.292.600,00 dan Hutang Tunjangan Profesi Guru TA 2021 sebesar Rp1.143.000.000,00, kemudian mutasi kurang yang berasal dari Pelunasan Hutang Tunjangan Profesi Guru TA 2020 sebesar Rp12.946.322.800,00 pada Dinas Pendidikan, dan pembayaran Jasa Medis pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung TA 2020 sebesar Rp3.502.116,00 dan Jasa Pelayanan RSJ sebesar Rp463.851.200,00.

2) Beban Persediaan

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
746.474.884.103,71	596.015.443.862,05

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp746.474.884.103,71 dan Rp596.015.443.862,05. Beban Persediaan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp150.459.440.241,66 atau 25,24%. Rincian Beban Persediaan sebagai berikut:

Tabel 5.489 Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
1	Beban Barang Pakai Habis	276.658.179.480,02	68.401.006.266,47
2	Beban Barang Tak Pakai Habis	223.237.750,00	
3	Beban Bahan/Material		20.138.768.302,91
4	Beban Cetak dan Penggandaan		51.048.740.777,43
5	Beban Barang dan Jasa BLUD	298.040.810.730,42	261.555.453.481,24
6	Beban Barang dan Jasa BOS	171.332.682.950,27	188.236.578.749,00
7	Reklasifikasi Belanja Modal 2020	219.973.193,00	6.634.896.285,00
Jumlah		746.474.884.103,71	596.015.443.862,05

Beban Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp746.474.884.103,71 tidak sama dengan nilai Belanja Persediaan LRA per 31 Desember 2021 sebesar Rp718.791.690.412,69. Perbedaan nilai Beban Persediaan dengan nilai Belanja Persediaan sebesar Rp27.405.693.903,18 disebabkan terdapat penyesuaian nilai tambah sebesar Rp147.536.350.097,37 dan dikurangi penyesuaian nilai kurang sebesar Rp119.853.156.406,35, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.490 Penambahan dan pengurangan dari penyesuaian Beban Persediaan per 31 Desember 2021

Beban Persediaan			
Tambah (Rp)		Kurang (Rp)	
Persediaan ATK 2020	5.800.452.257,93	Persediaan ATK 2021	6.369.707.294,09
Persediaan Beras 2020	939.469.070,50	Persediaan Beras 2021	939.469.090,00
Persediaan Obat 2020	26.781.823.809,76	Persediaan Obat 2021	22.953.829.092,76
Persediaan Bahan Bangunan 2020	1.860.241.921,00	Persediaan Alkes 2021	653.102.500,00
Persediaan Alkes 2020	25.307.461.735,44	Persediaan Bahan Makanan 2021	1.887.361.001,67
Persediaan bahan Makanan 2020	1.258.783.080,64	Persediaan Bahan Bangunan 2021	2.200.678.191
Persediaan Bahan Pakai Habis bantuan COVID-19	44.259.328.099,50	Persediaan Bahan Perlengkapan Lab 2021	31.993.415.044,83
Reklas BM 2020	3.078.996.450,00	Utang Obat BHP (RSAM) 2020	52.635.505.133,00
Utang Obat BHP (RSAM) 2021	33.355.272.947,60	Utang Obat BHP (RSJ) 2020	262.803.093,00
Utang reagen Alkes Dinkes (Labkes)	306.299.581,00		
Bantuan Pendidikan	4.207.423.000,00		
Utang Usaha Obat BHP (RSJ)	294.332.765,00		
Jumlah	147.449.884.718,37	Jumlah	119.895.870.440,35

3) Beban Jasa

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
561.718.614.945,02	351.493.179.383,69

Jumlah Beban Jasa per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp561.718.614.945,02 dan Rp351.493.179.383,69. Beban Jasa tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp210.225.435.561,33 atau 59,81%. Rincian Beban Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 5.491 Beban Jasa per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020
1	Beban Jasa Kantor	301.998.272.249,14	78.612.220.038,52
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	160.770.641.708,83	70.069.204.610,50
3	Beban Sewa Tanah	297.046.740,00	
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	23.413.239.866,00	
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	24.072.462.769,00	
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	225.275.000,00	
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	32.855.456.745,05	
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	10.735.348.222,00	
9	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	24.124.464,00	
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	499.000.000,00	
11	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.827.747.181,00	
12	Beban Makanan dan Minuman		75.605.049.974,00
13	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya		2.444.614.000,00
14	Beban Pakaian Kerja		344.917.500,00
15	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu		3.352.534.350,00
16	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		19.934.812.866,67
17	Beban Sewa Sarana Mobilitas		1.053.333.400,00
18	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		5.264.737.490,00
19	Beban Jasa Keamanan		2.148.605.000,00
20	Beban Restitusi Pajak		53.788.615,00
21	Beban Jasa Pihak Ketiga		44.935.905.653,00
22	Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur		33.369.332.416,00
23	Belanja Jasa Konsultansi		14.304.123.470,00
	Jumlah Beban Jasa	561.718.614.945,02	351.493.179.383,69

Beban Jasa per 31 Desember 2021 sebesar Rp561.718.614.945,02 tidak sama dengan Jumlah Belanja Jasa per 31 Desember 2021 sebesar Rp581.706.947.212,14. Perbedaan Nilai Beban Jasa dengan nilai Belanja Jasa sebesar Rp19.988.332.267,12 disebabkan terdapat penyesuaian nilai tambah sebesar Rp8.110.557.125,83 dan dikurangi penyesuaian nilai kurang sebesar Rp28.098.889.392,95.

Tabel 5.492 Penambahan dan Pengurangan Dari Penyesuaian Beban Jasa

Beban Jasa			
Tambah		Kurang	
Beban Listrik des 2021	1.749.167.379,00	Beban Listrik. Air. Telepon dan Internet des 2020	1.840.961.835,00
Beban Air Des 2021	31.027.720,00	Utang Jasa pihak Ketiga (RSAM) 2021	8.397.908.558,00
Beban Telepon 2021	66.756.201,00	Beban di bayar muka 2021	241.966.300,00
Beban Internet 2021	102.643.015,00	Beban Kapitalisasi Aset Tetap	17.618.052.699,95
Beban di bayar muka 2020	231.242.245,83		
Utang Jasa pihak Ketiga (RSAM) 2021	5.929.720.565,00		
Jumlah	8.110.557.125,83	Jumlah	28.098.889.392,95

4) Beban Pemeliharaan

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
75.323.747.017,72	122.276.768.127,99

Jumlah Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp75.323.747.017,72 dan Rp122.276.768.127,99. Beban Pemeliharaan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp46.953.021.110,27 atau 38,40%. Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.493 Jumlah Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	217.329.000,00	
2	Belban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.901.364.924,00	
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	43.487.066.488,72	
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.616.386.605,00	
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	101.600.000,00	
6	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor		19.392.357.384,00
7	Beban Pemeliharaan		102.884.410.743,99
Jumlah		75.323.747.017,72	122.276.768.127,99

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp75.323.747.017,72 tidak sama dengan Jumlah Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp44.084.291.740,00. Perbedaan Nilai Beban Pemeliharaan dengan nilai Belanja Pemeliharaan sebesar Rp31.239.455.277,72 disebabkan terdapat penyesuaian nilai tambah sebesar Rp39.362.267.207,97 yang merupakan retensi barang dan jasa tahun 2021 dan dikurangi penyesuaian nilai kurang sebesar Rp8.122.811.930,25 yang merupakan retensi barang dan jasa tahun 2020.

5) Beban Perjalanan Dinas

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
150.032.999.938,00	133.425.637.700,00

Jumlah Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp150.032.999.938,00 dan Rp133.425.637.700,00. Beban Perjalanan Dinas tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp16.607.362.238,00 atau 12,45%. Nilai Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas TA 2021 adalah sama yaitu sebesar Rp150.032.999.938,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Tabel 5.494 Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	150.032.999.938,00	0,00
2	Beban Perjalanan Dinas	0,00	112.101.289.419,00
3	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	477.450.000,00
4	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	4.247.123.735,00
5	Beban Akomodasi, Transportasi dan Uang Saku Peserta	0,00	16.599.774.546,00
Jumlah		150.032.999.938,00	133.425.637.700,00

6) Beban Bunga

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
20.422.920.833,00	29.844.950.845,00

Jumlah Beban Bunga per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp20.422.920.833,00 dan Rp29.844.950.845,00. Rincian Beban Bunga sebagai berikut:

Tabel 5.495 Beban Bunga per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
1	Beban Bunga	20.422.920.833,00	29.844.950.845,00
Jumlah		20.422.920.833,00	29.844.950.845,00

Jumlah Beban Bunga per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.422.920.833,00 tidak sama dengan Jumlah Belanja Bunga Per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.161.585.802,00. Terdapat selisih sebesar Rp1.738.664.969,00 yang berasal dari selisih tambah sebesar Rp3.042.663.621,00 yang merupakan utang bunga per 31 desember 2021 dan selisih kurang sebesar Rp4.781.328.590,00 yang merupakan utang bunga per 31 Desember 2020.

7) Beban Subsidi

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
0,00	0,00

Jumlah Beban Subsidi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00. Rincian Beban Subsidi sebagai berikut:

Tabel 5.496 Beban Subsidi per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
1	Beban Subsidi	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

Jumlah Beban Subsidi per 31 Desember 2021 tidak ada perbedaan dengan Belanja Subsidi – LRA Per 31 Desember 2021.

8) Beban Hibah

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1.736.187.138.830,12	1.686.698.047.514,26

Jumlah Beban Hibah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.736.187.138.830,12 dan Rp1.686.698.047.514,26. Beban Hibah tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp49.489.091.315,86 atau 2,93%. Rincian Beban Hibah sebagai berikut:

Tabel 5.497 Beban Hibah per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	45.270.942.200,00	
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	113.448.386.675,20	
3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia	228.833.087.026,24	
4	Beban Hibah Dana BOS	1.314.971.807.000,00	
5	Beban Hibah Uang		1.437.518.594.295,00
6	Beban Hibah Aset Tetap	33.662.915.928,68	4.707.677.720,00
7	Beban Hibah Barang & Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat		244.471.775.499,26
Jumlah		1.736.187.138.830,12	1.686.698.047.514,26

Jumlah Beban Hibah per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.736.187.138.830,12 tidak sama dengan Jumlah Belanja Hibah per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.682.887.389.922,12. Terdapat selisih sebesar Rp53.299.748.908,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.498 Mutasi Tambah Kurang Beban Hibah per 31 Desember 2021

Beban Hibah			
Tambah (Rp)		Kurang (Rp)	
Hibah Persediaan Barang yang Diserahkan 2020	37.783.815.631,00	Hibah Persediaan Barang yang Diserahkan 2021	18.146.982.651,68
Hibah Dari Belanja Modal	33.261.915.928,68		
Hibah Aset Tetap	401.000.000,00		
Jumlah	71.446.731.559,68	Jumlah	18.146.982.651,68

9) **Beban Bantuan Sosial**

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
48.754.652.356,00	68.535.810.830,00

Jumlah Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp48.754.652.356,00 dan Rp68.535.810.830,00. Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp19.781.158.474,00 atau 28,86%. Rincian Beban Bantuan Sosial sebagai berikut:

Tabel 5.499 Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial	36.860.419.659,00	
2	Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	11.894.232.697,00	
3	Beban Bantuan Sosial Uang	0,00	48.885.285.164,00
4	Beban Bantuan Sosial Barang dan Jasa	0,00	19.650.525.666,00
Jumlah		48.754.652.356,00	68.535.810.830,00

Jumlah Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2021 sebesar Rp48.754.652.356,00 tidak sama dengan Jumlah Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.930.194.829,00. Terdapat selisih sebesar Rp31.930.224.830,00 yang merupakan pemotongan pajak rokok untuk BPJS.

10) **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
611.631.667.541,65	585.913.867.716,92

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp611.631.667.541,65 dan Rp585.913.867.716,92. Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp25.717.799.824,73 atau 4,39%. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.500 Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.561.996.917,68	3.202.702.468,80
2	Beban Penyusutan Aset Tetap	609.069.670.623,97	582.711.165.248,12
Jumlah		611.631.667.541,65	585.913.867.716,92

Adapun rincian per masing-masing beban dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) **Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud**

Nilai Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.561.996.917,68 yang terdiri dari:

Tabel 5.501 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021

No.	OPD	Beban Amortisasi 2021 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	914.608.685,80
2	DINAS KESEHATAN	268.121.843,88
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK	33.975.800,00
4	RUMAH SAKIT JIWA	60.672.400,00
5	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	159.500,00
6	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	101.593.136,67
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	13.000.000,00
8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.333.333,33
9	DINAS PERHUBUNGAN	-
10	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	63.721.900,00
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	23.069.833,33
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-
13	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	10.053.333,33
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	20.528.333,33
15	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.466.400,00
16	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	783.333,33
17	DINAS KEHUTANAN	2.000.000,00
18	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-
19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.150.000,00
20	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	246.494.234,67
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	237.103.983,33
22	BADAN PENDAPATAN DAERAH	267.793.666,67
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	2.841.666,67
24	BIRO PEREKONOMIAN	833.333,33
25	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	40.122.000,00
26	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	152.894.250,00
27	BIRO ORGANISASI	14.932.500,00
28	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	10.983.500,00
29	SEKRETARIAT DPRD	65.759.950,00
Jumlah		2.561.996.917,68

(b) Beban Penyusutan Aset Tetap

Nilai Beban Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp609.069.670.623,97 yang terdiri dari:

Tabel 5.502 Rincian Penyusutan Semester I dan Semester II TA 2021

Aset Tetap	Beban Penyusutan 2021		Total (Rp)
	Semester I (Rp)	Semester II (Rp)	
Peralatan dan Mesin	112.161.640.809,28	113.433.467.467,00	225.595.108.276,00
Gedung dan Bangunan	30.551.500.112,00	31.469.130.528,00	62.020.630.640,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	160.687.992.630,00	160.157.520.696,00	320.845.513.326,00
Aset Tetap Lainnya	247.063.518,75	361.354.862,94	608.418.382,00
Jumlah	303.648.197.070,03	305.421.473.553,94	609.069.670.623,97

11) Beban Penyisihan Piutang

**Per 31 Desember 2021
(Rp)**

1.245.285.707,02

**Per 31 Desember 2020
(Rp)**

643.280.392,65

Jumlah Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.245.285.707,02 yang terdiri dari:

Tabel 5.503 Rincian Beban Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2021

No	OPD	Penyisihan Piutang 2021	Penyisihan Piutang 2020	Penyesuaian penyisihan piutang	Beban Penyisihan Piutang
1	RSAM	503.224.976,13	2.404.368.788,79	(2.092.264.476,72)	191.120.664,06
2	RSJ	6.997.751,92	16.078.743,14	(16.078.743,15)	6.997.751,93
3	Dinas Koperasi	676.137.502,00	498.088.507,00		178.048.995,00
4	Dinas Pertanian	474.074.500,00	474.074.500,00		0,00
5	BPKAD (TGR+Transfer)	949.612.516,95	1.089.246.577,67	(134.615.357,92)	(5.018.702,80)
6	BPKAD (Penjualan Angsuran)	4.136.840.548,61	4.876.404.143,95	(1.613.700.594,18)	874.136.998,83
7	Dinas Pendapatan	-	20.008.411,40	(20.008.411,40)	0,00
8	Dinas Kehutanan	-	20.900,00	(20.900,00)	0,00
JUMLAH		6.746.887.795,61	9.378.290.571,95	(3.876.688.483,36)	1.245.285.707,02

12) Beban Transfer

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1.278.247.901.125,00	1.156.316.438.148,00

Jumlah Beban Transfer per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.278.247.901.125,00 dan Rp1.156.316.438.148,00. Beban Transfer tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 121.931.462.977,00 atau 10,54%. Rincian Beban Transfer sebagai berikut:

Tabel 5.504 Beban Transfer per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
1	Beban Transfer Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.278.247.901.125,00	1.156.316.438.148,00
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintahan Desa dan Partai Politik		
Jumlah		1.278.247.901.125,00	1.156.316.438.148,00

Beban Transfer per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.278.247.901.125,00 tidak sama dengan Jumlah Belanja Transfer – LRA per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.096.585.546.691,00. Jumlah perbedaan nilai Beban Transfer dengan nilai Belanja Transfer – LRA sebesar Rp181.662.354.434,00 disebabkan terdapat penyesuaian nilai tambah sebesar Rp1.278.247.901.125,00 yang berasal dari SK Penetapan Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota tahun 2021 dan dikurangi penyesuaian nilai kurang sebesar Rp1.096.585.546.691,00 yang merupakan realisasi belanja dana bagi hasil kepada kabupaten/kota tahun 2021.

13) Beban Lain-lain

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
39.476.519.506,01	102.527.386.040,70

Jumlah Beban Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp39.476.519.506,01 dan Rp102.527.386.040,70. Beban Lain-lain tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp63.050.866.534,69 atau 61,50%. Rincian Beban Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 5.505 Beban Lain-lain per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
1	Beban Belanja Tak Terduga	126.400.000,00	68.674.939.273,71
2	Beban Penurunan nilai Dana Bergulir	1.008.843.480,01	486.704.573,99
3	Beban Ekstrakomtabel	1.543.214.420,00	4.064.475.852,00
4	Beban BM tidak jadi Aset	24.561.984.516,00	17.560.383.088,00
5	Beban Penghapusan Aset Tetap	7.435.745.519,00	1.491.479.434,00
6	Beban Penghapusan Aset Lainnya	4.800.331.571,00	10.249.403.819,00
7	Beban Luar Biasa		0,00
Jumlah		39.476.519.506,01	102.527.386.040,70

3. SURPLUS/(DEFISIT) – LO

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
438.324.153.761,11	391.107.586.060,31

Jumlah Surplus/Defisit – LO per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp438.324.153.761,11 dan Rp391.107.586.060,31. Surplus/Defisit – LO Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp42.216.567.700,80 atau 12,07%

E. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya. Surplus/defisit – LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. Yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Laporan Perubahan Ekuitas TA 2021 terdiri dari:

Tabel 5.506 Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Ekuitas Awal	10.358.609.340.087,56	8.614.266.390.720,46
Surplus/Defisit-LO	438.324.153.761,11	391.107.586.060,31
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	94.255.447.900,00	1.396.097.090.911,00
Lain-lain	(13.844.719.951,76)	(42.861.727.604,21)
Ekuitas Akhir	10.877.344.221.796,91	10.358.609.340.087,56

Ekuitas awal per 1 Januari 2021 Rp10.358.609.340.087,56 dengan penambahan adanya Surplus – LO sebesar Rp438.324.153.761,11. Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp94.255.447.900,00 kemudian adanya koreksi lain-lain sebesar Rp13.844.719.951,76 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 5.507 Rincian Penambahan dan Pengurangan Selisih Revaluasi Aset Tetap
Laporan Perubahan Ekuitas TA 2021**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bertambah akibat lain-lain	8.566.142.398,00
2	Bertambah Temuan baru	16,00
3	Bertambah Appraisal	65.871.944.798,00
4	Bertambah P3D	29.707.960.709,00
5	Berkurang akibat lain-lain	(9.759.748.798,00)
6	Berkurang P3D	(118.851.225,00)
7	Berkurang Double Entry	(12.000.000,00)
8	Bertambah Reklas aset Ektrakomtabel ke Aset Tetap	2,00
	Jumlah	94.255.447.900,00

**Tabel 5.508 Rincian Penambahan dan Pengurangan Koreksi Lain-lain
Laporan Perubahan Ekuitas TA 2021**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyesuaian Kas BP 2020	(0,11)
2	Penyesuaian Piutang Awal TGR	(57.322.000,00)
3	Penyesuaian Piutang Awal RSAM	(9.963.364.875,00)
4	Penyesuaian Piutang Awal Koperasi	(1.066.380,00)
5	Penyesuaian Penyisihan Piutang RSAM	2.092.264.476,72
6	Penyesuaian Penyisihan Piutang RSJ	16.078.743,15
7	Penyesuaian Penyisihan Piutang Aset	1.613.700.594,18
8	Penyesuaian Penyisihan Piutang Bapenda	20.008.411,39
9	Penyesuaian Penyisihan Piutang TGR	134.515.357,92
10	Penyesuaian Penyisihan Piutang Dinas Kehutanan	20.900,00
11	Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.842.131.256,03)
12	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(3.848.560.328,00)
13	Koreksi tambah perhitungan NRV investasi non permanen dana bergulir dinas pertanian Tahun 2021	106.579.067,71
14	Koreksi tambah perhitungan NRV investasi non permanen dana bergulir dinas koperasi Tahun 2021	68.289.476,81
15	Koreksi tambah Utang Belanja - Utang Belanja Modal (pada Dinas Kelautan dan Perikanan)	(9.885.000,00)
16	Koreksi tambah Utang Belanja - Utang Belanja Hibah (pada Dinas PSDA, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya, dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)	(84.120.800,00)
17	Koreksi kurang Utang Belanja - Utang Belanja Modal RSUD Abdoel Moeloek TA 2021	65.843.589,54
18	Koreksi tambah Utang Belanja - Utang Belanja Hibah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif TA 2021	(709.767,00)
19	Koreksi kurang Utang Belanja - Utang Belanja Hibah Dinas Kesehatan TA 2021	668,07
20	Koreksi Kelebihan pembayaran piutang TGR	(100.000,00)
21	Koreksi Penyisihan Piutang akibat Kelebihan pembayaran piutang TGR	100.000,00
22	Koreksi kurang Utang Belanja - Utang Belanja Hibah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya TA 2021	32.406.232,00
23	Koreksi tambah Utang Belanja - Utang Belanja Modal Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya TA 2021	(156.379.300,00)
24	Koreksi kurang Utang Belanja - Utang Belanja Modal Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya TA 2021	28.600,00
25	Koreksi Penyisihan Piutang karena Reklasifikasi Aset Lain-lain - Kas Tekor (TGR) RSAM ke Piutang Lainnya sebesar Rp30.916.363,10	(30.916.363,10)
	Jumlah	(13.844.719.951,76)

1. Penyesuaian Kas Bendahara Pengeluaran 2020 karena adanya koreksi perhitungan sebesar Rp0,11;
2. Penyesuaian Piutang awal Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp57.322.000,00 karena adanya SK Gubernur Lampung tentang Penghapusan TP/TGR atas nama Saudara M. Zein Alie (Almarhum);
3. Penyesuaian Piutang Awal RSAM sebesar Rp9.963.364.875,00 dikarenakan koreksi saldo Piutang Pasien Umum, Piutang Pasien Tidak Mampu, Piutang Jamkesda Kabupaten, dan Kelebihan saldo Piutang BPJS Kesehatan dan Piutang Perawatan Pasien COVID-19 karena klaim belum terverifikasi BPJS;
4. Penyesuaian Piutang Awal Jasa Dana Bergulir Dinas Koperasi sebesar Rp1.066.380,00 karena koreksi saldo piutang tahun sebelumnya;
5. Penyesuaian Penyisihan Piutang RSAM Rp2.092.264.476,72 karena adanya pembayaran dan koreksi saldo piutang;
6. Penyesuaian Penyisihan Piutang RSJ Rp16.078.743,15 karena adanya pembayaran;
7. Penyesuaian Penyisihan Piutang Penjualan Angsuran Rp1.613.700.594,18 karena adanya perubahan Kebijakan Akuntansi terkait penggolongan kualitas Piutang Penjualan Angsuran;
8. Penyesuaian Penyisihan Piutang Bapenda sebesar Rp20.008.411,39 karena adanya pembayaran;
9. Penyesuaian Penyisihan Piutang TGR sebesar Rp134.515.357,92 karena adanya penghapusan piutang dan perubahan Kebijakan Akuntansi terkait penggolongan kualitas Piutang TP/TGR;
10. Penyesuaian Penyisihan Piutang Dinas Kehutanan sebesar Rp20.900,00 karena adanya pembayaran;
11. Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp3.842.131.256,03;
12. Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain akibat mutasi tambah kurang Rp3.848.560.328,00;
13. Koreksi tambah perhitungan NRV investasi non permanen dana bergulir dinas pertanian Tahun 2021 karena selisih direkening koran dan saldo yang seharusnya sebesar Rp106.579.067,71;
14. Koreksi tambah perhitungan NRV investasi non permanen dana bergulir dinas koperasi Tahun 2021 karena selisih direkening koran dan saldo yang seharusnya sebesar Rp68.289.476,81;
15. Koreksi tambah Utang Belanja - Utang Belanja Modal karena utang TA 2020 belum dibayarkan sebesar Rp9.885.000,00 (pada Dinas Kelautan dan Perikanan);
16. Koreksi tambah Utang Belanja - Utang Belanja Hibah karena utang TA 2020 belum dibayarkan sebesar Rp84.120.800,00 (pada Dinas PSDA, Dinas

Ketahanan Pangan, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya, dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif);

17. Koreksi kurang Utang Belanja - Utang Belanja Modal RSUD Abdoel Moeloek TA 2021 karena kesalahan perhitungan sebesar Rp65.843.589,53;
18. Koreksi tambah Utang Belanja - Utang Belanja Hibah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif TA 2021 karena kesalahan perhitungan sebesar Rp709.767,00;
19. Koreksi kurang Utang Belanja - Utang Belanja Hibah Dinas Kesehatan TA 2021 karena kesalahan perhitungan sebesar Rp668,07;
20. Koreksi Kelebihan pembayaran piutang TGR an Syamsul sebesar Rp100.000;
21. Koreksi Penyisihan Piutang akibat Kelebihan pembayaran piutang TGR an Syamsul sebesar Rp100.000;
22. Koreksi kurang Utang Belanja - Utang Belanja Hibah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya TA 2021 karena retensi tersebut telah dibayarkan Tahun 2021 dan kesalahan perhitungan sebesar Rp32.406.232,00;
23. Koreksi tambah Utang Belanja - Utang Belanja Modal Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya TA 2021 karena kesalahan perhitungan nilai retensi sebesar Rp156.379.300,00;
24. Koreksi kurang Utang Belanja - Utang Belanja Modal Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya TA 2021 karena kesalahan perhitungan nilai retensi sebesar Rp28.600,00;
25. Koreksi Penyisihan Piutang karena Reklasifikasi Aset Lain-lain - Kas Tekor (TGR) RSAM ke Piutang Lainnya sebesar Rp30.916.363,10.

F. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas melalui kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Pada dasarnya aktivitas keuangan pemerintah sebagian besar merupakan penerimaan dan pengeluaran kas daerah dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan. Bahkan penentuan adanya hak dan kewajiban pemerintah diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari kas daerah dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan.

Laporan Arus Kas menggambarkan arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Arus masuk kas dapat berasal dari penerimaan tunai pendapatan, penjualan aset tetap, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman bahkan penerimaan atas potongan pembayaran yang dilakukan pemerintah. Arus keluar kas misalnya pembayaran tunai belanja pegawai, belanja modal, pembayaran cicilan utang, pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah dan penyeteroran kepada pihak ketiga atas pemotongan yang telah dilakukan penerimaan dan pengeluaran kas ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi investasi aset non keuangan pembiayaan dan non anggaran.

Saldo akhir Kas Pemerintah Provinsi Lampung TA 2021 adalah sebesar Rp.385.221.746.641,01 yang terdiri atas Saldo akhir kas di BUD/Kas daerah sebesar Rp219.673.534.356,09 saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran sebesar

Rp400,05 saldo akhir kas di bendahara BOS sebesar Rp1.831.774.299,34 saldo Kas di BLUD sebesar Rp163.013.619.856,24, saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00 dan saldo Kas Lainnya sebesar Rp702.817.729,29.

1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Lampung selama TA 2021. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

a. Arus Masuk Kas

Rincian arus masuk kas dari aktivitas operasi sebagai berikut:

Tabel 5.509 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Provinsi Lampung Per 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	2.721.138.045.704,00	2.386.345.268.304,00
Penerimaan Retribusi Daerah	14.664.095.996,00	17.080.208.104,00
Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33.335.927.752,08	29.873.630.623,14
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang	475.591.016.935,97	399.280.230.041,22
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	183.140.967.609,00	123.204.760.040,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	42.401.390.658,00	34.589.203.086,00
Penerimaan Pendapatan Dana Alokasi Umum	1.726.296.248.000,00	1.732.551.921.000,00
Penerimaan Pendapatan Dana Alokasi Khusus	2.232.553.876.742,00	571.540.325.831,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		
Penerimaan Pendapatan Dana Penyesuaian	17.389.748.000,00	46.434.098.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		
Penerimaan Hibah	10.565.423.805,00	8.946.876.858,00
Penerimaan Dana Darurat		
Penerimaan Bantuan Keuangan	7.374.451.000,00	-
Penerimaan Lainnya	77.392.950,00	1.659.765.807.998,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	7.464.528.585.152,05	7.009.612.329.885,36

b. Arus Kas Keluar

Rincian arus keluar kas dari aktivitas operasi sebagai berikut:

Tabel 5.510 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Provinsi Lampung Per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	2021	2020
Pembayaran Pegawai	2.038.408.894.642,48	1.971.312.365.234,00
Pembayaran Barang	1.402.859.274.872,32	1.423.341.867.179,80
Pembayaran Bunga	22.161.585.802,00	31.583.615.813,00
Pembayaran Subsidi		
Pembayaran Hibah	1.682.887.389.922,12	1.437.518.594.295,00
Pembayaran Bantuan Sosial	4.930.194.829,00	352.400.000,00
Pembayaran Tak Terduga	126.400.000,00	119.312.701.296,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	1.096.585.546.691,00	1.231.408.694.144,94
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
Pembayaran Bantuan Keuangan		
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		
Jumlah Arus Keluar Kas	6.247.959.286.758,92	6.214.830.237.962,74

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan selisih antara Arus masuk kas dengan Arus keluar kas dari Aktivitas Operasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.511 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
Arus Masuk Kas	7.464.528.585.152,05	7.009.612.329.885,36
Arus Keluar Kas	6.247.959.286.758,92	6.214.830.237.962,74
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.216.569.298.393,13	794.782.091.922,62

2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Arus Kas dari aktivitas Investasi/Investasi aset non keuangan merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan Aset Tetap dan Aset Non Keuangan Lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

a. Arus Masuk Kas

Arus kas dari aktivitas investasi/Investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan Provinsi Lampung TA 2021 sebesar Rp4.940.760.877,00 yang merupakan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. Arus Keluar Kas

Tabel 5.512 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi aset Non Keuangan Provinsi Lampung Per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan		
Perolehan Tanah	127,714,760.00	8,785,013,950.00
Perolehan Peralatan dan Mesin	185,593,022,021.90	254,349,003,701.00
Perolehan Gedung dan Bangunan	240,978,511,324.58	182,406,597,671.89
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	390,107,373,947.73	280,131,995,852.00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	32,846,817,778.00	26,855,599,045.00
Perolehan Aset Lainnya	38,675,000.00	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	30,000,000,000.00	56,000,000,000.00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		
Pengeluaran Investasi Lainnya	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	879,692,114,832.21	808,528,210,219.89

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan merupakan selisih antara arus masuk kas dengan Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan.

Tabel 5.513 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
Arus Masuk Kas	4,940,760,877.00	9,707,141,998.00
Arus Keluar Kas	879,692,114,832.21	808,528,210,219.89
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non-Keuangan	(874,751,353,955.21)	(798,821,068,221.89)

3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/ PEMBIAYAAN

Arus Kas dari aktivitas Pembiayaan merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman pemerintah sehubungan dengan surplus/defisit anggaran. Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Realisasi penyertaan modal pemerintah daerah TA 2021 masuk di aliran arus keluar kas pada arus kas dari aktivitas investasi/investasi aset non keuangan. Pada Arus Kas Masuk dari aktivitas Pembiayaan Provinsi Lampung tahun 2021 tidak ada realisasi. Arus Kas Keluar dari aktivitas Pembiayaan Provinsi Lampung tahun 2021 sebesar Rp141.176.332.704,00 merupakan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank. Sehingga Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan sebesar Rp141.176.332.704,00.

4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran yaitu penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pemerintah yaitu perhitungan pihak ketiga yang berasal dari potongan SPM khusus seperti potongan iuran Taspen, Askes, Jamsostek, dan potongan PPN/Pajak lainnya yang menjadi hak pemerintah pusat. Arus kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah. Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk.

Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar. Penerimaan dari aktivitas non anggaran ini bukan merupakan pendapatan daerah tetapi bersifat titipan yang harus dikembalikan kepada yang berhak. Informasi arus kas yang disajikan pada bagian ini meliputi penerimaan kas dari pihak ketiga atau disingkat PFK (Penerimaan PFK). PFK ini bukan merupakan pendapatan daerah tetapi merupakan titipan atau utang yang berasal dari jumlah yang dipotong oleh Kas Daerah dari SPM khusus untuk pihak ketiga seperti iuran Taspen, Askes dan Jamsostek, PPN atau PPh yang dipungut oleh Kas Daerah. Pengeluaran kas kepada pihak ketiga (Pengeluaran PFK) yaitu pengembalian penerimaan PFK kepada yang berhak. Selama TA 2021 arus masuk kas dan keluar dari aktivitas non anggaran Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 5.514 Penerimaan Kas dari Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
Arus Kas Masuk Penerimaan PFK	302.029.543.388,84	252.511.365.446,48
Arus Kas Keluar Pengeluaran PFK	300.181.826.910,84	252.511.365.446,48
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	1.847.716.478,00	-

5. KENAIKAN/ PENURUNAN KAS

Merupakan jumlah seluruh arus kas bersih Pemerintah Provinsi Lampung selama TA 2021, yang terdiri dari

**Tabel 5.515 Kenaikan/Penurunan Kas
Pemerintah Provinsi Lampung Selama TA 2021 dan 2020**

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	1.216.569.298.393,13	794.782.091.922,62
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(874.751.353.955,21)	(798.821.068.221,89)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan	(141.176.332.704,00)	(141.176.332.704,00)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitori/Non Anggaran	1.847.716.478,00	-
Kenaikan (Penurunan Kas)	202.489.328.211,92	(145.215.309.003,27)

6. SALDO AKHIR KAS

Saldo Akhir Kas merupakan saldo Kas Pemerintah Provinsi Lampung per 31 Desember 2021 sebesar Rp385.221.746.641,01 yang terdiri atas kas di BUD/Kas daerah sebesar Rp219.673.534.356,09, saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp400,05, saldo akhir Kas di bendahara BOS sebesar Rp1.831.774.299,34, saldo Kas di BLUD sebesar Rp163.013.619.856,24, saldo Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,00 dan saldo kas Lainnya sebesar Rp702.817.729,29. Terdapat selisih sebesar Rp94.260.000,00 yang merupakan kas lainnya berupa uang jaminan pasien RSUDAM dan Laboratorium Kesehatan.

Tabel 5.516 Saldo Akhir Kas

Uraian	Realisasi 2021
Kenaikan (Penurunan Kas)	202.489.328.211,92
Saldo Awal Kas	182.975.935.717,04
Saldo Akhir Kas Arus Kas 2021	385.127.486.641,01
Saldo Akhir Kas di Neraca 2021	385.221.746.641,01
Selisih	- 94.260.000,00